

## BAB I

### PENDAHULUAN

Guna memperoleh pengertian dan pemahaman mengenai Sosiologi Perkotaan atau Sosiologi Kota (*Urban Sociology*) yang menjadi fokus pembahasan bab ini, maka penulis perlu menyegarkan kembali memori ingatan kita pada pengertian sosiologi.

#### A. Pengertian Sosiologi

Secara etimologi, **sosiologi** berasal dari bahasa Latin: *socius* dan *logos*. *Socius* artinya teman, perikatan; dan *logos* artinya ilmu. Jadi, secara etimologi **sosiologi** berarti ilmu berteman. Syarat berteman, yaitu minimal terdapat dua orang (individu), dan hubungan di antara dua orang itu baik. Apabila hubungan di antara dua orang itu tidak baik, maka akan muncul masalah sosial. Interaksi sosial ini tentu tidak hanya terjadi di antara dua orang saja, tetapi bisa lebih, yaitu dapat terjadi antara kelompok orang dengan kelompok orang, antara individu dan kelompok orang.

Oleh karena itu, dapat disebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi (hubungan timbal balik) antara seorang individu yang satu dengan seorang individu yang lain, baik seseorang sebagai pribadi (individu) maupun sebagai anggota kelompok orang (masyarakat). Di dalam kelompok masyarakat terdapat berbagai aspek, meliputi aspek struktur sosial, perubahan sosial, aspek budaya, status, peran, motivasi, kepentingan, adaptasi, kesejahteraan, jumlah anggota (penduduk), perubahan perilaku, dan lain-lain.

Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh ahli filsafat, moralis dan sekaligus sosiolog berkebangsaan Perancis, **Auguste Comte** melalui sebuah karyanya yang berjudul *Cours de Philosophie Positive*. Menurut Comte, sosiologi berasal dari kata latin *socius* yang artinya teman atau sesama dan *Logos* dari kata Yunani yang artinya cerita. Jadi pada awalnya, sosiologi berarti bercerita tentang teman atau kawan (masyarakat).

Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Berikut ini definisi-definisi sosiologi yang dikemukakan berbagai ahli.

**Pitirim Sorokin (Idianto M., 2004 : 11)**

**Sosiologi** adalah ilmu yang mempelajari:

- hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala agama, gejala keluarga, dan gejala moral)
- Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial (gejala geografis, biologis),
- ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain.

**Roucek dan Warren (Sapari Imam Asy'ari : 1993 : xiii)**

**Sosiologi** adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.

**William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkopf (Idianto M., 2004 : 11)**

**Sosiologi** adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial.

**J.A.A. Von Dorn dan C.J. Lammers (Idianto M., 2004 : 11)**

**Sosiologi** adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.

**Max Weber (Idianto M., 2004 : 11)**

Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.

**Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi (1974 : 14)**

**Sosiologi** adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial.

**Paul B. Horton (Idianto M., 2004 : 11)**

**Sosiologi** adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut.

**Soerjono Soekanto (2000 : 17)**

**Sosiologi** adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.

**William Kornblum (Idianto M., 2004 : 11)**

**Sosiologi** adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi.

**Alan Johnson (Idianto M., 2004 : 11)**

**Sosiologi** adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat di dalamnya mempengaruhi sistem itu.

**Hasan Shadily (1999 : 9)**

**Sosiologi** ialah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki tenaga kekuatan yang menguasai kehidupan itu. Ia mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan dan cara-cara sehari-harinya yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu.

**Soerjono Soekanto (2000 : 21)**

**Sosiologi** adalah ilmu sosial (obyeknya kehidupan bersama manusia) yang kategoris, murni, abstrak, berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional dan empiris, serta bersifat umum.

Dari beberapa definisi di atas dapat disederhanakan, yaitu sosiologi adalah *ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum*. Rasional berarti apa yang dipelajari sosiologi selalu berdasarkan penalaran dan empiris.

## B. Pengertian Kota

Dalam memberikan definisi tentang kota, para ahli kota memberi definisi kota dengan dua sudut pandang, yaitu : *pertama*, kota atau bahasa Inggrisnya yaitu *city*; dan *kedua*, daerah perkotaan, yaitu kawasan yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan modern, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan nama *urban* (Ilham, 1990 : 4).

Perkotaan (*urban area*) tidak sama artinya dengan kota (*city*). Yang dimaksud dengan perkotaan (*urban*) adalah daerah atau wilayah yang memenuhi 3 persyaratan (Priyono Tjiptoherijanto, Buletin Populasi, Volume 10 No. 2/1999 : 57-58) yaitu :

1. Kepadatan penduduk 500 orang atau lebih per kilometer persegi,
2. Jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian sebesar 25 persen atau kurang, dan
3. Memiliki delapan atau lebih jenis fasilitas perkotaan.

Jenis fasilitas yang digunakan sebagai kriteria untuk menentukan daerah perkotaan dalam sensus penduduk 1980 dan 1990 adalah (1) sekolah dasar atau sederajat, (2) sekolah menengah pertama atau sederajat, (3) sekolah menengah atas atau sederajat, (4) bioskop, (5) rumah sakit, (6) rumah bersalin/balai kesehatan ibu dan anak, (7) pusat kesehatan masyarakat/klinik, (8) jalan yang dapat dipergunakan oleh kendaraan bermotor roda tiga atau empat, (9) telepon/kantor pos/kantor pos pembantu, (10) pasar dengan bangunannya, (11) pusat perbelanjaan, (12) bank, (13) pabrik, (14) restoran, (15) listrik, dan (16) penyewaan peralatan untuk pesta.

Berikut ini akan disajikan serangkaian definisi kota yang dikembangkan oleh para ahli yang dirangkum kembali Ilham (1990 : 4-5) sebagai berikut :

1. Kota secara etimologi (ilmu asal usul kata) adalah suatu daerah perumahan dan bangunan-bangunan yang merupakan satu tempat kediaman.
2. Kota secara umum dapat diartikan sebagai tempat konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya.
3. Kota adalah kelompok orang-orang dalam jumlah tertentu hidup dan bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu berpola hubungan rasional, ekonomis, dan individualitis.
4. Pengertian kota secara struktural, adalah suatu area/daerah atau wilayah yang secara administratif memiliki batas-batas dengan di dalamnya terdapat komponen-komponen yang meliputi, antara lain : penduduk dengan ukuran tertentu (*population size*), sistem ekonomi, sistem sosial, sarana maupun infrastruktur yang kesemuanya merupakan satu kelengkapan keseluruhan. Pengertian kota secara fungsional, adalah sebagai pusat pemukiman penduduk maupun pertumbuhan dalam pengembangan kehidupan sosio kultural yang luas.
5. ...
6. ...
7. ...

8. Pada hakekatnya kota mempunyai dua macam pengertian :

Pertama : Kota sebagai suatu wadah yang mempunyai batasan administrasi wilayah, seperti Kotamadya, Kota Administratif, sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.

Kedua : Kota adalah, sebagai lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non-agraris, misalnya, Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pemukiman.

Kota sebagai lingkungan kehidupan perkotaan dapat tumbuh dan berkembang melalui dua macam proses yaitu :

a. Proses perubahan yang terjadi dengan sendirinya (proses alamiah).

b. Proses perubahan yang dibentuk, diarahkan, dikendalikan melalui proses perencanaan kota (*city planning*).

Proses perubahan yang terjadi dengan sendirinya dapat menimbulkan pelbagai masalah yang tidak menunjang bagi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, perubahan perlu dibentuk secara sadar, diarahkan, dikendalikan melalui proses perencanaan kota (*city planning*).

*City planning* mencakup suatu perencanaan kota yang bersifat menyeluruh dan perencanaan yang bersifat sektoral.

9. Kota adalah, pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah yang administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan. Sedangkan perkotaan, adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul saja.

Di samping pengertian-pengertian di atas, kota mempunyai pengertian dan batasan yang bermacam-macam pula sesuai dengan sudut tinjauan masing-masing penulis. Pengertian kota yang dikemukakan itu sebagaimana dirangkum kembali Khairuddin (2000 : 4-5) sebagai berikut :

- Prof. R. Bintarto (N. Daldjoeni, 1997 : 23) : kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.
- Sjoberg (P.J.M. Nas, 1979: 29): titik awal dari gejala kota adalah timbulnya berbagai kelompok khusus, seperti golongan literasi (golongan intelegensia kuno seperti sastrawan, pujangga dan ahli-ahli keagamaan).
- Wirth (P.J.M. Nas, 1979: 29): Kota adalah suatu pemukiman yang cukup besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya.
- Max Weber (P.J.M. Nas, 1979: 29): Suatu tempat adalah kota apabila penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal.
- Dwight Sanderson (1942: 664): Kota adalah tempat yang berpenduduk 10.000 orang atau lebih.
- P.J.M. Nas, (1979: 32-34): Kota dapat dilihat dari beberapa segi :  
Morfologi : Adanya cara membangun dan bentuk fisik yang berjejal-jejal.

Kriterium Jumlah Penduduk: Sesuai dengan kondisi Negara yang bersangkutan.

Misalnya Jepang, 30.000 orang atau lebih.

Belanda, 20.000 orang atau lebih.

India, Selandia Baru, Belgia, dan Yunani, 5.000 orang atau lebih.

Mexico, Amerika Serikat, Venezuela, 2.500 orang atau lebih.

Jerman Barat, Perancis Portugal dan Ceko Slovakia, 2.000 orang atau lebih.

Panama, Columbia, Irlandia batasnya adalah 1.500 orang

Selandia Baru adalah 1.000 orang, sedangkan Islandia Kecil 300 orang atau lebih.

Hukum : Di sini orang sering menunjuk pada kota-kota yang dalam abad ke-19 biasanya mengenal sistem hukum tersendiri. Pengertian kota di sini dikaitkan dengan adanya hak-hak hukum tersendiri bagi penghuni kota. Tetapi kriterium ini pada masa sekarang tidak lagi berarti karena pemberian posisi hukum tersendiri bagi kota telah ditinggalkan.

Ekonomi : Suatu ciri kota ialah cara hidup yang bukan agraris. Fungsi-fungsi kota yang khas adalah kegiatan-kegiatan budaya, industri, perdagangan, dan niaga serta kegiatan pemerintah.

Sosial : Bersifat kosmopolitan, hubungan-hubungan sosial yang impersonal, hubungan sepintas lalu, berkotak-kotak, dan sebagainya.

Di Indonesia, pengertian kota juga dapat dikenakan pada daerah-daerah atau lingkungan komunitas tertentu sesuai dengan tingkatan stratanya dalam struktur pemerintah. Misalnya untuk daerah tingkat I, disebut Kota Propinsi, tingkat II Kota Kabupaten, dan seterusnya sampai Kota Kecamatan. Untuk tingkatan di bawah kecamatan orang tidak lagi menyebutnya dengan kota. Luas wilayah maupun struktur kota dan adat istiadat kota setempat untuk daerah dengan tingkatan yang sama, belum tentu juga sama. Luas wilayah dan struktur kota Medan, mungkin tidak sama dengan Pekanbaru (Riau), demikian juga Bandung dengan Surabaya. Umumnya, kota-kota ini juga dapat dibagi menjadi kota besar dan kota kecil. Kota besar dimaksudkan sebagai kota yang sudah mempunyai kompleksitas dan sarana serta fasilitas yang cukup untuk memenuhi keinginan manusia. Sedangkan kota kecil mungkin masih terdapat beberapa fasilitas yang belum memenuhi kebutuhan penduduknya. Seseorang mungkin akan dapat membedakannya, baik fasilitas maupun tata caranya, apabila ia pindah dari kota kecil ke kota besar, atau sebaliknya. Di kota besar orang dapat memilih untuk mencari hiburan (beberapa bioskop, tempat-tempat rekreasi, dan sebagainya) sedangkan di kota kecil, walaupun ada, mungkin hanya satu dua saja, sehingga tidak memberikan alternatif lain bagi orang untuk memilih.

Jadi melihat pembagian kota di Indonesia, dapat dikatakan bahwa kriteria untuk menentukan apakah itu kota propinsi, kabupaten, ataupun kota administratif bukanlah didasarkan pada besarnya wilayah, besarnya jumlah penduduk, tetapi hanya untuk kepentingan administratif atau teknis pemerintah.

### C. Pengertian Sosiologi Kota

Setelah dijelaskan pengertian sosiologi dan kota, maka berikut ini dijelaskan pengertian sosiologi kota.

Istilah **sosiologi kota** sebenarnya dapat diberi pengertian sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antarmanusia, baik sebagai individu maupun kelompok manusia yang terdapat dalam kawasan kota. Sedangkan kawasan kota mencakup berbagai macam, seperti ekonomi, hukum, kesehatan, dan lain-lain (Paulus Hariyono, 2007 : 18).

**Sosiologi perkotaan** atau **sosiologi kota** (*urban sociology*) ialah ilmu sosiologi yang mempelajari atau menganalisis segi-segi kehidupan manusia bermasyarakat dalam kawasan kota atau perkotaan (Sapari Imam Asy'ari, 1993 : xv).

**Urban sosiologi** yaitu sosiologi yang khusus mempelajari aspek kehidupan masyarakat kota, baik karena perpindahan maupun karena revolusi industri. Adanya urbanisasi disebabkan antara lain : adanya musim paceklik, karena penduduk kampung atau desa makin bertambah (M. Cholil Mansyur, tanpa tahun : 13).

Dengan demikian, ladang garapan sosiologi kota cukup luas, misalnya : masyarakat dan kebudayaan; kemajemukan atau kepluralitasan masyarakat kota; pola perilaku dan penataan kawasan; kemerosotan sosial dan pemanfaatan ruang; manusia dan lingkungan alam; pola-pola sosial dalam bangunan; gerakan sosial dan pembangunan kota; dan persoalan-persoalan sosial kota lainnya.

## BAB II

### KARAKTERISASI DAN KATEGORISASI KOTA

#### A. Karakterisasi Kota

Kota adalah suatu himpunan penduduk masal yang tidak agraris, yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar suatu pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, kesenian dan ilmu pengetahuan (Soekandar Wirjaatmadja, 1985 : 133).

Kota mempunyai karakterisasi-karakterisasi yang melekat padanya, dan dapat diamati melalui sistem dan jaringan kehidupan sosial masyarakat. Pada umumnya, karakterisasi kota adalah hal-hal yang bertolak belakang dengan karakterisasi desa. Untuk itu dapat disusun karakterisasi kota, sebagaimana dikemukakan Khairuddin (2000 : 13-21) sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan,
- 2) Ukuran masyarakat,
- 3) Kepadatan penduduk,
- 4) Lingkungan,
- 5) Diferensiasi sosial,
- 6) Stratifikasi sosial,
- 7) Mobilitas sosial,
- 8) Interaksi sosial,
- 9) Solidaritas sosial, dan
- 10) Kontrol sosial.

Untuk lebih jelasnya kesepuluh karakterisasi kota secara sosiologis tersebut, akan diuraikan secara lebih jelas sebagai berikut (Khairuddin, 2000 : 13-21).

##### 1) *Pekerjaan*

Sifat pekerjaan di kota tidak lagi mengandalkan tanah yang luas sebagaimana di pedesaan. Di kota orang lebih banyak bekerja di ruang tertutup sehingga tidak tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Bahkan bekerja di dalam ruang sekarang ini, suhu udara yang ada dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan, misalnya dengan memasang AC.

Di samping hal di atas, pekerjaan di kota juga lebih banyak variasinya, dan biasanya berkaitan dengan jasa. Variasi pekerjaan ini dapat dimungkinkan karena banyaknya kebutuhan-kebutuhan dari penduduk kota, sedangkan semua kebutuhannya ini tidak dapat dipenuhi secara mandiri, atau dikerjakan sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya itu. Jasa yang diberikan oleh orang yang membantu itu sudah merupakan lapangan kerja tertentu di kota. Meskipun warga kota lebih menonjol individualitasnya, tetapi mereka tidak dapat mengelakkan adanya sikap bergantung pada orang lain dalam melaksanakan aktivitas hidupnya sehari-hari. Mulai dari menyemir sepatu sampai kepada kendaraan, pergi ke tempat pekerjaan, semuanya banyak tergantung kepada orang lain. Jadi kesimpulannya adalah bentuk pekerjaan di kota lebih bervariasi, tidak bergantung pada alam, dan banyak menggunakan jasa orang lain.

##### 2) *Ukuran Masyarakat*

Salah satu ciri masyarakat kota yang dapat terlihat jelas adalah jumlah penduduk yang besar. Berbeda dengan di pedesaan, yang sangat membutuhkan tanah luas untuk

pekerjaan mereka, di kota meskipun nilai tanah lebih tinggi, tetapi untuk bekerja orang tidak membutuhkan tanah yang luas sebagaimana bidang pertanian. Sehingga kondisi kota selalu ditandai dengan banyaknya bangunan-bangunan yang berdempet-dempet, baik untuk tempat pekerjaan maupun tempat tinggal. Sebagaimana definisi kota yang telah diuraikan di depan, tidak ada keseragaman dari masing-masing negara untuk mengukur jumlah penduduk agar suatu komunitas disebut sebagai kota. Kriteria jumlah penduduk kota berkisar mulai dari 2.500 orang sampai 12,5 juta orang. Sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah kota inilah yang menimbulkan adanya pembagian kota menjadi : kota kecil, sedang, dan kota besar. Bagi PBB ukuran populasi kota (urban) adalah 20.000 orang lebih; berikutnya 500.000 ke atas adalah kota besar; 2.500.000 ke atas adalah kota multi juta; dan 12.500.000 ke atas adalah kota metropolitan (Marbun, 1979: 28).

Tetapi satu hal yang penting tentang ukuran penduduk di perkotaan ini adalah kepadatan penduduk, yang menyebabkan kota tersebut selalu ramai dan sibuk setiap harinya, sesuai dengan aktivitas kota yang lebih “mobil” dibandingkan dengan desa.

### 3) *Kepadatan Penduduk*

Seperti telah dijelaskan pada ukuran penduduk, maka akibat dari jumlah penduduk yang sangat besar adalah kepadatan penduduk, yakni rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah kota. di Indonesia kita jumpai kota-kota terpadat seperti : Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan Makassar. Kepadatan ini sudah mencapai 1.000 – 2.500 jiwa per kilometer persegi. Akibat-akibat dari kepadatan penduduk di kota ini membawa dampak positif dan negatif (Smith, T. Lynn, 1951: 47 – 48).

Dampak positifnya adalah :

- Kontak sosial yang luas.
- Tersedianya semua sarana untuk pelayanan.
- Kesempatan untuk spesialisasi.
- Asosiasi yang bervariasi, yang memungkinkan orang untuk menyeleksi.
- Bebas gossip dari anggota-anggota primer.
- Sekolah-sekolah yang prima.
- Tersedianya fasilitas untuk rekreasi.

Adapun dampak negatifnya adalah :

- Kemacetan, kebisingan, kegaduhan.
- Kurangnya keleluasaan secara pribadi.
- Tingginya biaya hidup.
- Hubungan yang impersonal.
- Pencemaran udara akibat asap kendaraan, rokok, jelaga.
- Isolasi psikologis.
- Ketegangan, nervoses, dan sebagainya.

### 4) *Lingkungan*

Lingkungan bagi masyarakat kota kebanyakan sudah dibentuk oleh teknologi atau tangan manusia. Lingkungan lebih bersifat buatan (artifisial). Seperti yang diungkapkan oleh Lynn Smith (1951: 48) bahwa di kota orang-orang membuat lingkungan mereka sedemikian rupa sehingga menjadi perisai antara mereka dengan gejala-gejala alam. Misalnya dengan membuat AC, alat pemanas, tanggul-tanggul pencegah banjir.

### 5) *Diferensiasi Sosial*



Diferensiasi sosial yang terjadi di kota semakin kelihatan dengan adanya perbedaan-perbedaan yang besar dalam aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Perbedaan ini menurut T. Lynn Smith (1951: 50) erat berkaitan dengan perbedaan asal-usul populasi di pedesaan dan perkotaan. Anak-anak yang lahir di kota sering tidak dapat mengganti dan memenuhi kembali populasi isi kota tersebut. Selain itu, bertambahnya penduduk kota lebih banyak diakibatkan oleh faktor-faktor migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan, yang secara khusus sering dikenal dengan urbanisasi. Sebagai akibat dari urbanisasi ini, penduduk kota sangat bervariasi, baik sikap, suku bangsa, bahasa, dan lain-lainnya. Oleh sebab itulah sifatnya sangat heterogen. Seperti yang diungkapkan oleh Pitirim Sorokin dan Zimmerman (Smith, T. Lynn, 1951: 50): “bahwa kota sangat ditandai oleh heterogenitas, keragaman suku, dan unsur-unsur budaya, sehingga benar-benar menjadi” tempat bercampur” (*melting pot*)”

Orang-orang kota hidup di tengah-tengah perbedaan yang besar, yang secara tetap berhubungan dengan orang-orang yang mempunyai perbedaan-perbedaan dalam ide, kepercayaan, tata kelakuan, bahasa, posisi ekonomi, jabatan, tradisi keagamaan, moral dan sebagainya. Menurut Schoorl (1980: 106-107) timbulnya diferensiasi ini, terutama yang bersifat struktural, dikarenakan adanya peralihan fungsi-fungsi yang dahulunya dipegang oleh kerabat keluarga, tetapi sekarang dipegang oleh organisasi-organisasi yang lebih spesialis. Sebagai contoh disebutkan dengan demikian : di dalam masyarakat tradisional, kelompok kerabat itu merupakan satuan-satuan penting yang menjadi dasar organisasi untuk mengadakan berbagai kegiatan, khususnya untuk satuan produksi, yang anggota-anggotanya bersama-sama menggarap tanah atau melakukan suatu pekerjaan. Karena proses modernisasi, kelompok kerabat kehilangan fungsi itu. Hal ini kelihatan bilamana kaum lelaki mulai bekerja di industri atau pertambangan. Ini lebih menyolok lagi, apabila kaum lelaki untuk waktu yang singkat atau lama pergi ke kota dan meninggalkan anak isterinya di desa. Apalagi hal ini dilihat di kota, di mana aktivitas mereka sehari-hari tidak memungkinkan untuk berkumpul setiap saat. Tidak jarang terjadi waktu mereka habis di tempat pekerjaan. Kalaupun ada hubungan yang agak erat, itupun karena mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan saling menguntungkan satu sama lain.

Apa yang disebutkan di atas, menurut RDH Koesoemaatmadja (1978: 18) sama dengan “sciale desintegratie”, yaitu kerusakan hubungan antara keluarga yang satu dengan yang lain, disebabkan oleh suasana yang mementingkan diri sendiri dan beratnya perjuangan hidup yang dialami sehari-hari. Disintegrasi sosial ini juga disebabkan oleh perubahan-perubahan tugas ekonominya masing-masing (misalnya : Bapak dan anak laki-laki dewasa mengerjakan tanah, ibu mengurus piring, seorang anak laki-laki menggembala sapi, dan seterusnya), maka tugas ekonomi para keluarga yang harmonis seperti yang dimaksudkan tidak termasuk lagi pada masyarakat kota. Para anggota keluarga sering melakukan berbagai macam pekerjaan yang satu sama lainnya berlainan, bahkan kadang-kadang bertentangan, misalnya ayah bekerja di kantor, anak sulung berdagang, anak kedua menjadi polisi dan seterusnya.

#### 6) Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial di kota cenderung lebih tajam daripada pedesaan. Di kota, perbedaan kelas ekonomi lebih nyata terlihat. Kebutuhan-kebutuhan akan suatu kelembagaan yang dapat menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat kota,

membuat semakin banyak organisasi-organisasi yang memberikan berbagai macam status dan peranan bagi masyarakat kota. Sedangkan organisasi itu sendiri lebih banyak merupakan organisasi yang terbentuk dari mereka yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, seperti misalnya: Perkumpulan Bridge, Golf, atau organisasi olahraga bergengsi lainnya. Sedangkan dalam dunia usaha terdapat juga kecenderungan untuk membagi kelompok pengusaha atas pengusaha besar, menengah, dan kecil.

Tetapi berbeda dengan di desa, yang mempunyai sifat tertutup (*Closed Social Stratification*) sedangkan di kota lebih bersifat terbuka (*Open Social Stratification*). Dengan demikian, setiap orang dengan kemampuan yang dimilikinya mempunyai kesempatan yang sama dan terbuka untuk meniti suatu strata yang lebih tinggi. Status yang dimilikinya, yang diperoleh karena perjuangan dan kemampuannya itu merupakan *Achieved Status*, yaitu status yang diperoleh karena usaha sendiri. Misalnya: jabatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut Bintarto (1983: 45) perbedaan tingkat pendidikan dan status sosial dapat menimbulkan suatu keadaan yang heterogen. Heterogenitas ini selanjutnya akan menimbulkan persaingan, sehingga timbul spesialisasi di bidang keterampilan ataupun di bidang jenis mata pencaharian. Dalam hal ini pelapisan sosial ekonomi dapat ditemukan sebagai salah satu ciri sosial di kota.

#### 7) *Mobilitas Sosial*

Karena banyaknya profesi, penduduk kota lebih mudah beralih dari satu status ke status lainnya. Di kota, segala sesuatu sudah terkelompok secara profesional (Misalnya: guru, dokter, wartawan, pengusaha, buruh bangunan, bahkan juga pedagang kaki lima) (1978: 47).

Keinginan untuk hidup layak dan mendapatkan posisi atau status lebih tinggi adalah aspek naluriyah setiap manusia, karena setiap manusia ingin dihormati sesuai dengan status yang dimilikinya. Dalam masyarakat, semakin tinggi nilai status seseorang, semakin besar pula penghormatan orang terhadap orang itu. Kenaikan dalam jenjang kemasyarakatan ini (*Social Climbing*) di kota, hanya dapat dilakukan dengan usaha dan perjuangan pribadi. Perjuangan pribadi artinya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai status tersebut. Tetapi sebaliknya, seseorang dapat turun kelasnya akibat tindakannya sendiri (misalnya dipecat dari jabatan karena membuat kesalahan). Kondisi seperti ini termasuk dalam kategori mobilitas vertikal, yang sangat mungkin dan sering terjadi pada masyarakat kota. Di samping mobilitas sosial, pengertian mobilitas bagi masyarakat kota juga dikenakan untuk mobilitas fisik, yaitu gerakan-gerakan yang horizontal dari setiap orang secara territorial, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Menurut Koesoemahatmadja (1978: 16-17) sifat mudah bergerak ini dapat dilihat dari:

- a. Banyaknya mempergunakan berbagai macam kendaraan baik kepentingan dinas atau perusahaan, maupun karena kegemaran semata-mata.
- b. Sering kalinya berpindah tempat tinggal, disebabkan karena banyaknya kesempatan untuk mendapatkan perumahan (banyaknya hotel-hotel dan rumah-rumah sewaan lainnya).
- c. Kerap kalinya bertukar pekerjaan, disebabkan lebih banyaknya pilihan-pilihan bagi tenaga-tenaga ahli yang cakap. Petani di desa-desa biasanya sukar sekali berpindah

lapangan pekerjaan, karena yang mereka dapat hanyalah warisan dari nenek moyang mereka.

- d. Pembentukan “*cities*” di dalam kota, yaitu penunjukkan daerah-daerah khusus guna pembangunan kantor-kantor, pendirian pabrik-pabrik dibagian-bagian kota yang ditetapkan secara khusus, terjadinya kota-kota forens (*Forens* adalah orang yang tinggal di luar kota, tetapi bekerja di kota). Hal ini menyebabkan orang-orang pada waktu pagi pergi berduyun-duyun pergi kebagian kota tersebut untuk bekerja, dan sore harinya berduyun-duyun kembali ke tempat tinggalnya masing-masing, yakni tempat mereka bekerja semula. Mungkin bagi Gist dan Fava (1934: 109); Bintarto (1977: 47) kelompok ini disebut dengan kelompok penglaju (*Commuters*), yaitu kelompok yang tinggal di daerah pinggiran kota atau luar kota, yang biasanya ke kota mengendarai kendaraan umum, bersepeda atau kendaraan lainnya. Hal semacam ini di Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, sering kita lihat penduduk berbondong-bondong memasuki Kota Yogyakarta pada pagi hari, dari daerah Bantul (sebelah selatan Kota Yogyakarta), dan dari daerah Godean (sebelah barat Kota Yogyakarta), baik para pekerja maupun para anak-anak sekolah; Makassar demikian adanya. Demikian pula halnya pada waktu-waktu pulang bekerja dan pulang sekolah. Umumnya mereka bersepeda atau menumpang kendaraan umum.
- e. Mondar-mandirnya orang-orang yang berbelanja ke toko (*shopping*), pergi dan pulang menonton berbagai pertunjukan atau keolahragaan, dan seterusnya (bagi banyak orang kota, tempat tinggal itu hanya merupakan “*a parking place for the night*”).

Ada kalanya, gerak mobilitas untuk perpindahan pekerjaan ini disebabkan juga oleh nilai-nilai pekerjaan itu sendiri. Di kebanyakan negara berkembang, status pekerjaan lebih ditekankan pada “gengsi” pekerjaan tersebut. Seperti misalnya, orang lebih menghargai menjadi pegawai negeri daripada wiraswastawan walaupun pendapatan dalam bidang wiraswasta lebih tinggi daripada pegawai negeri. Tetapi karena pekerjaan menjadi pegawai negeri sudah terlanjur memberikan gengsi yang tinggi dan dianggap pekerjaan “*white collar*”, maka kedudukannya dianggap lebih tinggi dibanding bidang pekerjaan lainnya, yang sering dicap sebagai pekerjaan “*blue collar*”. Sebagaimana disampaikan oleh Neil J. Smelser (1968: 186) “analisis masalah mobilitas dan motivasi pada bangsa-bangsa yang sedang berkembang biasanya menganggap bahwa masyarakat yang bersangkutan lebih menitikberatkan untuk memelihara status yang lebih tinggi pada posisi-posisi yang “empuk” akibat tingginya tuntutan-tuntutan pada posisi tersebut.” Hal inilah yang menyebabkan bertambah besarnya gap dalam menilai jabatan yang dianggap “halus” dan jabatan yang dianggap “kasar”. Dengan mengutip pendapat Hert Hoselitz; “sangat rendah prestise yang diberikan pada pekerja kasar, yakni pekerja yang mau berkotor tangan”. Beberapa pekerja terpaksa mempertahankan posisi pekerjaan yang tidak terkenal itu hanya demi ekonomi mereka. Sedangkan para pekerja “*white collar*” selalu membayangkan bahwa “pekerjaan kasar” tersebut biasanya ramai dengan buruh-buruh biasa. Dalam beberapa negara sedang berkembang, sifat prestise sosial yang melekat pada pekerjaan-pekerjaan “*white collar*” juga lebih besar, dan ini secara relatif mempunyai korelasi yang sangat erat dengan tingginya angka buta huruf.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak variasi pekerjaan atau organisasi untuk menampung tuntutan-tuntutan kebutuhan masyarakat, terlihat adanya

kecenderungan semakin mudahnya orang berpindah dari status satu ke status lainnya. Sorokin dan Zimmerman (Smith T. Lynn, 1951: 53) berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya atau kecenderungan ke arah terjadinya mobilitas vertikal, antara lain:

- a. Adanya jabatan-jabatan atau posisi-posisi yang mempermudah orang untuk berpindah secara vertikal baik ke atas maupun ke bawah. Seperti misalnya organisasi militer, organisasi politik, parlemen, universitas, dan sebagainya.
- b. Apabila stratifikasi cukup luas, akan membesar pula kesempatan orang untuk berpindah ke kelas yang satu ke kelas yang lainnya.
- c. Perbedaan tingkat fertilitas, yang menyebabkan semakin berkurangnya orang-orang pada kelas atas perkotaan, dan menyebabkan kosongnya "*top position*" dari piramida sosial, yang selanjutnya menimbulkan kevakuman yang dapat menciptakan arus vertikal. Faktor ini biasanya sangat jarang terjadi di pedesaan, karena perbedaan tingkat fertilitas mereka tidak begitu besar atau kurang sama sekali.
- d. Perbedaan sifat biologis dan psikologis antara orang tua dan anak-anaknya. Ini lebih jelas terlihat apabila si anak kurang mampu, paling tidak menyamai orang tuanya. Sehingga dirinya tidak mampu untuk mempertahankan level di mana ia dilahirkan. Misalnya orang tuanya sarjana, sedangkan si anak hanya tamatan SMTA. Demikian juga sebaliknya, apabila si anak ternyata melebihi kemampuan orang tuanya, sehingga memungkinkannya berpindah status yang lebih daripada status di mana ia dilahirkan.
- e. Setiap adanya perubahan lingkungan sosial dan budaya pasti mengarah kepada mobilitas vertikal.

#### 8) *Interaksi Sosial*

Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat kota yang bersifat individualistis, maka hubungan satu sama lain sering bersifat impersonal, yaitu hubungan tidak langsung yang hanya didasarkan atas kepentingan-kepentingan yang sama. Atau dengan kata lain, hubungan antar manusia sudah merupakan hubungan sekunder, dan tidak lagi didasarkan atas hubungan yang intim, *face to face* dan kegotongroyongan. Di samping itu hubungan tatap muka ini sudah jarang berlangsung dengan waktu lama, karena komunikasi lewat telepon sudah menjadi alat penghubung yang bukan lagi merupakan suatu kemewahan (Bintarto, 1983:45). Dilihat dari tata hubungan masyarakat di kota, Mc. Iver dan Page (1952:320) berpendapat :

- a. Di kota terdapat banyak asosiasi dengan keadaan bahwa satu individu adalah anggota dari banyak asosiasi.
- b. Hubungan antar manusia lebih bersifat *secondary group* daripada hubungan yang bersifat *primary group*, dan juga lebih bersifat hubungan kategoris.
- c. Adanya spesialisasi dalam kehidupan ekonomi.
- d. Kontrol sosial (*sosial control*) oleh keluarga sebagai pengganti kontrol sosial masyarakat desa.
- e. Keputusan harus diambil oleh individu.
- f. Keterampilan dan prestasi lebih menentukan daripada status sosial.

Dengan adanya hubungan yang bersifat sekunder tersebut, maka Paul H. Landis (1942: 24) mengatakan bahwa pada masyarakat kota akan terdapat kompetisi dan perjuangan untuk tujuan tersendiri.

### 9) *Solidaritas Sosial*

Sebagaimana disebutkan pada masyarakat desa bahwa solidaritas yang terjadi adalah solidaritas mekanisme, yakni solidaritas yang timbul karena tata hubungan dan norma-norma yang biasa dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan karena banyaknya perbedaan-perbedaan yang terdapat pada masyarakat kota, semakin pula perbedaan-perbedaan mereka dalam hal kepentingan. Sehingga untuk menciptakan solidaritas perlu diatur secara organis, yaitu menimbulkan rasa solidaritas hanya karena kepentingan yang sama. Seperti misalnya, solidaritas di antara sesama pekerja (buruh), ini didasarkan hanya kepada kepentingan-kepentingan mereka dalam menjalankan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan majikannya.

### 10) *Kontrol Sosial*

Kontrol sosial dalam suatu masyarakat sangat tergantung seberapa besar visibilitas sosial yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan dan juga kerelaan (*permissiveness*) dari masyarakat untuk tidak memperhatikan kesalahan yang dibuat oleh anggota masyarakatnya. Tetapi bagi masyarakat kota, visibilitas sosial ini semakin kecil, karena orang kebanyakan tidak mau tahu apa yang diperbuat oleh orang lain, selama perbuatan orang itu tidak merugikan dirinya. Itulah sebabnya kontrol sosial dalam masyarakat kota sudah semakin lemah. Untuk sanksi terhadap diri orang lain, lebih banyak bersifat formal, dan bukan datang dari masyarakat itu sendiri, berupa sanksi pengucilan misalnya.

## **B. Kategorisasi Kota**

Pada hakekatnya kota mempunyai dua macam pengertian. *Pertama* adalah sebagai suatu wadah yang mempunyai batasan administrasi wilayah, seperti Kotamadya, Kota Administratif sebagaimana yang telah diatur di dalam perundang-undangan, dan *kedua* adalah sebagai lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non-agraris, misalnya Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pemukiman.

Kota dalam pengertian administrasi pemerintahan diartikan secara khusus, yaitu suatu bentuk pemerintah daerah yang mayoritas wilayahnya merupakan daerah perkotaan (Mulyono Sadyohutomo, 2008 : 3).

Di Indonesia, di luar daerah khusus Ibukota Jakarta, sebuah kota dari segi hukum dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan (Sandy, 1983), yaitu : (1) Kotamadya; (2) Kotamadya Administratif, dan (4) Kota.

Yang dimaksud dengan Kotamadya adalah sebuah kota yang jelas batas hukum kewenangan pemerintah daerahnya. Mungkin sekali, tidak seluruh wilayahnya merupakan wilayah yang 'terbangun', artinya sebagian wilayahnya masih merupakan daerah perdesaan dalam penggunaan lahannya, seperti sawah, perkebunan, kolam ikan atau hutan. Kotamadya adalah tingkat II;

Kotamadya Administratif adalah sebuah kota yang meskipun dipimpin oleh seorang Walikota, tetapi masih tetap merupakan bagian dari pada Daerah Tingkat II. Kota Administratif tidak mempunyai Dewan, tetapi batas-batas wilayah hukum walikotanya jelas ditetapkan;

Kota, seperti layaknya sebuah kabupaten, keberadaannya hanya ditandai oleh bagian-bagiannya yang sudah dibangun namun kewenangan hukum pemerintah

daerahnya tidak terbatas pada daerah terbangun saja tetapi termasuk wilayah yang belum terbangun yang berada dalam batas-batas wilayah yang sudah ditetapkan.

Menurut BPS (1985) Kota Administratif adalah satuan wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan wilayah kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah umum, terpisah dari kegiatan Bupati Kepala Daerah Tk. II. Kota ini dibentuk berdasarkan UU No. 5 Th. 1974 dengan mengingat pertimbangan dan pertumbuhannya di bidang sosial ekonomi, jumlah penduduk kurang lebih 150.000 jiwa untuk Pulau Jawa dan Bali, sementara itu sejumlah minimal 50.000 jiwa untuk daerah luar Pulau Jawa dan Bali. Kota yang bersangkutan telah menampilkan sifat-sifat yang mampu mempengaruhi pertumbuhan wilayah propinsi.

### C. Masyarakat Kota

Secara sosiologis, masyarakat merupakan makna daripada penduduk. Menurut Sapari Imam Asy'ari (1993 : 32), "Masyarakat sebenarnya juga "istilah yang bersifat abstrak" buatan manusia atau tegasnya buatan para ahli pikir, untuk menandai "wadah pergaulan hidup bersama manusia." Ia sebagai tempat persemaian dan pertumbuhan budaya manusia sebagai makhluk sosial." Di masyarakat terdapat simbol-simbol, nilai-nilai, aturan-aturan, norma-norma atau kaidah-kaidah tingkah laku yang bersifat normatif yang harus ditaati, dikembangkan atau dipertahankan, dan bahkan diciptakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat tersebut.

Pada hakikatnya, masyarakat terdiri atas kelompok besar manusia yang relatif permanen, berinteraksi secara permanen, menganut dan menjunjung suatu sistem nilai dan kebudayaan tertentu.

Menurut P.J. Bouman sebagaimana dikutip M. Cholil Mansyur (1999 : 22) bahwa "Masyarakat ialah pergaulan hidup yang akrab antara manusia dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka."

Koentjaraningrat dalam Suparto (1987 : 116) dikemukakan bahwa "Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinue dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama."

Pengertian lain dikemukakan R. Abdussalam sebagai berikut : "Masyarakat adalah segenap manusia Indonesia baik sebagai individu/ perorangan maupun kelompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan serta kepentingan berbeda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda pula, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama yaitu aman, sejahtera dan bahagia dalam arti fisik, mental, dan spiritual serta berideologi Pancasila baik secara perorangan maupun kelompok" (R. Abdussalam, 1997 : 25).

Berdasarkan pada beberapa pengertian atau definisi masyarakat tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa masyarakat merupakan pengumpulan manusia yang banyak dan bersatu dengan cara tertentu oleh karena adanya hasrat-hasrat kemasyarakatan yang sama. Dengan demikian, syarat-syarat timbulnya masyarakat meliputi : harus ada pengumpulan manusia yang banyak.

### Ciri-ciri Masyarakat

Suatu masyarakat atau *community* menurut N. Daldjoeni (1997 : 9) memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- i. berisi kelompok manusia,

- ii. menempati suatu wilayah geografis,
- iii. mengenal pembagian kerja ke dalam spesialisasi dengan fungsi-fungsi yang saling tergantung,
- iv. memiliki kebudayaan dan sistem sosial bersama yang mengatur kegiatan mereka,
- v. para anggotanya sadar akan kesatuan serta kewargaan mereka dari *community*, dan
- vi. mampu berbuat secara kolektif menurut cara tertentu.

Berkenaan dengan faktor-faktor yang mendorong manusia untuk bermasyarakat, M. Cholil Mansyur (1999 : 23) mengemukakan sebagai berikut :

1. *Hasrat sosial*. Adalah merupakan hasrat untuk menghubungkan dirinya dengan individu lainnya atau kelompok.
2. *Hasrat meniru*. Adalah hasrat untuk menyatakan secara diam-diam atau terang-terangan sebagian dari salah satu gejala atau tindakan.
3. *Hasrat berjuang*. Dapat dilihat adanya persaingan mengalahkan lawan.
4. *Hasrat bergaul*. Hasrat untuk bergabung dengan orang-orang tertentu, kelompok tertentu, misal : organisasi, club, dan lain-lain.
5. *Hasrat untuk memberitahukan*. Hasrat untuk menyampaikan perasaan-perasaan kepada orang lain. Biasanya disampaikan dengan suara, bintang jasa, bertujuan untuk mencapai hubungan dengan orang lain.
6. *Hasrat untuk mendapat kebebasan*. Hasrat untuk menghindari diri dari tekanan atau pembatasan.
7. *Hasrat sexuil*. Hasrat adanya untuk mengembangkan keturunan.
8. *Hasrat bersatu*. Adanya kenyataan bahwa manusia itu adalah makhluk lemah, maka dari itu mencari kekuatan bersama, sehingga mereka berlindung bersama-sama.
9. *Adanya kesamaan keturunan, kesamaan keyakinan, dan lain-lain.*

Dari faktor-faktor manusia bermasyarakat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk masyarakat tersebut ditentukan oleh bentuk/sifat-sifat dari golongan masyarakat yang mengadakan perikatan tersebut.

### **Jenis-jenis Masyarakat**

Hasan Shadly (1988 : 87) memberikan pengertian masyarakat sebagai “Golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain.”

Berdasarkan jenis, menurut Hasan Shadly (1988 : 88-89) masyarakat dibedakan atas :

- a. Masyarakat desa yaitu masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama di sektor pertanian, perikanan, peternakan atau gabungan dari kesemuanya itu dan yang sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencahariannya.
- b. Masyarakat kota yaitu masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor perdagangan atau industri yang bekerja di sektor administrasi pemerintahan.
- c. Masyarakat modern yaitu masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar, secara luas spesialisasi bidang industri dan pemakaian teknologi canggih.

- d. Masyarakat primitif yaitu masyarakat yang memiliki sistem ekonomi yang sederhana.
- e. Masyarakat tradisional yaitu masyarakat yang lebih banyak dikuasai oleh adat istiadat yang lama.



### BAB III

#### PERKEMBANGAN KOTA

Kota merupakan hasil peradaban umat manusia, dan sejalan dengan peradaban itu pula, maka kota mengalami sejarah pertumbuhan, perkembangan, mekar menjadi kota besar dan kemudian adanya kota yang hilang, tinggal namanya saja dalam sejarah. Kota menunjukkan dinamika masyarakat manusia. Lewis Mumford dalam bukunya *“The Culture of Cities”* (Sapari Imam Asy’ari, 1993 : 30) menggambarkan perkembangan kota-kota sebagai berikut : “(1) *Ecopolis* (kota yang baru berdiri); (2) *Polis* (kota); (3) *Metropolis* (kota besar; metro = induk); (4) *Megalopolis* (megalo = besar; kota yang sudah menunjukkan keruntuhan); (5) *Tyrannopolis* (tyran = penguasa kejam; penguasa kota menguasai pedalaman dengan perusahaan-perusahaan raksasa); dan (6) *Nekropolis* (neko = mayat; kota runtuh).

Perkembangan kota menurut Prof. Bintarto (1977:52) mempunyai dua aspek pokok. *Pertama*, aspek yang menyangkut perubahan-perubahan yang dikehendaki dan yang alami oleh warga kota, dan *kedua*, aspek yang menyangkut perluasan atau pemekaran kota.

Aspek yang merupakan perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh warga kota lebih merupakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan prasarana dan fasilitas hidup di kota. Terutama karena bertambahnya jumlah penduduk di kota, baik secara alamiah maupun karena migrasi atau perpindahan, menyebabkan semakin besarnya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, seperti ruang dan prasarana (perumahan, jalan, air minum, dan sebagainya). Meskipun demikian, tidak semua kota dapat berkembang sama cepatnya, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan sesuatu kota dapat berkembang dengan pesat. Menurut Daldjoeni (1978:13-14) faktor yang mendorong perkembangan kota antara lain:

- a. Pertambahan penduduk kota itu sendiri.
- b. Penemuan mesin dan tenaga uap ditambah lagi dengan penggunaan modal besar dalam usaha dagang dan industri yang menciptakan pabrik-pabrik besar. Ini menarik banyak tenaga kerja dari daerah pertanian melalui tingginya upah dan aneka jaminan sosial. Akhirnya produksi massal dari industri kota itu sendiri mendorong perkembangan kota lebih lanjut.

Peranan transportasi dan komunikasi di kota. Kedua hal ini menjamin kekompakan kehidupan masyarakat kota. Jika itu macet, maka segala tata kerja akan menjadi lumpuh.

- a. Kesempatan untuk maju dan berhasil lebih banyak terdapat di kota dibandingkan dengan di desa.
- b. Kota menawarkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang cukup sebagai sarana kenaikan jenjang sosial.
- c. Pengisian waktu senggang tersedia cukup, demikian pula berbagai hiburan dan olah raga.

Di samping itu, posisi kota juga menentukan laju perkembangan kota itu sendiri. Kota kecil yang terletak di persimpangan jalan antara kota yang satu dengan kota yang lain akan mempunyai peluang untuk berkembang lebih cepat daripada kota-kota yang tidak mempunyai jalur tembus atau persimpangan jalan ke arah kota lain. Atau dengan kata lain, kota tersebut dapat berfungsi sebagai terminal atau persinggahan

perjalanan (*break in transportation*). Pertemuan antara dua sungai juga merupakan lokasi kota yang mempunyai potensi untuk berkembang secara cepat. Daerah-daerah tepian sungai, seperti di Kalimantan, justru merupakan pembentukan awal dari perkembangannya kota-kota besar. Tidak hanya faktor tersebut di atas yang menyebabkan berkembangnya kota secara pesat. Prof. Bintarto (1978:62-64) menyebutkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kota ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

a. Letak

Letak suatu kota mempunyai peranan penting dalam menentukan perkembangan kota tersebut, karena letak suatu kota mempunyai hubungan dengan strategis tidaknya suatu kota. Misalnya, kota-kota yang mempunyai cabang jalan, komunikasi akan lebih cepat berkembang daripada kota yang terpencil letaknya. Contoh dari kota-kota seperti ini adalah:

- kota yang terletak pada dua aliran sungai
- kota pada persimpangan jalan .
- kota di lembah-lembah yang subur.

b. Iklim dan relief

Di sini akan terlihat bahwa kota yang mempunyai relief tanah yang lebih mendatar akan lebih mudah berkembang dibandingkan dengan daerah yang berbukit-bukit, karena pemekarannya dibatasi oleh rintangan alam. Merupakan suatu kenyataan bahwa munculnya kota-kota pada jaman dahulu banyak berlokasi pada dataran rendah yang relief tanah mendatar. Meskipun pada saat sekarang ini, dengan perkembangan teknologi, relief-relief tanah yang berbukit-bukit tadi bukan lagi menjadi hambatan mutlak, karena manusia dengan teknologi yang ditemukan sudah mampu berbuat terowongan-terowongan maupun berubah bukit-bukit kecil tersebut menjadi dataran-dataran yang dapat dipergunakan untuk pemukiman dalam rangka perluasan tata ruang kota

Iklim yang sejuk dan menyenangkan merupakan faktor dan pertimbangan bagi manusia untuk memilih tempat tinggalnya, karena iklim ini juga berkaitan dengan mata pencaharian penduduk pada awalnya, yakni bertani. Kebanyakan proses terbentuknya kota diawali dengan munculnya kota-kota pertanian, yang kemudian berkembang menjadi kota-kota industri. Di negara-negara sedang berkembang, bentuk kota pertanian ini masih merupakan salah satu bentuk kota dari beberapa tipe kota yang ada, selain kota transit (Nas,1979:14).

c. Sumber alam

Sumber alam adalah kekayaan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun dalam pemanfaatannya dibutuhkan keahlian khusus untuk menggali dan mengolah sumber tersebut. Kota-kota yang mempunyai sumber alam yang dikelola otomatis memberikan kesempatan kerja bagi penduduk sekitarnya. Pengelompokan penduduk pada sumber-sumber mata pencaharian ini merupakan potensi bagi berkembangnya kota tersebut dengan pesat. Ibarat di mana ada gula, maka semut-semut pun akan menuju ke sana. Pengelompokan manusia ini selanjutnya jelas membutuhkan ruang dan fasilitas untuk tempat tinggal dan sarana serta prasarana hidup lainnya sehingga hal ini memungkinkan adanya perkembangan kota tersebut.

d. Tanah

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktifitas hasil pertanian adalah tanah yang subur. Karena danya revolusi agraris yang menyangkut pengolahan, penggunaan tanah dapat dilakukan dengan efisien. Sistem transportasi yang mengimbangi revolusi agraris memungkinkan kota kecil di daerah pertanian akan berkembang.

e. Demografi dan kesehatan

Pertambahan penduduk mempunyai hubungan erat dengan tingkat kesehatan masyarakat. Dengan tingkat kesehatan yang semakin baik, maka akan mempengaruhi angka kematian, terutama angka kematian balita. Demikian pula rata-rata kesempatan hidup akan lebih panjang. Selanjutnya pertambahan penduduk ini merupakan faktor yang utama bagi perkembangan kota. Albion W.Small and George E. Vincent (Smith and MasMahan, 1951:142) mengatakan:

*"The increase of population has required the erection of public buildings, stores, and dwelling until the original area of the city is largely occupied"* (pertambahan penduduk menurut perkembangan bangunan-bangunan untuk umum, toko-toko dan tempat tinggal, sehingga memerlukan tempat kosong yang lebih luas dan kota tersebut).

e. Pendidikan dan kebudayaan

Kota ini dimungkinkan berkembang karena banyaknya pendatang untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan yang ada sehingga menghendaki adanya pemekaran kota, paling tidak untuk pemukiman. Untuk kota-kota pendidikan seperti ini kita dapat melihat kota Yogyakarta, yang sebagian penduduknya adalah pendatang.

f. Teknologi dan elektrifikasi

Perkembangan teknologi, seperti sarana transportasi dan hubungan komunikasi lainnya (telepon, radio, dan televisi) membuat jarak yang dahulunya jauh terasa semakin dekat. Tempat tinggal di luar kota atau di daerah tepian kota tidak lagi menjadi masalah bagi mereka yang mempunyai aktivitas sehari-hari di kota. Dan juga kemajuan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan industri dan perdagangan. Arus barang produksi dari daerah pinggiran kota ke pusat perdagangan membuat jalur-jalur sepanjang jalan ke kota semakin ramai.

g. Transportasi dan lalu lintas

Jalur jalan dalam kota dan jalur-jalur jalan penghubung antara kota sebagaimana disebutkan di atas, merupakan faktor yang sangat berpengaruh untuk meningkatkan intensitas hubungan antar manusia dan arus barang, dan sepanjang jalan akan memungkinkan terjadinya pembangunan yang pesat. Kondisi ini berkaitan dengan teori linier dalam perkembangan kota, di mana bangunan-bangunan akan tumbuh sekitar jalan penting perhubungan dalam kota maupun antar kota. Bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang jalan ini oleh Bergel (Raharjo, 1982:39) disebut *konurbasi (conurbation)*, yaitu adanya kecenderungan perkembangan yang terjadi di sepanjang jalan raya antar kota. Pertemuan antar konurbasi ini dengan kota yang satu dengan kota yang lain, akan memungkinkan terbentuknya agglomerasi (*agglomeration*). Kondisi seperti ini dapat dilihat proses menyatunya kota Jakarta dengan Bogor, sehingga kedua kota tersebut kelihatan tidak lagi mempunyai batas kota yang jelas, karena sepanjang jalan antar kota Jakarta dan Bogor sudah penuh dengan bangunan-bangunan yang membuat kedua kota tersebut menjadi satu.

Perkembangan kota yang selanjutnya menuntut adanya pemekaran kota secara fisik, juga terjadi secara horizontal (mendatar) dan vertikal ke atas. Pemekaran kota secara horizontal juga melihat daya tarik yang berasal dari aktivitas-aktivitas yang berada di luar kota. Di mana daya tarik dari luar kota ini adalah pada daerah-daerah yang kegiatan ekonominya banyak menonjol (Bintarto, 1983 :47-48) yaitu di sekitar pelabuhan dan di sekitar *hinterland* (tepi kota) yang subur.

### **Teori-Teori Perkembangan Kota**

Teori perkembangan kota tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong kota tersebut menjadi berkembang. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa faktor yang menyebabkan suatu kota dapat berkembang dengan pesat. Dari faktor-faktor inilah para ahli mencoba menyusun teori perkembangan kota, sehingga mempunyai latar belakang pandangan yang berbeda. Perbedaan ini sesungguhnya bukan merupakan perbedaan yang bersifat dikotomi atau terciptanya polarisasi dari pendapat-pendapat tersebut. Bahkan kalau disatukan, teori-teori ini akan saling melengkapi satu sama lain.

Ada beberapa teori perkembangan kota yang sangat populer dan sering dijadikan referensi, baik bagi para ahli perencanaan kota maupun sosiologi perkotaan. Paling tidak, kalau dibagi ke dalam sudut pandang para ahli tersebut, akan dijumpai bahwa di antaranya menyoroti teori perkembangan kota dari sudut sosiologi (hubungan antar anggota), demografi, keruangan (*spatial*), dan sudut ekonomi. Di bawah ini akan diungkapkan beberapa teori perkembangan kota sesuai dengan sudut pandang tersebut di atas.

## BAB IV

### FUNGSI KOTA

Noel P. Gist dalam bukunya "*Urban Society*" mengemukakan beberapa fungsi kota.

- (1) "*Production center*" yaitu kota sebagai pusat produksi, baik barang setengah jadi maupun barang jadi. (2) "*Center of trade and commerce*", yakni kota sebagai pusat perdagangan dan niaga, yang melayani daerah sekitarnya. Kota seperti ini sangat banyak, seperti Rotterdam, Singapura, Hamburg. (3) "*Political capitol*", yaitu kota sebagai pusat pemerintahan atau sebagai ibu kota negara, misalnya Kota London, Brazil. (4) "*Cultural center*", kota sebagai pusat kebudayaan, contohnya: Kota Vatikan, Makkah, Yerusalem. (5) "*Health and recreation*", yakni kota sebagai pusat pengobatan dan rekreasi (wisata), misalnya : Monaco, Palm Beach, Florida, Puncak-Bogor, Kaliurang. (6) "*Divercified cities*", yakni kota-kota yang berfungsi ganda atau beraneka. Kota-kota pada masa kini (setelah Perang Dunia ke-II) banyak yang termasuk kategori ini. Sebagai contoh : Jakarta, Tokyo, Surabaya yang mencanangkan diri sebagai "Kota Indamardi" (kota industri, perdagangan, maritim, dan pendidikan), di samping sebagai pusat pemerintahan." (Sapari Imam Asy'ari, 1993 : 29)

Dalam menjalankan kehidupannya suatu kota menurut Ilhami (1990 : 290) berfungsi sebagai : (a) Pusat pemukiman penduduk yang dalam proses kehidupan selalu berubah-ubah selaras dengan faktor perkembangannya. (b) Pusat kegiatan penduduk yang menempatkan kedudukannya sebagai pusat pemasaran dan pelayanan peningkatan produksi dari kegiatan ekonomi maupun pusat pelayanan sosial, politik dan budaya. (c) Pusat penyediaan fasilitas penunjang pertumbuhannya dan daerah belakangnya dalam hal ini kota dapat merupakan terminal jasa distribusi. (d) Pusat pendorong dalam proses pembangunan daerah dan nasional.

Bicara tentang "*Ke Mana Layar Pembangunan Kota Bima Digayuh?*" sebagai misal, berarti menggugat visi dan misi Pemerintah Kota Bima. Visi sendiri dapat diartikan sebagai kondisi ideal yang ingin dicapai dalam eksistensi organisasi di masa depan (Hadari Nawawi, 2000). Lonnie Helgerson (J. Salusu, 2000) mengemukakan, visi adalah gambaran kondisi masa depan dari suatu organisasi yang belum tampak sekarang tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap orang (anggota organisasi). Visi memiliki kekuatan yang mampu mengundang, memanggil, dan menyerukan pada setiap orang (anggota organisasi) untuk memasuki masa depan. Visi organisasi harus dirumuskan oleh manajemen puncak (pucuk pimpinan) organisasi. Naisbit menjelaskan, visi merupakan gambaran yang jelas tentang apa yang akan

dicapai berikut rincian dan instruksi setiap langkah untuk mencapai tujuan. Suatu visi dikatakan efektif jika sangat diperlukan dan memberikan kepuasan, menghargai masa lalu sebagai pengantar masa depan (J. Salusu, 2000).

Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam bentuk produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan (Kotler *dalam* J. Salusu, 2000).

Secara sederhana visi dapat diartikan sebagai sudut pandang ke masa depan dalam mewujudkan tujuan strategik, yang berpengaruh langsung pada misinya sekarang dan di masa depan.

Lalu, apa arti misi? Misi pada dasarnya berarti keseluruhan tugas pokok yang dijabarkan dari tujuan strategik untuk mewujudkan visi. Atau, misi adalah bidang/jenis kegiatan yang akan dijelajahi atau dilaksanakan secara operasional untuk jangka waktu panjang oleh sebuah organisasi/lembaga dalam merealisasikan tujuan strategiknya, yang setelah secara keseluruhannya tercapai berarti visi juga terwujud.

Visi Kota Bima tidak boleh terlalu jauh beda dengan visi pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai IPTEK, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Visi Kota Bima adalah “*terwujudnya Kota Bima sebagai Kota Transit yang Maju, Religius, dan Berperadaban.*”

Sementara visi Kota Bima : (1) Mengembangkan potensi strategis yang dimiliki Kota Bima melalui peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan dasar, fisik, sosial ekonomi dan kelembagaan untuk menunjang upaya percepatan, kepastian dan kenyamanan berusaha; (2) Memfungsikan nilai-nilai religius dan kearifan lokal sebagai faktor pendorong transformasi masyarakat; (3) Mengembangkan secara terpadu kegiatan usaha produktif masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sumberdaya lokal melalui peningkatan nilai tambah, keunggulan kompetitif dan mempertahankan keunggulan komparatif; (4) Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya saing tinggi dan mampu menggerakkan potensi sumber daya yang tersedia; (5) Memanfaatkan dan meningkatkan potensi sumberdaya alam dan lingkungan melalui upaya pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan; dan (6) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui manajemen pemerintahan yang efektif dan terbuka dengan mengacu kepada prinsip “*good governance*” (Buku Panduan Musrenbang Kota Bima, 2007 : 14-15).

*Pendidikan, Maju dan Mandiri* merupakan 3 (tiga) kata kunci visi pembangunan Kota Bima yang memiliki makna strategis dan dirumuskan dalam misi pembangunannya dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, peningkatan pelayanan umum, membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan supremasi hukum dan pemberdayaan perempuan serta menciptakan masyarakat yang bersih efektif dan efisien.

Dengan rumusan visi tersebut di atas, dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan, diharapkan kondisi Kota Bima akan mengalami perubahan dan lompatan secara signifikan yang diindikasikan oleh 2 (dua) indikator keberhasilan utama, yaitu :

1. Kota Bima sebagai Kota Pendidikan dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi melalui terbangunnya Universitas Negeri Bima dan semakin berkembangnya kualitas pendidikan tinggi negeri dan swasta serta peningkatan profesionalisme pengelolaan pendidikan dasar dan menengah.
2. Masyarakat maju dan mandiri ditandai dengan adanya kemajuan dalam hal tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang lebih baik, maupun ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang baik. Dari aspek rohani ditandai dengan meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan pembangunan daerah, semakin mantapnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat, serta meningkatnya ketahanan sosial budaya.

Pembangunan kota, termasuk Kota Bima yang sementara terus-menerus berbenah diri, harus diarahkan pada upaya-upaya peningkatan produktivitas kota, mengurangi kemiskinan di perkotaan serta pelestarian (*sustainability*) lingkungan hidup (World Bank dalam Nana Rukmana DW, Dkk., 1993 : 21). Khususnya, kaitan dengan pelestarian lingkungan, rupanya terdapat tujuh “dosa” lingkungan (*environmental sins*), demikian dikemukakan “New Week” 1 Juni 1992. Dosa yang pertama yaitu *keputus-asaan*; Dosa yang kedua adalah *godaan*; dosa ketiga yaitu *kerakusan*; dosa keempat yaitu *keangkuhan*. Yang kelima yaitu *kelalaian*. Dosa keenam adalah *keirihatian*. Dosa ketujuh yaitu *kebencian*.

Untuk apa kota diprioritaskan penataannya ? Sebagaimana sering dikemukakan Walikota Bima Drs.H.M. Nur Latif, secara ekonomis sangat menguntungkan, dari segi pariwisata misal. Produktivitas kota yang rendah menyebabkan semakin rendahnya daya tarik investor, yang berakibat akan menurunnya pertumbuhan kegiatan ekonomi. Lebih lanjut hal ini akan menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat dan pemerintah sehingga akhirnya menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat dan pemerintah untuk investasi pembangunan kota. Sementara, sustainabilitas kota diartikan “sebagai kemampuan kota untuk mempertahankan kehidupan sosial ekonominya secara berkelanjutan. Dari sisi ekonomi, kota perlu dikelola agar kegiatan ekonominya dapat sustain, dalam arti agar pemanfaatan sumber daya untuk produksi dapat diperbaharui atau selalu tersedia alternatif penggantinya” (Ditjen Cipta Karya dalam Nana Rukmana DW, Dkk., 1993 : 21).

Membangun kota tidak boleh dengan gaya “tambal-sulam”. Kota harus dirancang sesuai peruntukannya. Atau, dibentuk karakteristik khusus yang diinginkan, sesuai fungsinya. Misal, apa ia mau dijadikan kota pendidikan, perdagangan, industri, wisata, dan karakteristik lainnya. Kaitan dengan itu, Noel P. Gist dalam bukunya “*Urban Society*” (Sapari Imam Asy’ari, 1993 : 29) mengemukakan beberapa fungsi kota. (1) “*Production center*” yaitu kota sebagai pusat produksi, baik barang setengah jadi maupun barang jadi. (2) “*Center of trade and commerce*”, yakni kota sebagai pusat perdagangan dan niaga, yang melayani daerah sekitarnya. Kota seperti ini sangat banyak, seperti Rotterdam, Singapura, Hamburg. (3) “*Political capitol*”, yaitu kota sebagai pusat pemerintahan atau sebagai ibu kota negara, misalnya Kota London, Brazil. (4) “*Cultural center*”, kota sebagai

pusat kebudayaan, contohnya : Kota Vatikan, Makkah, Yerusalem. (5) “*Health and recreation*”, yakni kota sebagai pusat pengobatan dan rekreasi (wisata), misalnya : Monaco, Palm Beach, Florida, Puncak-Bogor, Kaliurang. (6) “*Divercified cities*”, yakni kota-kota yang berfungsi ganda atau beraneka. Kota-kota pada masa kini (setelah Perang Dunia ke-II) banyak yang termasuk kategori ini. Sebagai contoh : Jakarta, Tokyo, Surabaya yang mencanangkan diri sebagai “Kota Indamardi” (kota industri, perdagangan, maritim, dan pendidikan), di samping sebagai pusat pemerintahan.

Khususnya mengenai potensi dan karakteristik kota (kota jasa/perdagangan, pelayanan, pendidikan, pengembangan ekonomi kerakyatan), dan mengacu pada pendapat P.J.M. Nas (1979), bahwa secara ekonomi, ciri kota adalah cara hidup yang bukan agraris. Fungsi-fungsi kota yang khas adalah kegiatan-kegiatan budaya, industri, perdagangan, dan niaga serta kegiatan pemerintah; dan salah satu dari enam kondisi yang diperlukan suatu kota (*city*), sebagaimana dikemukakan N. Daldjoeni (1997) adalah suatu sistem perdagangan dan pertukangan; kemudian, Sosiolog Jerman Max Weber mengidentifikasi kelahiran suatu kota dengan perkembangan kapitalisme. Etos kapitalisme yang mencakup nilai-nilai rasionalitas, ekspansi perdaganga, kerja keras, efisiensi, penghargaan terhadap waktu... (Agus Sutoyo, 1997).

Dengan demikian, perencanaan kota (*urban planning*) merupakan aktivitas merencanakan suatu lingkungan tertentu, yang lebih luas daripada perencanaan lahan atau fisik, karena mempertimbangkan semua faktor fisik, tata guna lahan, ekonomi, politik, administratif dan sosial—yang mempengaruhi wilayah kota. Perencanaan kota yang efektif diperlukan guna menghindari beberapa hal antara lain : (1) perkembangan kota secara acak yang pada gilirannya menimbulkan kesemrawutan; (2) penyediaan fasilitas pelayanan dan infrastruktur yang mahal dan tidak efisien; (3) spekulasi tanah yang dapat mengakibatkan pelipatgandaan biaya pembangunan; (4) penggunaan lahan yang tidak bertanggung jawab, yang dapat mengancam kelestarian lingkungan (Achmad Nurmandi, 1999 :145). Olehnya itu, dalam perencanaan kota, tidak hanya sebatas perencanaan fisik semata, namun melibatkan perencanaan ekonomi, sosial, dan politik.

Sangat diinsyafi, setiap kota, pada awal tentulah merupakan kota baru. Demikian halnya Kota Bima. Setiap pembangunan kota baru harus diawali dengan studi yang mendalam termasuk perkiraan dampak yang akan terjadi (oleh cendekiawan dan ilmuan), perencanaan menyeluruh terpadu (oleh para profesional), pelaksanaan yang taat (oleh pihak swasta) dan pengawasan yang ketat (oleh pemerintah) untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara kasat mata, apa yang sedang dikerjakan Walikota Bima, dalam waktu yang relatif singkat ini, pantas diberi acungan jempol.  
Semoga !!!



## BAB V “DOSA-DOSA” PERENCANA KOTA

"... kota merupakan momok, bahkan digambarkan dalam berbagai kita suci bahwa kota merupakan wajah keburukan dan kejahatan" (Horton, 1992 dalam M. Zaini Hasan dan Salladin, 2007 : 256).

Sebagian literatur kadang mencela kawasan perkotaan (*urban areas*) yang berlebihan, sebagai pusat kejahatan dan dosa, tipudaya dan kemunafikan, kekotoran politik, ketidakaturan dan kepalsuan, serta berbagai persoalan yang berpangkal kejenuhan kota dari sisi-sisi jeleknya (Glazer, 1980 dalam M. Zaini Hasan dan Salladin, 2007 : 256).

### A. “Dosa-Dosa” Perencana Kota

Ada beberapa unsur pokok kota, yang dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam menyusun *Rencana Induk Kota*, yang juga saling berkaitan satu sama lain— agar tidak ada “dosa” bagi para perencana kota, adalah : (1) Wisma (perumahan); (2) Karya (aktivitas yang bersangkutan dengan lapangan pekerjaan); (3) Marga (jalan); (4) Suka (fasilitas rekreasi dan hiburan); (5) Penyempurna (fasilitas keagamaan, pendidikan, pemakaman); dan (6) Prasarana kota (air minum, listrik, drainase, angkutan kota, telepon, dan lain sebagainya) (Khairuddin, 2000 : 227).

Bila dikaji secara bijak tentang sejarah perkembangan peradaban kota, maka kota-kota mengalami rentang riwayat pertumbuhan, perkembangan, kemudian mekar menjadi kota besar dan selanjutnya kita lihat kota yang hilang--tinggal namanya dalam sejarah. Kita masih ingat dengan kota-kota dunia yang pernah mencapai masa keemasannya, misal Kerajaan Inka, Babylonia, Kerajaan Bulgis, Kerajaan (Nabi) Sulaiman, Istana Alhamra’ dan lain-lain. Demikian halnya di nusantara ini, ada sejumlah kota yang pernah mencapai masa kejayaan, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, dan sejumlah kota kerajaan lainnya.

Lalu, kenapa sebuah kota dapat hilang ? Lenyap atau runtuhnya sebuah kota, selain karena peristiwa alam (gempa, misal), pun akibat ulah manusia, perang misal, termasuk dalam hal ini akibat ulah para perancang atau perencana kota. Lewis Mumford dalam “*The Culture of Cities*”-nya sebagaimana dikutip Khoe Shoe Kiam (1956), menceritakan perkembangan peradaban kota-kota yakni bermula dari “eopolis” (kota yang baru berdiri); kemudian menjadi “polis” (kota); selanjutnya berkembang menjadi “metropolis” (kota besar; metro = induk); tumbuh menjadi “megapolis” (megalo = besar; kota yang sudah menunjukkan keruntuhan); “tyrannopolis” (tyran = penguasa kejam; penguasa kota menguasai pedalaman dengan perusahaan-perusahaan raksasa); kemudian, “nekropolis” (nekro = mayat; kota runtuh).

Memang, untuk sampai ke kota yang “nekropolis” dalam pengertian hilang, runtuh, dan hancur sesungguhnya kecil kemungkinan terjadi, dan kalau toh terjadi membutuhkan waktu yang relatif lama, namun “runtuh” atau “hilang” dimaksudkan

penulis yakni kota yang tidak lebih sekadar dari kumpulan desa-desa yang tidak tertata, tidak menarik, acak-acakan, dan kering kerontang.

Menarik apa yang pernah diungkapkan Mahbub Ul Haq 1995 lalu dalam “*The Poverty Curtain*” atau “Tirai Kemiskinan” sebagaimana dinukil kembali Badrul Munir (2002) mengenai sejumlah “dosa” para perencana pembangunan—juga perencana kota. Beliau mengungkapkan adanya “tujuh dosa” para perencana pembangunan. Dosa pertama yaitu “**permainan angka.**” Mereka pemuja angka. Diam-diam mereka menganggap apa yang dapat diukur bermakna, apa yang tidak dapat diukur boleh diabaikan. Akibatnya, terlalu banyak menciptakan model-model ekonometri dan sedikit merumuskan kebijaksanaan ekonomi. Dosa kedua yakni **pengendalian yang berlebihan.** Mereka cinta pengendalian langsung atas ekonomi. Cepat sekali dianggap bahwa merencanakan akan pembangunan itu berarti mendorong sektor pemerintah dan menjalankan pengendalian birokrasi guna mengatur kegiatan ekonomi, terutama di sektor swasta.

Dosa ketiga adalah **penanaman modal khayal.** Mereka asyik menghitung tingkat penanaman modal. Tak jadi soal apakah tingkat penanaman modal produktif atau tidak, bagaimana kaitan dengan investasi pembangunan sumber daya manusia. Ini sebagai gambaran dunia nyata, bahwa kita telah melihat investor khayal. Dosa keempat yakni **mode-mode yang berlebihan.** Mereka kecanduan mode pembangunan. Hal ini terjadi karena ada perasaan ketakutan tidak akan mendapat bantuan. Jika mereka tidak ikut patuh dengan jalan pikiran yang sedang jadi mode di kalangan negara pemberi bantuan.

Dosa kelima adalah **perencana dan pelaksana dipisahkan.** Mereka memisahkan antara perencana dan pelaksana. Sebuah rencana yang baik biasanya disertai dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakannya. Dosa keenam yaitu **sumber daya manusia diabaikan.** Mereka cenderung mengabaikan sumber daya manusia. Walaupun banyak sanggahan, tetapi umumnya di sebagian besar negara sedang berkembang, sedikit sekali modal yang ditanam untuk mengembangkan sumber daya manusia.

Dan dosa terakhir yakni **pertumbuhan tanpa keadilan.** Mereka terpaku oleh laju pertumbuhan GNP yang tinggi dan mengabaikan tujuan pemerataan.

Lanjut Badrul Munir, di Indonesia kondisinya tidak lebih baik dengan apa yang disimpulkan Mahbub Ul Haq (baca : penelitiannya pada beberapa negara berkembang !). Bahkan menurut Rachbini (2000), Indonesia jauh lebih para karena birokrasi sebagai tulang punggung perencana pembangunan dihinggapi lima penyakit. (1) “*Empire Builder*”. Para birokrat di tingkat pusat dan di daerah berperan sebagai raja dan tuan feodal yang terus memperbesar kekuasaan dan birokrasi di bawahnya tanpa memperhitungkan efisiensi; (2) “*Cost Maximizers*”, yang terlihat dari borosnya biaya pembangunan, mark-up, dan berbagai perilaku tidak efisien; (3) “*Free riders*”, yaitu birokrasi yang besar tetapi produktivitasnya rendah, tidak menghasilkan output yang nyata; (4) “*Involutive*”, penurunan kualitas yang terus-menerus dan semakin berperan mengganggu sistem pelayanan publik; dan (5) sistem yang sakit tersebut kemudian menciptakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Inilah inti dari persoalan yang digugat dalam reformasi.

Terlepas dengan “dosa-dosa” para perencana dan perilaku para birokrat sebagaimana dikemukakan di atas, memang dalam pembangunan terdapat setumpuk

penghambat dalam perencanaan, termasuk perencanaan kota. Slamet Riyadi (Sapari Imam Asy'ari, 1993) menunjukkan adanya beberapa hambatan dalam hal perencanaan kota. Hambatan pertama yakni belum jelasnya titik tolak mana akan dimulainya perencanaan kota itu. Karena ada yang berpendapat, tata perencanaan kota harus mendapatkan persejutuan semua pihak, baik unsur politik (legislatif) dan eksekutif, tetapi ada juga di pihak lain yang lebih mengutamakan kepada tujuan planologi saja.

Hambatan kedua yakni adanya perbedaan persepsi dan interpretasi tentang istilah “*city planning*”, karena ada istilah lain yang digunakan seperti “*out line plann*”, “*master plann*”, dan “*detail plann*.” Hambatan ketiga ialah kurangnya tenaga ahli/profesional dalam segi “*city planning*” pada khususnya, dan perencanaan pembangunan pada umumnya.

Kemudian, hambatan lain yakni tidak adanya kesatuan pendapat tentang tata kota yang sinkron dari berbagai tenaga ahli, seperti dari unsur Perguruan Tinggi, Konsultan Swasta, Bappeda, atau Pemerintah Kota yang bersangkutan.

Agar kota tidak sekadar kumpulan desa-desa yang tidak tertata, acak-acakan dan tidak teratur, maka perlu melewati serangkaian tahap perencanaan tata kota. Slamet Riyadi mengemukakan empat tahap perencanaan tata kota. Tahap pertama yakni “*out line plann*”, meliputi perumusan tujuan dan sasaran, inventarisasi, penelitian maupun survey-survey yang kemudian dirumuskan dalam suatu kerangka garis besar sebagai suatu “*out line plann*”. Tahap kedua, meliputi perencanaan sesungguhnya yang lebih mendalam berdasarkan masing-masing sub sistem. Seperti sub sistem transportasi, termasuk bagaimana menghubungkan suatu zoning dan zoning berikutnya, membuang dan memasukkan arus angkutan antar kota tetangga dan sebagainya. Tahap ketiga, menyangkut perencanaan yang lebih mendetail terhadap segala sesuatu yang bersifat sarana fisik untuk menjabarkan fragmen-fragmen dari masing-masing sub sistem. Dan tahap keempat, adalah realisasi semua fase perencanaan yang sudah ditetapkan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan konstruksi/prasarana.

Keempat tahap inilah yang dikenal sebagai Rencana Induk Kota atau *Master Plann/City Planning*.

## **B. Risiko Perencanaan Kota Model “*Tambal Sulam*”**

“Perencanaan kota seolah berlomba dengan pertumbuhan yang lebih cepat, sehingga seolah-olah kota berkembang tanpa perencanaan” (Exline, 1982 *dalam* M. Zaini Hasan dan Salladin, 2007 : 257).” Demikian pula yang terjadi di Indonesia, perkembangan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Malang, Yogyakarta, dan sebagainya sistem perencanaannya tidak seimbang dengan pertumbuhan kotanya” (Salladien, 1988 *dalam* M. Zaini Hasan dan Salladin, 2007 : 257)

## **UTOPIA Vs DISTOPIA**

Salah satu pengaruh pemikiran filsafat dunia terhadap teori perencanaan yakni lahirnya aliran *utopianism*. Ada juga faham-faham lain, misal : *theocentrism*, *positivism*, *rationalism*, dan *phenomenology*.

Memang, dalam perencanaan kota dan wilayah itu akan dihubungkan dengan harapan dalam *utopia*. Secara harfiah *utopia* artinya hari esok akan lebih baik dari hari ini. *Utopia*, menurut Meyerson, suatu istilah yang dilancarkan oleh Sir Thomas More

(1516) yang berarti, “*negeri yang tidak ada*”, adalah suatu tinjauan yang membayangkan pola hidup masa depan yang diinginkan. Menurut Meyerson itu, kebanyakan penganut *utopia sosial* percaya bahwa manusia akan lebih bahagia, lebih produktif, lebih religius, atau lebih “baik” menurut kriteria moral, jika pranata dari masyarakat diubah. Kebanyakan penganut *utopia fisik* berpendapat bahwa manusia akan lebih sehat, lebih teratur, lebih puas (*satisfied*), lebih terdugah oleh keindahan, atau lebih baik dari biasa, jika lingkungan fisik diatur dan disesuaikan (Johana T. Jayadinata, 1999 : 276, dan Mulyono Sadyohutomo, 2008 : 33).

Menurut Faludi, dalam *utopianisme*, perencanaan dianggap sebagai pengendalian yang menyeluruh, yang berarti pengendalian pola pada masa yang akan datang, baik dalam pranata sosial penduduk, maupun dalam lingkungan fisiknya (Johana T. Jayadinata, 1999 : 276).

*Utopisme (utopionism)*, yaitu suatu paham yang memberikan gambaran tentang tata masyarakat dan tata politik yang sempurna, bagus dalam gambaran (angan-angan) tetapi sulit untuk dilakukan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988 : 1000). *Utopianism* adalah suatu pandangan yang memimpikan kehidupan akan datang yang diinginkan sesuai falsafah nilai-nilai kemanusiaan dan naturalisme (Mulyono Sadyohutomo, 2008 : 33).

Pengaruh pandangan *utopianisme* terhadap teori perencanaan adalah munculnya tradisi *city planning* yang diharapkan sebagai kontrol untuk menuju kehidupan ideal manusia. Diyakini bahwa perencanaan harus menjadi petunjuk transformasi masyarakat yang kacau (karena industrialisasi) ke masyarakat yang teratur (Mulyono Sadyohutomo, 2008 : 33).

Menang, para *Futuris Modern* menggunakan metode-metode baru yang ilmiah dalam perencanaan, misalnya : metode eksplorasi, metode *normative forecasting* (prakiraan normatif) dan teknik-teknik lain, yang dapat menghasilkan prakiraan global (*global prognostication*) yang lebih handal dan jitu.

Tekanan futuris yang sedikit banyak berupa masa depan yang *utopia*, berdasar. Tentu saja, pada keyakinan bahwa masih ada cukup waktu untuk memilih antara menciptakan dunia yang baik bagi kehidupan manusia dan dunia yang dibuat tidak bisa dipertahankan, karena kesediaan manusia untuk melakukan apa saja kecuali memberikan konsesi penting pada tuntutan waktu.

Para *futuris* yang paling yakin pada pandangan *utopia*, dua di antaranya adalah W.W. Wagar yang menulis *Building the City of Men* dan Gerald Feinberg—penulis buku *The Prometheus Project*. Wagar mengemukakan analisis yang meyakinkan tentang masalah dan dilema saat ini, walaupun dia tidak begitu meyakinkan skenario reformasi yang mempunyai kelemahan utama yaitu keyakinannya yang naive tentang kemampuan kita mengubah dengan cepat nilai-nilai yang diwarisi dari masa lalu yang tidak paralel dengan kelangsungan hidup manusia. Sedangkan Gerlad Feinberg, bukan saja mengemukakan pernyataan yang provokatif tentang tujuan-tujuan, tetapi juga menganjurkan bagaimana perkembangan teknik masa depan yang mungkin timbul, beserta implikasinya, dapat membantu kita menghadapi beberapa masalah kontemporer. Karenanya, perencanaan pembangunan harus : terintegrasi, komprehensif, menjangkau ke depan, berkualitas, dan manajemen yang terintegral.

Lawan dari *utopia* yakni *distopia*. Yang berarti : hari ini lebih buruk dari hari kemarin. *Distopia* terjadi, kemungkinan disebabkan kedangkalan perencanaan.

“Perencanaan yang paling buruk dan dangkal tidak lebih dari sekadar laporan tahunan untuk memperoleh dana” (C.E. Beeby, 1985 : 32). Contoh perencanaan yang dangkal yang akhirnya melahirkan *distopia* : *pertama*, bersifat jangka pendek, artinya : perencanaan untuk tahun pertahun; *kedua*, fragmenter, artinya bagian-bagian direncanakan secara terpisah-pisah; *ketiga*, tidak integral; dan *keempat*, tidak dinamik, artinya perencanaan menggunakan model-model yang kaku dan statik.

## **PERENCANAAN**

Perencanaan pada hakikatnya adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran (*objectives*) apa yang akan dicari, tindakan apa yang diambil dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran tersebut dan siapa yang akan melaksanakan tugas-tugas tersebut (Burhanuddin, 1994 : 167). Perencanaan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum out put*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selain itu perencanaan juga merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukannya dan oleh siapa dan siapa yang melakukannya (Bintoro Tjokroamidjojo, 1999 : 12). *Planning* dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Sondang P. Siagian, 1999 : 108).

Definisi perencanaan lain dikemukakan Louis A. Allen dalam Manullang (1983 : 51) yang terdiri atas : 1. Meramalkan (*forecasting*); 2. Menetapkan maksud-maksud tujuan (*establishing objectives*); 3. Mengacarakan (*programming*); 4. Menyusun tata waktu (*scheduling*); 5. Menyusun anggaran belanja (*budgeting*); 6. Memperembangkan prosedur (*developing procedure*); 7. Menetapkan dan menafsirkan kebijaksanaan (*establishing and interpreting policy*).

Jika suatu kota tidak direncanakan secara matang, bukan mustahil bahwa kota tersebut tidak lebih dari sekadar kumpulan desa-desa yang tidak tertata, tidak menarik, acak-acakan, amburadul, dan kering kerontang.

Sehubungan dengan perencanaan yang acak-acakan atau perencanaan model tambal sulam, menarik apa yang pernah diungkapkan Mahbub Ul Haq 1995 lalu dalam “*The Poverty Curtain*” atau “Tirai Kemiskinan” sebagaimana dikutip Badrul Munir (2002 : 20) mengenai sejumlah “dosa” para perencana pembangunan—juga perencana kota. Mahbub Ul Haq mengemukakan adanya “tujuh dosa” para perencana pembangunan. Dosa *pertama* yaitu “permainan angka.” Mereka pemuja angka. Diam-diam mereka menganggap apa yang dapat diukur bermakna, apa yang tidak dapat diukur boleh diabaikan. Akibatnya, terlalu banyak menciptakan model-model ekonometri dan sedikit merumuskan kebijaksanaan ekonomi. Dosa *kedua* yakni pengendalian yang berlebihan. Mereka cinta pengendalian langsung atas ekonomi. Cepat sekali dianggap bahwa merencanakan akan pembangunan itu berarti mendorong sektor pemerintah dan menjalankan pengendalian birokrasi guna mengatur kegiatan ekonomi, terutama di sektor swasta.

Dosa *ketiga* adalah penanaman modal khayal. Mereka asyik menghitung tingkat penanaman modal. Tak jadi soal apakah tingkat penanaman modal produktif atau tidak, bagaimana kaitan dengan investasi pembangunan sumber daya manusia. Ini sebagai gambaran dunia nyata, bahwa kita telah melihat investor khayal. Dosa *keempat* yakni mode-mode yang berlebihan. Mereka kecanduan mode pembangunan.

Hal ini terjadi karena ada perasaan ketakutan tidak akan mendapat bantuan. Jika mereka tidak ikut patuh dengan jalan pikiran yang sedang jadi mode di kalangan negara pemberi bantuan.

Kemudian, dosa *kelima* adalah perencana dan pelaksana dipisahkan. Mereka memisahkan antara perencana dan pelaksana. Sebuah rencana yang baik biasanya disertai dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakannya. Dosa *keenam* yaitu sumber daya manusia diabaikan. Mereka cenderung mengabaikan sumber daya manusia. Walaupun banyak sanggahan, tetapi umumnya di sebagian besar negara sedang berkembang, sedikit sekali modal yang ditanam untuk mengembangkan sumber daya manusia.

Dan dosa *terakhir* yakni pertumbuhan tanpa keadilan. Mereka terpaku oleh laju pertumbuhan GNP yang tinggi dan mengabaikan tujuan pemerataan.

Lanjut Badrul Munir, di Indonesia kondisinya tidak lebih baik dengan apa yang disimpulkan Mahbub Ul Haq. Malah menurut Rachbini (2000, dalam Badrul Munir, 2002 : 20), Indonesia jauh lebih parah karena birokrasi sebagai tulang punggung perencana pembangunan dihinggapi lima penyakit. (1) “*Empire Builder*”. Para birokrat di tingkat pusat dan di daerah berperan sebagai raja dan tuan feodal yang terus memperbesar kekuasaan dan birokrasi di bawahnya tanpa memperhitungkan efisiensi; (2) “*Cost Maximizers*”, yang terlihat dari borosnya biaya pembangunan, mark-up, dan berbagai perilaku tidak efisien; (3) “*Free riders*”, yaitu birokrasi yang besar tetapi produktivitasnya rendah, tidak menghasilkan output yang nyata; (4) “*Involutive*”, penurunan kualitas yang terus-menerus dan semakin berperan mengganggu sistem pelayanan publik; dan (5) sistem yang sakit tersebut kemudian menciptakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Inilah inti dari persoalan yang digugat dalam reformasi.

Dengan tidak mengindahkan “dosa-dosa” para perencana dan perilaku para birokrat sebagaimana dikemukakan di atas, memang dalam pembangunan terdapat setumpuk penghambat dalam perencanaan, termasuk perencanaan kota. Slamet Riyadi (Sapari Imam Asy’ari, 1993) menunjukkan adanya beberapa hambatan dalam hal perencanaan kota. Hambatan *pertama* yakni belum jelasnya titik tolak mana akan dimulainya perencanaan kota itu. Karena ada yang berpendapat, tata perencanaan kota harus mendapatkan persejutuan semua pihak, baik unsur politik (legislatif) dan eksekutif, tetapi ada juga di pihak lain yang lebih mengutamakan kepada tujuan planologi saja.

Hambatan *kedua* yakni adanya perbedaan persepsi dan interpretasi tentang istilah “*city planning*”, karena ada istilah lain yang digunakan seperti “*out line plann*”, “*master plann*”, dan “*detail plann*.” Hambatan *ketiga* ialah kurangnya tenaga ahli/profesional dalam segi “*city planning*” pada khususnya, dan perencanaan pembangunan pada umumnya.

Hambatan *keempat* yakni tidak adanya kesatuan pendapat tentang tata kota yang sinkron dari berbagai tenaga ahli, seperti dari unsur Perguruan Tinggi, Konsultan Swasta, Bappeda, atau Pemerintah Kota yang bersangkutan.

Supaya kota tidak sekadar kumpulan desa-desa yang tidak tertata, acak-acakan dan tidak teratur, maka perlu melewati serangkaian tahap perencanaan tata kota. Slamet Riyadi (Sapari Imam Asy’ari, 1993) mengemukakan empat tahap perencanaan tata kota. *Tahap pertama* yakni “*out line plann*”, meliputi perumusan tujuan dan sasaran, inventarisasi, penelitian maupun survey-survey yang kemudian dirumuskan dalam

suatu kerangka garis besar sebagai suatu “*out line plann*”. *Tahap kedua*, meliputi perencanaan sesungguhnya yang lebih mendalam berdasarkan masing-masing sub sistem. Seperti sub sistem transportasi, termasuk bagaimana menghubungkan suatu zoning dan zoning berikutnya, membuang dan memasukkan arus angkutan antar kota tetangga dan sebagainya. *Tahap ketiga*, menyangkut perencanaan yang lebih mendetail terhadap segala sesuatu yang bersifat sarana fisik untuk menjabarkan fragmen-fragmen dari masing-masing sub sistem. Dan *tahap keempat*, adalah realisasi semua fase perencanaan yang sudah ditetapkan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan konstruksi/prasarana. Dan keempat tahap inilah yang dikenal sebagai Rencana Induk Kota atau Master Plann/City Planning.

### **PENTINGNYA PERENCANAAN YANG MATANG**

Jika semangat membangun seperti ini konsisten dipertahankan apalagi ditingkatkan, bukan mustahil tiga tahun ke depan, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan walikota pertama, Kota Bima akan tumbuh menjadi kota yang berkembang tanpa terkendali. Risikonya, harus berhadapan dengan sejumlah persoalan baru sekaligus risiko sebagai sebuah kota. Misalnya, masalah transportasi dengan kemacetan lalu lintasnya, degradasi lingkungan, kriminalitas, kebisingan, polusi udara, lahan (tanah) dan pemukiman, lapangan kerja, urbanisasi, dan sejumlah ekkses lainnya.

Apabila sejumlah ekkses tersebut tidak ditangani secara serius, tidak menutup kemungkinan, dapat berpengaruh terhadap bergesernya perilaku masyarakat kota, dan yang maha penting yakni pengaruhnya terhadap menurunnya investasi, yang muara akhirnya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Olehnya itu, penataan kota perlu perencanaan yang matang, misalnya dengan sistem “*bottom up planning*” atau perlu perencanaan yang bersumber dari bawah. Artinya, bukan hanya ditentukan aktor pengelola kota saja. Eko Budihardjo (Suara Pembaruan, 1/3/1996), pernah mensinyalir, “Kota-kota di Indonesia pada umumnya berkembang secara “*laisser faire*”. Artinya, kota-kota tumbuh tanpa dilandasi perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu, taman dan ruang terbuka yang semula cukup tersedia, beralih menjadi bangunan, lingkungan pantai dan tambak udang yang selama berabad-abad menjalankan tugas secara prima sebagai penjaga gawang ekologis dengan serta-merta menjadi kawasan pemukiman perdagangan atau pertokoan.” Mudah-mudahan pengembangan Kota Bima yang begitu pesat bukan pengembangan kota yang “*premature sub-unization*” atau pengembangan kota yang terlalu dini (Philip M. Hauzer, dalam Ahmad Usman, Bima Ekspres, 26 Oktober 2004).

Seyogyanya, pembangunan Kota Bima yang pesat akhir-akhir ini, bukan berarti mengembangkan wilayah semaunya atau tanpa batas. Artinya, tidak semua tempat bisa diperuntukkan pembangunan fisik. Ada batas zona pengembangan ! Misalnya : **pertama**, pengembangan zona suaka alam, seperti pembuatan kebun burung/binatang (rencananya pada zona “Daeng La Kosa”), taman kota, fasilitas untuk pembibitan (zona Sambinae, dan Ncai Kapenta), dan pelestarian satwa yang dilindungi. **Kedua**, sumber daya air, yaitu mempertahankan kualitas air yang ada, terutama air minum untuk konsumsi warga kota dan sekitarnya untuk itu diperlukan ketahanan sungai terhadap polusi agar tidak tercemar; juga sumber air pertanian (kini Dam Rontu sedang dikeruk, di samping Dam tersebut dijadikan zona wisata pancing dan dayung, dan

kolam resapan air di Ncai Kapenta). *Ketiga*, wilayah pengembangan terbatas, seperti ketersediaan lahan kosong yang dipertahankan dan bebas pengembangan dan pembangunan baru (Ahmad Usman, BimaEkspres, 1 Mei 2004).

Demikian halnya, pemerintah Kota Bima perlu mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan. Secara ekologis terdapat tiga kaidah pokok yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan. *Pertama*, keharmonisan spasial; *kedua*, kapasitas asimilasi; *ketiga*, pemanfaatan berkelanjutan. Keharmonisan spasial (*spatial sustainability*) masyarakat bahwa dalam suatu wilayah pembangunan, seluruh arealnya tidak boleh dialokasikan hanya untuk zona pemanfaatan. Namun, ada sebagian yang disisakan untuk zona prevervasi (jalur hijau, baik pantai maupun sungai; dan hutan lindung), dan zona konservasi (hutan produksi dan kebun raya).

### **LOCAL GENIUS**

*Local genius* yakni kemampuan kota mempertahankan karakter dan identitasnya, bahkan memengaruhi daerah dan kota sekitarnya (Ayatrohaedi dalam Paulus Hariyono, 2007 : 89). Nah, *lokal genius* ini harus menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kota.

Demikian halnya, orientasi budaya bagi sebuah kota. Penting orientasi budaya, yaitu berguna untuk 1) memberikan identitas kota dan masyarakatnya; 2) menumbuhkan kebanggaan masyarakat akan kotanya; 3) menyatupadukan pola berpikir masyarakatnya, agar tidak berpikir menurut sudut pandang sendiri-sendiri (Paulus Hariyono, 2007 : 89)

### **PENTINGNYA BANK DATA**

Guna membuat perencanaan yang baik diperlukan data dan informasi yang akurat. Keberadaan data dan informasi dalam era pembangunan ini memegang peranan yang sangat strategis dan menentukan. Informasi yang akurat dan dapat dipercaya lazimnya bersumber dari data. Sebagaimana dikemukakan Sondang P. Siagian (1988 : 82), “Secara sederhana pedoman yang dapat digunakan untuk membedakan data dengan informasi ialah, apabila sesuatu angka-angka misalnya masih terbuka untuk diinterpretasikan dengan beraneka ragam oleh orang-orang yang menghadapinya, maka sesuatu itu masih berupa data.” Lanjut Sondang P. Siagian (1988 : 82), “Akan tetapi apabila sekelompok orang melihat sesuatu dengan interpretasi yang sama dapat dikatakan bahwa yang dihadapi itu adalah informasi.”

Ciri terakhir informasi yang diperlukan dalam usaha pemecahan masalah adalah bahwa informasi tersebut disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Informasi sangat erat hubungannya dengan pengambilan keputusan (*decision making*). Dalam hubungan dengan pengambilan keputusan ini, M.J. Riley dalam Idochi Anwar, Dkk. (1986 : 10) mengemukakan bahwa “Informasi berfungsi untuk menggambarkan (*describe*), menjelaskan/menerangkan (*to explain*), memperkirakan (*to predict*), mengevaluasi (*to evaluate*) dan mengadakan pembaharuan (*to innovate*).” Hal ini berarti, bahwa pengumpulan dan pengolahan informasi tidak selalu harus dilakukan sendiri oleh mereka yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalah melainkan dapat menyerahkannya kepada sekelompok tenaga ahli atau tenaga yang berkompeten dalam organisasi yang biasa dikenal dengan istilah *information specialists*. Bagi mereka yang harus memecahkan masalah, tidak



penting metode dan teknik apa yang digunakan oleh para ahli untuk mengumpulkan dan mengolah informasi, yang penting bagi mereka yakni bahwa informasi yang diterimanya dapat membantu dalam mengambil berbagai langkah dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi.

Pemecahan masalah secara efektif dapat dilakukan dengan penggabungan yang tepat antara pendekatan ilmiah dengan daya pikir yang kreatif dan inovatif, disertai intuisi dan keterlibatan emosional. Cara demikian menuntut serangkaian informasi yang memenuhi paling sedikit lima persyaratan yaitu : *pertama*, mutakhir; *kedua*, lengkap; *ketiga*, dapat dipercaya; *keempat*, bersumber dari data yang terolah dengan baik; dan *kelima*, disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami.

Data yang benar-benar akurat, terpercaya, teratur, berkesinambungan, tepat waktu, dan mutakhir sangat diperlukan dalam pengolahan program dan proyek serta kegiatan yang dilakukan. Untuk dapat merencanakan dan memantau serta mengevaluasi program dengan baik sangat diperlukan tersedianya seperangkat data dan informasi yang baik pula.

Pentingnya pengumpulan dan pengolahan data yang profesional dimaksudkan untuk melahirkan pengambilan keputusan yang akurat dan tepat sasaran. Menurut Sondang P. Siagian (1988 : 26), pengambilan keputusan model seperti itu, hanya akan berlangsung dengan efektif dan efisien, apabila empat kriteria berikut dapat dipenuhi : tersedianya waktu dan dana yang memadai untuk pengumpulan dan analisis data; tersedia data yang bersifat kuantitatif; kondisi lingkungan yang relatif stabil, yang di dalamnya tidak terdapat tekanan kuat untuk secara cepat melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu terhadap kondisi yang selalu berubah; dan tersedianya tenaga terampil untuk merumuskan permasalahan secara tepat, termasuk tuntutan operasional yang harus dipenuhi (Sondang P. Siagian, 1988 : 26)

## **D A T A**

Istilah data adalah suatu istilah majemuk. Yang berarti fakta, atau bagian dari fakta yang mengandung arti, yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, atau situasi dan lain-lain. Jelasnya data itu dapat berupa apa saja dan dapat ditemui di mana saja. Kegunaan daripada data itu ialah sebagai bahan dasar yang obyektif (relatif) di dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan keputusan oleh pimpinan organisasi (John J. Longkutoy *dalam* Safruddin HS., 1997 : 3).

Data adalah simbol-simbol bahasa, matematis atau simbol-simbol lain yang disepakati secara umum untuk menyatakan manusia, obyek, peristiwa dan konsep-konsep. Dengan demikian, data itu dapat muncul dalam bentuk pernyataan (*statements*) fakta atau gambar (M.J. Riley *dalam* Idochi Anwar, Dkk., 1986 : 9). Data adalah suatu catatan mentah atau *raw fact* tentang suatu keadaan atau gambaran atau suatu keadaan yang dikumpulkan pada suatu keadaan tertentu dalam suatu organisasi.”

Data belum dapat memberikan informasi secara lengkap apabila belum diolah sedemikian rupa sesuai penggunaan dalam manajemen. Data sebagai bahan baku informasi didefinisikan sebagai kelompok teratur, simbol-simbol yang mewakili kualitas, tindakan benda dan sebagainya (Davis, 1995 : 71).

Data itu merupakan fakta yang masih mentah (“*raw facts*”) yang berdiri sendiri (Burch dan Strater *dalam* Idochi Anwar, 1986 : 9).

Data adalah fakta dan angka yang sedang tidak digunakan pada proses pengambilan keputusan dan biasanya berbentuk catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan. Data merupakan bahan dasar pengerjaan dan baru memperoleh makna dalam kadar tertentu (Murdick *dalam* Safrudin HS., 1997 : 4).

Data pada dasarnya merupakan fakta yang belum terorganisasikan dengan baik; data yang ada belum memberikan makna jika tidak diproses lebih lanjut dan dikaitkan dengan suatu persoalan yang spesifik. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa data yang ada masih memerlukan proses lebih lanjut agar memberi makna.

Menurut Winardi (1987 : 51), “Dilihat dari penerimaannya atau pengguna data, menganggap data tersebut sebagai informasi, tapi pimpinan lain menganggap tidak mengandung arti apa-apa, bergantung dari pengetahuan, pengalaman dan penghayatan dari penerima. Jadi sebelum data bermanfaat sebagai informasi, harus mengalami berbagai pengerjaan tahapan sebelum dilakukan penyebarluasan pada yang berkepentingan.”

Berkaitan dengan sumber data, menurut *dalam* Safruddin HS.(1997 : 3), bahwa “berdasarkan sumber dari mana data diperoleh, maka data dapat dibedakan menjadi data primer, data sekunder, dan data tertier.” *Data primer* adalah data atau fakta yang diperoleh dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti atau pengolah seperti data survei dan data observasi eksperimen. *Data sekunder* adalah data atau fakta yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang lain seperti catatan dan laporan rumah sakit, Puskesmas dan kantor statistik. Data sekunder dapat berasal dari lingkungan sendiri (*internal*) atau di luar lingkungan (*eksternal*). Sedangkan *data tertier* adalah data atau fakta yang diperoleh dari hasil kesimpulan para ahli, para penulis atau peneliti sebagai hasil dari pengolahan data primer dan atau data sekunder.

Agar data dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan, data harus diolah menjadi suatu informasi. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam mengolah data yaitu : pengorganisasian dan pengelompokkan data; data dari berbagai sumber dan dari berbagai jenis instrumen pengumpulan data dikelompokkan kembali menurut kategori jenis variabelnya masing-masing sesuai matriks variabel indikator; penyajian data, setelah dikelompokkan data, data berikutnya adalah menyajikan data tersebut dalam bentuk yang sesuai dengan karakteristik datanya untuk mempermudah menarik kesimpulan. Beberapa bentuk penyajian data yang dapat digunakan untuk memperoleh deskripsi data-data tersebut adalah : *pertama*, statistik deskriptif yaitu penyajian data untuk memperoleh deskripsi/kesimpulan deskriptif tentang suatu variabel/data secara biostatistik. *Kedua*, epidemiologi deskriptif yaitu penyajian data untuk menggambarkan deskripsi/kesimpulan deskripsi tentang masalah kesehatan pada masyarakat. *Ketiga*, demografi yaitu penyajian data untuk menggambarkan deskripsi/kesimpulan deskripsi tentang ukuran demografi.

### **HUBUNGAN DATA DENGAN INFORMASI**

Gordon B. Davis (1987 : 28) menjelaskan pengertian informasi sebagai berikut : “ Informasi adalah data yang diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.”

M..J. Riley *dalam* Idochi Anwar, Dkk. (1986 : 9) dikemukakan bahwa “Informasi adalah hasil pembentukan, pengorganisasian atau pengubahan data dimana dengan cara itu dapat meningkatkan pengetahuan penerimanya.”

Pengertian informasi sebagaimana yang tercantum dalam Konsep dan Prinsip Manajemen Rumah Sakit oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Medik (Depkes RI, 1990 : 3) dijelaskan bahwa “Informasi adalah data yang diproses kedalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima, mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat ini atau mendatang.”

Burch and Strater *dalam* Idochi Anwar, Dkk. (1986 : 10) dikemukakan “Informasi adalah data yang telah diproses untuk menemukan hubungan di antara data tersebut.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa informasi itu pada dasarnya diproduksi oleh adanya data. Data merupakan *raw material* (bahan mentah) bagi usaha memproduksi informasi. Suatu kegiatan analisis yang akhirnya melahirkan suatu informasi tidak dapat dilaksanakan jika tidak ditunjang oleh data.

Pada dasarnya sumber data dapat diklasifikasikan atas sumber data eksternal atau sumber data yang berasal dari luar instansi/lembaga tersebut dan sumber data internal atau sumber data yang berasal dari dalam instansi/lembaga tersebut.

Khususnya mengenai kegiatan mendisain sistem informasi, maka M.J. Riley *dalam* Idochi Anwar, Dkk., mengemukakan beberapa kriteria mengenai informasi. Kriteria-kriteria dimaksud sebagai berikut : “(1) Akurasi (*accuracy*) berarti bahwa informasi hendaknya bebas dari kekeliruan-kekeliruan komputasi dan transkripsi; (2) Komprehensif (*comprehensiveness*) berarti dapat merupakan sesuatu yang dianggap lengkap untuk suatu kepetingan atau kegiatan tertentu; (3) Kesesuaian (*appropriateness*), berarti bahwa informasi hendaklah selektif dalam arti hendaklah relevan terhadap tujuan-tujuan pengambilan keputusan, perencanaan dan pengawasan; (4) ketepatan waktu (*timelines*) dimaksudkan bahwa informasi itu hendaklah tersedia jika dibutuhkan; (5) Kejelasan (*clarity*) berarti informasi itu bebas dari keraguan; (6) Fleksibel (*flexibility*) mempunyai daya adaptasi terhadap kebutuhan yang berbeda; (7) Verifiabilitas (*Verifiability*) berarti bahwa informasi itu dapat dibuktikan kebenarannya; (8) Bebas dari bias (*freedom from bias*); (9) Mudah untuk dicapai/diperoleh (*accessibility*); (10) mempunyai bentuk (*form*); (11) Skop/ruang lingkup (*scope*); (12) Keaslian (*origin*); dan (13) Keefektifan biaya (*cost effectiveness*).” (M.J. Riley *dalam* Idochi Anwar, Dkk., 1986 : 21).

Data memerlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum menjadi informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan. Informasi bervariasi dalam mutunya karena adanya bias atau kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh : metode pengukuran dan pengumpulan data yang salah; tidak mengikuti prosedur pengolahan data; data hilang atau terolah; kesalahan mencatat atau mengoreksi data; *file historis* atau induk yang salah (keliru memilih *file historis*); kesalahan dalam prosedur pengolahan; dan kesalahan yang disengaja.

Kesulitan menghadapi kesalahan menurut Davis (1992 : 79) dapat diatasi dengan cara : Pengendalian *intern* untuk mengetahui kesalahan; 2. Audit *intern* dan *ekstern*. 3. Menambahkan batas kepercayaan data; dan 4. Instruksi pemakai dalam prosedur pengukuran dan pengolahan data agar pemakai dapat menilai kesalahan yang mungkin terjadi.”

Lanjut Davis (1992 : 23), bahwa “Ciri-ciri informasi yang baik harus relevan, akurat, tepat waktu, lengkap, padat dan singkat. Relevan berarti sesuai dengan keperluan, akurat berarti tepat atau tidak menyimpang dari apa yang sebenarnya terjadi, tepat waktu berarti informasi ada pada saat diperlukan dan lengkap berarti berbagai jenis informasi yang diperlukan ada.”

Dalam beberapa pengertian menurut teori komunikasi data, setelah ditransformasikan menjadi informasi dalam bentuk kode angka dan simbol-simbol.

Sedangkan informasi pragmatis adalah informasi untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Kemudian, beberapa bentuk atau klasifikasi tentang informasi antara lain : (1) Informasi untuk manajemen adalah informasi yang ditujukan untuk memperlancar proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, proses operasional dijalankan dan memfungsikan organisasi dari pimpinan ke tingkat di bawahnya. (2) Informasi proses adalah informasi yang diperlukan oleh para pimpinan untuk melaksanakan fungsi mereka sehari-hari. (3) Informasi identifikasi adalah informasi untuk mengidentifikasi obyek-obyek yang menunjukkan berbagai obyek yang saling dihubungkan.

Winardi (1987 : 71) mengemukakan bahwa “Syarat informasi yang harus dipenuhi dijumpai syarat-syarat sehubungan dengan sifat, isi, bentuk, ketetapan, kecepatan, frekuensi dan kualitas.” Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan suatu organisasi.

### ***PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA***

Analisis sesuatu persoalan membutuhkan data yang lengkap, untuk itu perlu didahului dengan pengumpulan data dan pengolahan data.

Data yang diperlukan bukan hanya data kesehatan tetapi juga data pendukung dari sektor terkait. Data yang diperlukan dalam program penanggulangan kesehatan masyarakat, dapat dikelompokkan dalam :

- a. Data umum, yaitu mencakup data geografi dan demografi (penduduk, pendidikan, sosial budaya) serta data non-teknis lainnya. Data ini diperlukan untuk menetapkan target, sasaran dan strategi operasional lainnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat.
- b. Data program, yaitu meliputi data tentang penyakit masyarakat, pencapaian program (penemuan penderita, keberhasilan diagnosis, keberhasilan pengobatan), resistensi obat serta data tentang kinerja institusi lainnya. Data ini diperlukan untuk dapat menilai apa yang sedang terjadi, sampai di mana kemajuan program, masalah apa yang dihadapi dan rencana apa yang akan dilakukan.
- c. Data sumber daya, yaitu meliputi data tentang tenaga (*man*), dana (*money*), logistik (*material*), dan metodologi yang digunakan (*method*). Data ini diperlukan untuk menyusun program secara rasional, sesuai dengan kemampuan serta dapat mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat dimobilisasi.

Semua data tersebut sebaiknya dikumpulkan melalui sistem yang rutin, dengan memanfaatkan sistem pencatatan pelaporan serta sistem *surveilens* yang baku. Dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan penelitian. Data tersebut diolah dan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, serta bentuk lain yang sesuai sehingga mudah untuk membuat analisis.

Di samping untuk perencanaan, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal seperti advokasi, desiminasi informasi serta umpan balik.

### **ORGANISASI DATA**

Untuk keperluan analisis kota diperlukan organisasi data yang baik. Dalam hal ini dikenal ada dua macam organisasi data yang baku, yaitu (1) *formal geographical data matrix (formal g.d.m)* dan (2) *functional geographical data matrix (functional g.d.m)* (Hadi Sabari Yunus, 2005 : 250).

*Formal geographical data matrix (formal g.d.m)* merupakan bentuk organisasi data yang memuat data sosial, ekonomi, kultural dan fisik kota yang tercatat dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda-beda (Hadi Sabari Yunus, 2005 : 251).

*Functional geographical data matrix (functional g.d.m)* adalah bentuk organisasi data yang memuat data tentang aliran. Oleh karena data yang dimuat berkenaan dengan alirannya, maka data yang dimuat adalah data sosial, ekonomi maupun kultural saja (Hadi Sabari Yunus, 2005 : 252).

Misalnya, data pembangunan pertanian. Data yang dibutuhkan dapat digolongkan dalam tiga bentuk : (1) *Data sosial*, misalnya : (a) pola interaksi petani; (b) dinamika kelompok tani; (c) kebiasaan; (d) kelas penguasaan lahan; (e) hubungan patron-client dan lain-lain. Data ini mempengaruhi laju pembangunan dan efisiensi penggunaan faktor produksi. (2) *Data ekonomi*, misalnya : (a) rataan luas lahan; (b) jumlah anggota keluarga; (c) angka ketergantungan; (d) sarana transportasi; (e) pasar; (f) arus nilai tukar barang pertanian-pangan dan lain-lain; dan (3) *Data teknologi* yang menggambarkan kemampuan adopsi iptek seperti penerapan pola agribisnis.

Informasi dan data yang digunakan khususnya untuk tingkat mikro/lokal/kota, menyangkut : aspek kependudukan, sosial dan kebudayaan; aspek perekonomian; aspek fisik dasar; aspek tata guna tanah; aspek fasilitas pelayanan dan prasarana; dan aspek kemampuan keuangan serta pengelolaan pembangunan.

### **PERMASALAHAN KOTA YANG DIHADAPI**

Sejumlah tantangan global mengenai perkotaan yang dihadapi dewasa ini, sesuai dengan kajian Le Grange dan Rochford tentang “*Ranking of Science and Technology-Related Global Problems*” tahun 1996 (Eko Budihardjo, 2005 : 168-169) mencakup butir-butir sebagai berikut : (1) *Pengadaan Perumahan Masal* (rumah untuk semua, termasuk pembuatan perlindungan atau keamanan lingkungan, pelayanan sosial); (2) *Tata Guna Lahan yang Jelek* (erosi, reklamasi lahan, pemekaran dan pertumbuhan kota, lenyapnya habitat untuk satwa, penggundulan hutan, meluasnya tanah gersang/padang pasir, meningkatnya kandungan garam pada tanah dan air); (3) *Penggunaan dan Penyalahgunaan Teknologi* (ledakan informasi elektronik, penyimpangan penyebaran ilmu pengetahuan, jejaringan komunikasi berskala dunia, penciptaan lapangan kerja, indoktrinasi melalui televisi, pengaruh serbaneka informasi kontroversial lewat satelit); (4) *Pertumbuhan Penduduk* (imigrasi, penyempitan ruang kehidupan, perencanaan kota yang kurang antisipatif); (5) *Pasokan Air Bersih* (distribusi air minum, kontaminasi air tanah, pengolahan limbah cair, banjir dan kekeringan); (6) *Pencemaran Udara* (hujan asam, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global); dan (7) *Keterbatasan Energi* (sumberdaya energi yang menyusut, konservasi energi, bahan bakar fosil, panas matahari).

Karena itu, untuk Kota Bima yang baru berusia 7 tahun diharapkan bahwa setiap pembangunan kota diawali dengan studi yang mendalam, intensif, dan komprehensif termasuk perkiraan dampak yang akan terjadi (oleh cendekiawan dan ilmun), perencanaan menyeluruh terpadu dan integralistis (oleh para professional), pelaksanaan yang jujur dan taat asas (oleh pihak swasta), dan pengawasan yang ketat (oleh pemerintah dan legislatif), yang semuanya bermuara : untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan dan kemashlahatan masyarakat.

### **RENCANA INDUK KOTA**

Agar pengembangan dan pembangunan suatu kota dapat diarahkan dengan sebaik-baiknya, maka pemerintah kota dapat mempersiapkan tiga jenis rencana kota, yaitu : (1) Rencana Induk atau Rencana Umum Kota, (2) Rencana Peruntukkan Tanah, dan (3) Rencana Kota Terperinci.

Rencana Induk atau Rencana Umum Kota ialah suatu rencana yang pada dasarnya disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisa segala aspek dan faktor pengembangan dan pembangunan kota dalam suatu rangkaian yang bersifat komprehensif, berupa uraian-uraian dalam teks kebijaksanaan dan langkah-langkah yang bersifat mendasar, yang dilengkapi pula dengan data-data serta peta-peta penggunaan tanah.

Agar rencana semacam itu dapat lebih praktis serta efektif, maka dalam menganalisa berbagai faktor dimaksud agar lebih diadakan penekanan analisa secara khusus pada faktor-faktor perkembangannya kota yang benar-benar bersifat strategis dan dominan saja.

Faktor-faktor dimaksud dapat meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan pemukiman fisik, yang besarnya faktor tergantung daripada pola watak kota itu sendiri dan tipologi kota dalam daripada pola watak kota itu sendiri dan tipologi kota dalam hubungan ketergantungan dengan wilayah yang dilayani luas dan ruang lingkup wilayah yang dilayani inipun berbeda antara satu kota dan kota lain, tergantung dari berbagai lokasi sumber daya yang ada maupun yang akan dikembangkan, maupun tata jenjang kota-kota dalam wilayah nasional, regional, jenjang kota-kota di dalam wilayah nasional, regional, propinsi serta wilayah satuan pembangunan yang lebih kecil lagi, yang dapat meliputi satu, dua atau lebih wilayah kabupaten.

Dalam penyusunan Rencana Induk atau Rencana Umum Kota, pada prinsipnya terlebih dahulu harus dirumuskan kebijaksanaan yang mendasari perencanaan kota. Kebijaksanaan tersebut meliputi tiga aspek pokok, yakni aspek strategis, aspek teknis dan aspek pengelolaan (*city management*). Hal ini diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan pengembangan tata ruang kotanya.

Aspek strategis menyangkut kebijaksanaan dasar perencanaan kota seperti penentuan fungsi kota, pengembangan kegiatan kota dan pengembangan tata ruang kota merupakan penjabaran dan pengisian dari rencana-rencana pembangunan nasional dan daerah secara jangka panjang.

Aspek teknis menyangkut kebijaksanaan dasar perencanaan kota ditujukan untuk mengefisiensikan penggunaan tanah kota, memberikan fasilitas dan utilitas secara tepat, mengefisiensikan pola transport dan menjaga kelestarian dan meningkatkan

kualitas lingkungan pemukiman. Sementara aspek pengelolaan kota (*city management*) ialah bahwa kebijaksanaan dasar perencanaan harus mempertimbangkan aspek hukum dan perundangan agar rencana dapat dilaksanakan, aspek koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan serta aspek sumber pembiayaan rencana.

Rencana Induk atau Rencana Umum Kota harus memuat informasi dan data yang digunakan, analisa pengkajian potensi dan masalah, rumusan kebijaksanaan dasar perencanaan, penjabaran dan bentuk rencana struktur, dan rumusan pelaksanaan pembangunan.

### ***STRATEGIS KOTA BIMA***

Strategis-strategi yang telah ditetapkan tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk Tematik Pembangunan untuk membuat tahap-tahap yang jelas, sebagai berikut :

1. Tahun 2009 Kota Bima sebagai kota dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan kualitas pelayanan publik yang optimal.
2. Tahun 2010 Kota Bima dengan prioritas pembangunan ekonomi berbasiskan perekonomian lokal.
3. Tahun 2011 Kota Bima sebagai kota yang sehat dengan fasilitas pelayanan publik yang nyaman.
4. Tahun 2012 Kota Bima sebagai kota pendidikan dengan kehidupan yang agamis.

## BAB VI ANTARA “PEMBENCI” DAN “PECINTA” KOTA

“Dalam filsafat mengenai kota dibicarakan pula faham mereka yang disebut “*pembenci kota*” dan “*pecinta kota*”. Siapakah para pembenci kota itu?

(penulis) Para pembenci kota terdiri atas mereka yang putus asa dalam menghadapi berbagai kebobrokan kehidupan dalam kota. Kota mereka pandang sebagai sumber segala kekerasan, pemabukan, penyakit jiwa, kejahatan, frustrasi, perceraian dan sebagainya”  
(N. Daldjoeni, 1997 : 147).

”... kota merupakan momok, bahkan digambarkan dalam berbagai kitab suci bahwa kota merupakan wajah keburukan dan kejahatan” (Horton, 1992 *dalam* M. Zaini Hasan dan Salladin, 2007 : 256). Sebagian literatur kadang mencela kawasan perkotaan (*urban areas*) yang berlebihan, sebagai pusat kejahatan dan dosa, tipudaya dan kemunafikan, kekotoran politik, ketidakaturan dan kepalsuan, serta berbagai persoalan yang berpangkal kejenuhan kota dari sisi-sisi jeleknya (Glazer, 1980 *dalam* M. Zaini Hasan dan Salladin, 2007 : 256).

Sehubungan itu, arsitek Amerika Frank Lloyd melukiskan manusia kota sebagai ternak goblok atau kelompok semut yang berputar-putar bingung mencari lubangnya. Filsuf abad ke-19, Emerson pernah memperingatkan bahwa kota menjadikan manusia semakin cerewet dan keranjingan hiburan serta iseng. Dengan demikian terciptalah manusia yang munafik. Ada pula tokoh pembenci kota dalam sejarah yakni Jenghis Khan. Selama hidupnya ia selalu diancam oleh kota. Dalam rangka meluaskan kerajaannya, kota-kota di Asia banyak yang dihancurkannya dengan sewenang-wenang (N. Daldjoeni, 1997 : 146).

Terdapat selalu polarisasi antara dua faham dalam menilai kota dan merencanakan perkembangannya demi kelestarian dan kebahagiaan penduduknya. Menurut N. Daldjoeni (1997 : 146) ada golongan kolot yakni para *locals* yang lebih berpangkal pada emosi, pengamatan pribadi dan nostalgia. Mereka berpendapat bahwa yang ada tak usah dirubah, demi nilai sejarahnya. Para penganut nostalgis ini : di dalamnya terdapat kerinduan kepada suasana alam kedesaan atau kepada masa kecil.

Golongan kedua, para *cosmopolitans* yang menghendaki perubahan drastis, yakni supaya wajah kota dirubah sehingga lebih tampak corak modern dan internasional. Anjuran mereka : ini demi segarnya pemandangan, kesehatan dan kelancaran lalu lintas. Jalan-jalan raya perlu dilebarkan, rumah-rumah dipagar dan seterusnya.

Bagi *locals* ini berarti perlindungan terhadap yang ada. Bagi *cosmopolitans*, itu berarti pemugaran disertai pertimbangan penggunaan ruang secara efektif dan efisien.

Kenyataannya, pengawetan dengan melalui jalan manapun belum juga menghapus penyakit jasmani dan rohani kota. Krisis kota berjalan terus, didorong oleh faktor-faktor demografis, administratif, dan teknis. Arus penduduk dari pedesaan terus saja



masuk. Tata tertib dilanggar semena-mena; banyak proyek pembangunan kurang beres penanganannya.

Sebab itulah, maka pendapat bahwa untuk menyembuhkan penyakit kota diperlukan tiga faktor. *Pertama*, secara relatif arus penduduk yang masuk harus dihentikan. *Kedua*, kesadaran penduduk akan masalah-masalah kota perlu ditingkatkan melalui pelbagai sarana komunikasi. *Ketiga*, mengerjakamkan kemampuan berbagai ilmu dan teknologi yang mencakup riset, komputerisasi, sistem informasi, teori simulasi dan pengelolaan komunikasi (N. Daldjoeni, 1997 : 147).

Filsuf N. Drijarkara (N. Daldjoeni, 1997 : 170) : "... fondasi kota yang sebenarnya bukanlah batu dan batu bata itu, melainkan kodrat manusia itu sendiri. Selain kota dibangun oleh manusia, manusia juga dibangun oleh kota. Kota ikut membangun masyarakat kota; ia ikut menentukan eksistensi konkrit dari manusia."

Semoga !!!

## BAB VII KOTA SEBAGAI “JIWA” YANG HIDUP

“Geograf Berry menunjuk bahwa struktur kota itu terdiri atas tiga unsur yaitu *kerangka* (jaringan jalan), *daging* (kompleks perumahan penduduknya) dan *darah* (gerak-gerik manusia). Geograf lain ada yang menafsir daging dalam arti yang lebih luas, yakni lembaga-lembaga kemasyarakatan yang wadah fisiknya berupa pasar (ekonomi), kampus (pendidikan, rumah sakit, kesehatan), rumah ibadah (keagamaan), stadion (olahraga) dan seterusnya  
(N. Daldjoeni, 1997 : 24)

Dalam bidang perencanaan kota, kita mewarisi pula dari pendahulu kita kaidah panca faktor : *wisma* (perumahan), *karya* (lapangan kerja), *marga* (jalan/transportasi), *suka* (tempat rekreasi), *prasarana* atau penyempurna (infrastruktur) (Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, 1998 : 5)

Kota bukan semata-mata dipandang sebagai raga, tetapi jiwa yang hidup melalui ragam perilaku budaya warganya. Kota bukan sebatas persoalan penataan fisik semata-mata. Justru persoalan yang maha besar dan dahsyat, berkaitan dengan berbagai patologi atau penyakit-penyakit sosial, misal : pemukiman kumuh, urbanisasi, kemiskinan, sektor-sektor informal (pedagang kaki lima, misal), pengangguran, premanisme, prostitusi, ke-stres-an, dan sederet persoalan sosial lainnya. Karenanya, dalam menata kota, tidak boleh menganggap sepele persoalan sosial tersebut, dan tidak jarang persoalan sosial acapkali menjadi pengganggu akselerasi atau percepatan pembangunan.

Dalam literatur geografis dapat ditemukan berbagai definisi kota. Bintarto dari UGM dalam menyusunnya berdasarkan aneka definisi yang telah ada, menyebutkan bahwa kota itu suatu sistim jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi diwarnai oleh strata sosial- ekonomi yang heterogen dengan coraknya yang materialisasi.

Di samping itu ia juga menulis bahwa kota dapat diartikan sebagai benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan daerah belakangnya (hinterlan).

Kemudian disimpulkannya bahwa kota itu merupakan tempat bermukiman warga kota, tempat bekerja, tempat hidup dan tempat berekreasi. Sesuai itu maka selayaknyalah jika kelestarian kota harus didukung oleh berbagai prasarana dan sarana yang cukup untuk jangka waktu lama.

Jika diperkirakan dari udara, kota akan nampak berupa anglomerat bangunan yang dikelilingi atau di batasi oleh jalur-jalur jalan atau sungai-sungai yang disilingi oleh pepohonan besar-kecil. Dari foto udara tersebut, manusia dengan segala kegiatan tidak nampak

Tinjauan biologis seperti itu acap kali dipakai oleh para geograf dari aliran *human ecology*; disitu ditandaskan bahwa kota itu bukanlah sekedar yang berwujud materi (seperti gurun dari beton, aspal, besi dan kayu) tetapi mencakup pula manusia

penghuninya dengan segala kegiatannya sambil beradaptasi secara spatial dan ekologis.

Sosiologi kota Svend Riemer dari swedia juga melihat kota modern dengan cara mirip dengan di atas. Kota baginya terdiri atas tiga hal : konstuksi materi, relasi sosial dan transportasi. Dijelaskan bahwa tanpa yang pertama, kita tak akan memasalahkan bagaimana dan dimana sesuatu harus bangun. Tanpa yang kedua, konstruksi kota itu tak akan menarik bagi para sosiolog. Kota itu selain mewujudkan suatu konstuksi materi, juga suatu jaringan relasi antara para penghuninya. Interelasi secara personal inilah menurut ia sebagai sosiolog harus diproyekkan ke dimensi-dimensi geografis dari teritorium kota.

Konstruksi kota itu sekaligus terjalin dalam sistem transportasi di kota itu; ini berfungsi melayani kebutuhan penduduk kota dalam memenuhi aneka hal seperti bekerja, berbelanja dan berekrasi. Kelestarian kota antara lain bergantung pada transportasi intra urbanya. Apabila sistem ini macet, karena sesuatu, maka relasi sosial juga akan menderita kerugian; jika terhenti total karena bencana alam atau peperangan, dapatlah dibuktikan bahwa terjadi disorganisasi bahkan ancaman maut, karena pelayanan kesehatan dan pangan terhenti.

Akhirnya perlu diketahui pula definisi dari geograf Jerman Hofmeister (1969) yang meliputi aneka fungsi kota dikemukakan didepan yang berpendekatan biologis pula, sebagai berikut : kota itu adalah suatu pemusatan spatial dari tempat tinggal dan tempat kerja manusia yang kegiatan umumnya di sektor ekonomi sekunder dan tersier, dengan pembagian kerja ke dalam dan arus lalu lintas yang beraneka, antara bagian-bagiannya dan pusatnya, yang pertumbuhannya sebagian besar disebabkan oleh bertambahnya kaum pendatang yang mampu melayani kebutuhan-kebutuhan barang serta jasa bagi wilayah yang jauh letaknya (N. Daldjoeni, 1997 : 24-25).

Bagaimana bentuk wajah kota Bima di masa depan, bergantung kepada siapa yang paling dominan dalam merancang-bangunnya, karena begitu banyaknya aktor-aktor pembangunan yang terlibat. Namun demikian, dilandasi asumsi bahwa salah satu kelompok aktor tertentu akan lebih dominan ketimbang yang lain. Karenanya, terdapat beberapa kemungkinan bentuk wajah kota masa depan, termasuk Kota Bima yang sementara terus membenahi diri sekarang. Peter Hall yang dikutip Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto (Ahmad Usman, Bima Ekpres, 25 Maret 2004) mengestimasi modelnya sebagai berikut. **Pertama**, bila yang mendominasi adalah para rekayasawan dan teknolog, yang tercipta adalah "*technopolis*." Wujudnya bisa berupa kota yang sarat dengan bangunan jangkung, kota kompak satu dimensi, kota terapung, kota di dalam laut, kota di udara, kota yang bisa berjalan dan semacamnya. Melalui kecanggihan teknologi kehadiran kota yang berorientasi pada kecanggihan teknologi seperti itu bukan merupakan perkara yang mustahil. **Kedua**, manakala yang sangat berperan adalah kalangan pengusaha atau aktor swasta, yang muncul adalah "*profitopolis*." Wujudnya berupa kota yang sangat efektif dan efisien, biasanya dengan pola papan catur, dan potongan atau profil kota mirip piramid. Penataan kota seperti itu dilandasi perhitungan ekonomi atau analisis biaya manfaat (*cost-benefit analysis*) yang amat cermat, mengabaikan aspek sosial-budaya. **Ketiga**, bila penentu kebijakan atau pengelola perkotaan, dalam hal ini pimpinan pemerintah daerah : gubernur, bupati atau walikota, yang mendominasi pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pembangunan kota, yang tercipta adalah "*marxopolis*." Kota-kota akan tampak

seragam. Memang serba rapi, teratur, menyiratkan kedisiplinan, namun akan terlihat kaku, monoton, tidak ada keberagaman atau variasi. Persepsi atau aspirasi yang memberagam tidak diserap apalagi diwadahi. **Keempat**, kalau yang lebih berperan adalah dari kalangan ilmuan dan pakar ahli lingkungan, maka yang akan tercipta adalah “*ecopolis*.” Lingkungan binaan termasuk karya arsitekturnya akan menyatu, selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan alamnya. Konservasi energi dan pelestarian keseimbangan ekologis menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan kota. **Kelima**, yang mungkin dewasa ini masih akan dinilai utopis, adalah bila wajah kota ditentukan sendiri sepenuhnya oleh segenap warganya, sehingga tercipta apa yang disebut dengan “*humanopolis*.” Keterlibatan warga kota dalam pembangunan kota yang berwajah manusia tidak sekadar terbatas pada pemberian informasi, penyelenggaraan diskusi dan konsultasi, tetapi sudah sampai pada tahap “*citizen power*.” Rakyatlah yang lebih menentukan wajah kota masa depan.

Karenanya, penataan kota yang manusiawi, merupakan perpaduan antara *ecopolis*, *humanopolis*, dan *technopolis*. Konsekuensi lainnya, pembangunan kota perlu dimanajerial dengan arif. Manajemen perkotaan sendiri didefinisikan sebagai “upaya memobilisasi berbagai sumber daya, dan memanfaatkannya sehingga saling mendukung dalam perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan, pendanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan suatu pemukiman agar dapat mencapai tujuan pembangunan (kota) (Davidson dalam Sidabutar yang dikutip kembali Nana Rukmana DW. Dkk., 1993 : 14).

Mestinya, demikian Nana Rukmana DW. Dkk., (1993 : 14), pengelolaan pembangunan perkotaan mencakup paling tidak tiga jalur gagasan : (a) pengenalan pendekatan sistem dalam perencanaan kota (dikembangkan oleh McLoughlin dan Chadwik); (b) perubahan perspektif sosiologi perkotaan (dianjurkan oleh Pahl); dan (c) perkembangan teknik pengelolaan dari pimpinan daerah dan penentu kebijakan dalam menyediakan sarana-prasarana perkotaan (diungkapkan oleh Stewart dan Edison).  
Semoga !!!

**BAB VIII**  
**MENGARIFI PERKEMBANGAN KOTA**  
**YANG “HIPERAKTIF”**

“Suatu kota yang hanya sarat dijejali dengan beton, besi, baja, dan batu bata yang keras, tidak dilengkapi dengan ruang terbuka dari penghijauan yang mencerminkan kelembutan berarti sudah dekat dengan kematian.”

Bagaimana soal penghijauan atau lebih ekstrimnya “hutan” kota ?

(Eko Budihardjo, Harian Suara Pembaruan 1/3/1996)

Pada kesempatan lain, beliau menyarankan (Suara Merdeka 22/6/1996) “... agar kota-kota kita dihutankan.”

Disadari betul, perkembangan Kota Bima setahun terakhir ini di bawah komando H.M. Nur Latif begitu “hiperaktif”(!?) Sejumlah ruas jalan raya diperlebar dan diaspal (jalan yang amat parah dan belum dijamah Pak Wali yakni jalan menuju Jatiwangi-Wera !)—jika memungkinkan jalan yang telah diperlebar dibagi dua dan di tengahnya dibuat taman; taman-taman kota ditata (pertigaan Pasar Raba, zona kuburan Monggonao, zona taman Ama Hami mengesankan !) dan bertambah asri karena dihiasi lampu kelap-kelip warna warni; sejumlah tempat rekreasi sedang dipersiapkan, misalnya lokasi Ama Hami dan Daeng La Kosa. Khususnya tempat rekreasi, ada indikasi masyarakat sedang haus dan sangat membutuhkan tempat rekreasi yang representatif, sementara arena wisata sepanjang pantai belum tertata, dan masih terkesan dan memang kumuh. Kehidupan malampun, mulai tampak (zona Lapangan Serasuba dan Ama Hami). Ini dapat dimaklumi, karena itu salah satu identitas kota. Dan ini sekaligus tantangan dan peluang bagi pengelola kota. Komponen pengelola kota lazim dikenal dengan Panca-P. Penguasa--pemerintah (power) atau “public sector”; Penguasa (private sector); Pakar (professional/planner); People atau rakyat; dan yang tidak kalah pentingnya adalah Press atau media massa (cetak maupun elektronik). Bagaimana wajah kota ke depan, bergantung siapa yang dominan di antara aktor-aktor pengeloa kota (lihat kembali artikel penulis : “Tunjukkan Padaku Wajah Kotamu, Aku akan Bisa Menebak Tampang Walikotanya”).

Jika semangat membangun seperti ini konsisten dipertahankan apalagi ditingkatkan, bukan mustahil empat tahun ke depan, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan walikota pertama, Kota Bima akan tumbuh menjadi “booming city.” Konsekuensi, harus berhadapan dengan sejumlah persoalan baru sekaligus risiko sebagai sebuah kota. Misalnya, transportasi, kemacetan lalu lintas, degradasi lingkungan, kriminalitas, kebisingan, polusi udara, lahan (tanah) dan pemukiman, lapangan kerja, urbanisasi, dan sejumlah ekses lainnya.

Bila sejumlah ekses tersebut tidak ditangani secara serius, tidak menutup kemungkinan, dapat berpengaruh terhadap bergesernya perilaku masyarakat kota, dan yang maha penting yakni pengaruhnya terhadap menurunnya investasi, yang muara akhirnya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Olehnya itu, penataan kota perlu perencanaan yang matang, misalnya dengan sistem “bottom up planning” atau perlu perencanaan yang bersumber dari bawah. Artinya, bukan hanya ditentukan aktok pengelola kota “an sich”. Eko Budihardjo (Suara Pembaruan, 1/3/1996), pernah mensinyalir, “Kota-kota di Indonesia pada umumnya berkembang secara “laisser faire”. Artinya, kota-kota tumbuh tanpa dilandasi perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu, taman dan ruang terbuka yang semula cukup tersedia, beralih menjadi bangunan, lingkungan pantai dan tambak udang yang selama berabad-abad menjalankan tugas secara prima sebagai penjaga gawang ekologis dengan serta-merta menjadi kawasan pemukiman perdagangan atau pertokoan.” Mudah-mudahan pengembangan Kota Bima yang begitu pesat bukan pengembangan kota yang “premature sub-unization” atau pengembangan kota yang terlalu dini (Philip M. Hauzer, 1985).

Sekaitan dengan perencanaan di atas, ada dua proses perencanaan yang perlu dianut, yaitu : melalui Rakorbang, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat propinsi; (2) survei lapangan baru menyusun rencana. Perencanaan seperti ini, yang digembar-gemborkan sebagai proses perencanaan dari bawah yang implementasi proyeknya selalu menerapkan partisipasi rakyat (La Ode Ida, Harian Surya, 27/1/1994).

Seyogyanya, pembangunan Kota Bima yang pesat akhir-akhir ini, bukan berarti mengembangkan wilayah semaunya atau tanpa batas. Artinya, tidak semua tempat bisa diperuntukkan pembangunan fisik. Ada batas zona pengembangan ! Misalnya : pertama, pengembangan zona suaka alam, seperti pembuatan kebun burung/binatang (rencananya pada zona “Daeng La Kosa”), taman kota, fasilitas untuk pembibitan (zona Sambinae), dan pelestarian satwa yang dilindungi. Kedua, sumber daya air, yaitu mempertahankan kualitas air yang ada, terutama air minum untuk konsumsi warga kota dan sekitarnya untuk itu diperlukan ketahanan sungai terhadap polusi agar tidak tercemar; juga sumber air pertanian (kini Dam Rontu sedang dikeruk, di samping Dam tersebut dijadikan zona wisata pancing dan dayung). Ketiga, wilayah pengembangan terbatas, seperti ketersediaan lahan kosong yang dipertahankan dan bebas pengembangan dan pembangunan baru.

Demikian halnya, pemerintah Kota Bima perlu mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan. Secara ekologis terdapat tiga kaidah pokok yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan. *Pertama*, keharmonisan spasial; *kedua*, kapasitas asimilasi; ketiga, pemanfaatan berkelanjutan. Keharmonisan spasial (spatial sustainability) masyarakat bahwa dalam suatu wilayah pembangunan, seluruh arealnya tidak boleh dialokasikan hanya untuk zona pemanfaatan. Namun, ada sebagian yang disisakan untuk zona prevervasi (jalur hijau, baik pantai maupun sungai; dan hutan lindung), dan zona konservasi (hutan produksi dan kebun raya).

Bagaimana soal penghijauan atau lebih ekstrimnya “hutan” kota ? Menarik apa yang pernah dikemukakan Eko Budihardjo (Suara Pembaruan 1/3/1996), “suatu kota yang hanya sarat dijejali dengan beton, besi, baja, dan batu bata yang keras, tidak dilengkapi dengan ruang terbuka dari penghijauan yang mencerminkan kelembutan berarti sudah dekat dengan kematian.” Pada kesempatan lain, beliau menyarankan (Suara Merdeka 22/6/1996) “... agar kota-kota kita dihutankan.”

Kaitan dengan “tudingan” Eko Budihardjo di atas, mantan Walikota Makassar H.A. Malik B. Basry pernah memasyarakatkan program “paving block” dan sumur

resapan. Bahkan, betonisasi pada setapak-setapak, di sepanjang pantai, sepanjang trotoar-trotoar, jalan raya, halaman kantor dan rumah penduduk, taman-taman bunga, taman-taman kota, dan tempat-tempat lain yang terlanjur jadi mode era sebelumnya, digantinya dengan sistem “paving block”.

Kembali kaitan dengan perlunya penghijauan kota dilatari alasan bahwa hutan/hijauan kota bermanfaat : dapat memfilter atau menyaring asap dan debu kendaraan dan debu alam yang beterbangan, apalagi Kota Bima masih dominan kotoran kuda (penarik benhur); terjaminnya fungsi pengaturan iklim; dan nilai estetika yang menyangkut arsitektur, serta kebahagiaan manusia. Pada dimensi lain, hijauan/hutan kota berfungsi sebagai wahana rekreasi murah-meriah bagi masyarakatnya, yang ingin melepaskan lelah di siang hari sesudah bekerja, agar etos kerja dapat pulih kembali dan akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Hutan kota, sebenarnya dapat berupa : taman-taman, kebun-kebun, bahkan sekumpulan tanaman/pohon yang menghijau di sepanjang jalan (sekarang sedang ditanam), pinggir sungai atau sekeliling perkotaan, hotel, rumah sakit, pekarangan warga, lapangan olah raga, dan tempat-tempat pemukiman lain.

Dalam gerakan menghutankan kota misal, bukan mustahil bila menggunakan konsep hutan kota dengan orientasi tanaman hortikultural (sayur-sayur, buah-buahan, dan bunga-bunga—kini lagi trend), sehingga menjadi produktif, termasuk di setiap pekarangan rumah masyarakat.

Ke depan, sebagai pusat kota, Kota Bima merupakan tempat di mana terjadi inovasi (kebudayaan, teknologi, dan produksi); merupakan titik pusat perekonomian, bisnis, perdagangan, industri, pendidikan, dan hiburan; pusat informasi terkumpul dianalisa, dan dipertukarkan. Kota dengan segala karakteristiknya, investasi, budayanya merupakan suatu bagian yang integral dari pertumbuhan dan perubahan ekonomi.

Konsekuensinya, sebuah kota termasuk Kota Bima harus menyediakan lingkungan yang sejuk dan nyaman, menarik perhatian para wisatawan, pemilik modal, para manager, dan para pekerja. Demikian halnya, kesehatan masyarakat harus diperhatikan, transportasi memadai, bersih, aman, dan hiburan cukup.

Semoga !!!

## BAB IX ELITE LOKAL KOTA DAN OTONOMI DAERAH

"Ketika otonomi daerah pertama kali digelindingkan  
beberapa jeda lalu, ada semacam anekdot yang  
muncul ke permukaan :  
"akan lahir raja-raja kecil di daerah.""

Bagi penulis, bukan saja lahirnya raja-raja kecil '*an sich*', namun otonomi daerah (Otodas) bakal "membebani" rakyat dengan munculnya pusparagam pajak, pungutan, dan sejenisnya. Pada nuansa lain, ada indikasi, penguasa daerah bakal mengeksploitasi, bahkan akan menguras habis-habisan kekayaan alam, hutan misal, dengan dalih dan atas nama peningkatan pendapatan asli daerah, demi kesejahteraan rakyat (apa bukan kesejahteraan pejabat !). Dan juga, Otodas bakal menimbulkan riak-riak kecil, terutama "perebutan" wilayah yang semula "tak bertuan", misalnya wilayah perbatasan, dan hal terakhir ini sudah banyak terjadi.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu : (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah dinilai sangat bermanfaat bagi proses pembangunan dan kemasyarakatan, dengan menekankan pada prinsip-prinsip : *pertama*, membuka partisipasi politik tingkat lokal (*political equality*); *kedua*, kebijakan lebih berpihak pada komunitas lokal (*local accountability*); dan *ketiga*, akselerasi pembangunan sesuai dengan komunitas lokal (*local responsiveness*) (Ruland, 1992, dalam Hidayat, 2000)

Sebagaimana dimaklumi, kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategi bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Dalam artikel ini, penulis tidak bernafsu mengupas aneka persoalan Otodas tersebut. Karena, bukan kapasitas dan kompetensi penulis. Dengan tidak bermaksud mengamini 'hipotesis' awal di atas "akan lahirnya raja-raja kecil di daerah", tapi yang jelas dan pasti, Otodas membutuhkan partisipasi aktif elite-elite lokal. Elite lokal dimaksud yakni golongan penduduk desa/kelurahan yang mampu dan lebih berpengaruh. Elite lokal acapkali dilabeli : tokoh atau pemuka masyarakat, tokoh berpengaruh, tokoh strategis, tokoh penentu, atau dalam tulisan ini dipakai istilah elite-elite informal.

Kesuksesan pemerintah daerah mengejawantahkan Otodas, menurut penulis, sejauhmana top leader--aparatur daerah, melibatkan secara aktif elite informl dari



berbagai tipologi (elite agama, dusun, RT, RW, pemuda, wanita, cendekiawan, usahawan, adat, politik, jawara, dan lain-lain) yang bermukim di desa/kelurahan, sebagai mitra dan perpanjangan tangan di lapangan. Sebab, secara hakiki yang memiliki massa--rakyat adalah elite informal.

Elite-elite berpengaruh, baik elite formal seperti pejabat dan perangkat pemerintah maupun elite informal dari berbagai tipologi di lingkungan suatu masyarakat, urgensinya sangat vital dan esensial untuk dapat menyosialisasikan gerakan membangun di kalangan masyarakat, bahkan para elite tersebut merupakan pioner-pioner dalam modernisasi, lebih-lebih dengan karakteristik paternalistiknya yang hidup subur di lingkungan masyarakat, apatah lagi masyarakat desa. Yang oleh Emile Durkheim mengategorikannya sebagai masyarakat yang cenderung *mechanic solidarity* sebagai lawan dari masyarakat yang memiliki sifat *organic solidarity*. Observasi Cooley dalam Koentjaraningrat (1984) yang menunjukkan bahwa penduduk desa memang menunggu saja bimbingan—tak peduli dalam persoalan apa—rupanya menceminkan hubungan patrimonial antara yang memerintah dan yang diperintah di kebanyakan tempat di Indonesia. Dengan karakteristik paternalistik tersebut, keberadaan elite-elite berpengaruh sangat vital di lingkungan masyarakat.

Suatu kasus di Desa Tamalatea Kecamatan Galesong Utara Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa pimpinan formal akan banyak menemui kesulitan dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program apabila tidak disertakan para pemimpin (elite versi penulis) informal (papalele dan punggawa) (Karim, 1989). Bagaimanapun baiknya suatu gagasan dan rencana pengembangan, tidak akan berhasil bahkan mungkin akan menimbulkan ketegangan, jika mengabaikan peranan pemuka masyarakat (elite informal versi penulis) yang telah melembaga di pedesaan (Sumaatmadja, 1986).

Dalam mengkaji struktur kekuasaan elite sebagai faktor yang mempengaruhi posisi peran para elite dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu dapat diamati dua aspek atau substruktur kekuasaan elite (Nashir, 2000). *Pertama*, pada tingkat mikro kelompok elite sosial mana yang dianggap paling berkuasa atau pengaruh dalam struktur kekuasaan kelompok elite itu yang pada akhirnya mempengaruhi posisi dan peran elite dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. *Kedua*, pada tingkat makro, kekuasaan elite apa saja yang tengah berkuasa dalam kehidupan sistem politik yang juga dimungkinkan mempengaruhi posisi dan peran para elite dalam kehidupan masyarakat di mana elite itu berada.

Mengikuti pandangan Robert D. Putnam dalam Mas'ood dan Colin MacAndrews (1997), bahwa orang memiliki lebih banyak kekuasaan dibandingkan dengan yang lain, maka terdapat tiga kategori elite. *Pertama*, kekuasaan elite sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain termasuk anggota/massa. *Kedua*, kekuasaan elite sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan organisasi, dan *ketiga*, kekuasaan sebagai kemampuan untuk melakukan alokasi nilai-nilai secara otoritatif.

Kalau disoroti dari fungsi sosialnya, elite sebagai penentu berperan sebagai berikut (Hartomo dan Armicus Azis, 1990). a) Elite penentu dapat dilihat sebagai suatu lembaga kolektif yang merupakan pencerminan kehendak-kehendak masyarakat. Dalam hal ini elite penentuan bertindak sebagai lembaga yang berwenang sebagai pengambilan dan penentu, keputusan akhir, pendukung kekuatan moral bahkan dapat

menjadi prototype dari masyarakat. b) Sebagai lembaga politik, elite penentu mempunyai peranan memajukan kehidupan masyarakatnya dengan memberikan kerangka pemikiran konseptual sehingga massa dapat dengan tepat menanggapi permasalahan yang dihadapi. c) Elite penentu memiliki peranan moral dan solidaritas kemanusiaan baik dalam pengertian nasionalisme maupun pengertian universal. Hal ini penting sekali dalam rangka penghayatan tentang identitas dan tujuan hidup bersama, dengan pola pemikiran filosofis yang sama dan kerangka pendekatan yang sama pola. d) Elite penentu lainnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemuasan hedonik atau pemuasaan instrink lainnya bagi manusia khususnya terhadap reaksi-reaksi emosional. Peranan ini disebut dengan peranan ekspresif. Kelompok elite yang bertugas memenuhi kebutuhan ini bekerja dengan pertimbangan-pertimbangan nilai etis estetis.

Seraca riil peran elite informal dalam kegiatan pembangunan (Iberamsjah, 1988), yaitu : *pertama*, sebagai penganjur dan penasihat tentang program pembangunan yang akan diputuskan; *kedua*, sebagai perencana dan perumus keputusan yang akan dibuat; *ketiga*, sebagai tokoh yang mempunyai kemampuan memotivasi peserta rapat untuk sampai pada suatu keputusan; *keempat*, sebagai pendamai dan pencari jalan keluar apabila terjadi silang atau perbedaan pendapat di antara peserta rapat; *kelima*, sebagai penyusun, penghitung, dan pencari dana yang berhubungan dengan program yang akan diputuskan; *kelima*, sebagai tokoh yang mengamankan hasil keputusan yang telah diambil bersama.

Penelitian Wisynubroto (1993), bahwa apabila diperhatikan pembangunan prasarana desa, maka pada kedua desa penelitiannya diperoleh perbandingan angka yang sangat mencengangkan, 87,5 % merupakan kontribusi yang diberikan oleh masyarakat secara sukarela atas peranan yang diberikan oleh kepala dusun, sedangkan 12,5 % merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Peranan elite desa/kelurahan sangat dominan sebagai *identifer* atau dalam *resources mobilizer and organizer*, dan agitator. Elit desa/kelurahan ini mempunyai kaitan dengan lembaga pemerintahan desa/kelurahan atau yang di atasnya (Wilonoyudho, *Surya*, 28-4-1994). Peran patron (elite informal versi penulis) sebagai lapisan elite pedesaan cukup besar dan menonjol. Di sini patron memiliki *attribute of authority*, yang mengontrol, memberi sanksi, dan memecahkan permasalahan dalam komunitas (Rajab, *Suara Karya*, 15-9-1992).

Soetomo (1990) juga mengakui, masih tampak adanya dominasi elite dusun dalam proses pengambilan keputusan. Lanjutnya, meskipun ide-ide yang kemudian berproses menjadi keputusan bersama berasal dari tokoh-tokoh masyarakat tertentu (elite dusun) akan tetapi tidak semata-mata mencerminkan kepentingan individu dan kelompok elite dusun tersebut, melainkan mencerminkan kepentingan dusun pada umumnya.

Realitas senada dikemukakan pula Kana (Sumintarsih, dkk., 1991/1992), ada kecenderungan bahwa para tokoh masyarakat (pimpinan—elite informal) lebih menampakkan inisiatif untuk kegiatan-kegiatan yang berasal dari dalam desa sendiri atau yang potensinya terdapat di desa atau paling tidak menyalurkan pengaruhnya untuk kegiatan-kegiatan pamong desa, sedangkan para pamong lurah lebih bergiat dalam realisasi program-program instruktif dari atas.

Dalam retorika yang berbeda dan dengan membandingkannya dengan masyarakat kebanyakan, Wilonoyudho (*Surya*, 28-4-1994) mengemukakan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Tim Fisipol UGM terhadap beberapa desa di Kabupaten Sleman tersingkap, penduduk desa yang sangat responsif terhadap program pengabdian, ternyata sangat lemah untuk mengidentifikasi kebutuhan riil baginya, dan sebaliknya dengan elite desa. Ini mengisyaratkan bahwa elite informal adalah penentu terhadap program pembangunan yang akan dihasilkan di masyarakat.

Siswono (1991), keberhasilan pembangunan terletak pada ada tidaknya pimpinan masyarakat (elite informal versi penulis) dan motivator. Motivator dan penyuluhan yang tepat tentang pembangunan yang disampaikan oleh motivator telah mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Akan halnya, Ramos Ramon, mengakui bahwa salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam mengajak masyarakat berpartisipasi yaitu kepemimpinan masyarakat (elit informal versi penulis). Karena masyarakat sebetulnya tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin dirinya (Side, 2001).

Dominannya elite informal, sebab sebagai seorang *Opinion Leader*, elite informal mempunyai karakteristik (Depari, 1978), lebih tinggi pendidikan formalnya; lebih tinggi status sosial serta status ekonominya; lebih inovatif dalam menerima atau mengadopsi ide baru; lebih tinggi pengalaman medianya; kemampuan simpati mereka lebih besar; partisipasi sosial mereka lebih besar; dan lebih sesmopali.

Salah satu metode yang telah diintroduksi oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam masyarakat Islam pada zamannya adalah : pengambilan keputusan-keputusan bagi hal-hal yang belum ditentukan Wahyu Ilahi, didasarkan atas mufakat dan musyawarah, yang pelaksanaannya oleh masyarakat dipercayakan kepada kaum cerdik cendekiawan (*ahlul-hilli wal 'aqdi*) (elit informal dalam berbagai tipologi versi penulis). Jadi tanamkan pengertian : perwakilan yang cocok (representatif versi penulis), dengan cara pengambilan keputusan atas dasar mufakat dan musyawarah (Amidjaja, 1992).

Masyarakat kita pada umumnya masih terdapat orientasi nilai budaya yang vertikal. Artinya, manusia yang hidup dalam suatu kebudayaan serupa itu akan berpedoman kepada tokoh-tokoh pemimpin, orang-orang senior atau orang-orang atasan (Kontjaraningrat, 1987).

Kerepresentasian, memakai konsep Paul (1987) berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil-hasil pembangunan” (Hamid, Fajar, 3-10-2001).

Elite informal memainkan peranan yang dominan, baik yang bersifat manifes maupun peranan yang bersifat laten. Peranan elite informal (Nasution, menggunakan istilah agen perubahan) yang manifes dapat dilihat dalam tiga perspektif, yaitu sebagai penggerak, perantara, dan penyelesaian (*accomplisher*) (Nasution, 1990). Sebagai penggerak, peranan elite meliputi fungsi-fungsi fasilitator, penganalisis, dan pengembang kepemimpinan. Peranan sebagai perantara meliputi fungsi-fungsi : pemberi informasi, dan penghubung. Dan dalam peranannya sebagai pencapai hasil, elite informal berfungsi sebagai : pengorganisir, pengevaluasi, dan yang memantapkan hasil.

Sedangkan peranannya yang bersifat laten, misalnya, sebagai pemberi informasi, elite informal dapat berfungsi sebagai seseorang yang “*person oriented sharer*”, yaitu berusaha mencegah konsumerisme, menekankan kemanusiaan yang multi dimensional, menekankan konsumsi yang rasional serta pemerataan pembagian

pendapatan. Sebagai penghubung, elite informal mungkin bisa berfungsi sebagai “*modernizer*” atau pun sebagai “*syncretizer*”. *Modernizer* berusaha mencari nilai-nilai dari industrialisasi melalui cara yang membebaskan. Sedangkan *syncretizer* memadukan hal-hal yang lama dan baru melalui pembangunan yang bervariasi dan berpusat pada percaya terhadap diri sendiri.

Membaca realitas uraian di atas, *top leader*--aparatur daerah, dalam mengoperasionalkan Otda, tidak sekadar dilibatkan secara aktif, namun perlu optimalisasi, fungsionalisasi, dan bahkan merefungsionalisasi pranata-pranata sosial dan elite informal.

Semoga !!!

## BAB XII

### MEMBANGUN KOTA DENGAN MODAL “KEBUTUHAN/MOTIF BERPRESTASI”

“Ada beberapa falsafah pembangunan yang dianut oleh beberapa negara. Misalnya, McClelland menggunakan istilah “*n-Ach*” kependekan dari “*need for Achievement*”, bagi motif berprestasi. Ada : “*Semangat Ikan Bushido* (Jepang), *Anjing Bulldognya* (Inggeris), *Samuel Undong* (Korea Selatan), *Look East Policy* (Malaysia), dan *Adab Karsa* (Soewardi Indonesia).”

#### ***MOTIF BERPRESTASI***

Koentjaraningrat *dalam* Sri Mulyani Martaniah (1984 : 19), menilai motif berprestasi perlu untuk pembangunan. Menurut McClelland (1961 *dalam* Sri Mulyani Martaniah, 1984 : 19) untuk membuat sebuah pekerjaan berhasil, yang paling penting adalah sikap terhadap pekerjaan tersebut. Dari sini, McClelland tiba pada konsepnya yang terkenal yakni “*the Need for Achievement (n-Ach)*.” Kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi, yang kemudian menjadi sangat terkenal, yakni *n-Ach*. Orang dengan *n-Ach* yang tinggi, yaitu dorongan yang amat kuat untuk selalu berprestasi, serta melalui proses mengejar prestasi tadi ia akan mengalami kepuasan, dan pada gilirannya menjadi determinan utama keberhasilan pembangunan.

McClelland mengatakan bahwa negara yang berhasil membangun adalah negara yang masyarakatnya ada banyak orang yang memiliki *n-Ach* yang tinggi. Dengan kata lain, SDM yang harus dikembangkan adalah motivasi yang kuat untuk berprestasi. Kita hindari pendidikan kepada anak-anak yang ditempuh melalui jalur nonprestasi.

Hagen (Wahyu, 2005 : 127) sependapat dengan McClelland, yaitu kualitas SDM sebagai determinan keberhasilan pembangunan suatu negara. Hagen menunjuk SDM yang paling memegang peranan sentral dalam menentukan keberhasilan pembangunan, yakni : *pertama*, intelegensi dan energi; *kedua*, orientasi nilai; *ketiga*, kognisi; dan *keempat*, kebutuhan (*need*). Hagen berpendapat bahwa kualitas intelegensi dan energi, orientasi nilai, dan kognisi antara bangsa-bangsa di dunia, relatif sama. Yang membedakan kepribadian antara bangsa-bangsa adalah justru pada unsur kebutuhan (*needs*) ini. Keberhasilan pembangunan menuntut pribadi yang mempunyai kebutuhan manipulatif (kebutuhan untuk mengubah lingkungannya) yang tinggi, kebutuhan agresif (kebutuhan untuk bertindak agresif) rendah, dan kebutuhan pasif (kebutuhan untuk bersikap pasif) yang rendah. Hagen (Wahyu, 2005 : 127) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan menuntut SDM yang mempunyai kualitas : *pertama*, *need achievement*, kebutuhan untuk selalu berprestasi; *kedua*, *need autonomy*, kebutuhan untuk mandiri; *ketiga*, *need order*, kebutuhan untuk hidup dalam kehidupan yang serba teratur; dan *keempat*, *need understanding*, kebutuhan untuk selalu memahami peristiwa yang terjadi.

Menurut Heckhausen (Sri Mulyani Martaniah, 1984 : 19), penelitian mengenai motif berprestasi ini dimulai semenjak Narzis Ach pada tahun 1910, dan kemudian

diteruskan oleh Kurt Lewin pada tahun 1926. Ach menggunakan konsep "*determining tendency*" dan Lewin menggunakan konsep "*quasi need*" bagi motif tersebut. Tetapi yang berhasil menyebarluaskan konsep motif berprestasi dan mengembangkan metode pengukurannya adalah McClelland.

McClelland et.al (1953) dan McClelland (1967) menggunakan istilah "*n-Ach*" kependekan istilah "*need for Achievement*", bagi motif berprestasi. Need sering digunakan untuk motif. McClelland mendefinisikan motif berprestasi sebagai suatu usaha untuk mencapai sukses, yang bertujuan untuk berhasil dalam kompetisi dengan suatu ukuran keunggulan. Ukuran keunggulan ini dapat prestasi orang lain, akan tetapi juga dapat prestasinya sendiri sebelumnya. Orang yang mempunyai motif berprestasi yang tinggi, menurut pendapatnya, mempunyai sikap yang positif terhadap situasi berprestasi. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa deskripsi Weber tentang kepribadian yang dihasilkan oleh Reformasi Protestan sejajar dengan kepribadian yang mempunyai motif berprestasi yang tinggi (McClelland, 1967). Menurut Weber, Reformasi Protestan menghasilkan tipe kepribadian yang baru pada kaum buruh dan kaum pengusaha yang menunjukkan semangat yang lebih tinggi, yang akhirnya menghasilkan kapitalisme industri yang lebih modern (Sri Mulyani Martaniah, 1984 : 21).

Ada beberapa sifat tertentu yang khas terdapat pada individu-individu yang mempunyai motif berprestasi tinggi. *Pertama*, mempunyai aspirasi yang tingkatnya sedang, karena menurut beberapa penelitian ternyata bahwa individu yang mempunyai motif berprestasi tinggi, memiliki risiko yang sedang, sedangkan individu yang motif berprestasinya rendah, memilih tugas-tugas yang terlalu sukar atau terlalu mudah. *Kedua*, lebih memilih risiko yang sedang daripada risiko yang tinggi. *Ketiga*, berjuang untuk prestasi sosial, hal ini berdasarkan penemuan bahwa individu yang mempunyai fungsi yang lebih tinggi dalam masyarakat daripada orang tuanya, mempunyai motif berprestasi yang lebih tinggi daripada individu-individu yang kedudukannya lebih rendah (Sri Mulyani Martaniah, 1984 : 22).

Ada beberapa falsafah membangun yang dianut oleh beberapa negara. Misalnya, *Semangat Ikan Bushido* (Jepang), *Anjing Buldognya* (Inggris), *Samuel Undong* (Korea Selatan), *Look East Policy* (Malaysia), dan *Adab Karsa* (Soewardi Indonesia).

Berdasarkan falsafah "*Semangat Ikan Bushido*", Jepang membangun negara dengan menggunakan falsafah atau gaya hidup Ikan Bushido. Ikan ini bila bertelur, naik ke hulu. Ia harus melalui jeram-jeram yang kuat arusnya, tetapi mereka akan mencoba tanpa lelah. Satu, dua, tiga, empat, lima kali gagal, tapi ke enam kalinya mereka berhasil naik ke dalam jerami itu. Orang Jepang mengatakan : "keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, kemudian keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut badak, dan keluar dari mulut badak, masuk ke mulut ular, sehingga akhirnya ia dapat mengumpulkan kulit harimau, kulit buaya, kulit badak, dan kulit ular." Lumayankah ! Artinya, pembangunan di Jepang mengutamakan kerja keras, ulet, pantang menyerah untuk mencapai prestasi.

Demikian halnya dengan "Anjing Buldognya" orang Inggris. Sifat mereka disebut "*tenacious*". Yaitu mereka dididik menjadi manusia-manusia yang di dalamnya bekerjanya suka ngotot, kuat bertahan, atau pantang menyerah sebelum berhasil.

Negarawan Korea Selatan Park Chung Hee, melalui program "*Samuel Undong*"nya (Pembangunan Komunitas Baru) yaitu membentuk kualitas SDM Korea Selatan

dengan cara : Pertama, *diligence* yaitu sikap rajin bekerja, dapat menghargai penunaian kerja yang paling sederhana tetapi dengan sempurna; kedua, *thrifty*, yaitu sikap hemat, yang timbul sebagai konsekuensi sikap *diligence* tadi; ketiga, *self-help*, yaitu sikap mandiri; dan keempat, *cooperation*, yaitu cara untuk mencapai tujuan secara efektif dan rasional serta mempersatukan individu dan masyarakat.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Muhammad, menyadari etnik Melayu tak mungkin mengejar ketinggalannya, kecuali membangun SDMnya, mencanangkan kebijakan *Look East Policy*, berkiblat ke Timur ke Jepang, dan mengambil langkah-langkah bagaimana mereka dapat menginternalisasikan ethos kerja dan kualitas kepribadian dari bangsa Jepang.

Menurut Soewardi (2001) masyarakat kita sekarang ini dalam keadaan adab rendah-karsa lemah, maka kita harus pindah ke adab tinggi-karsa tinggi. Adab tinggi menunjukkan ketaatan masyarakat itu terhadap perintah-perintah Tuhan, sedangkan karsa tinggi, menunjukkan kekuatan psikologis yang tinggi.

### **“N-ACH”-NYA DAVID C. MCCLELLAND DAN PEMBANGUNAN KOTA**

Sebagai pusat segala aktivitas, suatu kota mesti dirancang menjadi komunitas yang dicirikan dengan kehidupan yang sejuk, nyaman, tertib, indah, tertata, rapi, asri, dan berpola hidup bersih. Tanpa karakter seperti itu, kota tidak ubah hanyalah sebuah kumpulan dusun yang jorok dan semrawut. Karenanya, perlu diciptakan budaya hidup sehat dan bersih, dan merupakan identitasnya. Rahardi Ramelan (1996) mengingatkan pentingnya mempertahankan identitas kota. Yaitu : fungsi kota sebagai pusat kegiatan, budaya versus kualitas lingkungan nilai-nilai tradisional versus modernisasi, pembangunan kota berkelanjutan dan berwawasan lingkungan arsitektur kota, keseimbangan kota-desa, ukuran luas kota (megaurban, konurbasi perkotaan), konservasi dan pertumbuhan kota, nilai estetik, pendekatan komprehensif, perencanaan ruang/spasial, pembangunan infrastruktur yang memadai, pembangunan kota yang terintegrasi, kualitas warga kota (*public private partnership*), dan peningkatan partisipasi, termasuk pihak swasta.

Pemerintah Kota Bima kini kian gencar membenahi diri. Berbagai strategi pembangunan yang berwujud program kini diejawantahkan. Salah satu program yang akan digelar dalam waktu dekat ini yakni lomba kelurahan tingkat Kota Bima. Berbagai hadiah disediakan untuk yang “terbaik” (juara 1 sampai dengan harapan 3), dan juga bagi yang “terbaik jelek”-nya, dengan nominal hadiah mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 2,5 juta . Lomba kebersihan, mestinya tidak sekadar terbatas pada lomba kelurahan. Seyogianya, lomba yang sama juga diberlakukan bagi dinas-dinas (lomba antar dinas), sekolah-sekolah (lomba antar sekolah), dan lembaga/wadah lainnya. Penulis pernah mengkalkulasi, akselerasi (percepatan) pembangunan (khususnya pada penataan lingkungan) melalui lomba-lomba, lebih efisien—hemat biaya, bila dibandingkan dengan pemerintah yang bangun, padahal hadiah yang disiapkan pemerintah “tidak seberapa”. Keuntungan lain, dengan lomba akan merangsang partisipasi masyarakat, di samping masyarakat merasa memiliki apa yang dibangunnya. Dengan demikian, pemerintah kota tidak perlu mengeluarkan iklan “ucapan terima” kasih kepada perusak kota, walau disadari “ucapan terima” yang dikeluarkan pemerintah kota itu adalah “sindiran”, mungkin ada aktor intelektual di

balik “hobi” merusak itu (hasil bincang-bincang tak formal bersama Walikota HM. Nur A. Latief, Senin, 6/12/2004).

Juga lomba merupakan ajang guna membangkitkan sugesti dan motivasi masyarakat. Kaitan dengan pentingnya motivasi ini, terdapat dua pendekatan yang melatari, mengapa seseorang harus diberi dorongan atau motivasi. Pendekatan yang dimaksud, mendasarkan diri pada serangkaian anggapan mengenai sifat manusia yang disebut *Teori X* dan *Teori Y* yang dikemukakan oleh Douglas MC. Gregor. Kondisi manusia berdasarkan asumsi *Teori X* yaitu : “pada umumnya manusia tidak senang bekerja; pada umumnya manusia tidak berambisi, tidak bertanggung jawab, dan lebih suka diarahkan; pada umumnya manusia harus diawasi dengan ketat dan sering harus dipaksa untuk memperoleh tujuan-tujuan organisasi; ...” Sementara berdasarkan asumsi *Teori Y* mengenai manusia, bahwa bekerja adalah kodrat manusia jika kondisi menyenangkan; pengawasan diri sendiri tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan organisasi; manusia dapat mengawasi diri sendiri memberi prestasi pada pekerjaan yang diberi motivasi dengan baik; ...”

Dengan demikian, hendaknya pimpinan (Camat, Lurah, LKMD, RW, RT, dll) dapat menerapkan *Teori X dan Teori Y* sehingga para masyarakatnya akan didorong untuk berkembang dan sekaligus dapat menggunakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan imajinasi mereka untuk membantu mencapai tujuan, misalnya untuk meraih juara dalam lomba.

Kembali pada lomba, apapun bentuknya, pada dasarnya hanyalah sarana, bukan tujuan (*goal*). Sebab, lomba itu juga tetap mengandung dua konsekuensi atau dalam wacana sosiologi khususnya *Teori Fungsionalisme Struktural* dikenal dengan istilah *fungsional*—keber-fungsi-an atau keber-arti-an dan *disfungsional*—ketidak-berfungsi-an atau ketidak-berarti-an.

Hubungannya dengan kefungsionalan dan kedisfungsionalan lomba tersebut, sebuah penelitian yang dilakukan Soetomo (1995) seolah mengingatkan, bahwa kompetisi desa (kelurahan, penulis) sebagai sarana menggerakkan partisipasi masyarakat menunjukkan, apabila kompetisi desa dapat menumbuhkan kompetensi masyarakat terhadap proses pembangunan, mereka dapat mempertahankan partisipasi masyarakat pada pasca evaluasi. Namun, sebaliknya apabila tidak dapat menumbuhkan kompetensi masyarakat, maka partisipasi hanya akan muncul pada saat kompetisi berlangsung, dan menjadi surut secara perlahan pada periode pasca evaluasi.

Saya sependapat dengan hasil penelitian Soetomo tersebut, betapa antusiasnya masyarakat berpartisipasi menjelang dan ketika lomba berlangsung, akan tetapi apa yang terjadi pasca lomba. Mestinya, dengan lomba akan melahirkan masyarakat yang berkebutuhan berpartisipasi.

Mengenai kekhawatiran Soetomo pasca lomba tersebut, beberapa saat lalu ketika diselenggarakan pertemuan antar kelurahan juara se Indonesia di Jakarta, penulis menyarankan kepada duta kelurahan teladan tersebut, agar menjaga kegiatan pasca lomba, dan salah satu program yang digolkan adalah disepakatinya pembuatan buletin (sekretariat di Jakarta), sebagai wadah penampung segala program kelurahan juara, khususnya pasca lomba, yang sekaligus dijadikan media “sharing”—tukar pengalaman, mengenai kegiatan pasca lomba.

Dengan demikian, kegiatan lomba tidak boleh dijadikan program temporer—tiba masa, tiba akal”, akan tetapi dijadikan ajang lomba yang dikalenderkan. Sebuah



pengalaman, yang pernah penulis ungkap pada sebuah gubahan artikel beberapa saat lalu, menarik dijadikan rujukan bagi pemerintah kota. Pengalaman penulis di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar (penulis sengaja tidak mengambil sampel Kelurahan Rabadompu, walaupun baru-baru ini mendapat predikat sebagai kelurahan teladan NTB, karena baru mendapat predikat juara kelurahan !) bahwa mayoritas masyarakat di kelurahan tersebut betul-betul mempunyai kebutuhan berprestasi yang tinggi. Hasil dari adanya mental berprestasi tersebut, di antaranya : *pertama*, tahun 1995 Kelurahan Kassi-Kassi dinobatkan sebagai kelurahan teladan I Tingkat Sulawesi Selatan; *kedua*, tahun 1996, juara I Lomba Asah Terampil Kelompencapir Tingkat Sulawesi Selatan; *ketiga*, kelurahan terbaik dalam penerapan Gerakan Disiplin Nasional (1996); *keempat*, RW terbaik I dalam rangka lomba RW tingkat Kota Makassar (1997); *kelima*, bahkan menjadi tempat studi banding bagi Parlemen Jepang di samping dari Jakarta dan Bali; *keenam*, untuk organisasi Karang Taruna dinobatkan sebagai Karang Taruna Teladan, baik Tingkat Kotamadya (kota Makassar sekarang) hingga tingkat propinsi. Dan beberapa prestasi lain, termasuk dijadikannya sebagai pilot proyek dalam pembangunan kelurahan di Sulawesi Selatan.

Secara hakiki, perlombaan desa/kelurahan misal, merupakan suatu metode dan gerakan pembangunan secara obyektif dan psikologis, mendorong, merangsang pertumbuhan, perkembangan, percepatan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat pada tatanan desa yang tertib, aman, dan dinamis (Direktorat Pemdes NTB, 1987/1988).

Salah satu hal yang sangat positif di antara sekian manfaat dari lomba desa (kelurahan, penulis) adalah lomba memiliki daya pacu yang kuat bagi tumbuhnya semangat dan peranserta masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Sehingga lomba desa bermanfaat merangsang masyarakat untuk lebih melibatkan diri dalam setiap kegiatan pembangunan desa (Mawarni, *Suara Pembaruan*, 8-3-1996).

Mengapa lomba ini dikait-kaitkan dengan partisipasi masyarakat ? Hal ini disebabkan, bahwa di antara sekian banyak unsur penilaian, maka unsur yang bobotnya cukup tinggi, lagi penting adalah partisipasi masyarakat, yang biasa berwujud dalam bentuk sumbangan dana, waktu, natural, pemikiran, dan tenaga.

Berprestasi merupakan sebuah impian-rasional dalam setiap kerja, atau kegiatan-kegiatan lomba. Dalam artikel ini, penulis hanya mengambil ilustrasi kegiatan lomba. Kegiatan lomba, lomba antar kelurahan, misal sebagaimana yang akan diselenggarakan pemerintah Kota Bima, pada hakikatnya merupakan medium pemicu animo gairah partisipasi masyarakat untuk membangun lingkungannya; dan yang tidak kalah vitalnya yakni tertaburnya benih-benih kebutuhan berprestasi masyarakat atau pinjam pendapat David C. McClelland, kebutuhan untuk berprestasi yang dilambangkan dengan '*n achievement*' atau disingkat *n-Ach* (*the need for Achievement*). Menurut Clelland '*n-achievement*' merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.

Dengan adanya kebutuhan berprestasi, masyarakat benar-benar tersugesti memberikan kontribusi yang maha dahsyat bagi pembangunan.

Prestasi atau prestige menurut Maslow merupakan kebutuhan. Kebutuhan akan penghargaan/prestise (*esteem needs*) merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, demikian menurut Maslow. Dalam *Motivation and Personality*-nya, Maslow membagi lima jenjang kebutuhan pokok manusia, yaitu : 1. Kebutuhan mempertahankan diri

(*physiological needs*); 2. Kebutuhan rasa aman (*safety needs*); 3. Kebutuhan sosial (*social needs*); 4. Kebutuhan akan penghargaan/prestise (*esteem needs*); dan 5. Kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja (*self actualization needs*).

Prestasi berkorelasi positif dengan gengsi (*prestige*). Kaitan dengan gengsi (*prestige*), hal ini pernah diselidiki oleh Vance Parkard dan David Reisman (Anonim, 1985). Parkard menulis mengenai pencari status dan motifnya, sementara Reisman membawa rahasia individu yang terarah pada orang lain yang merupakan bagian dari apa yang disebut "*the lonely crowd*". Gellerman melukiskan gengsi sebagai sekumpulan definisi yang tidak tertulis dari berbagai jenis perbuatan (*conduct*) yang diharapkan orang tampil di muka orang lain : yaitu sampai berapa tinggi ia dihargai atau tidak dihargai, secara formal atau tidak formal dengan tulus hati.

Kembali ke persoalan tumbuhnya partisipasi dari kegiatan lomba. Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibutuhkan beberapa motivasi dan rangsangan. Di samping untuk mengembangkan partisipasi, motivasi dan rangsangan tersebut juga diperlukan untuk mendorong masyarakat agar dapat mendaya-gunakan potensi yang ada di sekitarnya secara lebih optimal dan efektif (Soetomo, 1990). Koentjaraningrat (1987) juga menyebutkan rangsangan sebagai salah satu cara untuk membina mentalitet yang berjiwa pembangunan, di samping beberapa usaha lain yaitu memberi contoh yang baik, persuasi dan penerangan serta pembinaan dan pengasuhan generasi baru.

Suatu realitas dan hal ini merupakan sistem nilai sosial yang sering dijumpai dalam masyarakat bahwa warganya kurang mempunyai inisiatif, dan mengandalkan elite-elite yang ada dalam masyarakat baik elite formal maupun elite informal. Agar warga masyarakat mempunyai inisiatif, kreatif, dan inovatif, perlu diciptakan adanya tradisi persaingan (kompetisi)—melalui lomba-lomba.

Walaupun persaingan ini merupakan interaksi sosial yang *dissosiatif*—hubungan yang penuh pertentangan, akan tetapi secara sosiologis juga fungsional—mempunyai fungsi. Menurut Sosiolog Horton dan Hunt (Taneko, 1984), fungsi persaingan sebagai berikut : (1) persaingan boleh dianggap sebagai suatu alat pendistribusian yang tidak sempurna; (2) persaingan dapat membentuk sikap tertentu bagi yang melakukan persaingan, biasanya akan tidak membangun ketidak-kawanan dan sikap yang kurang baik di antara mereka; (3) persaingan dapat memberi stimulasi atau rangsangan kepada setiap orang untuk melakukan prestasi yang lebih baik.

Selain isu persaingan, dalam batas-batas tertentu mempunyai fungsi lain (Soekanto, 1999), yaitu : (1) dapat menyalurkan keinginan dari orang/kelompok; (2) sebagai suatu jalan dalam mana keinginan, kepentingan serta nilai yang menjadi pusat perhatian, tersalurkan dengan baik; (3) merupakan alat untuk mengadakan seleksi sosial, yaitu untuk mendudukan orang pada kedudukannya serta peranan dalam masyarakat yang sesuai dengan kemampuannya.

Berkiblat dari kefungsionalan persaingan atau kompetisi tersebut, maka perlu diciptakan budaya persaingan (kompetisi) dengan misi untuk memberi semangat kerja. Ciptakan masyarakat yang berkebutuhan berprestasi sebagaimana "pesan" David C. McClelland yang dilambangkan dengan '*n achievement*' atau disingkat *n-Ach* (*the need for Achievement*), melalui kegiatan lomba-lomba Bukankah ini *asset* bagi pemerintah kota dalam menerjemahkan otonomi daerah yang bersifat desentralistis ? Desentralisasi sendiri mengandung arti sebagai penyerahan urusan

pemerintahan kepada daerah sehingga wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, termasuk di dalamnya penentuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan dan aparatnya. Ranis (Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001) menyebut sistem seperti ini sebagai devolusi (*devolution*), yaitu pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan (*power*) kepada pengambil keputusan di tingkat daerah.

### **MANUSIA KARYA**

Asset membangun dengan falsafah : *Semangat Ikan Bushido* (Jepang), *Anjing Bulldognya* (Inggris), *Samuel Undong* (Korea Selatan), *Look East Policy* (Malaysia), dan *Adab Karsa* (Soewardi Indonesia), bermuara pada lahirnya : “Manusia Karya.”

Siapa manusia karya itu? Dian Tariningsih (1995 : 39-40) mengilustrasikan secara detail dengan meramu pendapat para pakar sebagai berikut : Bath (1988) beranggapan bahwa manusia pada dasarnya “*ethnics*”, sebab ragam perilakunya sebagai sesuatu yang “*describe*” (pemberian) dan apapun variasinya selalu dapat ditemukan kesamaannya. Goode (1985) dengan konsep universalnya menganggap manusia dalam keluarga sebagai kesatuan kelahiran, pendewasaan, pematangan dan kontrol sosial. Ghatak dan Ingersen (1984) menyebut aktivitas manusia yang produktif berkisar pada (*riks taker* sampai *riks averse*). Harbinson (1964) menjuluki sebagai profil yang “*need for affiliation*” sehingga selalu mampu membina hubungan positif-reaktif dengan pihak lain. Motivasi yang tinggi untuk “*need for achievement*” (McClelland, 1983). Selanjutnya Inkeles dan Smith (1974) menyebut sebagai “*individual of modernity*”, kemudian Kindleberger dan Herrick (1977) mengaitkan bahwa manusia adalah dirigen yang meramu kontribusi faktor produksi untuk menghasilkan output berkualitas. Pandangan yang solid oleh Koentjaraningrat (1986) mengatakan manusia karya dicirikan oleh : peka terhadap kebutuhan; mampu menciptakan kesempatan kerja, cerdas, dinamis, inovatif, kerja keras serta amat kreatif mengembangkan produktivitas.

Lanjut Dian Tariningsih, jika manusia karya diidentikkan dengan modernitas individu, Inkeles dan Smith (Hasan, 1989) mengembangkan 10 tema analitik yaitu : (1) Terbuka; (2) Siap menerima perubahan; (3) “Opinion” terhadap isu penting; (4) Aktif mencari fakta; (5) Percaya pada kemampuan orang lain; (6) Orientasi pada perencanaan; (7) Kalkulabilitas; (8) Menghargai ketrampilan teknik; (9) Hormat terhadap martabat orang lain; dan (10) Rasional.

Dengan demikian, dimensi internal manusia karya dibentuk oleh motivasi pribadi, sikap mental, bakat, tempramen, persepsi, kepribadian dan aspirasinya dalam membentuk perilaku. Dimensi eksternal, dikaitkan oleh sub-sistem pemerintahan, masyarakat, keagamaan, lintas ekonomi, kependidikan, keluarga, ekologis, kebudayaan, kepribadian, demografi dan dimensi waktu.

Semoga !!!

### BAB XIII ADIPURA = PURA-PURA?

Hanya pengalaman selama ini, banyak pemerintah kabupaten/kota yang mengejar penghargaan itu dengan pura-pura dan penuh kamuflase :  
pura-pura bersih, pura-pura indah, pura-pura sehat, pura-pura tertib, pura-pura rapi, pura-pura aman, pura-pura asri, pura-pura sejahtera, pura-pura peduli lingkungan, dan pura-pura yang lainnya.  
Semoga Kota Bima mengejar Adipura bukan dengan kepura-puraan.  
(Ahmad Usman, *Harian Bima Ekspres*, 1 Juni 2009)

Memperhatikan karakteristik kekinian Kota Bima, maka dapat dikategorikan sebagai agropolitan. Konsep agropolitan menurut John Friedman dan Mike Douglass (1976) dalam Paulus Hariyono (2007 : 106) ada dua, yaitu : 1) agropolitan atau “kota ladang” dan 2) agropolitan distrik, yaitu meluasnya hubungan sosial di pedesaan sampai keluar batas-batas desanya, sehingga terbentuk suatu ruang sosio-ekonomi dan politik yang lebih luas. Salah satu ciri terbentuknya agropolitan, yaitu terdapat modernisasi di kota yang berada di tengah ladang (John Friedman dan Mike Douglass, 1976). Nah, sekarang kota agropolitan itu sedang memburu lambang supremasi dan prestisius yang bernama Adipura.

Bagi penulis, penghargaan Adipura merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam membangun. Memang banyak indikator keberhasilan lainnya, misalnya : apakah masyarakat merasakan kebebasan dan kemerdekaan, bukan pengekanan dan pengungkungan. Seperti yang pernah diungkapkan mendiang Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dengan “*The Four Freedom*”-nya atau empat macam kebebasan, yaitu : *freedom of speech and expression* (hak dan kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat); *freedom of religion* (hak dan kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya); *freedom from fear* (kebebasan dari rasa takut); dan *freedom from want* (kebebasan dari kekurangan).

Atau, seperti semboyan J.J. Rousseau, Voltaire, dan Montesquieu : “*Liberte, egalite, fraternite*”, yang artinya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Atau, seperti dilontarkan Mubyarto (1982) dalam Ahmad Usman (Harian Pedoman Rakyat, 14/2/1998) : “siapapun orangnya dan bagaimana tata kehidupannya, serta apapun yang diperbuatnya, asal saja dirinya tergolong dalam kategori Warga Negara Indonesia, tentu sepakat, bahwa yang paling dibutuhkan adalah mencoba mendatangkan kemakmuran dan meninggalkan kemiskinan. Bahkan para pelacur jalanan pun tentu akan senang jika pembangunan menyentuh kehidupan kaum lemah di republik ini.”

Atau, seperti yang diungkapkan Loekman Soetrisno (1988 : 13), suatu pembangunan dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan itu menaikkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga harus diukur dengan sejauhmana pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan dari suatu masyarakat untuk mandiri, dalam arti kemauan masyarakat itu untuk menciptakan dan melestarikan pembangunan

serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat”

Atau mengukurnya melalui *Human Development Index* (HDI). *Human Development Index* (HDI) disusun untuk menggambarkan dimensi paling penting dari pembangunan manusia. Sebagai indeks gabungan, HDI terdiri dari tiga indikator yaitu : angka harapan hidup, mewakili lamanya hidup dan kesehatan; tingkat pendidikan mewakili pengetahuan; dan PDB riil (dalam *purchasing power parity dollar/PPP\$*) merupakan taraf kehidupan (Priyono Tjiptoherijanto, 1997 : 27).

Kata kuncinya : kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat sendiri ialah suatu keadaan, di mana seluruh rakyat secara merata, hidup berkecukupan baik materiil maupun spirituil; aman, tentram, tertib dan maju; jauh dari segala penderitaan dan ketakutan, serta di mana harkat dan derajat manusia dapat dipelihara dan dijunjung tinggi (H. Soerono, Majalah Mimbar, No. 25/III/1978). Mencakup unsur-unsur : kemakmuran dan kesejahteraan; pemerataan dan keadilan sosial; keamanan dan ketentraman lahir-bathin; dinamika dan kemajuan; serta unsur-unsur kemanusiaan lainnya.

Hanya pengalaman selama ini, banyak pemerintah kabupaten/kota yang mengejar penghargaan itu dengan pura-pura dan penuh kamufase : pura-pura bersih, pura-pura indah, pura-pura sehat, pura-pura tertib, pura-pura rapi, pura-pura aman, pura-pura asri, pura-pura sejahtera, pura-pura peduli lingkungan, dan pura-pura yang lainnya. Semoga Kota Bima mengejar Adipura bukan dengan kepura-puraan.

Adipura merupakan lambang supremasi tertinggi dan prestisius di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura bukan sekadar persoalan kebersihan sebagaimana persepsi kebanyakan orang yakni sampah dan lingkungan “an sich”. Sebab, syarat untuk meraih Adipura Kencana, misal, amat kompleks, selain harus meraih Adipura berturut-turut lima kali; juga ada penilaian administrasi; kondisi riil-obyektif di lapangan; dan bobot kredit yang paling tinggi adalah tingkat partisipasi masyarakat dan kepedulian organisasi/lembaga yang ada dalam masyarakat, baik organisasi sosial (orsos), organisasi kepemudaan (Karang Taruna, Kelompencapir, Kadarkum, dan sejenisnya), organisasi kemasyarakatan (LKMD/LPM, PKK), BUMN, BUMD, swasta, dan unsur-unsur lain yang ada dalam masyarakat, termasuk LSM, Pramuka, dan lain-lain.

Lalu, syarat lain yang amat menentukan pula dalam penilaian Adipura beberapa tahun lalu adalah adanya data pemantauan terhadap tingkat kebisingan.

Kebisingan adalah sebagai bentuk suara yang tidak diinginkan atau bentuk suara yang tidak sesuai dengan tempat dan waktunya (Suratmo, 1982 *dalam* Ahmad Usman, 1996). Kebisingan dapat diartikan sebagai suara yang merugikan terhadap manusia dan lingkungan, termasuk tanah, ternak, satwa liar dan sistem alam. Jadi, semua bunyi atau suara yang bersifat mengganggu lingkungan (Iksir Rohyati N. Baay *dalam* Ahmad Usman, 1996). Lalu, apa dampak kebisingan? Usman Taba (Ahmad Usman, 1996), menjelaskan bahwa kebisingan dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam gangguan fungsi-fungsi fisiologis, terutama gangguan sirkulasi, pencemaran, dan harmonal. Secara lengkap kebisingan berdampak : berkurangnya pendengaran seseorang atau menimbulkan ketulian pada pendengaran, kelainan pada reaksi (gerakan), kelahiran bayi di bawah berat normal, mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah, mengganggu pekerjaan rumah, mengganggu ketenangan tidur,

mengganggu mental dan tingkah laku sosial, berbahaya bagi keselamatan hidup, dan beberapa dampak lainnya. Berarti, kebisingan perlu ditangani secara serius.

Penghargaan Adipura sendiri, mempersyaratkan kompleksitas kriteria, mulai dari : pengelolaan kebersihan kota (aspek lembaga, aspek hukum, aspek pembiayaan (sumber dana, struktur pembayaran, retribusi kebersihan), aspek teknis operasional (tingkat pelayanan, pelaksanaan)); peranserta masyarakat (peran serta masyarakat umum, masyarakat bisnis/swasta, media massa, dan lembaga pendidikan); peran serta PKK; tata ruang dan penghijauan/ketedeuhan kota; aspek kesehatan, termasuk di dalamnya : pemantauan dan pengawasan kesehatan lingkungan, data penyakit, pengelolaan sampah rumah sakit, pengelolaan air limbah rumah sakit, peralatan kesehatan; dan keselamatan kerja petugas kebersihan lapangan dan hasil pemantauan kualitas lingkungan sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Untuk perolehan penghargaan Adipura tahun 2009 ini, sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu : perumahan (menengah dan sederhana), ruang terbuka hijau (hutan kota, taman kota, ketedeuhan dan penghijauan), terminal bus/angkot, pelabuhan, trotoar, pasar, perkantoran, sekolah, Tempat Pembuangan Sementara, rumah sakit, perairan terbuka, sungai, saluran terbuka, Tempat Pembuangan Akhir, pantai wisata, dan sarana areal pantai.

Perolehan Adipura bukan merupakan tujuan akhir, melainkan justru awal dari semangat baru menciptakan kota yang menimbulkan rasa damai, bahagia, aman, dan sejahtera bagi warganya. Tak cukup sekadar bersih, tertib, indah, rapi, lancar, sehat dan semacamnya (Eko Budihardjo, 2005 : 24).

Menurut Eko Budihardjo (2005 : 24), syarat pertama perolehan Adipura : “apakah kesejahteraan penduduk telah meningkat, terutama dilihat dari segi sosial-ekonominya?” Bila masih saja terlihat banyak ‘gepeng’ (gelandangan dan pengemis) berkeliaran di persimpangan jalan, pedagang kaki lima tergusur terus dan terpuruk ke pinggir jalan, supir kendaraan seperti bemo serba tidak menentu nasib peruntungannya, berarti kota itu masih belum betul-betul melindungi warganya.

Kedua, bertautan dengan pemenuhan butsarman (kebutuhan dasar manusia), yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Walaupun Kota Bima sedang merampungkan persiapan penilaian Adipura, beberapa deretan masalah yang segera ditangani dan dibenahi serius, di antaranya : *pertama*, masih terbatasnya personil, terutama yang terlatih di bidang kebersihan; *kedua*, masih terbatasnya armada kebersihan; *ketiga*, masih rendahnya taraf perobahan pola pikir, terutama banyaknya masyarakat yang berpola pikir dan menganggap selokan, got, drainase, sungai, laut, lapangan umum, bahkan jalan raya sebagai “tong” sampah; *keempat*, terbatasnya dana atau pembiayaan dalam pengelolaan sampah; *kelima*, masalah transportasi; *keenam*, masih terbatasnya hutan dan taman kota; *ketujuh*, belum meratanya sosialisasi dan penyelenggaraan retribusi kebersihan; *kedelapan*, belum meratanya pemasyarakatan taman binaan; *kesembilan*, masih relatif rendahnya menerjemahkan budaya disiplin, terutama budaya bersih dan etos kerja.

Hambatan lain : *pertama*, masih relatif rendahnya menerjemahkan Sapta Tertib, misalnya : tertib administrasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), tertib transportasi, tertib administrasi pemakaian lahan, dan tertib kebersihan; *kedua*, sulitnya menertibkan beberapa yang “liar-liar”, baik itu pasar liar, pengemis-pengemis liar, parkir liar, pemukiman liar, dan beberapa ragam “liar” lainnya; *ketiga*, masih relatif

rendahnya pengetahuan masyarakat dan pengangkut sampah gerobak terhadap sistem kontainer; *keempat*, penggalian drainase, got, penggalian PDAM, penggalian kabel listrik, PT. Telkom yang tidak padu dan tidak tuntas; *kelima*, mulai terkikisnya budaya gotong royong; *keenam*, relatif kurangnya lomba; dan *ketujuh*, masih relatif belum optimalnya melibatkan rumah-rumah ibadah dalam penanganan kebersihan lingkungan.

Dalam mewujudkan kota yang damai, bahagia, nyaman, aman, sejahtera, bersih, tertib, indah, rapi, lancar, sehat dan semacamnya sebagai persyaratan meraih Adipura, beberapa daerah menciptakan icon, kiat-kiat, strategi atau motto. Misalnya : Kota Ujung Pandang semasa Walikota Suwahyo mencanangkan motto BERSINAR, yang merupakan akronim dari *Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman, dan Rapi*. Lalu, pada masa Walikota H.A. Malik B. Masry melengkapi motto itu menjadi “TEDUH BERSINAR” yang merupakan akronim dari *Tekad Disiplin Untuk Hidup Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman, dan Rapi*.

Di Kabupaten Gowa sebagai daerah yang sangat bersejarah, ketika Syahrul Yasin Limpo menjadi Bupati (sekarang Gubernur Sulawesi Selatan) mengusung motto Gowa BERSEJARAH, yang merupakan kependekan dari *Bersih Rapi Sejahtera Aman Rapi dan Hijau*.

Di Kabupaten Bima waktu zamannya H. Zainul Arifin terkenal dengan motto BIMA IKHLAS yang merupakan akronim dari *Bersih Iman Masyarakat Aman Iman Kekuatan Hati Lahirkan Anugrah Surgawi*.

Ada juga akronim ATLAS = Aman Tertib Lancar dan Sehat. Makna aman misal, aman dari kebakaran, aman dari gangguan manusia, aman dari banjir, aman dari bahaya lalu lintas, aman dari ketunakayaanl. Makna tertib misal, tertid dalam pelayanan, tertib berlaluymlintas, tertib administrasi, tertib kependudukan, dan lain-lain.

Pemberian anugerah atau penghargaan Adipura setiap tahun kepada kabupaten/kota dan masyarakat, bertujuan untuk menjaga dan mengelola lingkungan perkotaan.

Kaitan dengan penganugerahan Adipura, diberikan pula “penghargaan” untuk kota terkotor atau terjorok. Tujuannya yakni sebagai bentuk *reward* dan *punishment* kepada pemerintah kabupaten/kota agar dapat memacu diri dalam menjaga dan mengelola lingkungan perkotaan. Benarkah sebagai bentuk *reward* dan *punishment*? Ada kisah menarik di Kota Ujung Pandang, kini Kota Makassar. Almarhum Rudini ketika Mendagri, pernah memberi gelar/julukan kota Anging Mamiri--Kota Makassar itu sebagai : “kota terjorok, kota ujung sampang (pelesetan dari Ujung Pandang), dan kota sejuta bak sampah.” Akibat ejekan itu, menggelitik Pemerintah Kota Ujung Pandang dan menyatakan “perang” terhadap sampah. Alhasil, beberapa saat kemudian meraih Adipura..

Ada beberapa tingkatan penghargaan Adipura : Anugerah Adipura, Penghargaan terhadap Hutan Kota, Piagam Adipura, dan Plakat Adipura. Anugerah Adipura merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Bupati/Walikota yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan lingkungan perkotaan dengan baik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pemberian Penghargaan terhadap Hutan Kota untuk memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota yang mempunyai luas hutan kota minimum 10 % dibandingkan luas wilayah perkotaan. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang terkandung dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota. Hutan kota, dapat berupa : taman-taman, kebun-kebun, bahkan sekumpulan tanaman/pohon yang menghijau di sepanjang jalan, pinggir sungai atau sekeliling perkotaan, hotel, rumah sakit, pekarangan warga, lapangan olah raga, dan tempat-tempat pemukiman lain.

Dalam gerakan menghutankan kota misal, bukan mustahil bila menggunakan konsep hutan kota dengan orientasi tanaman hortikultural (sayur-sayur, buah-buahan, dan bunga-bunga—kini lagi trend), sehingga menjadi produktif, termasuk di setiap pekarangan rumah masyarakat.

Hutan kota dengan pusparagam tanamannya, menurut Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto (1999 : 73-74) berfungsi sebagai : 1. Kontrol pandangan (*visual control*). 2. Pembatas fisik (*physical barriers*). 3. Pengendali iklim (*climate control*). 4. Pencegah erosi (*erosion control*). 5. Habitat binatang (*wildlife habitats*). 6. Nilai estatis (*aesthetic values*).”

Sebagai kontrol pandangan atau *visual control*, tanaman dapat berfungsi untuk : *pertama*, menahan silau dari pantulan sinar di jalan raya maupun bangunan. *Kedua*, sebagai ruang luar, tanaman dapat dipakai sebagai dinding, atap dan lantai. Dinding dapat dibentuk oleh pembatas. Atap dibentuk oleh pohon yang membentuk konopi atau tanaman merabat pada pergola. Sebagai lantai dapat diperguna rumput. *Ketiga*, sebagai pembentuk *privacy*, tanaman dapat digunakan untuk membentuk kesan *privacy* yang dibutuhkan oleh manusia. *Keempat*, pembatas hijau (*green screen*), tanaman digunakan sebagai penghalang pandangan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan untuk dilihat seperti sampah, galian pembangunan dan sebagainya.

Sebagai pembatas fisik, tanaman dipakai sebagai penghalang gerak manusia dan hewan, selain itu juga dapat berfungsi untuk mengarahkan.

Tanaman berfungsi sebagai pengendalian iklim untuk kenyamanan manusia. Faktor iklim yang mempengaruhi kenyamanan manusia adalah suhu, radiasi matahari, angin dan kelembaban. Selain itu hal yang mempengaruhi kenyamanan manusia adalah suara dan baru.

Sebagai pencegah erosi, tanaman digunakan untuk menahan efek negatif terhadap kondisi tanah baik oleh pembuatan bangunan, konstruksi, pengolahan tanah dan sebagainya.

Sebagai habitat binatang, tanaman sebagai sumber makanan bagi hewan dan sebagai tempat perlindungannya.

Tanaman dapat memberikan nilai estetis dan menambah kualitas lingkungan disebabkan oleh sesuatu yang terkandung di dalamnya seperti warna, bentuk, tekstur dan skala.

Alasan lain, perlunya penghijauan kota karena hutan/hijauan kota bermanfaat : memfilter atau menyaring asap dan debu kendaraan dan debu alam yang beterbangan, apalagi Kota Bima masih dominan kotoran kuda (penarik benhur); terjaminnya fungsi pengaturan iklim; dan nilai estetika yang menyangkut arsitektur, serta kebahagiaan manusia. Pada dimensi lain, hijauan/hutan kota berfungsi sebagai wahana rekreasi murah-meriah bagi masyarakatnya, yang ingin melepaskan lelah di siang hari sesudah bekerja, agar etos kerja dapat pulih kembali dan akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja.



Penghargaan Piagam Adipura diberikan Menteri Negara Lingkungan Hidup kepada Bupati/Walikota yang telah menunjukkan adanya upaya peningkatan kinerja yang signifikan dalam pengelolaan lingkungan perkotaan (*best effort*).

Sementara penghargaan Plakat Adipura diberikan oleh Wakil Presiden kepada Bupati/Walikota yang telah berhasil mewujudkan Sarana dan Prasarana Terbaik (*Best Location*), yaitu : pasar tradisional dan taman kota. Untuk saat ini, penghargaan *Best Location* hanya diberikan untuk kota Metropolitan dan Kota Besar.

Kaitan dengan penilaian taman kota, taman sendiri merupakan bagian dari bidang publik dalam ruang perkotaan (Tibbalds, 2001 : 1), yang dapat diakses oleh masyarakat yang berbeda kelas (Madanipour, 1996 : 11).

Ruang publik antara lain meliputi taman yang dapat dimanfaatkan oleh publik (Mulyani, 2002 : 20). Menurut Tibbalds (2001 :1) bidang publik dalam ruang perkotaan adalah semua bagian jaringan perkotaan yang dapat diakses secara fisik dan visual oleh masyarakat umum, termasuk jalan, taman, dan lapangan/alun-alun.

Taman merupakan ruang publik yang memiliki batas tertentu yang digunakan untuk kesenangan dan dapat diakses oleh publik. Makna taman menunjukkan ruang terbuka yang memiliki keindahan dan kenyamanan yang divisualisasikan oleh alam, baik alam yang bersifat natural maupun alam buatan dan dapat diakses oleh publik.

Taman kota bermanfaat, baik secara estetis maupun sosial. Nilai estetika dari taman diperoleh dari perpaduan antara warna daun, batang, dan bunga; bentuk fisik tanaman, meliputi batang, percabangan, dan tajuk; tekstur tanaman; skala tanaman dan komposisi tanaman. Nilai estetis tanaman juga dapat diperoleh dari satu tanaman, sekelompok tanaman yang sejenis, kombinasi tanaman berbagai jenis ataupun kombinasi antara tanaman dengan elemen lanskap lainnya (Rustam Hakim, 2003 : 129).

Warna batang, daun dan bunga dari suatu tanaman dapat menimbulkan efek visual, demikian pula refleksi cahaya yang jatuh pada tanaman tersebut. Warna daun dan bunga dari tanaman dapat menarik perhatian manusia dan memengaruhi emosi orang yang melihatnya. Efek psikologis yang ditimbulkan dari warna tersebut, yakni warna cerah memberikan rasa senang, gembira dan hangat. Sedangkan warna lembut memberikan kesan tenang dan sejuk. Apabila beberapa jenis tanaman dengan berbagai warna dipadukan dan dikomposisikan akan menimbulkan nilai estetika.

Bentuk tanaman dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan bentuk dua atau tiga dimensi, memberi kesan dinamis, indah, memperlebar, atau memperluas pandangan, ataupun sebagai aksentuasi dalam suatu ruang.

Tekstur suatu tanaman ditentukan oleh batang/percabangannya, massa daun, serta jarak penglihatan terhadap tanaman tersebut. Tekstur tanaman juga memengaruhi secara psikis dan fisik bagi yang memandangnya. Skala atau proporsi tanaman adalah perbandingan besaran tanaman dengan tanaman lain atau perbandingan antara tanaman dengan lingkungan sekitarnya.

Peletakan tanaman sebenarnya dapat menimbulkan nilai estetika. Menurut Rustam Hakim (2003 : 143) peletakan tanaman haruslah disesuaikan dengan tujuan dari perancangannya tanpa melupakan fungsi tanaman yang dipilih. Pada peletakan ini harus pula dipertimbangkan kesatuan dan desain atau unity, yaitu variasi (*variety*), penekanan (*accent*), keseimbangan (*balance*), kesederhanaan (*simplicity*), dan urutan (*sequence*).

Di samping fungsi estetika, taman kota memiliki fungsi lain. Menurut Rustam Hakim (2003: 52) taman kota sebagai ruang terbuka mempunyai beberapa fungsi sosial, antara lain meliputi : tempat bermain dan olahraga; tempat bermain dan sarana olahraga; tempat komunikasi sosial; tempat peralihan dan menunggu; tempat untuk mendapatkan udara segar; sarana penghubung antara satu tempat dengan tempat yang lain; pembatas di antara massa bangunan; sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan; dan sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, dan keindahan lingkungan.

Dari banyak fungsi taman kota tersebut, terdapat fungsi yang terfokus pada fungsi sosial, khususnya taman kota sebagai tempat bermain dan olahraga, tempat bermain dan sarana olahraga, tempat komunikasi sosial, tempat peralihan dan menunggu, tempat untuk mendapatkan udara segar. Fungsi-fungsi ini mengundang kerumunan orang untuk berdatangan sehingga dapat dikatakan taman kota memiliki fungsi sosial. Semoga !!!

## BAB XIV KEARIFAN LOKAL : PEMICU AKSELERASI PEMBANGUNAN KOTA

“Nilai-nilai baru muncul menggeser nilai-nilai lama pembangunan, di antaranya : martabat diri (*self-esteem*), kebebasan (*liberation*) atau independensi, keberlanjutan (*sustainability*), keswadayaan (*self-reliant*), dan pemberdayaan (*empowerment*)”

Tulisan ini tidak hanya diperuntukkan kepada Yang Terhormat Walikota Bima, tapi buat siapa saja yang mengemban amanat rakyat sebagai pemimpin, serendah apapun levelnya. Terutama pimpinan-pimpinan yang dampak kebijakannya, bermuara pada : “apakah akan mensejahterakan atau justru malah menyengsarakan masyarakat !”.

Ketika pawai budaya digelar, sesaat sebelum puncak Hari Jadi Kota Bima Ke-7, tepatnya April 2009 lalu, begitu kentalnya nuansa budaya yang ditampilkan. Demikian halnya, “mozaik kebersamaan” ditata sedemikian indah, apik nan menawan. Naluri penulis berbisik bahagia dan amat ceria : “*kita masih punya modal besar, dalam pangkuan tumpah pertiwi Kota Bima, untuk sama-sama membangun daerah : kebersamaan di antara pusparagam etnis dan agama.*” Berarti, tidak semua warga terperangkap dalam area “*ogah sosial.*” Ogah sosial secara sederhana dapat diartikan individualistis. Ada kecenderungan memudarnya : solidaritas, kesetiakawanan, rasa senasib sepenanggungan, dan kebersamaan.

Bagi pemerintah Kota Bima yang sementara sibuk mencari formula jitu (maaf, mungkin sekarang sudah rampung), dalam menentaskan Otda, ada beberapa potensi yang menjadi aset partisipasi sosial dalam upaya pembangunan masyarakat, dan salah satu di antaranya adalah kearifan tradisional atau kearifan budaya lokal. Kearifan tradisional dimaksudkan, yakni sebangkah nilai-nilai tradisi yang terbungkus dengan pernik-pernik nilai religi yang telah menjadi budaya turun-temurun nenek moyang, yang kini mulai terancam punah, ternoda, tererosi, dan terdegradasi. Namun, secara samar-samar sisa kearifan tradisional tersebut, masih “*hidup enggan, mati tak mau,*” namun, masih dapat diselamatkan. Hal inipun “diakui” Pemerintah Kota Bima sebagaimana tersurat lewat misinya : “Memfungsikan ... kearifan lokal sebagai faktor pendorong transformasi masyarakat.”

*Pertama*, masih terpatrynya kesakralan pernik-pernik nilai budaya “*kacoi angi*” (saling menghormati) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. (Catatan : walau disadari akhir-akhir ini budaya “*kacoi angi*” mulai ternoda, terutama sebagai bias gerakan reformasi). Pernik-pernik nilai “*kacoi angi*” ini memungkinkan masyarakat untuk bertoleransi terhadap pendapat, anjuran, ataupun ajakan elite formal dan elite informal untuk melaksanakan pembangunan. Karenanya, pembangunan sebagai tujuan yang diinginkan, harus selalu memperhatikan faktor budaya dan tradisi masyarakat melalui sebuah kritik histori. Dalam pemaknaan lain, perlu adanya kearifan tradisional sebagai simbol semangat dalam pembangunan. Kearifan tradisional menurut Huston Smith dalam bukunya *Beyond the Post Modern Mind* (1982) yang dikutip Ruslin (Kompas, 23-1-1998) sudah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat 25 abad yang lalu. Smith menyatakan : ... sudah dapat ditemukan dalam dongeng-dongeng tradisional masyarakat primitif di seluruh penjuru dunia, dan dalam bentuknya yang

paling matang selalu akan mendapatkan tempat dalam setiap agama tingkat tinggi. Salah satu versi filsafat paling universal ini, dari para pengikut ajaran-ajaran teologi masa lampau, sudah pernah tertuang dalam tulisan lebih dari 25 abad yang lalu. Sesudah itu tak henti-hentinya tema tersebut diulang-ulang, dari berbagai sudut pandang religius, dalam berbagai bahasa, yang ada di Asia maupun Eropa. Perlulah direnungkan apa yang dikatakan Zimmermann (Zen, MT., 1979), bahwa kearifan dan akal budi manusia itulah yang pada akhirnya dapat menjadi sumber daya utama yang membuka rahasia dan hikmah alam semesta. Kearifan tradisional ini oleh Zainal Arifin Thoha (Kompas, 5-11-2001) yang mengutip Mangkunegara IV melalui bait-bait Wedhatama-nya menyebutnya dengan istilah kearifan lokal. Ajaran agama akan membumi dalam kehidupan masyarakat setempat bila kearifan lokal dijadikan pertimbangan, terutama dalam rangka menjaga keharmonisan kosmologis dan sosial.

Pembangunan yang komprehensif tidak pernah berlangsung tanpa memperhitungkan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam masyarakat dan sejarahnya (Kusndiningrat, Harian Suara Pembaharuan, 25-8-1995).

Demikian halnya, Clifford Geertz (Arifin, Harian Surya, 12-7-1996) mengungkapkan, variabel di luar agama, seperti, adanya perasaan berkebudayaan satu (*The sense of a common culture*), sebagai faktor penting terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat.

Dalam batas-batas tertentu masyarakat pedesaan, meminjam konsep ilmu antropologi, merupakan suatu *close corporate community* (Rajab, Harian Suara Karya, 15-9-1992). Ada empat ciri *close corporate community*. *Pertama*, interaksi sosial di antara warga komunitas desa berlangsung secara tatap muka (*face to face relationship*); hubungan tatap muka ini dimungkinkan karena mereka bertempat tinggal di tempat yang sama. *Kedua*, dikarenakan mereka telah cukup lama saling mengenal satu sama lain, maka perasaan sebagai sesama anggota komunitas (*in group feeling*) cukup tinggi. *Ketiga*, adanya suatu sistem hak dan kewajiban bagi para anggotanya terhadap sejumlah harta produktif tertentu (*common property*), biasanya berupa sebidang tanah yang dikuasai dan digarap secara bersama. *Keempat*, adanya sistem administrasi yang relatif otonom, terutama berfungsi dalam mengatur rumah tangga komunitas, khususnya penggunaan pemilikan bersama, menengahi permasalahan yang timbul di antara para warganya, dan sebagai perantara yang menghubungkan komunitas dengan sistem sosio-politik yang lebih luas.

Ciri khas dari sebuah komunitas kecil seperti desa adalah adanya ikatan komunal yang cukup kuat. Kekuatan ikatan komunal itu terutama terwujud dalam suatu kelompok sosial yang berupa kehidupan bertetangga dekat, serta dalam kegiatan-kegiatan yang berdasarkan etos-etos paguyuban. Kegiatan itu misalnya berupa sumbangan, slametan, jagongan, dan sebagainya (Kartodirdjo, 1993).

*Kedua*, wujud kearifan lokal--tradisi "*mbolo weki*" atau "*mbolo rasa*" ("*Tudangsipulung*" versi Bugis-Makassar) bukan sekadar tetap terpatri, tapi semakin tumbuh subur dan teradministrasi dengan baik. Saban kegiatan kemasyarakatan, misalnya perhelatan pernikahan, akikah, kematian, pengislaman atau sunatan dan lain-lain, termasuk hajatan naik haji semuanya diawali dengan "*mbolo weki*" atau "*mbolo rasa*" (musyawarah mufakat).

*Ketiga*, semangat keagamaan (Islam) yang masih berakar-kokoh yang menjadi motivasi sugesti dalam menata segala dimensi kehidupan kemasyarakatan. Jadi, selain

faktor budaya dan tradisi pada umumnya (point kedua di atas), agamalah yang amat berperan dalam mengartikan dan mengarahkan serta memberikan makna pada kehidupan manusia (Lihat tulisan lain : “Kesakralan Nilai Religi Kembali Diuji, Sebagai “Ruh” Pembangunan”).

Agama diyakini dengan sepenuh hati oleh para pemeluk agama sebagai realitas yang dapat membingkai seluruh totalitas dan kesemestaan (universalitas) kehidupan manusia (Arifin, Harian Republika, 14-3-1997).

Para sosiolog, demikian Arifin (Fajar, 8-4-1992) sepakat memberikan rumusan fungsional terhadap agama. Dalam hal ini agama didefinisikan dalam kerangka fungsi sosialnya. Ini berarti (1) agama memberikan suatu nilai yang terakhir tempat moralitas masyarakat itu didasarkan; (2) agama memberikan penjelasan mengenai situasi yang dihadapi oleh manusia di dalam kehidupannya, seperti kematian, perkawinan, atau kesengsaraan; (3) agama mendamaikan pengalaman-pengalaman yang bertentangan di dalam kehidupan manusia, seperti kehidupan dan kematian, yang sementara yang permanen yang kodrati dan yang mengatasi kodrat atau kebebasan dan keharusan. Selain itu, agama merupakan suatu visi yang terpadu mengenai dunia dan eksistensi manusia sebagai sarana menafsirkan tata perilaku dan tersirat di dalamnya pandangan mengenai apa yang ada, dan apa yang harus. Dengan kata lain, unsur-unsur normatif dan kognitif ini adalah rumusan-rumusan kenyataan.

Agama merupakan sebuah kekuatan transformatif yang perlu ditingkatkan sebagai sumber etik moral dan spiritual dalam pembangunan (Purnomo, Harian Surya, 28-10-1994). Kalau agama dipandang sebagai kekuatan etik spiritual, akan melahirkan peran yang bersifat holistik bagi seluruh kehidupan manusia. Dalam pengertian semacam ini, agama tidak hanya menjadi sesuatu yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia (*something to use*), tapi lebih fungsional sebagai *comprehensive commitment* dan *driving integrative motive* yang mengatur seluruh hidup seseorang (Arifin, Harian Republika, 14-3-1997).

Potret bangsa Indonesia saat ini boleh dikatakan sebagai religius. Untuk mengukurnya dapat memakai *Teori Commitmen*-nya Glock dan Stark (Bramualim, Harian Republika, 6-6-1997). Dalam tulisan mereka *Religion and Society in Tention*, dikemukakan beberapa dimensi religiositas yang dapat dipakai untuk mengukur komitmen keberagamaan seseorang atau sekelompok orang. Mereka menyebutnya sebagai *The Dimension of Religiosity*, yaitu : dimensi eksperimental, ideologik, ritualistik, intelektual, dan konsekuensial. Namun demikian, seorang filsuf besar abad 20, Alfred North Whitehead dalam karyanya *Religion in the Making* (1974) (Purnomo, Harian Surya, 28-10-1994), melihat gejala kemerosotan pengaruh agama pada zaman modern. Menurut pengamatannya, pengaruh agama dalam kehidupan manusia dewasa ini tidak sekuat masa-masa lalu. Dalam tangkapannya, agama kehilangan pengaruh atas dunia. Dua alasan disebut oleh Whitehead, yaitu : 1) adanya kemandegan yang terungkap dalam setiap konservatisme dan defensif kaum agamawan dalam menghadapi perubahan masyarakat akibat perkembangan iptek; 2) adanya ketidaksesuaian antara gambaran Tuhan menurut manusia modern dan tradisional. Dalam gambaran tradisional, Tuhan laksana raja absolut yang harus selalu ditakuti dan dipatuhi titah-Nya. Sedang manusia modern menggambarkan Tuhan sebagai kekuasaan kasih yang memberi ruang kebebasan bagi manusia untuk memikul tanggung jawab pribadinya.

*Keempat*, gerakan reformasi yang berlangsung sejak beberapa tahun lalu telah melahirkan semangat *euphoria*, yang konsekuensinya melahirkan kebiasaan baru bagi elite formal untuk mentransformasikan nilai keterbukaan dan demokrasi. Kondisi seperti ini, Maliki (1999) menyebutnya dengan *a shift in paradigm*. Paradigma birokratik-otoritarian (hendak) diganti dengan demokrasi. Tak urung terjadi berbagai perubahan kebijakan publik. Di sektor pemerintahan desa, pemerintahan mulai bersedia membuka bagi munculnya “suara lain”. Tokoh masyarakat desa di-“izin”-kan memegang jabatan Ketua LKMD dan LMD-yang sejak UU 5/1979 “wajib” dipegang oleh Kepala Desa dan atau elite lokal sebagai klien dukungan negara (*state backed client*).

Dalam rangka mengelaborasi secara empirik dampak krisis ekonomi terhadap demokratisasi, Samuel P. Huntington (Siagian, Harian Surya, 24-11-1997) mengajukan enam hipotesis. *Pertama*, krisis membawa rezim ke arah demokrasi. *Kedua*, dampak krisis ekonomi terhadap demokrasi tergantung pada sifat rezim politik. *Ketiga*, krisis ekonomi mendorong proses demokratisasi, namun tergantung bentuk dan sifat komplementer rezim. *Keempat*, peranan krisis ekonomi dalam proses demokratisasi menurun dan menjadi tak signifikan setelah dekade 1980-an, sedang peranannya menaik selama dekade 80-an. *Kelima*, kondisi sosial ekonomi, struktural, budaya politik, lembaga demokrasi, situasi internasional mempengaruhi proses demokrasi, secara relatif tergantung pada tingkat pembangunan ekonomi dan politik.

Dalam suasana seperti saat sekarang, pemerintah tak lagi bisa diharapkan tetap dalam posisi *avant garde* pembangunan. Jargon “pemerintah sebagai agen pembangunan” yang populer sejak dua setengah dekade yang lalu akan semakin sulit dipenuhi (Sulistiyo, Harian Kompas, 24-2-1996).

Konsekuensinya, perlu pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan secara aktif dalam proses pembangunan. Istilah Sujatmoko (1988) *dalam* Azis (Fajar, 2-10-1997) yakni *Pendekatan Emansipatif*, dengan melengkapi strategi dari bawah ke atas yang menjamin partisipasi, prakarsa, dan pertumbuhan sukarela pada tingkat bawah. Dalam konsep *Good Governance* dengan sendirinya menyangkut revitalisasi dan restrukturisasi peran pemerintah dalam penyelenggaraan kekuasaan agar kekuasaan itu lebih memberdayakan (*empowering*) masyarakat (Suwandi, Harian Suara Pembaruan, 29-8-1995).

Nurland *dalam* Abu Hamid (2001), perkembangan terakhir ini terdapat pergeseran paradigma pembangunan dari *growth-centred development* yang berorientasi pada pembangunan fisik ke *people-centred development*. Paradigma baru ini merupakan pembangunan yang dibutuhkan bagi masyarakat yang dapat memberikan kesempatan orang banyak terlibat di dalam menentukan masa depannya sendiri. Konsep ini juga dikenal dengan nama *participatory-development*, dengan menekankan kebijaksanaan pembangunan, baik makro maupun mikro dibuat dengan muara dari bawah ke atas, searah dengan gagasan Chambers (1988) dan berlawanan dengan mekanisme lama *top down*. *Participatory-development* berarti, orang awam--masyarakat desa, yang miskin, kaum perempuan, dan golongan marjinal lainnya diakui haknya untuk menentukan arah pembangunan melalui mekanisme *learning process*. Idealnya konsep *participatory-development* diajukan untuk membuat pembangunan lebih “manusiawi”, pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan fisik semata, tetapi juga pembangunan secara nonfisik mempunyai porsi yang berimbang.

Bentuk kearifan lokal yang kelima, yakni masih gayutan dengan point keempat tersebut, semakin diakuinya eksistensi elite informal yang tidak sekadar menjastifikasi (*justification*) keputusan-keputusan elite formal desa/kelurahan. Di Indonesia posisi dan peran elite meminjam pengistilahan Osman Raliby, cendekiawan muslim Indonesia, memberi makna rasa golongan. Ini mirip pendapat Frans Rosenthal, yang menerjemahkannya dengan *A Group Feeling*. Muhsin Mahdi, sejarawan dan pengamat politik Islam memakai *Social Solidarity*. Orientalis Phillip K. Hitti mengartikannya *The Tribal Spirit* (semangat kesukuan) atau *The Spirit of The Clan* (semangat suatu suku atau kaum). Ini hampir mirip dengan definisi Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Mukaddimah*, “rasa cinta setiap orang-orang terhadap nasab (asal keturunan) dan golongan” (Thayib, Surya, 22-9-1995).  
Semoga !!!

## BAB XV INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KOTA

"Suatu pembangunan dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan itu menaikkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga harus diukur dengan sejauhmana pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan dari suatu masyarakat untuk mandiri, dalam arti kemauan masyarakat itu untuk menciptakan dan melestarikan pembangunan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat"  
(Loekman Soetrisno, 1988 : 13).

Banyak indikator untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu pembangunan. Misalnya, *Human Development Index* (HDI) sebagai salah satu indikator. *Human Development Index* (HDI) disusun untuk menggambarkan dimensi paling penting dari pembangunan manusia. Sebagai indeks gabungan, HDI terdiri dari tiga indikator yaitu : angka harapan hidup, mewakili lamanya hidup dan kesehatan; tingkat pendidikan mewakili pengetahuan; dan PDB riil (dalam *purchasing power parity dollar/PPP\$*) merupakan taraf kehidupan (Priyono Tjiptoherijanto, 1997 : 27).

Indikator yang hampir sama yakni dalam bentuk ukuran *PQLI* (*Physical Quality of Life Index*) atau *Indeks Mutu Hidup Fisik*. Ada tiga unsur yang tercakup di dalam *PQLI*, yaitu *Indeks Kematian Bayi*, *Harapan Hidup* pada satu tahun dan *Tingkat Melek Huruf* (Pudjiwati Sajogyo, 1985 : 228-229).

Indikator lain, ada indikator kemiskinan pendapatan seperti "*income poverty*"-nya Chambers (1997). Ada kombinasi garis kemiskinan dan distribusi pendapatan yang dikembangkan Sen (1973); *Social Accounting Matrix* (SAM) oleh Pyatt dan Round (1977), dan *Physical Quality on Life Index* (*PQLI*) oleh Moris (1977). Di bawah kepemimpinan ekonom asal Pakistan, Mahbub Ul Haq, pada tahun 1990-an UNDP memperkenalkan pendekatan *Human Development* yang diformulasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) dan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*). Pendekatan ini relatif lebih komprehensif dan mencakup faktor ekonomi, sosial dan budaya kemiskinan. Berporos pada ide-ide *heterodox* dari paradigma *popular development*, pendekatan ini memadukan model kebutuhan dasar (*basic needs model*) yang digagas Paul Streeten dan konsep kapabilitas (*capability*) yang dikembangkan Pemenang Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen.

Nah, indikator yang lain lagi? Apakah masyarakat merasakan kebebasan/kemerdekaan, bukan pengekangan dan pengungkungan? Seperti yang pernah diungkapkan mendiang Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dengan "*The Four Freedom*"-nya atau empat macam kebebasan, yaitu : (1) *Freedom*



*of speech and expression* (hak dan kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat); (2) *Freedom of religion* (hak dan kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya); (3) *Freedom from fear* (kebebasan dari rasa takut); dan (4) *Freedom from want* (kebebasan dari kekurangan).

Atau, seperti semboyan J.J. Rousseau, Voltaire, dan Montesquieu : “*Liberte, egalite, fraternite*”, yang artinya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan.

Atau, seperti dilontarkan Mubyarto (1982) dalam Ahmad Usman (Harian Pedoman Rakyat, 14/2/1998) : “Siapapun orangnya dan bagaimana tata kehidupannya, serta apapun yang diperbuatnya, asal saja dirinya tergolong dalam kategori Warga Negara Indonesia, tentu sepakat, bahwa yang paling dibutuhkan adalah mencoba mendatangkan kemakmuran dan meninggalkan kemiskinan. Bahkan para pelacur jalanan pun tentu akan senang jika pembangunan menyentuh kehidupan kaum lemah di republik ini.”

Kuncinya : kesejahteraan rakyat adalah indikator utama pembangunan suatu daerah. Kesejahteraan rakyat sendiri ialah suatu keadaan, di mana seluruh rakyat secara merata, hidup berkecukupan baik materiil maupun spirituil; aman, tentram, tertib dan maju; jauh dari segala penderitaan dan ketakutan, serta di mana harkat dan derajat manusia dapat dipelihara dan dijunjung tinggi (H. Soerono, Majalah Mimbar, No. 25/III/1978).

Definisi H. Soerono tersebut, telah tercakup unsur-unsur : kemakmuran dan kesejahteraan; pemerataan dan keadilan sosial; keamanan dan ketentraman lahir-bathin; dinamika dan kemajuan; serta unsur-unsur kemanusiaan lainnya.

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negaranya untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila (UU No. 6 Tahun 1974 dalam T. Sumarnonugroho, 1991 : 33-34).

Karena itu, politik kesejahteraan sosial yang perlu dan harus diejawantahkan, di antaranya : tiap orang dapat merasakan keadilan sosial dalam hidupnya; tiap orang terhindar dari kemiskinan hidup; tiap orang dapat merasakan bahagia, karena cukup makan, pakaian dan perumahan; tiap anak yang dilahirkan dapat bersekolah pada waktunya; tiap orang tidak perlu khawatir di hari tuanya, karena adanya jaminan sosial; dan sebagainya (Ahmad Usman, Harian Pedoman Rakyat, 02/5/1998).

Namun, demikian seperti yang diungkapkan oleh Sondang P. Siagian (1984 : 30), pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari negara-negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya “*titik jenuh yang absolut*” yang setelah tercapainya tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti : *a.* keadilan sosial; *b.* kemakmuran yang merata; *c.* perlakuan sama di mata hukum; *d.* kesejahteraan material, mental dan spiritual; *e.* kebahagiaan untuk semua; *f.* ketentraman; dan *g.* keamanan.

Tolak ukur pembangunan berkelanjutan misal, harus memenuhi tiga kriteria : “*economically feasible*”, “*socially acceptable*” dan “*ecologically sustainable*” (Dodik Ridho Nurrochmat, 2005 : 67)

Indikator pencapaian keberhasilan pembangunan perkotaan pada umumnya dan pembangunan prasarana dan sarana pada khususnya adalah : (a) Tingkat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi perkotaan; (b) Tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat perkotaan, baik yang diindikasikan oleh tingkat pendapatan perkapita, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, tingkat pengangguran, dan aspek ekonomi-sosial lainnya; (c) Tingkat kelestarian lingkungan hidup perkotaan; (d) Tingkat keseimbangan pembangunan perkotaan; dan (e) Tingkat optimalisasi pemanfaatan ruang perkotaan (Rahardjo Adisasmita, 2006 : 183).

Indikator ekonomi menilai bahwa pembangunan terutama sekali dinyatakan dalam angka pertumbuhan tahunan Produk Nasional Bruto (PNB) sebesar 6 persen. Angka pertumbuhan per kapita PNB digunakan untuk mengukur *economic well-being* penduduk, yaitu seberapa barang dan jasa tersedia untuk konsumsi dan investasi bagi rata-rata penduduk (Todaro, 1977 dalam Moeljarto T., 1995 : 4)

Lalu ada indikator sosial. Doh Joon Chien—sarjana Malaysia, mengusulkan agar setiap negara menentukan standar hidup minimal yang dapat diterima oleh negara tersebut yang meliputi gizi, sandang, akomodasi, kesehatan dan pendidikan. Cita-cita penganut aliran indikator sosial untuk menciptakan “masyarakat raya” (*the Great Society*) yang tidak menekankan pada “seberapa banyak”, tetapi “seberapa baik”—dan tidak mengutamakan persoalan “kualitas barang milik kita” tetapi menguatkan “kualitas hidup kita” (Bauer, 1999 dalam Moeljarto T., 1995 : 5)

Bagi Denis Goulet (1973) pembangunan mempunyai tiga komponen utama; kelangsungan hidup (*life sustenance*), kehormatan diri (*self-esteem*) dan kebebasan (*freedom*). Segi ekonomi dari pembangunan tercermin di dalam konsep “kelangsungan hidup” ini. Pembangunan harus berusaha memenuhi kebutuhan sebanyak mungkin orang untuk kelangsungan hidup : pangan, perumahan, kesehatan dan perlindungan, karena ini semua merupakan prasyarat bagi tercapainya kualitas hidup yang layak. Tetapi pemenuhan atau kesemuanya itu tidak demi akumulasi kekayaan dan materi. Kita harus memiliki sandang, pangan, dan kesehatan dan perlindungan itu “*in order to be more*”, yaitu agar kita dapat hidup layak sebagai manusia, agar kita dapat mencapai nilai pembangunan yang lain, yakni rasa harga diri atau kehormatan diri, suatu kualitas diri yang oleh Goulet digambarkan sebagai : keautentikan (*authenticity*); identitas (*identity*); kemuliaan (*diginity*); kehormatan (*respect*); dan pengakuan (*recognition*) (Moeljarto T., 1995 : 9).

Secara lengkap dikemukakan indikator pembangunan sebagaimana dikemukakan Adeal dan Moris dalam Khairuddin (2000 : 71-73) sebagai berikut. “Pembangunan dipengaruhi oleh tiga indikator sosio-budaya, politik, dan ekonomi, dan terbagi sebagai berikut : *pertama*, kelompok sosio-budaya. Indikatornya yakni luas sektor pertanian tradisional; tingkat keadaan dualisme yang ada; tingkat keadaan urbanisasi; ciri-ciri organisasi sosial yang utama; tingkat pentingnya peranan kelas menengah pribumi; tingkat keadaan mobilitas sosial; tingkat kemampuan melek huruf; tingkat keadaan komunikasi massal; kadar kepaduan (*degree of homogenety*) kebudayaan dan ethic; kadar ketegangan sosial; tingkat kesuburan kelahiran (*crude fertility rate*); dan kadar penglihatan modernisasi (*modernization outlook*).

*Kedua*, kelompok politik, dengan indikator : kadar integrasi nasional dan kesadaran kesatuan nasional; tingkat keadaan sentralisasi kekuatan politik; bobot kekuatan lembaga demokrasi; tingkat kebebasan operasi politik dan pers; kadar persaingan

antara partai politik; baris yang paling dominan dari sistem partai politik; bobot kekuatan gerakan buruh; bobot kekuatan politik dari kelompok elit tradisional; bobot kekuatan politik dari kelompok militer; tingkat efisiensi administrasi negara; kadar komitmen kepemimpinan kepada pembangunan ekonomi; dan tingkat stabilitas politik.

*Ketiga*, kelompok ekonomi, dengan indikator : produk nasional bruto per jiwa penduduk tahun tertentu; laju pertumbuhan PNB real per jiwa penduduk dalam kurun waktu tertentu; sumber alam yang tersedia; laju pertumbuhan investasi; tingkat modernisasi industri; laju perubahan tingkat industri dalam kurun waktu tertentu; ciri-ciri organisasi pertanian; tingkat modernisasi teknik pertanian; tingkat kemajuan produktivitas pertanian dalam kurun waktu tertentu; tingkat kecukupan prasarana fisik; tingkat perbaikan sistem perpajakan dalam waktu tertentu; tingkat efektivitas sistem perpajakan; tingkat perbaikan lembaga keuangan dalam waktu kurun tertentu; tingkat efektivitas lembaga-lembaga keuangan; tingkat perbaikan lembaga keuangan dalam kurun waktu tertentu; laju perbaikan sumber daya manusia; dan struktur perdagangan luar negeri.”

Harapan kita : orang dapat makan setiap hari, dapat mnenyekolahkan anak, memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak, diperlakukan adil oleh negara, dihargai serta dihormati agama yang diyakininya.

Intinya adalah : bagaimana rakyat memiliki peluang berusaha; peluang bekerja; memiliki pendapatan mencukupi kebutuhan hidupnya; memadainya pangan/papan/perumahan; terjaganya tingkat kesehatan dan pendidikan; terjaminnya keadilan di depan hukum; dan terpenuhinya rasa aman/martabat diri.

Kemakmuran rakyat merupakan indikator lain. Kemakmuran rakyat merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara. Kemakmuran sendiri pada dasarnya merupakan kondisi universal yang lebih berkonotasi fisik-material. Negara dibangun di atas landasan cita-cita luhur untuk menghantarkan rakyat ke gerbang yang memungkinkan mereka dapat hidup layak, tidak saja dalam arti fisik-material, tetapi juga dalam arti sosio-psiko-spiritual (Rusli Karim dan Fauzie Ridjal, 1992 : xiii)

Hollis Chenery dan kawan (1975) dalam Tulus Warsito (1999 : 19) menawarkan beberapa pendekatan dasar untuk memecahkan problem kesejahteraan bagi kelompok berpendapatan rendah. *Pertama*, maksimalisasi pertumbuhan melalui peningkatan tabungan dan alokalisasi sumber-sumber secara lebih efektif sehingga dapat menguntungkan semua. *Kedua*, mengarahkan kembali investasi terhadap kelompok miskin dalam bentuk pendidikan, akses terhadap kredit dan fasilitas-fasilitas umum. *Ketiga*, redistribusi pendapatan terhadap kelompok-kelompok miskin melalui sistem keuangan atau penyediaan langsung barang-barang konsumsi. *Keempat*, transfer langsung keberadaan aset terhadap kelompok miskin dan wujud seperti *landreform*.  
Semoga !!!

**BAB XVI**  
**SEKTOR INFORMAL DAN EKONOMI KERAKYATAN KOTA :**  
**“Bagai Buah Simalakama !”**  
**“Acapkali digusur, tapi pensubsidi sektor formal !”**

“Eksistensi pekerja sektor informal :  
*“bagai buah simalakama !”*”

Acapkali digusur, atas dalih : pengotor wajah kota. Tapi setidaknya, eksistensinya ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangannya

mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja dan kaum marjinal.

Siapa yang digolongkan sebagai pekerja sektor informal?

Ada : pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, pedagang asongan yang selalu membawa dagangannya ke hadapan konsumennya, tukang semir sepatu, ojek payung, ojek motor, penyewa petromaks, pedagang keliling atau penjaja, penarik becak, pengamen, penjahit jalanan,

penyapu beras, penukar uang kecil (*“money changer”*),

buruh bangunan termasuk buruh wanita, tukang pijat jalanan, pengatur lalu lintas swasta, penambah ban wanita, afdruck foto jalanan, pemungut sampah, dan mungkin juga pelacur dalam arti

yang sebenarnya.”

Sektor informal dapat dikatakan sebagai pensubsidi sektor formal : pekerja dengan upah rendah akan menghasilkan masukan yang rendah pula bagi sektor formal dan akan menyediakan barang-barang dan jasa yang murah bagi

para pekerja di sektor formal” (Portes dan Walton  
*dalam Alan Gilbert dan Josef Gugler, 1996 : 100).*

Salah satu visi yang diimplementasikan dalam bentuk Tematik Pembangunan Kota Bima bahwa *“Tahun 2010 Kota Bima dengan prioritas pembangunan ekonomi berbasiskan perekonomian lokal.”*

***PENTINGNYA SEKTOR INFORMAL***

Kenapa sektor informal penting ? Banyak contoh di mana sektor informal memainkan peranan utama dalam hampir semua jenis penyediaan pelayanan kota. Beberapa di antaranya menurut Nana Rukmana, dkk. (1993 : 200-201) ialah : (1) Distribusi air oleh penjaja air keliling, terutama di daerah yang air sumurnya berkualitas buruk atau tidak ada sistem distribusi/PDAM tidak memadai (bagian Utara Jakarta, Surabaya, dan hampir di semua kota besar); (2) Jasa penyedotan septik tank oleh truk atau kereta dorong swasta (di seluruh daerah perkotaan di Indonesia); (3) Pemulung yang mencari barang-barang buangan yang masih bisa dipakai di daerah perkotaan atau di tempat pembuangan (kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat khusus di tempat-tempat pembuangan yang besar di Jakarta dan kota-kota besar lain);

(4) Sistem transportasi informasi seperti becak, bajaj, dan kendaraan bermotor kecil lainnya (di seluruh daerah perkotaan di Indonesia, kecuali di Jakarta yang telah melarang beroperasinya becak); dan (5) Akhirnya pengadaan bahan bangunan dan sistem pemanfaatannya oleh swasta (informal) di seluruh daerah perkotaan di Indonesia.

Dari suatu penelitian ILO (*International Labour Office*), ternyata bahwa di negara berkembang : (1) sektor informal itu menyangkut penduduk yang banyak sekali; (2) bukan merupakan pekerjaan yang sementara, dalam gejala migrasi saja; (3) meliputi banyak macam kegiatan ekonomi; (4) pada beberapa mata pencaharian sektor informal dan sektor formal itu berhimpitan; dan (5) kegiatan ekonomi tersebut tidak merupakan ketertinggalan dalam perkembangan.

Perkembangan pedagang kaki lima tidak pernah hentinya seiring dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini membawa akibat yang positif dan negatif. Positifnya kehadiran pedagang kaki lima (1) dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah; (2) dapat berfungsi sebagai alternatif dalam mengurangi jumlah pengangguran; dan (3) dapat melayani kebutuhan masyarakat khususnya bagi golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dampak negatifnya yaitu dapat menimbulkan masalah dalam pengembangan tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal.

#### **DATA SURVAI MEMBUKTIKAN**

Hasil penelitian Departemen Koperasi dan PKM tahun 1998 menunjukkan bahwa dari 225.000 PKM (Pengusaha Kecil Menengah), ada 64,1 persen UKM yang mampu bertahan selama krisis berlangsung; 0,9 persen mampu berkembang; 31 persen mengurangi kegiatan usahanya; dan 4 persen terpaksa menghentikan usahanya (Saadah, 2002, *dalam* Tukiran, dkk., 2002 : 50). Lanjut, Saadah, pada tahun 1996, UKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 58.555.268 orang atau 88,3 persen dari total tenaga kerja secara nasional.

Walaupun sudah kadaluarsa, tetapi minimal menjadi referensi bahwa dari survai tentang sektor informal yang dilakukan Biro Pusat Statistik tahun 1982 misal, dari seluruh jumlah tenaga kerja yang sebanyak 57,8 juta orang, 43,89 juta orang atau 75,93 persen bekerja di sektor informal, dan sebanyak 13,93 persen atau 24,07 persen bekerja di sektor formal (BPS, 1986 : 42). Penting untuk dicatat bahwa sektor informal pedesaan yang selalu dilupakan, besar jumlahnya di Indonesia, yakni sebanyak 39,22 juta orang dan 89,7 persen dari seluruh jumlah tenaga kerja informal serta 83,28 persen dari seluruh jumlah tenaga kerja ada di pedesaan (BPS). Jumlahnya di sektor perkotaan adalah 4,66 juta orang, atau 10,63 persen dari jumlah tenaga kerja informal dan 43,59 persen dari jumlah tenaga kerja perkotaan.

Di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik pada Pebruari 2008, 73,53 juta orang dari 102,05 juta pekerja Indonesia (72 persen) bekerja di sektor informal.

Sektor informal ini tidak membebani pemerintah, dan sektor informal bakal menjadi gerakan aset kecil berpotensi besar. Atas dasar itu, *International Labour Organization* (ILO) (Dian Tariningsih, 1995 : 41) menawarkan empat bentuk pembinaan pendidikan orang dewasa termasuk pedagang jajan jalanan sebagai berikut : (1) Upaya pembinaan dan pematangan "basic skill" termasuk cara menyusun

dagangan, kesehatan, pengepakan dll; (2) *Technical and Vocational Training* termasuk bentuk, warna, aroma, dan rasa; (3) *Social and Economic Oriented* termasuk perencanaan, perhitungan untung-rugi, dan investasi kecil; dan (4) *Cultural and Scientific* termasuk diversifikasi dengan mempertimbangkan produk jajan masyarakat lainnya.

Ada beberapa argumen lain yang turut menggarisbawahi pentingnya promosi sektor informal. *Pertama*, data yang ada menunjukkan bahwa sektor informal mampu menciptakan surplus hasil, di tengah-tengah lingkungan yang bermusuhan sekalipun, yang menghalangi aksesnya untuk mendapatkan berbagai fasilitas kredit, valuta asing dan konsesi pajak. Jadi, surplus yang dihasilkan terbukti menjadi pendorong yang amat positif bagi pertumbuhan ekonomi perkotaan. *Kedua*, sebagai akibat dari rendahnya intensitas permodalan, sektor informal hanya memerlukan atau menyerap sebagian kecil modal dari jumlah modal yang diperlukan oleh sektor formal untuk memperkerjakan sejumlah tenaga kerja yang sama. Ini merupakan salah satu cara memupuk tabungan nasional bagi negara-negara berkembang yang sering menghadapi kesulitan atau kekurangan modal. *Ketiga*, sektor informal juga mampu memberikan latihan kerja dan magang dengan biaya yang sangat murah apabila dibandingkan dengan biaya yang dituntut oleh lembaga-lembaga dalam sektor formal, sehingga sektor informal dapat memainkan peranan penting dalam rangka formasi atau pembentukan dan pembinaan sumber daya manusia. Sedangkan argumen yang *keempat*, sektor informal menciptakan permintaan atas tenaga kerja semiterlatih dan kurang ahli yang jumlahnya secara absolut maupun relatif (persentase terhadap total angkatan kerja) terus meningkat dan yang tidak mungkin terserap oleh sektor formal yang hanya mau menerima tenaga kerja berkeahlian. *Kelima*, sektor informal lebih banyak dan lebih mudah menerapkan teknologi tepat guna dan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. *Keenam*, sektor informal memainkan peranan yang sangat penting dalam proses daur ulang sampah atau limbah. Di sektor ini, segala macam barang yang sudah dibuang dapat dimanfaatkan kembali, yakni mulai dari kaleng-kaleng bekas, kerta sisa, puntung rokok, dan sebagainya. Barang-barang yang telah dicampakkan ke tong sampah itu kemudian terbukti masih bisa masuk ke sektor industri dan dijadikan komoditi pokok bagi kalangan berpenghasilan rendah. Argumen *ketujuh*, atau yang terakhir, promosi sektor informal itu akan pemeratakan distribusi hasil-hasil pembangunan bagi penduduk miskin, yang kebanyakan memang terpusat di sektor informal (Michael P. Todaro, 1998 : 324-325).

Eksistensi dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi kontemporer bukanlah suatu gejala negatif tetapi lebih sebagai realitas ekonomi kerakyatan yang berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan. Kehadiran sektor informal menurut Lukman Sutrisno merupakan mekanisme pelindung dari massa pinggiran karena mereka tidak mampu berperan dalam sistem perekonomian sekarang.

### **SEKTOR INFORMAL**

Beberapa orang menyebut ekonomi informal sebagai ekonomi kerakyatan. Pedagang kaki lima adalah salah satu contoh ekonomi informal. Mudahnya, ekonomi informal adalah ekonomi yang tidak membayar pajak.

Apakah sektor informal—Pedagang Kaki Lima memiliki hak terhadap ruang kota? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang konsep informalitas perkotaan (*urban informality*). Konsep informalitas perkotaan ini tak terlepas dari dikotomi sektor formal dan sektor informal yang mulai dibicarakan pada awal tahun 1970.

Ananya Roy dan Nezar Alsayyad (2004) mengenalkan konsep informalitas perkotaan sebagai logika yang menjelaskan proses transformasi perkotaan. Mereka tidak menekankan dikotomi sektor formal dan informal, tetapi pada pengertian bahwa informalitas sebagai sektor yang tidak terpisahkan dalam struktur ekonomi masyarakat. Menurut mereka, informalitas ini adalah suatu moda urbanisasi yang menghubungkan berbagai kegiatan ekonomi dan ruang di kawasan perkotaan (Deden Rukmana, *Harian Kompas*, 26 Juni 2009).

Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 telah memasukkan pentingnya sektor informal di perkotaan.

Kegiatan ekonomi di kota terbagi menjadi dua kelompok, yaitu : 1. Sektor formal (perusahaan) yang bentuknya terorganisasi, cara kerjanya teratur pembiayaannya dari sumber resmi, menggunakan buruh dengan upah, dsb. 2. Sektor informal, yang bentuknya tidak terorganisasi (kebanyakan usaha sendiri), cara kerja tidak teratur, biaya dari sendiri atau sumber tak resmi, dikerjakan oleh anggota keluarga (Johara T. Jayadinata, 1999 : 146).

Sektor informal didefinisikan sebagai kegiatan usaha masyarakat (rakyat) yang dilakukan, baik di desa maupun di kota, tidak termasuk sektor pertanian (Djaali, Dkk., 1997 : 176). Sampai saat ini pengertian sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha dan pelaku sektor informal antara lain : kegiatan usaha dengan sumber modal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi tepat guna, pekerja terutama berasal dari tenaga kerja keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumberdaya lokal dan daerah, sebagian besar kegiatan melayani kebutuhan rakyat kelas menengah ke bawah, pendidikan dan kualitas sumber daya manusia pelaku tergolong rendah. Pengertian bersumber pada ciri usaha dan pengusaha terasa mengandung kelemahan karena sektor informal sebagai sektor ekonomi rakyat mempunyai akar sosial dan budaya. Berarti tidak semua gejala sektor informal merupakan gejala ekonomi saja. Oleh karena itu, dalam pembinaan sektor informal tidak hanya didekati secara ekonomi saja, tetapi perlu didekati dengan pendekatan sosial dan budaya. Artinya, dalam pembinaan sektor informal perlu pendekatan pengembangan masyarakat.

Aktivitas-aktivitas sektor informal pada umumnya dikesampingkan, jarang didukung, bahkan seringkali diatur oleh aturan yang ketat, dan terkadang tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Aktivitas-Aktivitas informal tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan di pinggiran kota-kota besar, tetapi bahkan juga meliputi berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas-aktivitas informal adalah cara melakukan sesuatu yang menurut Alan Gilbert dan Josef Gugler (1996 : 96) ditandai dengan : (a) Mudah untuk dimasuki; (b) Bersandar pada sumberdaya lokal; (c) Usaha milik sendiri; (d) Operasinya dalam skala kecil; (e) Padat karya dan teknologinya bersifat adaptif; (f) Keterampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal; dan (g) Tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.

### **CIRI-CIRI SEKTOR INFORMAL**

Ciri dari kegiatan informal (Buchari Alma, 1992 : 139) adalah : (1) tidak terorganisasi secara baik; (2) tidak memiliki izin usaha yang sah; (3) pola kegiatan tidak teratur, tidak ada jam kerja; (4) usahanya tidak kontinyu/mudah berganti usaha; (5) modal usaha relatif kecil, barang dagangan milik sendiri ataupun milik orang lain; (6) teknologi yang digunakan sangat sederhana; dan (7) umumnya tingkat pendidikan rendah.

Wirosardjono *dalam* Paulus Hariyono (2007 : 108) mengemukakan ciri-ciri sektor informal sebagai berikut : (1) Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, maupun penerimaan. (2) Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga kegiatannya sering dikatakan “liar”. (3) Modal, peralatan, dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian. (4) Tidak mempunyai tempat tetap. (5) Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapat rendah. (6) Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja. (7) Umumnya satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama. (8) Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkredit, dan sebagainya.

Hidayat (1978) *dalam* Ngakan Putu Kiskinda (1989 : 51), ciri-ciri pokok dari sektor informal yaitu : (1) Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia di sektor formal; (2) Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha; (3) Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja; (4) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini; (5) Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub sektor ke lain sub sektor; (6) Teknologi yang dipergunakan bersifat primitif; (7) Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil; (8) Untuk menjalankan usaha tidak mempergunakan pendidikan formal karena pendidikan yang diperlukan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja; (9) Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-man enterprise* dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga; (10) Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi; dan (11) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa yang berpenghasilan rendah, tetapi kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah.

Todaro dan Abdullah, Manning (1991) *dalam* Paulus Hariyono (2007 : 109) menyebutkan ciri-ciri sektor informal sebagai berikut. (1) Sebagian besar memiliki produksi yang berskala kecil, aktivitas-aktivitas jasa dimiliki oleh perorangan atau keluarga, dan dengan menggunakan teknologi yang sederhana. (2) Umumnya para pekerja bekerja sendiri dan sedikit yang memiliki pendidikan formal yang tinggi. (3) Produktivitas pekerja dan penghasilan cenderung lebih rendah daripada di sektor formal. (4) Para pekerja di sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan seperti yang didapat dari sektor formal dalam bentuk jaminan kelangsungan kerja, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pensiun. (5) Kebanyakan pekerja yang memasuki sektor informal adalah pendatang baru dari desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal. (6) Motivasi mereka biasanya untuk mendapatkan



penghasilan untuk bertujuan hanya untuk dapat hidup (*survive*), bukannya untuk mendapatkan keuntungan dan hanya mengandalkan pada sumber daya yang ada pada mereka untuk menciptakan pekerjaan. (7) Mereka berupaya agar sebanyak mungkin anggota keluarga mereka ikut berperan serta dalam kegiatan yang mendatangkan penghasilan dan meskipun begitu mereka bekerja dengan waktu yang panjang. (8) Kebanyakan di antara mereka menempati gubuk-gubuk yang mereka buat sendiri di kawasan kumuh (*slum area*) dan permukiman liar (*scelter*) yang umumnya kurang tersentuh pelayanan jasa seperti listrik, air, transportasi, serta jasa-jasa kesehatan dan pendidikan.

Sethuraman (Manning, 1991) mengatakan sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Akan tetapi, sektor informal tidak bisa disebutkan sebagai "perusahaan" berskala kecil. Sektor informal terutama dianggap sebagai manivestasi dari suatu pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang. Mereka memasuki kegiatan berskala kecil di kota, terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan karena mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil dan kebanyakan para migran. Jelaslah bahwa mereka bukan kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukan pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya.

Lebih lanjut Sethuraman menyatakan bahwa sektor informal di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evolusi daripada dianggap sebagai sekelompok perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan (*inputs*) modal dan pengelolaan (*manajerial*) yang besar. Skala operasi adalah karakteristik terpenting yang muncul dari konsep sektor informal. Meskipun skala operasi dapat diukur dengan berbagai macam cara, antara lain meliputi besarnya modal, omzet, dan lain-lain, maka alat ukur yang paling tepat untuk mengukur skala operasi adalah jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Melihat skala kota sebagai suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari unit-unit produksi dan distribusi, maka unit-unit yang memiliki 10 orang ke bawah diklasifikasikan ke dalam sektor informal. Pemilihan kriteria didasarkan pada keyakinan bahwa perusahaan yang memiliki lebih dari 10 pekerja tidak mungkin didirikan dengan motif utama memanfaatkan kesempatan kerja.

Dari pengertian yang diberikan Soetjipto Wirosardjono, Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Todaro, Abdullah dan Sethuraman dapat disebutkan bahwa sektor informal yang dimaksud memiliki ciri sebagai berikut. (1) Modal maupun omzetnya biasanya kecil dan usaha itu dilakukan atas dasar hitungan harian. (2) Peralatan dan perlengkapan yang digunakan biasanya sederhana. (3) Tidak mempunyai tempat tetap dan mudah dipindahkan oleh pihak yang berwenang biasanya menempati di lokasi tertentu di sepanjang jalan kaki lima (*trotoar*). (4) Umumnya kegiatan dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendaat rendah. (5) Relatif tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga. (6) Umumnya tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, teman dekat, orang yang dipercaya, atau berasal dari daerah yang sama. (7) Pengelolanya dibantu oleh sejumlah kecil

orang (menurut Sethuraman kurang dari 10 orang). (8) Lebih dimaksudkan untuk mencari lapangan pekerjaan daripada untuk mencari keuntungan.

### **MASALAH SEKTOR INFORMAL**

Kehadiran sektor informal yang tampaknya tidak dikehendaki oleh pihak birokrasi karena merusak tata ruang kota, sesungguhnya juga tidak dikehendaki oleh mereka sendiri. Tetapi karena tidak dapat memasuki sistem ekonomi yang berkembang atau karena sistem ekonomi yang sengaja dikembangkan memang tidak memberi ruang formal bagi mereka dan oleh karena itulah mereka disebut sebagai sektor informal dan dipinggirkan, merupakan sebab pertama tumbuhnya sektor informal. Jadi yang menyebabkan lahirnya sektor informal adalah sistem tata ekonomi yang ada.

Denagan ciri-ciri sektor informal tersebut di atas telah menunjukkan berbagai masalah yang mereka hadapi. *Pertama*, lemahnya posisi sektor informal pada pandangan hukum yang diberlakukan, mengakibatkan mereka menjadi sasaran empuk kelompok pemeras. Lemahnya posisi tersebut disebabkan oleh tidak adanya hukum yang melindungi mereka, pada hal hukum yang melindungi usaha formal cukup banyak seperti undang-undang ketenagakerjaan; dan disebabkan tidak adanya organisasi di antara mereka yang mandiri dan kuat di samping kesempatan maupun kesadaran berorganisasi rendah, juga karena organisasi sektor informal memang tidak memperoleh ruang dalam masa pembangunan ini karena organisasi yang tumbuh dari bawah dianggap berbahaya.

*Kedua*, sektor informal menghadapi kesulitan mengembangkan usahanya disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (1) kecilnya modal usaha (sebatas yang bisa dibawa ke mana-mana) akibat mereka tidak terjangkau oleh sumbu daya ekonomi (bank) dan kecilnya peluang menyetor tabungan untuk menambah modal; (2) ruang gerak sektor informal sangat terbatas dan tidak memperoleh pengakuan dalam sistem ekonomi, membuat mereka tidak mungkin memperluas usahanya.

*Ketiga*, sektor informal tidak memperoleh tempat yang layak usaha atau tidak dimasukkan dalam rencana tata ruang apapun misalnya tata ruang kota, tata ruang pemukiman, atau tata ruang tempat ibadah maupun tata ruang di mana manusia berkumpul sesaat. Hal ini mengakibatkan mereka memasuki tempat-tempat yang dianggap dapat mengganggu ketertiban dan keindahan kota dan oleh karena itu pihak ketertiban memburu dan mengusir mereka.

### **KENDALA KULTURAL**

Menurut Todaro (1983) *dalam* (Dian Tariningsih, 1995 : 41) ada 3 hambatan kultural yang sering menyertai para pelaku sektor informal, yaitu : (1) *The low levels of living* : sebagai tingkat hidup yang rendah sehingga melahirkan kemiskinan, kemelaratan dan kebodohan yang akhirnya status gizi mereka dekat rawan pangan; (2) *The low levels of self esteem* : tingkat harga diri rendah, miskin moral, mental, kepribadian dan pudarnya motivasi mencapai kualitas hidup yang lebih baik, contoh nyata keadaan kelompok lokalite yang rutin lapar gizi; dan (3) *The limited of freedom* : terbatasnya kemampuan, kemauan dan kesempatan unjuk potensi sehingga sulit mandiri dan budaya menunggu sehingga selalu tergantung pada pihak lain. Contoh nyata budaya "*coping mekanisme*" di mana dengan aktif menunggu "*Jot-an*" sebagai penerima makanan dan sejenisnya dari orang lain.

### **CARA PEMECAHAN**

Dengan mengetahui akar masalah yang dihadapi sektor informal tersebut ada beberapa jalan keluar yang dapat memecahkan masalah sektor informal sehingga mereka dapat berkembang dan bahkan berubah menjadi sektor formal. (1) Memasukkan apa yang disebut sebagai sektor informal ke dalam tatanan ekonomi yang dikembangkan sehingga mereka menjadi bagian yang diakui keberadaannya. (2) Mengembangkan dan memperkuat organisasi sektor informal sehingga memiliki posisi yang cukup kuat dalam menghadapi ancaman pemerasan pihak luar dan mampu mengelola anggotanya sendiri. (3) Mendekatkan sektor informal kepada sumber daya ekonomi secara layak yang memungkinkan mereka mampu mengembangkan usahanya. (4) Memberi tempat pada setiap tata ruang yang akan diwujudkan sehingga keberadaan sektor ini tidak mengganggu keindahan dan ketertiban. (5) Menyediakan peraturan atau undang-undang yang melindungi kehidupan sektor ini dari ancaman pihak luar maupun dari ancaman antar mereka sendiri. (6) Menghindari kebijakan-kebijakan yang akan merubah nasib mereka tanpa persetujuan mereka, misalnya perbaikan tata ruang pasar atas kemauan penguasa saja sering mengakibatkan mereka terusir dari pasar tempat mereka berjualan dan digantikan oleh pedagang baru dan besar.

Usulan pemecahan seperti terungkap di atas memerlukan pendekatan yang partisipatoris artinya melalui penelaahan bersama kelompok sasaran, perumusan bersama dan perencanaan secara partisipatoris sehingga hasil-hasil yang diperoleh adalah menjadi milik kelompok sasaran bukan pemberian pihak luar. Dengan pendekatan ini dapat diharapkan program pengembangan sektor ini dapat terus berkembang.

### **EKONOMI RAKYAT ?**

Salah satu sektor informal yang dominan di daerah perkotaan adalah pedagang atau pedagang pinggir jalan yang merupakan kegiatan ekonomi skala kecil yang menghasilkan dan atau mendistribusikan barang dan jasa. Kebanyakan barang-barang yang dijual oleh pedagang kali lima adalah barang-barang *convenience* (berkategori menyenangkan seperti souvenir atau kebutuhan sehari-hari di luar sembako) yang dibeli dengan cara emosional, begitu melihat barang langsung timbul keinginan membeli.

Dari sektor-sektor ekonomi yang ada, sektor perdagangan yang paling banyak menyerap pekerja di sektor informal (Hananto Sigit, 1989 : 7).

Nah, apa itu ekonomi kerakyatan? Umar Juoro *dalam* Mariman Darto (2004 : 50) mendefinisikan ekonomi rakyat sebagai berikut : *pertama*, ekonomi rakyat sebagai sistem ekonomi yang mencakup konsep, kebijakan, dan strategi pengembangannya. *Kedua*, ekonomi rakyat (*people economy*) merupakan pelaku ekonomi, yakni rakyat itu sendiri dalam bentuk koperasi, usaha menengah, kecil maupun gurem; usaha besar tidak termasuk dalam ekonomi rakyat. *Ketiga*, perekonomian rakyat (*state of people economy*) merupakan kondisi atau keadaan ekonomi rakyat.

Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga atau orang per orang. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat berarti perekonomian nasional berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda perekonomian mereka

sendiri (Sumodiningrat *dalam* Mardiasmo, 2002 : 63). Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini relevan dengan semangat pasal 33 UUD 1945, bahwa produksi ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dilaksanakan oleh semua dan di bawah “pemilikan” anggota-anggota masyarakat.

Sebagai pelaku ekonomi, rakyat menjalankan usahanya dalam bentuk : *pertama*, usaha tradisional seperti nelayan tradisional misalnya. *Kedua*, sektor usahanya berupa sektor informal, misalnya pedagang kaki lima, memetik hasil alam dengan teknologi sederhana (seperti memetik hasil hutan dan mengekstraksi bahan tambang/mineral atau pertambangan rakyat), dan melakukan budidaya secara sederhana (seperti perkebunan rakyat dan perikanan rakyat). *Ketiga*, *small, but modern enterprises* atau juga dalam bentuk *family enterprises* yang dikelola secara profesional (Umar Juoro, 1999 *dalam* Mariman Darto, 2004 : 51).

Lalu, yang disebut dengan rakyat itu siapa sih? Pemahaman terhadap definisi rakyat menjadi hal yang sangat penting karena kelompok sasaran atau *target group* yang dituju harus jelas (*well defined*). Pengertian ekonomi rakyat dapat dibedakan ke dalam tiga sudut pandang (Umar Juoro *dalam* Mariman Darto, 2004 : 51), *pertama*, dari sudut pandang hukum internasional, syarat berdirinya suatu negara adalah adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah. Dalam konteks ini, maka yang bukan pemerintah adalah rakyat. *Kedua*, menurut pandangan Marx, rakyat disebut sebagai kaum proletar (kaum pekerja). Dalam pengertian itu, pemilik modal atau konglomerat tidak dapat didefinisikan sebagai rakyat. *Ketiga*, di Prancis dikenal istilah *petit people* atau terjemahan bebasnya dalam konteks ke Indonesia adalah “*wong cilik*”.

Menurut Sri Edi Swasono (Mariman Darto, 2004 : 51), definisi rakyat bisa dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, dari sudut pandang politik, rakyat merupakan konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik atau statistik. Karena itu rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah *the common people*, rakyat adalah “orang banyak”. *Kedua*, dari sudut pandang kepentingan publik, rakyat yang membedakan kepentingan orang-seorang. Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Ada yang disebut *public intereset* atau *public wants*, yang berbeda dengan *private intereset* dan *private wants*. Sudah lama pula mempertentangkan antara *public needs* (yang berdimensi domain publik) dan *individual privacy*. Istilah rakyat memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat publik itu. Mereka yang tidak mampu mengerti paham kebersamaan (*broderbood* atau *broderschap*) pada dasarnya karena mereka tidak mampu memahami arti dan makna luhur dari istilah “rakyat” itu, tidak mampu memahami kemuliaan adagium “*vox populi vox dei*”, di mana rakyat lebih dekat dengan arti masyarakat atau umat, bukan dalam arti penduduk yang 210 juta.

Sumodiningrat (Mardiasmo, 2002 : 63), menegaskan bahwa kriteria rakyat haruslah didefinisikan secara jelas : “Rakyat yang dimaksud adalah rakyat biasa atau setiap warga negara biasa. Ekonomi rakyat adalah ekonomi pribumi bukan aktivitas perekonomian yang berasal dari luar masyarakat. Istilah ekonomi rakyat pada dasarnya merujuk pada pemihakan pada ekonomi usaha kecil dan menengah. Tantangan pembangunan nasional dalam masa mendatang adalah menghidupkan ekonomi usaha kecil dan menengah.”

### ***KOPERASI WUJUD EKONOMI KERAKYATAN***

Contoh lain dari ekonomi kerakyatan adalah koperasi. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 1 ayat (1) Koperasi didefinisikan sebagai berikut : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.”

Dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI Periode 2000-2004, dikemukakan : “Usaha kecil, termasuk dalam hal ini adalah usaha mikro yang memiliki lingkup usaha dan karakteristik tersendiri, adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagai berikut : memiliki kekayaan bersih hingga sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); milik Warga Negara Indonesia; berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai dan berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; dan berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.” (2002 : 5)

Secara tegas Proopenas 2000-2004, menempatkan pengembangan UKMK sebagai prioritas pembangunan. Prioritas program pembangunan ekonomi nasional meliputi tujuh butir (Renstra Kementerian KUKM Republik Indonesia, yaitu : “(1) menanggulangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok rakyat; (2) mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah, dan koperasi; (3) menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan; (4) memacu peningkatan daya saing; (5) meningkatkan investasi; (6) menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi; dan (7) memanfaatkan sumberdaya alam, secara berkelanjutan.” (Renstra Kementerian KUKM R I, 2002 : 25)

Keberhasilan pembangunan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dapat diukur dengan : “(1) meningkatnya pangsa pasar KUKM dalam pembentukan PDB/PDRB; (2) peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja, berikut mutu dan kualitasnya; (3) peningkatan produktivitas yang bisa diukur dengan rasio nilai tambah per tenaga kerja, rasio laba terhadap aktiva, rasio penjualan terhadap biaya; (4) peningkatan daya saing KUKM, diukur dengan peningkatan perdagangan lintas-daerah, peningkatan nilai dan pangsa pasar ekspor; (5) berkembang dan berkesinambungnya penjualan usaha, dapat diukur dengan peningkatan jumlah investasi, jumlah omzet penjualan, jumlah aktiva, perluasan usaha berupa diversifikasi produk jaringan dan mitra usahanya, stabilitas usaa dan etos kerja yang tinggi” (Renstra Kementerian KUKM R I, 2002 : 26)

## BAB XVII KOTA DAN ANCAMAN SINDROMA KEMISKINAN

"Kemiskinan dan kefakiran sering membawa kepada kekafiran dan keingkaran" (HR. Abu Naim).  
Bahkan Ali Bin Abi Thalib dengan tegas mengatakan :  
"Seandainya kemiskinan berwujud seorang manusia, niscaya aku akan membunuhnya."

Gantungan kalender 2006 telah dicabut pada dinding-dinding rumah ataupun kantor kita, dan diganti dengan kalender baru 2007. Apa yang diharapkan di tahun 2007 ini? Yang jelas kita harapkan utopis, bukan distopia. Kita inginkan cerah, bukan gerah. Kita impikan hidup selamat, bukan bunuh diri (*Suicide of survival ? The challenger of the year 2007*). Kita dambakan megatrend, bukan megamistake. Dan ini sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi di tahun 2007 ini. Apalagi, diawal tahun 2007 ini, pusparagam bencana alam datang silih berganti, yang bukan suatu hal yang mustahil, bakal menambah barisan kaum miskin. Misalnya, akibat cuaca buruk, para pencari nafkah di laut tidak dapat beroperasi. Demikian halnya, petani bakal mendapat tantangan akibat cuaca yang tak menentu. Banjir yang menerjang lahan pertanian misal, yang mau tidak mau bakal mengganggu produk pertanian.

Satu di antara "seribu satu macam" persoalan negeri yang bakal tetap menghadang yakni prolematika kemiskinan, apalagi negeri ini telah dibantai bencana : tsunami, gempa, kebakaran, tanah longsor, banjir, angin putting beliung, dan lain-lain.

Kenapa dengan kemiskinan ? Sebab, kemiskinan merupakan kerawanan dalam suatu negara, demikian Gunnar Myrdal (1968). John Haba (Suara Pembaruan, 12/8/1997), mensinyalir, masalah kemiskinan terangkat ke permukaan dihubungkan dengan sejumlah penyebab. *Pertama*, kemiskinan dilihat sebagai determinan faktor yang menghalangi derap maju pembangunan, sebab orang atau masyarakat miskin dianggap tidak punya keterampilan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. *Kedua*, kemiskinan adalah musuh peradaban manusia dan modernisasi. Artinya, arus pembangunan yang berlangsung cepat ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Tetapi di sinilah paradoks dari modernisasi itu sendiri yang kadang kala menyeret hidup manusia ke dalam kemelaratan. *Ketiga*, kemiskinan ditetapkan sebagai bagian dari kebijakan nasional.

"Kemiskinan dan kefakiran sering membawa kepada kekafiran dan keingkaran" (HR. Abu Naim). Bahkan Ali Bin Abi Thalib dengan tegas mengatakan "Seandainya kemiskinan berwujud seorang manusia, niscaya aku akan membunuhnya."

Pada panorama lain, Prijono Tjiptoherijanto (1997), melihat beberapa alasan penting, mengapa kemiskinan perlu mendapat perhatian untuk ditanggulangi. *Pertama*, kemiskinan merupakan kondisi yang kurang beruntung karena bagi kaum miskin akses terhadap perubahan politik institusional terbatas. *Kedua*, kemiskinan merupakan kondisi yang cenderung menjerumuskan orang miskin ke dalam tindak kriminalitas. *Ketiga*, bagi pembuat kebijaksanaan, kemiskinan itu sendiri mencerminkan kegagalan pelaksanaan pembangunan yang telah dihadapi pada masa lampau.

Probalematika kemiskinan itu tak ubahnya sebuah "lingkaran setan" atau "lingkaran tak berujung pangkal" (*the vicious circle*). Pinjam istilah Prof. Nurkse "lingkaran setan

kemiskinan” (*vicious circle of poverty*). Baik kemiskinan absolut (*absolute poverty*), kemiskinan relatif (*relative poverty*), kemiskinan kolektif (*collective poverty*), kemiskinan siklikal (*cyclical poverty*), maupun kemiskinan perorangan (*individual poverty*). Latar penyebabnya pun, dapat bersifat natural (alamiah), struktural (turun-temurun), maupun penyebab yang bersifat kultural (budaya). Sebagaimana pernah dikemukakan Oscar Lewis dalam *The Culture of Poverty*-nya (1968), kemiskinan adalah suatu kebudayaan yang diwariskan secara terus-menerus, yang disosialisasikan dari orang tua ke generasi anak-anak secara terus-menerus. Inilah yang melestarikan ”kebudayaan kemiskinan”. Dan, kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pola kelakuan yang mereka miliki dari dalam kebudayaan mereka sendiri, demikian Kriebert dalam *The Relationship Between Socio-Economic Rank and Behavior* (1963). Dan menurut pandangan ”mazhab fatalistik (fatalism)”, kaya dan miskin adalah takdir Tuhan.

Kembali ke latar penyebab kemiskinan yang bersifat struktural, Robert Chambers (1983) mensinyalir, bahwa inti dari kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya terletak pada apa yang disebut ”*deprivation trap*” atau ”perangkap kemiskinan”.

*Deprivation trap* dimaksud secara rinci terdiri atas lima unsur, yaitu : (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini acapkali saling berkait satu sama lain, sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup keluarga miskin. Menurut Chambers, dari kelima unsur tersebut, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapat perhatian yang serius dan utama. Kerentanan akan menimbulkan ”*poverty rackerts*” atau ”roda penggerak kemiskinan” yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan aset produksinya sehingga mereka menjadi miskin dan terpuruk di lembah kemiskinan.

Kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi tersebut pada gilirannya, mengakibatkan : tingginya beban sosial ekonomi masyarakat; rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia; rendahnya partisipasi aktif masyarakat; menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan kemungkinan pada merosotnya mutu generasi yang akan datang (Dirjen Cipta Karya, 2005).

Guna mengentas kerentanan, keterisolasian, dan ketidakberdayaan kaum ”the haves” tersebut diperlukan strategi pemberdayaan. Pemberdayaan itu sendiri, menurut Baily (1992) merupakan suatu proses sosial yang multi dimensial yang menolong orang-orang (masyarakat) memperoleh kontrol terhadap kehidupannya sendiri (*help people gain control over their own lives*). Menurut, Baily, pemberdayaan (*empowerment*) mempunyai tiga komponen dasar : *pertama*, *empowerment* sebagai multi dimensional yang berarti di dalamnya dapat terkait bidang sosial, psikologi, ekonomi, dan bidang lainnya; *kedua*, *empowerment* sebagai sosial, yang berarti dalam pemberdayaan memperhatikan berbagai tingkat dalam masyarakat seperti individu, kelompok (*group*), dan masyarakat (*community*); dan *ketiga*, *empowerment* sebagai suatu proses yang berarti dalam pemberdayaan memperhatikan terjadi hubungan dengan orang lain (*relationship to others*). Pemberdayaan dalam konsep ini dapat bermakna bahwa sebuah proses yang dapat diidentikkan dengan jalan kecil atau perjalanan (*path or journey*).

Muara akhir dari pemberdayaan, menurut Payne (Rukminto Adi, 2001), membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Masih gayutan dengan penyebab kemiskinan ini, pinjam pendapat Galbraith (1983), kemiskinannya itu sebenarnya adalah sebab-akibat. Dengan lain perkataan, perlu memahami secara detail, akurat dan jitu tentang "back ground" seseorang menjadi miskin. Sebagai misal, Ellis (1984), melihat ada tiga dimensi kemiskinan, yaitu kemiskinan ekonomi, kemiskinan politik, dan sosial. Hosbawn (1980) dalam bukunya "Kemiskinan dan Mobilisasi Pembangunan Desa" melihat kemiskinan juga dari tiga aspek, yaitu : *pertama*, kemiskinan sosial, seperti perasaan rendah diri dan ketergantungan sama orang lain; *kedua*, pauperisma, seperti orang yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sampai pemenuhan kebutuhan minimal sekalipun; dan *ketiga*, kemiskinan moral, yaitu tidak hanya ketidakmampuan yang bersifat ekonomi dan sosial, tetapi termasuk yang tidak mengetahui tata cara bermasyarakat (adat istiadat).

E de Vries (Alwi Yunus, 1989), mensinyalir, masalah kekurangan tanah sebagai indikator. Sartono Kartidirdjo (1988), kemiskinan terjadi karena distribusi tanah dan pendapatan yang tidak merata. Boeke (Ahmad Usman, 1991), menunjukkan, kekurangan uang sebagai penyebab. Peny (1990) menyimpulkan, peran sistem pasar menimbulkan kemiskinan. Elson (1990) berpendapat, penjajahan terlampau lama menyebabkan kemiskinan. Robert Malthus (Nasution A. Hamzah, 1973), "yang menyebabkan adanya kemelataran dari sebagian umat manusia adalah karena antara besarnya penduduk di satu pihak, dan di lain pihak produksi bahan makanan terdapat ketidakseimbangan, berlipat gandanya penduduk itu lebih cepat daripada bahan makanan."

Lester Frank Ward (1967), Brembeck (1978), dan Robert M. Hatchis (1981), sama-sama menyimpulkan, pendidikan sebagai penyebab kemiskinan. Mahbul Ul Haq (1983) mengungkapkan, tujuan pembangunan ekonomi mengejar pertumbuhan menimbulkan kemiskinan. H. Roeslan Abdulgani (Harian Merdeka, 21/5/1993), melihat "*mass-poverty*" atau kemiskinan massal adalah karena adanya sistem "eksploitasi" yang melekat pada susunan masyarakat pada umumnya. Sistem eksploitasi oleh kelompok masyarakat yang kuat-kaya-berkuasa terhadap mayoritas masyarakat yang lemah-miskin-tak berkuasa, itulah akar dan pokok sumber sebab kemiskinan umum di mana-mana. Dalam bahasa Perancis terkenal dengan ucapan "*exploitation de l'homme pa l'home*"--penghisapan oleh minoritas manusia kuat-kaya terhadap mayoritas manusia lemah-miskin.

Atau, dengan retorika lain, St. Aminah (Pelita, 10/8/1993), kemiskinan disebabkan adanya gejala "*kaususasi sirkuler kumulatif*". Artinya, yang menikmati tetesan pertumbuhan ekonomi adalah sebatas pada orang kaya (yang telah memiliki akses dan menguasai asset ekonomi dan politik). Sehingga yang kaya akan makin kaya dan yang miskin bertambah miskin.

Atau, dalam sudut pandang mantan Presiden Soeharto. Inti masalah kemiskinan adalah masih rendahnya tingkat kemampuan untuk mengelola sumber daya yang



tersedia. Ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat, berakar pada perbedaan peluang dan kemampuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia. Demikian ungkapan mantan Presiden Soeharto ketika menerima penghargaan dari UNDP dan peresmian pembukaan Konferensi Regional tentang Perbandingan Pengalaman Pengentasan Kemiskinan di Istana Negara (Suara Pembaruan, 8/9/1997).

Dengan melihat akar penyebab kemiskinan yang begitu kompleksitas, menuntut kearifan dan adanya "*political will*" pemerintah untuk mengentasannya, baik melalui pendekatan politik, budaya, religi, pendidikan; pendekatan melalui program sektoral, regional ataupun program khusus. Demikian pula sasaran pengentasannya, harus akurat dan jelas. Sebab, ada tujuh kelompok masyarakat yang menjadi konsentrasi kemiskinan. *Pertama*, petani gurem yang memiliki lahan persawahan sempit (di bawah 0,25 ha); *kedua*, buruh tani yang tidak memiliki tanah; *ketiga*, nelayan; *keempat*, perambah hutan; *kelima*, penganggur; *keenam*, mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan/sekolah; dan *ketujuh*, mereka yang kena drop out (putus sekolah). Sebagaimana pernah dikemukakan Edy Priyono (Republika, 16/9/1993), lingkaran kemiskinan (LK) merupakan mata rantai tak terputus yang menghubungkan pendidikan, ketenagakerjaan, dan kemiskinan.

Secara detail, B.S. Muljana (Kompas, 3/11/1993) menjelaskan sejumlah faktor penyebab kemiskinan, yakni : pemilikan lahan pertanian yang sangat kecil, yang terutama merupakan akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi terlebih-lebih di masa lampau dan sistem hukum warisan yang memungkinkan semakin terpecah-pecahnya pemilikan tanah oleh rakyat petani dan faktor ini lebih ganas akibatnya apabila tanahnya tidak subur dan sulit air; berlangsungnya sistem penguasaan (tidak usah sistem pemilikan) tanah yang kurang seimbang; pengetahuan dan ketrampilan yang kurang memadai baik dalam tingkat maupun jenisnya; lingkungan sosial budaya yang antara lain mengakibatkan kurang tingginya hasrat untuk lebih maju dalam kehidupan duniawi; tidak atau kurang adanya alternatif mata pencaharian selain yang dijalannya; sulitnya sistem perkreditan yang sesuai dengan pola mata pencaharian rakyat, khususnya pola mata pencaharian rakyat pedesaan, untuk berkembang; kuatnya kedudukan monopoli dan monopsoni yang dihadapi oleh para petani dan pengusaha kecil di pedesaan maupun di perkotaan; tempat pemukiman yang terisolasi, baik dalam arti fisik maupun nonfisik, baik dilihat dari kepentingan politik maupun kepentingan sosial budaya rakyat yang bersangkutan; masih adanya pejabat-pejabat dan petugas-petugas pemerintah di pusat maupun di daerah-daerah, baik di kota maupun di desa, yang kurang atau sulit sadar, bahwa keberadaan mereka, menjadi pejabat pada umumnya tidak lain adalah adanya kebutuhan rakyat akan pelayanan; dan "pungli" terhadap rakyat kecil.

Dengan memahami secara tepat, akurat dan jitu akar dan penyebab kemiskinan, maka perlu dicarikan solusi-alternatif yang efektif dan efisien.

Mubyarto (1982), pernah mengemukakan, siapapun orangnya dan bagaimana tata kehidupannya, serta apapun yang diperbuatnya, asal saja dirinya tergolong dalam kategori warga negara Indonesia, tentu sepakat, bahwa yang paling dibutuhkan adalah mencoba mendatangkan kemakmuran dan meninggalkan kemiskinan. Bahkan para pelacur jalanapun tentu akan senang jika pembangunan menyentuh kehidupan kaum lemah di Republik ini.

Dalam versi lain, Sri Edi Swasono (Harian Merdeka, 30/11/1993), menawarkan, isu kemiskinan, perlu dipecahkan melalui strategi ganda, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, dengan mengentaskan penduduk miskin (meningkatkan pendapatan), sedangkan yang tidak langsung, dengan mencegah proses pemiskinan, seperti terjadi pengalihan hak-hak tanah milik si miskin atau proses pembangunan yang bersifat "trickle-up" atau penyedotan nilai tambah ke "atas".

Dalam skala nasional, pernah kembangkan Empat Skema Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa : transformasi perekonomian yang berkesinambungan, peningkatan sumber daya manusia pedesaan, perbaikan infrastruktur yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan pengembangan penguatan kelembagaan.

Perlu diingat, mengentaskan "syndrom" kemiskinan tidaklah cukup dengan membagi-bagi dana—"ikan" seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekarang. Tetapi mereka butuh "kail". Bahkan, tidak sekadar "kail", mereka perlu disediakan "danau" atau "sungai" sebagai tempat memancing. Karenanya, perlu diintensifkan pelatihan-pelatihan kewiraswastaan, kewirausahaan; pelaksanaan wajib belajar merata; motivasi berprestasi, bantuan sosial berupa barang, modal usaha dan peralatan; pengembangan industri kecil dan kerajinan; latihan keterampilan; magang; dan ketrampilan-ketrampilan praktis lainnya. Muaranya, meningkatkan sumber daya manusia miskin, sehingga mereka bukan hanya menjadi beban pemerintah, tetapi justru menjadi asset. Menjadi manusia produktif, kreatif, konstruktif, inovatif dan punya kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan bangsanya. Bukan sebaliknya, hanya menjadi manusia dungu, fakum, mandek, bodoh, destruktif, loyo, tak enerjik, yang hanya menjadi parasit.

Agar obsesi pemerintah, kemiskinan akan terhapus bersih di muka bumi Indonesia, maka upaya penanggulangan kemiskinan harus ditempatkan sebagai "gerakan nasional" yang melibatkan semua pihak : pemerintah, dunia usaha, BUMN, dunia pendidikan (Perguruan tinggi, misal), organisasi-organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, termasuk masyarakat umum lainnya.

Memang, berbagai langkah terobosan telah digelindingkan selama ini, dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Misalnya : Prokesra (Proram Kesejahteraan Keluarga); IDT (Inpres Desa Tertinggal); IMD (Inpres Desa Miskin); Kukesra (Kredit Usaha Keluarga); Takesra (Tabungan Kesejahteraan Keluarga); KUK (Kredit Usaha Kecil); KUT (Kredit Usaha Tani); KCK (Kredit Candak Kulak); Prokesos (Program Kesejahteraan Sosial); PKT (Pengembangan Kawasan terpadu); Gerakan Kembali Desa; Program Hak Pengusahaan Hutan Bina Desa; Hutan Kemasyarakatan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP, misal), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan, dan semacamannya, yang kesemuanya bermuara memantapkan program mengentaskan kemiskinan.

Pengalaman-pengalaman nyata selama beberapa abad, demikian Sardjan Kadir dan Umar Ma'sum dengan jelas menunjukkan, faktor kemiskinan tidak terhapuskan oleh statemen-statemen keras dunia atau statemen-statemen para pimpinan nasional, oleh jiwa penolong kaum agama setempat, atau oleh vaksinasi anti-kemiskinan murni yang akhir-akhir ini diberikan oleh bangsa-bangsa maju. Tapi lewat usaha nyata, termasuk melalui adopsi atau kolaborasi, macam program-program di atas.

Demi tugas suci "memanusiakan manusia menjadi manusiawi"—rehumanisasi, maka sindroma kemiskinan harus diatasi.

Memang, angka penduduk miskin pernah turun, mungkin sebagai dampak langsung program-program di atas. Misal, tahun 1976 jumlah penduduk miskin sebanyak 54,2 juta; tahun 1978 turun menjadi 47,2 juta; tahun 1980 terdapat 42,3 juta; tahun 1981 menurun lagi menjadi 40,6 juta; tahun 1984 tinggal sejumlah 35,0 juta; tahun 1987 sekitar 30,0 juta; dan tahun 1990 turun menjadi 27,2 juta. Kemudian, grafik rakyat miskin menanjak secara tajam, pasca krisis moneter 1998 hingga sekarang, yang jumlahnya di atas separoh penduduk Indonesia.

Memang, lepas keakuratan datanya, yang jelas Biro Pusat Statistik pernah menaksir, bahwa selama periode 1970-1990 golongan masyarakat miskin secara relatif telah mengalami penurunan dari 60 persen menjadi 15 persen dari jumlah penduduk total. Penurunan sebesar 45 persen selama kurun waktu 20 tahun ini tentunya merupakan satu prestasi tersendiri yang sangat berarti (Mangkusobroto, 1993).

Hanya ada satu kata kunci sebagai muara akhir dari semua program pengentasan kemiskinan, yakni "kesejahteraan rakyat". Yaitu suatu keadaan, di mana seluruh rakyat secara merata, hidup berkecukupan baik materiil maupun spirituil; aman, tentram, tertib, dan maju; jauh dari segala penderitaan dan ketakutan, serta di mana harkat dan derajat manusia dapat dipelihara dan dijunjung tinggi (H. Soerono, *Majalah Mimbar*, No. 25 Tahun III/1978). Definisi ini telah tercakup unsur-unsur : kemakmuran dan kesejahteraan; pemerataan dan keadilan sosial; keamanan dan ketentraman lahir-bathin; dinamika dan kemajuan, serta unsur-unsur kemanusiaan lainnya.

Politik kesejahteraan sosial yang perlu diejawantahkan yakni : *pertama*, tiap orang dapat merasakan keadilan sosial dalam hidupnya; *kedua*, tiap orang terhindar dari kemiskinan hidupnya; *ketiga*, tiap orang dapat merasakan bahagia, karena cukup makan, pakaian, dan perumahan; *keempat*, tiap anak yang dilahirkan dapat bersekolah pada waktunya; *kelima*, tiap orang tidak perlu khawatir di hari tuanya karena adanya jaminan sosial; *keenam*, tiap orang dapat mengungkapkan kebebasannya, melalui unjuk rasa misal; dan sebagainya.

Pentingnya menangani kemiskinan dan kemelaratan di bidang pembangunan ini, sebab kemiskinan dan kemelaratan acapkali menjadi pemicu purparagam kejahatan di masyarakat. Prof. Bonger, pernah mengungkapkan macam-macam kejahatan yang terdapat dalam masyarakat lantaran sebab-sebab ekonomi. *Pertama*, karena penduduk tidak mempunyai mata pencaharian; *kedua*, tingkat kesusilaan rendah; *ketiga*, kemiskinan dan pengangguran; *keempat*, terlantarnya anak-anak karena tekanan ekonomi; *kelima*, adanya kejahatan karena kehidupan manusia yang kurang baik; dan *keenam*, karena harga-harga bahan makanan sehari-hari semakin mahal, sehingga sebagian besar penduduk tak dapat memenuhi kebutuhan yang penting.

Lalu, bagaimana untuk mengukur bahwa pembangunan masyarakat telah maju dalam arti kemajuan kehidupan sosialnya. A.J. Todd (Ahmad Usman, 1991), menelorkan lima kriteria kemajuan sosial. Kemajuan sosial (masyarakat) menurutnya adalah bertambahnya dalam hal : (a) *kekayaan*, yang dimaksud adalah kekayaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu kekayaan yang dipergunakan untuk memberantas kemiskinan dan menambah kesenangan, kenikmatan hidup bagi semua orang; (b) *kesehatan*, berarti menurunnya angka kematian bayi, bertambah panjangnya usia,

kehidupan yang kaya, penuh persaudaraan dan mempunyai arti; (c) *penduduk*, artinya bukan sekedar bertambahnya jumlah orang, melainkan bertambahnya warga negara yang produktif; (d) *tata* dan *stabilitas sosial*, ini sama sekali tidak berarti stagnasi sosial, melainkan suatu sistem dan organisasi sosial yang memungkinkan berkembang dan dipeliharanya idea-idea baru; dan (e) *kesempatan*, sama sekali tidak berarti keadaan yang memungkinkan orang berbuat jahat atau anti sosial, melainkan suatu kondisi yang memungkinkan orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang produktif.

Indikator lain dari kesejahteraan masyarakat, misalnya Allardt (R. Bintarto, 1989), memfokuskan pada tiga hal : *having*, yaitu unsur-unsur pendukung untuk bertahan hidup, dan standar tertentu yang harus dicapai untuk hidup sehat; *loving*, yaitu unsur-unsur pendukung untuk dapat hidup serasi, seperti kesetiakawanan (*companionship*), rasa kasih (*affection*), saling memiliki (*belonging*), dan solidaritas; dan *being*, yaitu keberadaan, keyakinan diri, dan kepribadian. Pendapat yang agak mirip, Maslow (R. Bintarto, 1989) membagi kesejahteraan itu ke dalam lima indikator. *Pertama, survival*, unsur-unsur pendukung untuk bertahan hidup (pangan, sandang, perumahan), dan sebagainya; *kedua, security*, yaitu keamanan yang menjamin seseorang dari bahaya alam, ancaman fisik; *ketiga, belonging and love*, yaitu kesetiakawanan dan kecintaan yang menentukan posisi sosial seseorang; *keempat, esteem*, yaitu penghargaan, seperti, status, popularitas, prestise yang ingin dicapai seseorang; dan *kelima, self actualizaion*, yaitu kemandirian atau kemantapan diri untuk menjaga eksistensi fisik, mental, dan moral.

Menghapus kemiskinan, tidak semudah membalikkan telapan tangan atau "*sim salabim. abra ka dabra*"-nya tukang sulap. Diperlukan adanya "*political will*" dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya : kejelasan siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari pembangunan tersebut (*clear intended beneficiaries*); memanfaatkan teknologi yang spesifik lokasi (*local specific*) yang cocok dengan kondisi sosial budaya setempat; dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*public accountability*) yang dicerminkan dengan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang mantap; bersifat terbuka (*transparent*) sehingga menjamin kepercayaan peserta program dan masyarakat akan kejujuran para pelaksana dan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan; memperhatikan peranan usaha kecil, menengah dan koperasi agar mereka dapat meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat; dan melanjutkan peninjauan atas berbagai peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan butir-butir di atas seraya menyiapkan peraturan perundangan yang diperlukan (Laode M. Kamaluddin, 1999).

Memang, ada sejumlah program yang telah dan masih diejawantahkan dalam mengentas kemiskinan ini. Misalnya : perluasan jangkauan lembaga perkreditan untuk rakyat; mempermudah akses kaum miskin terhadap berbagai bentuk pelayanan sosial, misal pendidikan, kesehatan, KB, air bersih, sanitasi; pembangunan infrastruktur ekonomi; dan penguatan kelembagaan, dan semua program-program tersebut perlu diuji keefektifitasannya.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan secara langsung (*direct attack*) dilakukan melalui (i) pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan; (ii) perluasan berbagai pelayanan publik, seperti KIA, KB, pendidikan; (iii) revolusi hijau; (iv) *resource sharing* dalam bentuk berbagai Inpres; (v) perluasan jangkauan perkreditan rakyat,

seperti Kupedes, BKK, KURK, Lumbung Piti Nagari, dan sebagainya; (vi) pengembangan kelembgaan seperti PKK, Karang Taruna, Dasa Wisma dan sebagainya; dan (vii) *last but not least* Inpres Desa Tertinggal (Moeljarto Tjokrowinoto, 2002 : 120-121).

Semoga !!!

## BAB XVIII GELIAT PEMBANGUNAN KOTA BIMA DAN TREND PERUBAHAN

Akankah perubahan bakal terjadi di bawah kepemimpinan Noliqu? Kita akan sepakat dengan Richard Kostalanetz sebagaimana pernah disinggung dalam karyanya :

*Beyond Left an Right : Radical Thought of Our Time* (1968) mensinyalir : "*Change is the Metaphysic of Our Age*" atau "hakekat zaman ini ditandai dengan pelbagai perubahan..." Atau, pandangan Heraclitus : "*Panta rhei kai anden menci*"—semuanya berubah. Atau seperti sinyal Bertrand Russel : "*All Thing are Flowing*"—semuanya mengalir. Yakinlah !

Setidak-tidaknya, demikian realita kekinian kita. Misalnya, masa rural-agraris dulu sudah berganti dengan masa urban-insdustri. Bahkan orang menyebut masa sekarang sebagai masa *post-industrialisme*, *post-capitalisme*, dan *post-modernism*. Atau, era informasi—era Gelombang Ketiga, pinjam istilah Alfin Toffler; era Pasca-Industri, demikian Daniel Bell mengistilalkannya. Atau, zaman *Technoktronic* versi Zbigniew Brezzinski.

Jelas dan pasti ke depan, akan (bahkan pasti) banyak greget perubahan. Di antaranya : dampak globalisasi, liberalisme; gaya (*style*) hidup, seperti : hedonisme, eksklusivisme, hooliganisme, konsumerisme; bahkan "*scientifico syndomatico*", yang kesemuanya menuntut kesiapan, kesiagaan kita semua untuk mengantisipasinya. Sebab, globalisasi, liberalisme dan semacamnya, bukan lagi alternatif pilihan (*option*), tapi fakta yang harus diterima. Termasuk globalisasi ideologi, bahkan akan muncul apa yang diistilahkan Alwi Dahlan--ahli komunikasi Indonesia sebagai *globalisasi emosional*.

Lepas apapun nama atau atribut yang diberikan, yang pasti dan jelas konsekuensi logis dari semua perubahan tersebut harus diantisipasi dengan bijak, arif, cerdas, dan dewasa. Di sini dibutuhkan warga yang tanggap terhadap greget perubahan. Sebab, pinjam istilah mendiang Mahatma Gandhi : "*my nationalism is my humanism*" yang menekankan pentingnya manusia sebagai pusat/sentral (JC. Tukiman Taruna, *Harian Suara Pembaharuan*, 14/10/1997).

Diakui atau tidak, Kota Bima telah banyak berubah. Wujud perubahan itu, bukan sekadar fisik "an sich", tapi sudah menyentuh perubahan pola pikir. Lebih ekstrim lagi, telah terjadi perubahan sosial (*social changing*).

Sebagai suatu lingkungan kehidupan perkotaan, kota dapat tumbuh berkembang melalui dua macam proses yaitu proses perubahan yang terjadi dengan sendirinya dan proses perubahan yang dibentuk dan diarahkan.

Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi ... yang satu ke situasi ... yang lain yang dinilai lebih tinggi (Katz, 1971); dengan kata lain pembangunan menyangkut proses perbaikan (Seers, 1970, p.2)." Dengan menekankan pada makna "menjadi" (*being*) dan "mengerjakan" (*doing*) dalam

upaya peningkatan kualitas manusia. Bryant dan White (1989 : 21) mengartikan “pembangunan sebagai peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya.” Hal ini mempunyai beberapa implikasi : *pertama*, pembangunan harus memberikan penekanan pada kapasitas (*capacity*). *Kedua*, pembangunan harus menekankan pemerataan (*equity*). *Ketiga*, pembangunan mengandung makna pemberian kuasa dan wewenang (*empowerment*) yang lebih besar kepada rakyat. *Keempat*, pembangunan mengandung pengertian kelangsungan perkembangan (*sustainable*) dan interdependensi di antara negara-negara di dunia.

Pada istilah pembangunan atau *development* sendiri terkandung unsur-unsur : (1) *Perubahan* : perubahan dari sesuatu yang kurang menuju kesempurnaan; (2) *Tujuan* : tujuan yang diarahkan oleh manusia untuk kelestarian kesejahteraan, dan kebahagiaan; (3) *Potensi* : potensi masyarakat atau “*funds and forces*” yang terdapat dalam masyarakat dan kemudian dapat digunakan untuk membiayai perencanaan. (Bintarto, 1983 : 108).

Perubahan masyarakat merupakan kenyataan yang dibuktikan dengan sejumlah gejala seperti : depersonalisasi, adanya frustrasi dan apati atau kelumpuhan mental, pertentangan dan perbedaan pendapat mengenai norma-norma susila yang sebelumnya dianggap mutlak, adanya pendapat *generation gap* (jurang pengertian antar generasi) dan lain-lain. Memang ada tidaknya suatu perubahan masyarakat, yaitu terganggunya keseimbangan (*equilibrium*) antar satuan sosial dalam masyarakat, hanya dapat dilihat melalui gejala-gejala ini.

Ternyata perubahan norma sosial sebagai dampak geliat pembangunan, lebih jelas kelihatan dalam kehidupan masyarakat kota. Perubahan-perubahan pada masyarakat kota terutama disebabkan oleh : *pertama*, komunikasi yang lancar, penerangan atau informasi baik melalui radio, surat kabar, televisi dan lain-lain mengenai suatu hal lebih mudah diterima; *kedua*, penduduk kota berasal dari berbagai suku, pertemuan antara suku ini lebih mudah mempengaruhi cara berfikir lama dan timbul pemikiran baru tentang kehidupan sosial; *ketiga*, mata pencaharian penduduk kota kebanyakan pada bidang jasa, kondisi ini memungkinkan orang kota lebih dinamis; *keempat*, kehidupan kota lebih berorientasi pada kehidupan ekonomi, segala sesuatu diperhitungkan dari segi ekonomi; dan *kelima*, kota pada umumnya penduduknya padat, kepadatan penduduk ini menyebabkan mereka berjuang untuk hidup lebih giat dan lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya (BKKBN Pusat, 1998: 6).

Setiap masyarakat akan mengalami perubahan-perubahan, ada perubahan yang mengalami kemajuan dan ada pula yang mengalami kemunduran, bahkan ada yang pengaruhnya luas dan ada juga yang terjadi lambat dalam proses kehidupan sosial, karena pada dasarnya tidaklah dapat dikatakan bahwa masyarakat itu adalah statis. Proses perubahan kehidupan tersebut sebagai akibat dari transformasi nilai lama ke nilai baru atau perubahan nilai hidup masyarakat tradisional ke nilai hidup masyarakat moderen. Akibat dari transformasi nilai itu, terjadilah perubahan sikap atau perilaku generasi muda, yang dulunya sikap mereka masih melekat dengan nilai-nilai agama, nilai budaya dan bahkan mereka sangat lugu terhadap perubahan-perubahan nilai secara normatif dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat dapat berupa norma, nilai-nilai, pola perilaku individu, kelompok maupun masyarakat itu sendiri. Perubahan-perubahan itu ada yang membawa pengaruh positif dan ada pula yang sebaliknya. Demikian pula halnya dengan penambahan penduduk yang cepat, membawa akibat

terhadap terjadinya proses perubahan terhadap masyarakat. Pada masa dulu sebelum penduduk bertambah dengan cepat, kehidupan orang secara homogen bentuk kehidupan mereka penuh dengan sikap kekeluargaan. Kalau ada satu keluarga yang mendapat kesulitan, maka keluarga lain membantu dengan tulus ikhlas tanpa mengharap imbalan.

Tapi setelah arah pembangunan semakin progresif dan maju, penambahan penduduk yang cepat khususnya di daerah perkotaan, dapat mengakibatkan beberapa perubahan situasi dalam masyarakat. Norma-norma lama sedikit demi sedikit beralih kepada norma-norma baru, sifat kegotong-royongan dan kekeluargaan berbalik pada individual, setiap orang cenderung untuk memikirkan dirinya daripada memikirkan orang lain.

Kota acap kali tampil dalam wajah ganda. Kota merupakan ajang pergulatan antara mereka yang serakah (*the greedy*) dan kelompok yang kesrakat (*the needy*). Kota menyediakan fasilitas dan pelayanan sosial yang terbaik, namun sekaligus juga mewadahi kehidupan kaum papa yang serba marjinal, kumuh, tidak sehat, sarat dengan pencemaran dan ketidakteraturan (Eko Budihardjo, 2005 : 113).

Jika ditelaah dengan arif, pola kerja kota ibarat sistem kerja biologisme. Artinya, kota dianggap sebagai suatu jasad hidup. Di sini kita diajak melihat kota sebagai suatu jaringan sistem organisme utuh yang terdiri atas dua subsistem yaitu *city's hardware* (jasmani kota) dan *city's software* (rohani kota) (N. Daldjoeni, 1997). Subsistem jasmani kota mencakup gejala *metabolisme* (mirip pencernaan manusia), *kardiovaskuler* (peredaran darah, *nervous* (persyarafan) dan *skeletal* (pertulangan). Di sinilah letak biologisme menurut Daldjoeni, yaitu penerapan fungsi biologis manusia pada kehidupan kota. Kepincangan yang terjadi pada sistem yang satu akan berpengaruh pada sistem yang lain.

Pada panorama lain, kota sering tampil dalam wajah seragam atau jiplakan, duplikasi, triplikasi, bahkan multiplikasi dengan kota-kota lain, terutama bila yang dominan dalam merancang kota adalah para birokrat atau pemerintah. Penyeragaman menciptakan homogenitas yang menyebalkan karena menghilangkan mozaik kultur dan subkultur yang sesungguhnya amat mempersona (Abu Loghod dalam Eko Budihardjo, 2005 : 135). Kota dan daerah pada dasarnya merupakan pengejawantahan budaya, yang diistilahkan Ropoport sebagai "*culture landscape*", dengan beraneka ragam karakter, sifat, kekhasan, keunikan, kepribadian. Karenanya yang pertama-tama harus dipahami adalah budaya dari berbagai kelompok masyarakat dan pengaruh dari tata nilai, norma, gaya hidup, kegiatan dan simbol-simbol yang mereka anut terhadap penataan dan bentuk kota maupun daerah.

Berbagai upaya telah dilakukan guna menangkai penyeragaman wajah kota, dengan melibatkan berbagai komponen dalam merancang kota, misal pelibatan akademisi, pengusaha, arsitektur, dan masyarakat itu sendiri.

Kota merupakan hasil cipta, rasa, karsa dan karya manusia yang paling rumit dan muskil sepanjang peradaban manusia. Kendati demikian, bukan berarti wajah kota ke depan tidak dapat direncanakan.

Kota Bima adalah kota yang relatif baru dan jelas dikategorikan sebagai kota baru. Teorinya, kota baru mesti dirancang sebagai kota taman yang merupakan senyawa antara keagungan kota dan keseragaman desa, dengan 2 (dua) prinsip utama :



kemandirian (*"self containment"*) dan keseimbangan (*"balance development"*) (Eko Budihardjo, 2005 : 89).

Prinsip kemandirian mengandung makna bahwa kota baru yang dibangun betul-betul mandiri dengan ketersediaan fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum), lapangan kerja, pendidikan, rekreasi, perbelanjaan, taman, kuburan dan lain-lain. Sementara, prinsip keseimbangan menyiratkan makna bahwa pernduduknya akan merupakan campuran yang seimbang dan harmonis dari berbagai tingkat sosial ekonomi, kelompok umur dan tingkat pendidikan serta keahliannya.

Taman kota, dapat berupa : taman-taman, kebun-kebun, bahkan sekumpulan tanaman yang menghijau di sepanjang jalan, pinggir sungai atau sekeliling perkotaan, hotel, rumah sakit, pekarangan warga, lapangan olah raga, dan tempat-tempat pemukiman lain. Manfaat taman kota : *pertama*, dapat memfilter atau menyaring asap dan debu kendaraan dan debu alam yang beterbangan; *kedua*, terjaminnya fungsi pengaturan iklim; *ketiga*, nilai estetika yang menyangkut arsitektur, serta kebahagiaan manusia; dan *keempat*, wahana rekreasi murah-meriah bagi masyarakatnya.

Beberapa butir saran terobosan bisa dikemukakan agar kota baru yang dibangun tidak mengulang kesalahan dan menghadapi masalah lama yang sudah dialami di beberapa negara. Beberapa saran dimaksud menurut Eko Budihardjo (2005 : 92-93) yaitu : *pertama*, kemitraan profesional antara penentu kebijakan, pengusaha atau agen pembangunan, profesional dan masyarakat luas perlu dijalin sejak awal perencanaan. Penentu tujuan dan sasaran pembanguann kota baru, perumusan masalah, pengungkapan alternatif dan lain-lain mesti digarap bersama sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing. *Kedua*, pembangunan kota baru mandiri seyogianya diawali dengan pengadaan fasilitas lapangan kerja yang dapat menarik penduduk, ibarat gula yang akan mendatangkan semut. Fasos dan fasum mestinya dibangun bersamaan dengan pembangunan perumahannya. Konsep-konsep *incentive* dan *disincentive* melalui keringan pajak, kemudahan perijinan, pemberian fasilitas pendukung bagi para indutriawan yang menanam modal di kota baru perlu lebih digalakkan.

*Ketiga*, sistem jaringan jalan dan transportasi umum massal yang menghubungkan kota-kota baru dengan .... sebagai kota induknya mesti direncanakan sejak awal, biarpun pembangunannya bisa dilakukan secara bertahap. *Mass Rapid Transit* (MRT)-nya Singapura pun baru selesai agak tuntas 15 tahun terhitung semenjak awal perencanaannya. *Keempat*, pertarungan perolehan lahan yang terlalu bebas yang memberi peluang pada para spekulan, perlu ditanggulangi dengan peraturan yang 'menggigit', dengan mekanisme pengawasan pembangunan yang jelas, lengkap dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Konsep-konsep *land banking*, *land pooling*, *land asembly*, *land consolidation* dan lain-lain sepatutnya dicoba lebih digalakkan. *Kelima*, model-model terobosan baru dalam pembangunan kota baru mandiri perlu lebih digali dan dikembangkan. Misalnya, kota baru yang direncanakan tidak harus mengambil lahan kosong dalam ukuran yang teramat luas, melainkan bisa dengan mengisi (*infill*) lahan-lahan kosong di lingkungan pemukiman atau kota lama yang sudah terbentuk. Intensifikasi pemanfaatan lahan semacam ini akan ikut membantu peningkatan efisiensi tata guna lahan, sekaligus mengamankan kawasan pantai dan perbukitan dari serangan pada "*Robber Baron*" yang cenderung mengidap penyakit lapar lahan. *Terakhir*, tetapi justru yang paling penting adalah perlunya

segera ditetapkan kelembagaan yang diberi kewenangan untuk mengelola kota baru mandiri sebagai suatu sub-sistem dalam jaringan perkotaan ....

\*\*\*\*Kondisi-kondisi yang diperlukan bagi suatu kota (*city*) ada enam : (1) pembagian kerja dalam spesialisasi yang jelas; (2) organisasi sosial lebih berdasarkan pekerjaan dan kelas sosial daripada kekeluargaan; (3) lembaga pemerintahan lebih berdasarkan teritorium daripada kekeluargaan; (4) suatu sistem perdagangan dan pertukangan; (5) mempunyai sarana komunikasi dan dokumentasi; (6) berteknologi yang rasional. Makin besar kota makin tegas ciri-ciri tersebut.

Semoga !!!

## BAB XIX MENUJU KOTA YANG “KANTIBMAS” !

“Efek atau ekses negatif yang timbul sebagai akibat makin meningkatkan aksi kejahatan di masyarakat, menurut Kartini Kartono : (a) Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir/merusak terhadap orde sosial; (b) Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan dan kepanikan di tengah masyarakat; (c) Banyak materi dan energi terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas; (d) Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya”  
(Kartini Kartono, 1997 : 151).

Seiring dengan perkembangan zaman, aksi kejahatan (*crime action*) baik secara kuantitas maupun kualitas semakin bervariasi. Mulai dari tawuran, termasuk tawuran antar pelajar yang akhir-akhir ini menjadi mode; penyalahgunaan narkoba, obat, minuman keras (miras), psikotropika (extasy); makin kompleksnya kasus kejahatan; fenomena premanisme; kasus perampokan, pemerkosaan, pemerasan, penipuan; kejahatan internet; pencucian uang; dan bahkan kejahatan-kejahatan yang bertaraf internasional, seperti : terorisme, penyelundupan, penggandaan uang palsu, sampai dengan kejahatan sindikat internasional. Termasuk dalam hal ini tindak pidana pencurian, baik pencurian dengan operandi yang sangat sederhana atau model konvensional hingga operandi pencurian kelas tinggi.

Efek atau ekses negatif yang timbul sebagai akibat makin meningkatkan aksi kejahatan di masyarakat, menurut Kartini Kartono sebagai berikut : (a) Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir/merusak terhadap orde sosial; (b) Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan dan kepanikan di tengah masyarakat; (c) Banyak materi dan energi terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas; (d) Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya.” (Kartini Kartono, 1997 : 151)

Sesuatu masyarakat yang menetapkan hukum untuk dirinya sendiri dan selanjutnya mengikatkan diri pada hukum itu, dan kondisi itulah yang disebut masyarakat hukum.

Hukum ditegakkan dengan tujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Van Kan dalam Surojo Wignjodipuro (1982 : 19), mengemukakan bahwa tujuan penegakkan hukum adalah “untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar daripada yang lain).”

Di samping itu, Bentham dalam Surojo Wignjodipuro (1982 : 19), mengemukakan bahwa “hukum bertujuan mewujudkan semata-mata yang berfaedah saja, jadi hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya (mengutamakan ke utilitas -utiliteist theorie).”

Hal demikian mengisyaratkan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Agar terciptanya masyarakat damai, adil, dan

harmonis, maka dituntut adanya ketaatan anggota masyarakat terhadap hukum. Taatnya anggota-anggota masyarakat kepada hukum menurut Andi Amrullah dalam Soerjono Soekanto, dapat disebabkan oleh dua faktor yang dominan, yaitu : (1) Bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan/aspirasi anggota-anggota masyarakat itu atau dengan kata lain taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri. (2) Karena adanya kekuasaan yang imperatif melekat dalam hukum tersebut dengan sanksi apabila ada orang yang berani melanggarnya ia akan memperoleh akibat-akibat hukum yang tak diinginkan.” (Andi Amrullah dalam Soerjono Soekanto, 1999 : 126).

Sifat tindak pidana yang relatif itu, kemudian mendapatkan seleksi berdasarkan nilai-nilai dari masyarakat yang diabstraksikan luas lingkungannya sebagai perilaku tindak pidana yang dapat dihukum oleh peraturan hukum pidana.

Pertumbuhan tindak pidana dalam masyarakat sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan masyarakat dengan lingkungan penyebab tindak pidana baik yang terletak pada diri setiap individu manusia maupun pada kondisi lingkungan sosial yang dapat menghasilkan peningkatan serta perkembangan perilaku perbuatan tindak pidana yang berbeda dari masa ke masa dan tidak dapat diramalkan sebelumnya. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa perkembangan perilaku perbuatan tindak pidana yang menyangkut frekuensi, kualitas dan kuantitas serta kemungkinan tumbuhnya perbuatan tindak pidana baru yang banyak dipengaruhi oleh aspek modernisasi dalam mobilitas sosial, urbanisasi, penambahan penduduk, industrialisasi, dan perkembangan teknologi.

Untuk mengurangi semakin bervariasinya irama tindak pidana sebagai konsekuensi dengan perkembangan masyarakat, maka beberapa upaya penanggulangan tindak pidana khususnya yang bermotif kejahatan sebagaimana pernah dikemukakan Soedjono, yaitu : “Sesungguhnya upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya haruslah memenuhi persyaratan yaitu : (1) Sistem organisasi kepolisian yang baik; (2) Peradilan yang efektif; (3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa; (4) Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi; (5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan; (6) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.” (Soedjono, 1976 : 22).

### ***KANTIBMAS***

Kantibmas merupakan akronim dari tiga kata yaitu keamanan, ketertiban dan masyarakat. Soewignyo (1986 : 37) mengemukakan sebagai berikut : “Keamanan berasal dari kata aman. Istilah aman mengandung empat pengertian yaitu : (1) *Security* yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis. (2) *Surety* yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran. (3) *Safety* yaitu perasaan dilindungi dari segala bahaya. (4) *Peace* yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.”

Sedangkan ketertiban masyarakat menurut Soebroto Brotodiredjo (1984 : 6) adalah “suasana tertib dan ketertiban yang merupakan suatu keadaan yang menimbulkan kegairahan dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya.”

### ***JENIS-JENIS GANGGUAN KANTIBMAS***

Di dalam kehidupan bermasyarakat cukup banyak bentuk gangguan yang dialami, mulai dari yang paling sederhana, seperti tawuran pelajar, kenakalan remaja hingga gangguan yang serius, misalnya pemerkosaan, perampokan, pencurian, tawuran antar kampung, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Makna kejahatan sendiri menurut B. Simandjuntak (1981 : 176) sebagai berikut : “Kejahatan adalah suatu/tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.” Dengan demikian, kejahatan merupakan bagian perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Ini berarti bahwa setiap kejahatan bertentangan dengan kesusilaan.

Kartini Kartono (1997 : 126), menjelaskan bahwa “Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).”

Kembali pada persoalan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas), pada dasarnya terdapat bermacam-macam gangguan dan dapat berupa, di antaranya : tindak pidana yaitu perbuatan yang melanggar atau melawan hukum pidana umum/khusus yang berlaku; penyimpangan sosial yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan aturan, norma-norma, atau adat istiadat masyarakat setempat; dan bencana alam, wabah penyakit manusia, ternak dan hama tanaman yaitu suatu bencana yang mengakibatkan penderitaan masyarakat setempat atau masyarakat daerah sekitarnya.

Gangguan-gangguan lain yang dapat menimbulkan kekacauan, kesengsaraan masyarakat, dan kehancuran sarana dan prasarana di masyarakat non pemerintah misalnya ketegangan antar suku dan antar golongan serta antar golongan agama.

### ***KEJAHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM***

Kondisi lingkungan dengan perubahan-perubahan yang cepat, norma-norma dan sanksi sosial yang semakin longgar serta macam-macam sub-kultur dan kebudayaan asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberikan pengaruh yang mengacau; dan memunculkan dis-organisasi dalam masyarakatnya, sehingga muncullah pelbagai jenis kejahatan. Dengan adanya kejahatan tersebut, merupakan tantangan berat bagi para anggota masyarakat.

Efek negatif yang timbul sebagai akibat makin meningkatkan aksi kejahatan di dalam masyarakat, menurut Kartini Kartono (1997 : 151) yakni : “(a) Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir/merusak terhadap orde sosial; (b) Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan dan kepanikan di tengah masyarakat; (c) Banyak materi dan energi terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas; dan (d) Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya.”

Kepentingan dan keinginan seseorang terkadang sejalan dan seirama dengan keinginan dan kepentingan orang lain, tetapi seringkali atau tidak jarang juga terjadi perbedaan dan pertentangan. Muara dari perbedaan dan pertentangan demikian dapat melahirkan perselisihan. Dalam keadaan demikian, hukum berupaya untuk mendamaikannya dengan jalan menentukan hak dan kewajiban sesama anggota

masyarakat. Hukum menghendaki terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu menghendaki adanya kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.

Olehnya itu, penegakan hukum ditujukan untuk menjamin kepentingan orang lain. Dengan demikian merupakan syarat mutlak bagi timbulnya hukum.

Dalam masyarakat, terdapat pelbagai macam kepentingan dalam segala macam bentuk saling bertemu yang menyebabkan berkembangnya hukum dengan pesatnya.

Sesuatu masyarakat yang menetapkan hukum untuk dirinya sendiri dan selanjutnya mengikatkan diri pada hukum itu, dan kondisi itulah yang disebut masyarakat hukum.

Hukum ditegakkan dengan tujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Van Kan dalam Surojo Wignjodipuro (1982 : 19), mengemukakan bahwa tujuan penegakkan hukum adalah “untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar daripada yang lain).”

Demikian halnya, Bentham dalam Surojo Wignjodipuro (1982 : 19), mengemukakan bahwa “hukum bertujuan mewujudkan semata-mata yang berfaedah saja, jadi hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya (mengutamakan ke utilitas—utiliteist theorie).”

Dengan demikian, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.

Agar terciptanya masyarakat damai, adil, dan harmonis, maka dituntut adanya ketaatan anggota masyarakat terhadap hukum. Taatnya anggota-anggota masyarakat kepada hukum menurut Andi Amrullah dalam Soerjono Soekanto, dapat disebabkan oleh dua faktor yang dominan, yaitu : “*Pertama*, bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan/aspirasi anggota-anggota masyarakat itu atau dengan kata lain taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri. *Kedua*, karena adanya kekuasaan yang imperatif melekat dalam hukum tersebut dengan sanksi apabila ada orang yang berani melanggarnya ia akan memperoleh akibat-akibat hukum yang tak diinginkan.” (Andi Amrullah dalam Soerjono Soekanto, 1999 : 126).

Secara hakiki, manusia memerlukan hidup bersama dengan manusia lainnya dalam jangka waktu yang cukup lama dalam suasana damai dan adil serta secara sadar membentuk kesatuan untuk hidup berbudaya baik di lingkungan terbatas maupun di lingkungan yang lebih luas. Dalam hal ini membutuhkan suatu proses keteraturan yang tumbuh dalam masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok yang mana antara lain karena mengalami perkembangan sosial yang belum tentu mendapatkan keteraturan seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh semakin banyak terjadinya konflik-konflik kepentingan. Kondisi seperti ini, dengan sendirinya akan semakin bertambah jumlah formulasi perilaku yang dinyatakan dengan tindak pidana.

Selanjutnya, terciptanya penyimpangan tersebut sudah barang tentu merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap formulasi tindak pidana. Berkembangnya tindak pidana tersebut, kemungkinan besar terjadi dari perubahan-perubahan kondisi sosial mengenai berubahnya konsepsi kepentingan baru sesuai dengan perkembangan politik, sosial budaya, dan nilai-nilai sosial lainnya.

Situasi penentuan itu dapat dibentuk, diciptakan dan dikualifikasikan oleh masyarakat menurut waktu dan tempat tertentu dari suatu tindak pidana sehingga tindak pidana itu merupakan bagian dari keseluruhan suatu produk proses sosial.

Sifat tindak pidana yang relatif itu, kemudian mendapatkan seleksi berdasarkan nilai-nilai dari masyarakat yang diabstraksikan luas lingkungannya sebagai perilaku tindak pidana yang dapat dihukum oleh peraturan hukum pidana.

Pertumbuhan tindak pidana dalam masyarakat sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan masyarakat dengan lingkungan penyebab tindak pidana baik yang terletak pada diri setiap individu manusia maupun pada kondisi lingkungan sosial yang dapat menghasilkan peningkatan serta perkembangan perilaku perbuatan tindak pidana yang berbeda dari masa ke masa dan tak dapat diramalkan sebelumnya. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa perkembangan perilaku perbuatan tindak pidana yang menyangkut frekuensi, kualitas dan kuantitas serta kemungkinan tumbuhnya perbuatan tindak pidana baru yang banyak dipengaruhi oleh aspek modernisasi dalam mobilitas sosial, urbanisasi, penambahan penduduk, industrialisasi, dan perkembangan teknologi.

Berbagai pengaruh dan sebab tumbuhnya perbuatan tindak pidana itu dapat mencerminkan kenyataan makin majemuknya perbuatan tindak pidana dengan beberapa tipe, derajat dan sifat yang berbeda-beda.

Untuk mengurangi semakin bervariasinya irama tindak pidana sebagai konsekuensi dengan perkembangan masyarakat, maka beberapa upaya penanggulangan tindak pidana khususnya yang bermotif kejahatan sebagaimana pernah dikemukakan Soedjono, yaitu : “Sesungguhnya upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya haruslah memenuhi persyaratan yaitu : (1) Sistem organisasi kepolisian yang baik; (2) Peradilan yang efektif; (3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa; (4) Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi; (5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan; dan (6) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.” (Soedjono, 1976 : 22).

Khususnya penegakkan hukum oleh pihak kepolisian, masyarakat menilai masih banyak polisi (oknum) yang pilih kasih dalam penegakkan hukum, sehingga akhir-akhir ini banyak masyarakat yang melawan polisi.

Adanya perlawanan masyarakat terhadap polisi, secara teoretis menurut Adrianus Maliala sebagaimana yang dikemukakannya dalam majalah Detektif dan Romantika, terdapat tiga sebab masyarakat melawan polisi. “Pertama, terjadi suatu perkembangan dalam masyarakat sehingga tidak lagi mengakui kekuasaan polisional yang dimiliki polisi sebagai penegak hukum. Karena itu lebih tepat disebut sebagai pemberontakan publik. Kedua, masyarakat berkali-kali menjadi sasaran penyimpangan polisi dan akhirnya melawan. Dalam konteks Indonesia, penyimpangan tersebut bisa berupa perilaku gagah-gagahan, mempergunakan upaya paksa secara sembarangan, meminta uang dari masyarakat, melakukan kejahatan jabatan, dan lain-lain... Ketiga, walaupun kondisi akumulasi kekesalan terhadap penyimpangan polisi tidak ada, bahkan hubungan polisi-masyarakat amat harmonis, keberingasan toh tetap dapat muncul. Itu bisa terjadi bila terdapat kondisi yang tidak dapat diterima sama sekali oleh masyarakat.

Penyebab kedua tersebut, akibat bergentayangannya polisi-polisi korup, penjilat, yes man, yang sadistis, tidak peduli prosedur, atau sibuk mengejar target penyelesaian

kasus. Merekalah para polisi yang potensial menjadi penganiaya masyarakat. Secara sosiologis, adalah wajar bila suatu kelompok yang ditekan terus-menerus suatu ketika melawan. Sedangkan skenario ketiga, terjadi seiring dengan semakin besar serta cepatnya informasi yang beredar di masyarakat. Kesalahpahaman, kekurangjelasan, ataupun ketidaktahuan dapat dengan mudah muncul di kalangan masyarakat, betapapun masyarakat tersebut sebenarnya cukup intelektual. Ketidaktahuan itu dapat terjadi antara lain akibat ciri pekerjaan polisi yang *low visibility* atau kerap tidak terlihat sehingga tidak bisa setiap saat dimonitor” (Adrianus Maliala *dalam* *Majalah Detektif dan Romantika*, 30/11/1996).

Bertolak dari uraian-uraian tersebut, maka terdapat beberapa pertimbangan yang mengilhami peneliti sehingga bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses penanganan kasus tindak pidana, yaitu : (1) Baik secara kuantitas maupun secara kualitas tindak pidana terutama sebagai bias era reformasi dengan perilaku euphorianya, yang kemudian disusul oleh krisis ekonomi yang belum ada tanda-tanda membaik frekuensinya semakin tinggi; (2) Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang; (3) Pengertian atau batasan tentang tindak pidana kita temukan dalam Undang-Undang, peraturan-peraturan dan lain-lain, akan tetapi aturan yang ada itu terbatas pada waktu dan tempat walaupun kebaikannya ada kepastian hukum karena dengan ini orang akan tahu akan perbuatannya (tindak pidana) dan apa yang tidak jahat, khususnya dalam tindak kejahatan yang berlainan; (4) Karena keterbatasan sumber daya manusia polisi, terdapat indikasi bahwa proses hukum terhadap tindak pidana masih terdapat penyimpangan-penyimpangan; (5) Masih banyak oknum polisi yang belum profesional dalam menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana. Padahal, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan inti pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan sebagai Aparat Negara Penegak Hukum yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membina unsur-unsur potensi keamanan dan ketertiban masyarakat seirama dengan tuntutan pembangunan.

### ***FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM***

Apeldoorn *dalam* Surojo Wignyodipuro (1982 : 19), mengemukakan tujuan hukum, “untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.”

Surojo Wignyodipuro (1982 : 19) menyimpulkan tujuan hukum setelah mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang tujuan hukum, bahwa tujuan hukum “harus menjamin keadilan dan wajib membawa kefaedahan dalam masyarakat.”

Secara garis besarnya menurut Pipin Syarifin (1998 : 51) terdapat 4 (empat) tahap fungsi hukum, yaitu sebagai berikut : (a) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat; (b) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; (c) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan; (d) Fungsi kritis dari hukum, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparat penegak hukum termasuk di dalamnya.”

Dari keempat fungsi hukum tersebut diharapkan terwujudnya ketertiban, keteraturan, dan perkembangan hukum agar terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menetapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari sehingga hukum



ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Masih berkaitan dengan fungsi hukum, Achmad Ali (R. Abdussalam, 1997 : 98) mengemukakan 5 (lima) fungsi hukum, sebagai berikut : (a) Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut; (b) Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) yaitu dengan cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu; (c) Fungsi hukum sebagai simbol yaitu mencakupi proses-proses dalam mana seseorang menerjemahkan atau menggambarkan atau mengartikan atau menggambarkan atau mengartikan dalam suatu istilah yang sederhana tentang perhubungan sosial serta fenomena-fenomena lainnya yang timbul dari interaksinya dengan orang lain; (d) Fungsi hukum sebagai alat politik, hal ini tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan pada negara-negara tertentu dengan sistem tertentu; dan (e) Fungsi hukum sebagai mekanisme untuk integrasi terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat dan juga berlaku baik jika tidak ada konflik maupun setelah ada konflik.”

Pada hakikatnya, yang mempunyai tujuan adalah manusia. Dengan demikian, hukum adalah alat manusia untuk mencapai tujuannya. Dalam hubungan ini, untuk menciptakan tata tertib masyarakat. Akan tetapi, karena manusia dan hukum tidak dapat dipisah-pisahkan, maka dikatakan dengan tujuan hukum.

Kecuali tata tertib, dalam pergaulan masyarakat hukum, juga bertujuan untuk mengatur bagaimana orang-orang memperoleh penghidupan yang memuaskan di dalam masyarakat, baik material maupun spiritual, termasuk di dalamnya kesusilaan. Kepuasan kerohanian menjamin setiap orang bebas melaksanakan agama dan kepercayaannya, tanpa paksaan. Kepuasan material menjamin perlindungan dalam memiliki dan menikmati harta kekayaan, seseorang dibenarkan memiliki harta kekayaannya, selama tidak mengganggu ketentraman umum. Hukum pun mengatur agar kesusilaan di dalam masyarakat selalu terjamin.

Tujuan hukum adalah ketertiban masyarakat. Hukum diperlakukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau golongan. Hukum pun menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang teratur, damai, adil, dan makmur.

Berkenaan dengan tujuan hukum ini, maka tujuan hukum terbagi 3 (tiga) teori.

*Pertama, Ethische Theori.* Menurut teori ini, tujuan hukum hanya ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Pendapat demikian sudah terkenal sejak zaman Aristoteles yang mengajarkan, bahwa yang dimaksud dengan keadilan bukanlah keadilan yang mutlak. Keadilan tidak sama dengan persamaan, tetapi berarti keseimbangan. Artinya, tiap orang dapat terjamin untuk memperoleh bagiannya sesuai dengan jasanya, dan inilah yang dinamakan keadilan distributif.

*Kedua, Utiliteis Theori.* Menurut teori ini, tujuan hukum ialah kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat atau manusia semata-mata. Para penganutnya, J. Bentham, J. Austin, dan J.S. Mills bersemboyan : “the greatest happiness for the greatest number.”

*Ketiga, Gemengde Theori* (teori gabungan). Menurut teori ini, tujuan hukum ialah bukan hanya keadilan tetapi juga kemanfaatan : justice et utilities. Penganut aliran ini di antaranya J. Schrasset, berpendapat bahwa bilamana unsur keadilan saja yang diperhatikan, maka hasilnya hanyalah ketentuan-ketentuan yang memenuhi keadilan mutlak (absolute justice), tetapi tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dalam pergaulan sehari-hari.

Dari ketiga teori tersebut di atas mengindikasikan bahwa hukum dapat mencapai tujuannya apabila terjadi keseimbangan, keserasian antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Pelaksanaan hukum dapat mengemban tugas sesuai dengan tujuan dari keinginan hukum, serta masyarakat taat dan sadar akan keinginan hukum demi keadilan tersebut. Fungsi hukum pun berkembang sehingga hukum akan berfungsi sebagai sarana penggerak pembangunan dan sebagai kritis dari hukum.

### **KEJAHATAN DAN TEORI-TEORI SEBAB MUSABAB TIMBULNYA**

Kejahatan itu merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan demikian kita harus memberikan suatu batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan, kejahatan itu sendiri, siapa yang berbuat, sebab-sebab yang mendorong timbulnya kejahatan dan sebagainya.

Para sarjana dalam memberikan pengertian mengenai kejahatan mengemukakan pendapatnya secara teoritis berdasarkan sudut pandangnya masing-masing.

Kartini Kartono (1997 : 125) mengemukakan, “Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.”

Bambang Poernomo (1984 :10) dalam bukunya “Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana”, mengemukakan pendapat bahwa : “Kejahatan dapat dinyatakan sebagai perilaku merugikan terhadap kehidupan sosial (Socialinur) atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku tidak sesuai pedoman hidup bermasyarakat (non conformist).”

Bilamana kita melihat definisi kejahatan tersebut, maka kejahatan sebagai perilaku atau perbuatan anti sosial atau ikatan-ikatan sosial merupakan sebagian dari perilaku-perilaku atau yang bertentangan dengan nilai sosial, seperti : tidak boleh menyakiti orang seperti penganiayaan, perkelahian dan sebagainya; rasa iri terhadap hak milik orang lain, lalu timbul perbuatan mencuri, merusak milik orang lain dan sebagainya; dan kurang adanya sikap tenggang rasa atau tepo seliro, terhadap semua anggota masyarakat seperti membuat keributan, keonaran, teler-teleran di pinggir jalan dan sebagainya.

Jadi dengan demikian kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan sangat merugikan bagi kehidupan bermasyarakat baik moril maupun materiil.

Pendapat lain dikemukakan B. Simandjutak (1981 : 176), sebagai berikut : “Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.”

Mulyatno (1982 : 10) dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, mengemukakan pengertian kejahatan adalah : “Tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan susila

yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut, dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).”

Kalau kita perhatikan pengertian kejahatan yang diberikan oleh empat orang sarjana tersebut di atas, maka pada dasarnya pengertian kejahatan itu terbagi dua pengertian utama yaitu :

1. Pengertian secara yuridis (*Legal Definition*)

Secara yuridis (*Legal Definition*) kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-undang. Pengertian tentang kejahatan ini kita temukan dalam Undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain, tetapi aturan-aturan yang ada itu terbatas pada waktu dan tempat walaupun kebaikannya yaitu adanya suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

2. Pengertian secara sosiologis (*Social definition*)

Secara sosiologis (*social definition*) merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai wewenang. Ini berarti kejahatan merupakan suatu perilaku-perilaku tertentu dari manusia, pemberian nama diberikan oleh pihak-pihak lain. Di dalam realitasnya kejahatan merupakan perikelakuan yang dibentuk.

Berdasarkan pengertian kejahatan baik secara yuridis maupun secara sosiologis tersebut, maka kejahatan dapat dipandang sebagai perilaku manusia yang dilihat dari keputusannya terhadap hukum dan perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat.

Bila dilihat dari pengertian kejahatan tersebut, maka pengertian kejahatan secara sosiologis ini lebih luas daripada pengertian secara yuridis, sebab tidak hanya menekankan dan pelanggaran hukum melainkan juga segi-segi di luar hukum, misalnya suatu perbuatan yang tidak melanggar hukum tetapi sudah patut mendapat celaan dari masyarakat (buang air kecil di sembarang tempat) dan tidak dihukum hal ini sudah cukup dalam pengertian sosiologis tadi, sedangkan secara yuridis tidak (sebab tidak dihukum, sebagaimana terhadap pengertian kejahatan yang diatur dalam Undang-undang).

Setelah dikemukakan pengertian kejahatan dari beberapa ahli tersebut di atas, berikut ini akan dikupas tentang teori-teori mengenai sebab musabab kejahatan..

Dalam meneliti masalah kejahatan ini, bermunculan teori-teori atau pendekatan. B. Simandjuntak (1981 : 175) mengelompokkannya sebagai berikut : “sociological, psychological, physiological, current sociological, psychiatric-psychological, synthesis of present day.” Selanjutnya, Kartini Kartono (1997 : 136-137) mengemukakan beberapa teori mengenai kejahatan sebagai berikut : “Teori teologis, teori filsafat tentang manusia (antropologi transendental), teori kemauan bebas (*free will*), teori penyakit jiwa, teori fa'al tubuh (fisiologis), teori yang menitikberatkan pengaruh antropologis (dekat sekali dengan teori fisiologis), teori yang menitikberatkan faktor sosial, dari sekolah sosiologis Perancis, mazhab bio-sosiologis, teori susunan ketatanegaraan, dan mazhab spiritualis dengan teori non-religiusitas (tidak beragamnya individu).”

Masing-masing teori ini mengemukakan dasar pengalaman yang dijumpai dalam penyelidikan masing-masing.

Selain itu, terdapat aliran-aliran atau teori-teori/mazhab-mazhab lain. Dan berikut ini akan diuraikan di antara beberapa aliran/teori/mazhab atau apapun namanya yang akan menerangkan tentang sebab musabab timbulnya kejahatan seperti uraian berikut ini.

*Pertama*, Aliran Klasik. Menurut aliran ini di mana mendasarkan penelaahannya pada pandangan psikologis yang hedonisto (bahagia atau derita) yang beranggapan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh kebahagiaan, kesengsaraan atau penderitaan. Adapun tokoh dalam aliran klasik ini ialah C. Beccaric (1738-1794) yang mengatakan bahwa hukuman yang terlalu berat dijatuhkan kepada seseorang adalah tidak diperbolehkan sebab orang tidak boleh dibedakan dari bentuk fisik, kelakuan peradaban, lingkungan sosial dan lainnya.

*Kedua*, Aliran Katographic. Aliran yang kedua disebut aliran katographic atau geografis di mana mereka menunjukkan perhatian pokok terhadap jumlah kejahatan pada suatu wilayah tertentu kemudian menarik kesimpulan dari padanya. Sebagai contoh dengan metode ini dapat dikemukakan bahwa apabila di suatu wilayah sering terjadi kejahatan, maka pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah kejahatan dalam hal ini kepolisian akan mencatat tingkat jumlah kejahatan dalam suatu statistik atau data kejahatan. Dari tingkat kejahatan itu, maka akan diselidiki sebab musababnya yaitu apa sebab kejahatan terus meningkat. Dengan diselidikinya tingkat atau jumlah kejahatan berdasarkan data statistik, maka dapatlah diketahui bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya sebab musababnya di dalam suatu wilayah itu. Adapun tokoh dalam aliran ini adalah P. Broca (tahun 1825-1884).

*Ketiga*, Aliran Sosialis. Aliran sosialis ini tidak begitu berbeda dengan aliran klasik, hanya saja aliran ini menitikberatkan bahwa penyebab timbulnya kejahatan karena adanya kebutuhan ekonomi. Adapun tokoh dalam aliran sosialis ini adalah Karl Marx dan Engels yang dimulai sekitar tahun 1850 dengan memberikan tekanan pada economic-determinism yaitu bahwa perbedaan jurang antara golongan kaya dengan miskin dalam suatu masyarakat atau bangsa merupakan suatu ancaman dari penyebab timbulnya kejahatan itu. Artinya, dengan perbedaan jurang antara yang kaya dengan yang miskin itulah yang membuat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan.

Di samping itu, menurut aliran ini juga bahwa seseorang yang faktor ekonominya kuat atau baik dapat saja melakukan suatu kejahatan seperti melakukannya korupsi, manipulasi, penyelewengan jabatan dalam hal-hal untuk memenuhi kebutuhan terhadap kebutuhan ekonominya.

*Keempat*, Aliran Tipologis. Dalam aliran tipologis ini terjadi dari tiga pendapat yang menguraikan tentang sebab musabab timbulnya kejahatan.

*Kelima*, Aliran Sosiologis. Menurut aliran ini bahwa kejahatan itu timbul, karena adanya refleksi daripada lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, sebab musababnya kejahatan tentunya karena keadaan sosial sekeliling individulah yang membenihkan tingkah laku atau perikelakuan jahatnya.

### **KEJAHATAN SEBAGAI KENYATAAN SOSIAL**

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan itu tumbuh hidup dan berkembang di dalam masyarakat, sebab masyarakat merupakan wadah daripada perkembangan terhadap segala struktur kehidupan yang ada seperti kebudayaan, politik, ekonomi, aliran-aliran keagamaan dan sebagainya.

Kejahatan sebagai kenyataan sosial telah banyak mengakibatkan penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial sehingga tidak dapat dijangkau oleh Undang-undang atau peraturan hukum pidana yang ada.

Selain itu para pelaku kejahatan seringkali merupakan pihak penguasa yang berkuasa baik secara politis, ekonomis, dan sosial yang sulit untuk ditindak walaupun menimbulkan kerugian, penderitaan mental, fisik, sosial pada golongan lemah.

Pemahaman lebih jauh tentang realistik sosial kejahatan sebagai kenyataan sosial harus memerlukan penjelasan tentang ruang dan ruas lingkungannya kejahatan atau analisa.

Berturut-turut keduanya yaitu ruas lingkup kejahatan dan bangunan analisa akan dijelaskan pada bagian berikut ini : (a) Ruang lingkup kejahatan; kejahatan dalam kenyataannya memang terdapat kontroversi telah berlangsung selama puluhan tahun mengenai rumusan kejahatan dan perilaku menyimpang. Sungguhpun begitu dalam dasawarsa terakhir ini terlihat adanya kecenderungan di antara kalangan ilmuan (khusus kriminolog) untuk meneruskan kejahatan dalam arti luas. (b) Bangunan analisa; dari uraian di atas jelas bahwa untuk menjelaskan kejahatan dibutuhkan keperluan secara formal mengenai kejahatan atau perilaku menyimpang yang harus dapat mencakup dan menghubungkan unsur-unsur analisa sebagai berikut : (1) Akar yang lebih luas dari kejahatan dan perilaku menyimpang dalam hubungan ini penjelasan mengenai kejahatan dan perilaku menyimpang dikaji baik pada masalah struktural yang langsung (misalnya wilayah ekologis, lokasi sub kebudayaan, distribusi kesempatan dan lain sebagainya) dan secara keseluruhan di tempat dalam konteks sosial ketidakmerataan kekuasaan kemakmuran dan wewenang. Pada tahap ini terdapat keperluan formal untuk ekonomi politik kejahatan. (2) Sumber-sumber langsung dari kejahatan dan perilaku menyimpang perlu dijadikan pengkajian, dengan melihat faktor-faktor pencetus di mana tuntutan-tuntutan struktural ditafsirkan diberi kreasi dalam suatu cara yang merupakan pilihan yang menyimpang. (3) Dinamika sosial yang melandasi tindakan-tindakan dalam kenyataan perlu dijelaskan dalam hubungannya dengan kaitan antara keyakinan, tindakan antara psikoanalitis optimum yang dipilih dengan perilaku dalam kenyataan. (4) Unsur psikologis sosial dari reaksi masyarakat yang mencakup sumber-sumber langsung reaksinya terhadap kejahatan. (5) Sumber-sumber yang lebih luas dari reaksi terhadap kejahatan perlu dipahami dengan melihat ekonomi politik dari reaksi-reaksi sosial termasuk ke dalamnya reaksi-reaksi dari birokrasi penegak hukum (hukum). (6) Pemahaman mengenai hasil reaksi sosial terhadap tindakan-tindakan pelaku kejahatan selanjutnya dalam pengertian apakah reaksi itu dihayati atau ditolak, menyerahkan atau tidak. (7) Sifat kejahatan sebagai proses keseluruhan dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa arah dan persistensi kejahatan atau perilaku menyimpang harus secara konstan dikaji dalam hubungan-hubungan antara unsur-unsur analisa tersebut di atas.

Jadi jelaslah bahwa kejahatan sebagai kenyataan sosial atau sebagai realitas sosial akan lebih luas dipahami dalam melihat sifat, jenis atau eksistensi kejahatan serta kategori-kategori analitik yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah kejahatan itu.

Sifat kejahatan tersebut merupakan suatu proses secara keseluruhan yang menyimpang atau perilaku yang tidak baik (jahat).

### **SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN**

Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) atau yang sehari-hari disebut dengan Keamanan Lingkungan (Kamling) sebenarnya merupakan wujud kegotongroyongan yang merupakan budaya Bangsa Indonesia di mana baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama bertanggung jawab atas terciptanya rasa aman, tertib dan tentram termasuk di dalamnya rasa tanggung jawab setiap anggota masyarakat untuk ikutserta menciptakannya.

Dari akronim atau singkatan Siskamling terdapat beberapa unsur yang perlu dijelaskan berikut ini, di antaranya pengertian aman, tertib, keamanan lingkungan dan Pos Kamling.

Pengertian Pos Kamling sendiri berdasarkan Agenda Polri (1989 : 23) sebagai berikut : “Pos Kamling merupakan salah satu sarana serta tempat untuk penyelenggaraan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat pada setiap lingkungan tertentu yang dilaksanakan secara sadar oleh serta untuk masyarakat yang berada pada lingkungannya masing-masing.”

Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Tugas Kamling (2001 : 2) dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Aman*. Aman adalah suatu situasi dan kondisi secara kualitas dan kuantitas terhindar terhadap ancaman baik secara fisik maupun psikis lahir maupun batin.
- b. *Tertib*. Tertib adalah suatu situasi dan kondisi secara kualitas dan kuantitas manusia baik secara individu maupun kelompok berperilaku sehari-hari tidak melanggar aturan-aturan hukum, adat, agama dan hukum perundang-undang yang berlaku.
- c. *Keamanan*. Keamanan adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana dirasakan adanya : 1) Rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis; 2) Rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan; 3) Rasa dilindungi dari segala ancaman bahaya; dan 4) Rasa kedamaian dan ketentraman lahiriah dan batiniah.
- d. *Lingkungan*. Lingkungan adalah seluruh ruang lingkup kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya, baik yang bersifat statis maupun yang bersifat dinamis dalam batas tertentu.
- e. *Pos Kamling*. Pos Kamling adalah merupakan salah satu sarana serta tempat untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat pada setiap lingkungan tertentu yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat yang berada di lingkungannya masing-masing.” (Kepolisian Negara RI, 2001 : 2).

Dulu istilah Kamling ini disebut dengan nama “Jogo Boyo” pada saat itu, untuk menjaga keamanan di tiap kampung masing-masing anggota masyarakat secara bergantian melakukan penjagaan dan ronda kampung.

### **MODAL KEDAMAIAN SOSIAL**

Modal sosial (*social capital*) merupakan isu menarik yang banyak dibicarakan dan dikaji belakangan ini. Dalam laporan tahunannya yang berjudul “*Entering The 21st Century*”, misalnya, Bank Dunia mengungkapkan bahwa tingkat modal sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap proses-proses pembangunan (Brata, 2004), dan perhatian besar terhadap peran modal sosial pun makin diarahkan pada persoalan-persoalan pembangunan ekonomi yang sifatnya lokal (Tonkiass, 2000) termasuk dalam hal pengurangan kemiskinan, karena hal-hal ini akan lebih mudah untuk dicapai

dan biayanya kecil jika terdapat modal sosial yang besar (Narayan dan Pritchett, 1997; Grootaert dan van Bastelaer, 2001; Brata, 2004 *dalam* H.M. Safi'i, 2008 : 14).

Kata “*kedamaian*” atau “*damai*” dalam modal kedamaian sosial merujuk pada makna “*aman*” atau “*bebas*”. Pengertian aman atau bebas di sini bukan saja dalam arti aman atau bebas dari segala gangguan dan ketakutan yang bersifat destruktif, seperti aman dari serangan pihak lain, melainkan pula : (a) Aman atau bebas dari kemiskinan, seperti kelaparan, kebodohan, ketergantungan; dan (b) Aman atau bebas menentukan pilihan-pilihan (*choices*), seperti bebas berbicara, berkarya, dan mengekspresikan diri dalam berbagai kegiatan sosial budaya (Edi Suharto, 2005 : 228).

Indikator modal kedamaian sosial dapat mencakup informasi mengenai pandangan-pandangan (*perception*) dan sikap-sikap (*attitudes*) masyarakat dalam hal (Miller, 1983, Spellerger, 1997 *dalam* Edi Suharto, 2005 : 230) : (1) Kepuasan dalam kehidupan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial (aktualisasi diri dan partisipasi dalam berbagai bidang kegiatan kemasyarakatan); (2) Persepsi terhadap keterjangkauan pelayanan-pelayanan dan sumber-sumber sosial, seperti transportasi, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, perumahan, kesehatan; (3) Rasa identitas (*sense of identity*) dan rasa memiliki (*sense of belonging*) atau alinasi (*alienation*) dalam konteks kelompok sosial dan masyarakat; (4) Sikap terhadap orang lain dalam masyarakat, termasuk jarak sosial dengan kelompok lain; (5) Tingkat kepercayaan (*level of trust*) dan keyakinan terhadap orang lain dan lembaga-lembaga kemasyarakatan; (6) Sistem-sistem kepercayaan dan ideologi; (7) Nilai-nilai yang dianut dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai; (8) Opini mengenai perlakuan-perlakuan pemerintah di masa lalu; (9) perasaan ketakutan-ketakutan (*fears*); dan (10) Harapan-harapan untuk masa depan.

Semoga !!!

## BAB XX KOTA DAN PERSOALAN PENDIDIKAN

“Jika Rencana Anda Satu Tahun, Tanamlah Padi;  
Sepuluh Tahun, Tanamlah Pohon; Seratus  
Tahun Didiklah Manusia”  
(Konfusius, 556-479 SbM)

Salah satu visi yang diimplementasikan dalam bentuk Tematik Pembangunan Kota Bima bahwa “*Tahun 2012 Kota Bima sebagai kota pendidikan...*”

Karakteristik pendidikan di Indonesia adalah : (1) titik tekannya lebih pada “*universal education*” daripada “*vocational education*”; (2) lebih menekankan kuantitas daripada kualitas; (3) tidak ada “*streaming*” dalam seleksi siswa pendidikan menengah; (4) terdapat *mitmatch* antara *supplay output* pendidikan dan *demand* tenaga kerja, dalam arti terdapat *excess demand* pada pendidikan SD atau di bawahnya, dan *oversupplay* pada pendidikan sekunder dan tertier; (5) rendahnya kualitas pendidikan *science* dan *matematika*; dan (6) methodik-didaktik yang digunakan tidak kondusif bagi proses *empowerment*, pembentukan kesadaran baru tentang *self* dan *a sense of dignity* (Moeljarto Tjokrowinoto, 2002 : 31-32).

Sekolah gratis, itulah salah satu program ambisius di samping program gratis-gratis lain yang ditawarkan sejumlah pasangan calon Wali dan Wakil Walikota Bima saat kampanye lalu. Ini pertanda, betapa urgen, vital, dan sakral sekolah atau pendidikan bagi suatu daerah/negara. Bagi Noli, kekomitmenan terhadap dunia pendidikan tidak perlu diragukan lagi, dan telah teruji. Menyimak kampanye pasangan Noli: “Bukan janji, tapi bukti !”, mengingatkan penulis pada pernyataan retorik seorang filosof : “Kita harus ingat : “bahwa bangsa kita tidak maju hanya dengan pidato-pidato yang filosofis atau doa-doa yang khusuk serta syair-syair yang syahdu, melainkan juga dengan usaha-usaha yang membawa sembuhnya penyakit, tambahannya makan dan membaiknya jalan raya serta komunikasi antarkita...”

E.F. Schumacher dalam “*Small is The Beautiful*”-nya (1970) menilai begini : “Pembangunan tidak dimulai dengan barang, tetapi dimulai dengan manusia...” “*Not the gun, the man behind the gun*”—bukan senjata (barang) yang penting, karena hanyalah seonggok benda mati, melainkan manusia yang menggunakan (di belakang) senjata itu. Demikian ungkapan sakral dalam kaveling militer yang nyaris semua kita hafal mati. “Manusia hanya dapat menjadi manusia karena dan oleh pendidikan” tandas Immanuel Kant. Dan “Pendidikan merupakan indikator dari mutu modal manusia” (Djajanegara, 1986).

Pendidikan, bukan sekadar “*education for all*”—pendidikan untuk semua, tetapi harus disempurnakan menjadi “*for what kind of education*”—untuk apa pendidikan itu diberikan. Misalnya, seperti yang dikemukakan Finch dan Crunkilton (1979), tujuan penting diselenggarakan pendidikan secara luas, yaitu (1) pendidikan untuk hidup, (2) pendidikan untuk mencari pekerjaan. Karenanya, sekolah didirikan agar dapat mengajarkan kepada anak-anak ilmu pengetahuan, sikap, nilai-nilai, serta teknik-teknik yang diperlukan untuk dapat hidup layak di masyarakat. Pada gilirannya, mereka diharapkan dapat meneruskan dan bertanggungjawab terhadap pengembangan kebudayaan masyarakat itu (Taba, 1962 : 17).



Mengapa pendidikan dianggap urgen, vital, dan sakral? W. Surachman (1992) mengomentarkannya begini : “Bila suatu negara yang mengharapkan suatu kebesaran, tapi tidak mepedulikan pendidikan, maka negara tersebut sedang memimpikan suatu kemustahilan”. H.G. Wells (1993) dalam “*The Outline of History*” menulis seperti ini : “*Human history becomes more and more a race between education and catastrophe*”-- “Siapa memperhatikan pendidikan dia akan jaya, siapa yang menjauhi pendidikan akan mengalami kekacauan (*catastrophe*)”. Edgar Faure (1992), mengomentarkannya dengan nada lain dan tetap melihat kesakralan pendidikan : “Setiap yang menjadikan dunia ini seperti sekarang ini, suatu tempat yang lebih baik dan mempersiapkan untuk hari esok, pendidikan adalah suatu modal, subyek yang universal.”

Pendidikan merupakan “*human investment.*” Pentingnya pendidikan, sebab data dari berbagai negara menunjukkan, investasi dalam pendidikan membawa tingkat keuntungan ekonomi yang cukup tinggi, rata-rata 18,4 persen, 13,1 persen dan 10,9 persen (*social rate of return*) masing-masing untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (Psacharopoulos, 1993).

Jika ditelaah dari segi filosofis, demikian Lodge, “Hidup adalah pendidikan, dan pendidikan adalah hidup” (Purnomo S. Akbar, 1991). Dan, “pada hakikatnya kalau kita mau meminjam dunia hari ini dari cucu-cucu kita, seperti dinyatakan Gunnard Myrdal, kita dapat membalasnya dengan “*human investment*”, yaitu pendidikan yang memadai” (Kariyoyo dalam Majalah Suara Guru, No. 9/1991 : 36). Leibniz seorang filosof kenamaan Jerman, pernah mengemukakan begini : “Serahkan kepada saya pimpinan pendidikan, saya menjamin akan mengubah wajah Eropa dalam waktu kurang dari satu abad” (Panji Masyarakat, 1991).

Albert Einstein, eksper fisika dan kosmologi modern, mengungkapkan bahwa “pendidikan merupakan salah satu piranti yang tepat untuk mentransfer *human culture* dari generasi ke generasi berikutnya” (Suyitno dalam Majalah Suara Guru Nomor 4/XLII, 30/4/1993). “Pendidikan adalah dasar dari pertumbuhan ekonomi serta perkembangan sains dan teknologi” (John Vaizey, 1967, B.G Tilak Jandhala, 1989).

Posisi strategi pendidikan di atas, menurut Harold G. Shane (1984 : 39-40) disebabkan karena ia punya empat potensi yang signifikan terhadap kehidupan masa depan. *Pertama*, pendidikan adalah suatu cara yang mapan untuk memperkenalkan si pelajar (*learners*) pada kebutuhan sosial yang timbul. *Kedua*, pendidikan dapat dipakai untuk menanggulangi masalah-masalah sosial tertentu. *Ketiga*, pendidikan telah memperlihatkan kemampuan yang meningkat untuk menerima dan mengimplementasikan alternatif-alternatif baru. Dan *keempat*, pendidikan merupakan cara terbaik untuk membimbing perkembangan manusia hingga memberikan kontribusi pada kebudayaan hari esok.

Begitu urgennya pendidikan, sehingga dijadikan materi diskusi di mana-mana, sehingga Kongres Kebudayaan belasan tahun lalu, menggodok sekurang-kurangnya ada lima belas materi pelajaran yang perlu dipersiapkan dalam meladeni kompleksitasnya problema hidup di abad 21 ini. Di antaranya : *pertama*, mampu memberi bekal peserta didik untuk menguasai masyarakat. *Kedua*, mampu memahami diri sendiri. *Ketiga*, mampu memahami investasi mereka di masa depan. *Keempat*, mereka tetap survival. *Kelima*, mampu mengenal masyarakat yang akan bervariasi. *Keenam*, mampu memahami hakikat dan sifat perubahan. *Ketujuh*, mampu memahami

cara atau alat yang dapat mempengaruhi perubahan. *Kedelapan*, mampu memahami konsep kunci IPS dan hubungannya dengan perubahan.

Ada tujuh masalah abad XXI yang sempat teridentifikasi dalam hasil simposium *Organization for Economic Cooperation and Development* (Moerdiono, 1991), yang juga dapat dijadikan rujukan dalam penanganan pendidikan. *Pertama*, reaktivasi ekonomi dunia secara menyeluruh; *kedua*, globalisasi serta regionalisasi; *ketiga*, pengembangan sumber daya manusia, kewiraswastaan dan pengelolaan pemerintahan; *keempat*, *development contracts*; *kelima*, rezim energi internasional menghadapi perubahan lingkungan yang makin destruktif; *keenam*, migrasi internasional; serta *ketujuh*, nasib buruh negara-negara agraris (Majalah Mimbar BP7 No. 50/IX/ 1991 : 106).

Mengingat begitu vitalnya pendidikan, maka tidaklah berlebih-lebihan Noliqu selaku pengemban amanah masyarakat Kota Bima lima tahun ke depan menerjemahkan pesan seorang filosof kenamaan Konfusius (556-479 SbM) sebagaimana tertera pada judul artikel ini : “*Jika rencana anda satu tahun, tanamlah padi; sepuluh tahun, tanamlah pohon; seratus tahun didiklah manusia.*”

Pasangan “Noliqu” yang terhormat ! Sejumlah persoalan pokok yang sedang dihadapi dunia pendidikan kita termasuk di Kota Bima dan bagaimana mencarikan solusinya, antara lain : *pertama*, persoalan kualitas, terutama mutu lulusan; *kedua*, persoalan kuantitas, dalam arti peningkatan daya tampung; *ketiga*, persoalan pemerataan, kesempatan mengikuti pendidikan; *keempat*, persoalan relevansi pendidikan dalam arti kaitan dengan kebutuhan pembangunan/lapangan kerja dan pengembangan ilmu, pengetahuan dan seni; *kelima*, persoalan wawasan masa depan pendidikan; *keenam*, persoalan dinamika sistem pendidikan dalam mengantisipasi masa depan yang cepat berubah; dan *ketujuh*, persoalan produktivitas sistem pendidikan.

Khususnya persoalan produktivitas pendidikan dapat dilihat pada produk, hasil atau efektivitas, dan pada proses, suasana atau efisiensi. Paul Mali (1978 : 34) dan Suterneister (1968 : 5), mengemukakan bahwa efektivitas (sangkil, berhasil guna), dapat dilihat pada : (1) masukan yang merata, (2) keluaran yang banyak dan bermutu tinggi, (3) ilmu dan keluaran yang gayut dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun, dan (4) pendapatan tamatan atau keluaran yang memadai. Sementara efisiensi (tepat guna, berdaya guna, mangkus) dapat dilihat pada : (a) kegairahan atau motivasi belajar yang tinggi, (b) semangat bekerja (belajar) yang besar, (c) kepercayaan berbagai pihak, dan (d) pembiayaan, waktu dan tenaga yang sekecil mungkin tetapi hasil yang besar mendekati rasio satu (Engkoswara, 1984 : 11-12).

Khususnya, kaitan dengan pemerataan memperoleh pendidikan, memang Everett Reimer (1971) seorang kritikus pendidikan formal pernah mengingatkan : “tak satupun negara di dunia ini akan memenuhi permintaan rakyatnya akan pendidikan dalam bentuk sekolah”.

Namun, bagaimanapun masyarakat terdidik harus diciptakan oleh pemerintah daerah. Wujudnya? Masyarakat terdidik bukan masyarakat yang hanya berteknologi tinggi, berpengetahuan tinggi, tetapi masyarakat yang berkembang intelektualnya, keterampilannya dan juga emosi kepribadannya (Suwarsih Madya, Harian Jawa Pos, 27/2/1993).

Masalah lain kaitan dengan dunia pendidikan yakni tidak relevannya luaran pendidikan dengan lapangan kerja. Menurut Archibald Callaway, karena "... jenis pendidikan yang "salah", misalnya terlalu banyak pelajaran yang lebih condong menghafal fakta-fakta mati dibandingkan dengan pelajaran tentang keterampilan yang diperlukan..." Dan memang ada kecenderungan, pendidikan kita lebih banyak penekanannya pada bidang akademik/kognitif (NEM atau IPK misal). Padahal pendidikan itu mestinya mengandung "Tri Ranah" (domain)" yaitu : kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (keterampilan). Nah, dampaknya? Mari kita simak pernyataan Norman M. Goble (1993) dalam bukunya "*The Change Role of The Teacher*" (terjemahan), "Penekanan yang berlebih-lebihan kepada ide-ide "keunggulan akademik" yang sekarang masih belum mengalami perubahan, dapat terjadi penyimpangan yang membahayakan." "Kita tidak boleh membuat mereka menjadi robot yang hanya mencatat sejumlah pertanyaan tertentu sehingga mereka memberikan jawabannya... melainkan manusia dalam pengertian seutuhnya—dengan perkataan lain, pencipta dan penggerak masyarakat" tegas delegasi Volta Hulu dalam "*Education and Development Reconsidered*." Memang diakui, ada korelasi NEM atau IPK dengan prestasi belajar. Bahkan dalam Teori Super dan Crites (1962 : 149), menyatakan, "prestasi akademik merupakan prediktor yang baik bagi keberhasilan pendidikan." Atau, Teori Segel : "tes prestasi akademik memprediksikan keberhasilan studi mahasiswa di perguruan tinggi." Hal inipun pernah dikemukakan mantan Dirjen Dikdasmen Prof. Dr. Hasan Walinono (Kompas, 3/12/1986), "... dari pengalaman guru ternyata mereka yang memiliki NEM tinggi, umumnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibanding dengan yang memiliki NEM rendah..."

Sungguh amat banyak policy yang muaranya ke arah perbaikan luaran pendidikan. Idealnya, arah luaran pendidikan kita, diharapkan : siswa harus menjadi manusia berilmu sebagaimana dicita-citakan oleh pendidikan klasik; manusia cakap dan trampil (baca : manusia siap pakai), sebagaimana dibutuhkan oleh perusahaan dan industri; manusia yang efektif, sebagaimana diperlukan oleh kaum manager; manusia berkembang dan karenanya terdorong untuk memperkembangkan masyarakatnya, sebagaimana didukung oleh kaum progressif; atau manusia pembaharu masyarakat, sebagaimana dicanangkan oleh kaum sosialis (Harian Merdeka, 7 Juli 1993).

Akan halnya, dilihat dari sifat manusianya, bagi saya, demikian "empu pendidikan" kita Prof. Dr. R. Slamet Imam Santoso—mantan Ketua Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional, seseorang lulusan yang baik harus : 1. Pintar, trampil, teliti, rapi, hemat dan sopan santun. 2. Kejujuran asli pribadi. Tak perlu disumpah, jujur mengakui kesalahan, tidak menipu, memeras siapapun, hanya menerima imbalan kalau jasanya memang berhasil dan tak perlu diawasi. 3. Disiplin asli pribadi. Dalam semua keadaan, selalu bisa mengatur diri. Datang-pulang sesuai peraturan tanpa perlu diabsen. Di jalan tak pernah melanggar peraturan lalu lintas. 4. Tahu kemampuan dan batas kemampuan diri, tanpa perlu diberitahukan orang lain, siapapun. Bekerja berdasarkan prinsip *the right man in the right place*. Menghindarkan *the right man in the wrong place*, *the wrong man in the wrong place*, dan *the wrong man in the wrong place*. Kalau mencari pekerjaan tak pernah *backing* atau amplop. 5. Berdasarkan sifat satu sampai empat, baru bisa tumbuh rasa hormat dari pribadi yang asli. Rasa hormat diri yang tidak didasari hirarki masyarakat, kekayaan atau apapun (Harian Republika, 15/9/1993).

Adakah “empu pendidikan” kita ini, sementara “memimpikan suatu kemustahiulan”? Yang jelas “empu pendidikan” ini tidak sedang bermimpi, dan itulah idealnya output pendidikan kita, sehingga tidak mubazir dan sebagai alternatif pelahir manusia-manusia paripurna.

Memang pendidikan kita, termasuk di daerah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu : (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi dan kemandirian (Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (Editor), 2001 : xxxi, dan Cece Wijaya, Dkk., 1988 : 32).

Persoalan pendidikan, tak ubahnya melerai benang kusut dan sebuah lingkaran setan. Menurut Bienaymen dalam Conny R. Semiawan (1991), “Pendidikan sekolah di seluruh dunia umumnya menghadapi empat kelemahan, yaitu : (a) Secara kualitatif tidak sesuai dengan tugasnya untuk mempersiapkan anak-anak muda untuk kehidupan kelak; (b) kekurangan biaya dilihat dari pertumbuhan penduduk dan bahkan untuk meningkatkan rasio antara guru-murid; (c) kapasitasnya yang terbatas dalam menempatkan kembali lulusan, disebabkan oleh adanya spesialisasi guru dan peralatan dan juga karena sulitnya mengubah sikap; dan (d) ada kesulitan untuk menyelaraskan nilai-nilai tradisional yang diwariskan di masa lalu—yang merupakan lapisan inti dari karakter suatu bangsa—dengan nilai-nilai yang lebih universal dan baku, yang dibawa serta oleh revolusi ilmu pengetahuan dan industri yang terjadi di dunia barat.

Mengantisipasi era kompetisi yang semakin tajam, berimplikasi semakin ketatnya persaingan mempersiapkan SDM anak didik yang handal. Dalam konteks ini, keunggulan kompetitif SDM anak didik tidak bisa lagi hanya mengandalkan segi kuantitas dan bertahan pada standar-standar kualitas berdasarkan acuan lokal/daerah, melainkan harus menyesuaikan dengan standar yang berlaku regional dan global.

Tuntutan kondisi seperti di atas, tampaknya dibutuhkan tekad dari berbagai jenis dan jenjang lembaga pendidikan, termasuk Wali dan Wakil Walikota Bima selaku pemimpin daerah : “tidak sekadar melahirkan SDM anak didik yang *komparatif*, namun yang maha penting yakni SDM yang *kompetitif*”, yang dilatari pertimbangan : *pertama*, tuntutan kebutuhan perkembangan global yang sangat cepat dan kompetitif; dan *kedua*, tuntutan kebutuhan dunia pasar kerja daerah/lokal yang juga secara otomatis tidak bisa melepaskan diri dari peningkatan kualitas produk, sehingga bisa bersaing di pasar bebas dunia.

Persaingan berdasarkan keunggulan komparatif adalah persaingan yang mengandalkan faktor-faktor produksi dalam pengertian berlimpahnya sumberdaya alam sebagai bahan baku dan tersedianya tenaga kerja murah. Sedangkan persaingan pada keunggulan kompetitif adalah persaingan yang berdasarkan pada kemampuan sumber daya manusia dan intensitas teknologi, yang menciptakan produktivitas tinggi dalam mempengaruhi produksi yang menghasilkan barang-barang berkualitas dan mempunyai nilai tukar tinggi.

Hadirnya pesaing memungkinkan individu dapat meningkatkan keunggulan bersaingnya. Dengan kata lain, adanya persaingan ketat dan terkendali akan mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas; dan melahirkan kemandirian dan keunggulan. Di sini memerlukan manusia yang berkebutuhan berprestasi. David C. McClelland, kebutuhan untuk berprestasi yang dilambangkan dengan ‘*n achievement*’

atau disingkat *n-Ach* (*the need for Achievement*) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dengan adanya kebutuhan berprestasi, masyarakat benar-benar tersugesti memberikan kontribusi yang maha dahsyat bagi kehidupannya.

Kembali ke persoalan luaran lembaga pendidikan, memang ada kekhawatiran, jika muara akhir dari lembaga pendidikan kita yakni menciptakan luaran siap pakai, maka seolah-olah kita melahirkan manusia robot yang tak bernurani. Olehnya itu, manusia siap pakai dan berkualitas dimaksudkan dilahirkan lembaga pendidikan yakni luaran yang memiliki kualitas jasmaniah, kualitas psikologis, kualitas sebagai makhluk sosial, kualitas kemandirian, kualitas iman/ketaqwaan (Hadari Nawawi dan Mimim Martini, 1994, 48). Atau, sebagaimana yang diamanatkan UU Pendidikan, manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan rasa kebangsaan, dan demikianlah muara akhir bentuk pendidikan yang bermartabat.

Relevansinya dengan luaran pendidikan yang mandiri, Emil Salim (1989) mengajukan beberapa komponen menuju pribadi mandiri, antara lain : (1) bebas, yaitu tumbuhnya tindakan atas kehendak sendiri dan bukan karena orang lain; (2) progresif dan ulet, seperti pada usaha untuk mengejar prestasi, penuh ketekunan, merencanakan dan mewujudkan harapan-harapan; (3) berinisiatif, mampu berpikir dan bertindak secara original, kreatif, dan penuh inisiatif; (4) pengendalian dalam diri, mencakup aspek percaya kepada diri sendiri, dan memperoleh kepuasan atau usahanya sendiri.

Demikian halnya, pendidikan tidak hanya bertugas mewariskan nilai-nilai masa lalu, tapi yang lebih penting adalah melayani kebutuhan masa kini dan menyiapkan anak untuk menghadapi masa depannya. Karakteristik sumber daya manusia yang diharapkan dilahirkan institusi sekolah yakni : *pertama*, SDM yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya, artinya tidak hanya mampu melaksanakan pekerjaan saat ini dengan baik, tetapi juga mempunyai potensi untuk mampu mengerjakan yang akan datang dengan bobot yang lebih besar; atau dengan kata lain, bagaimana menyiapkan *output* yang siap pakai dan berorientasi ke depan, bukan sebatas luaran yang siap latih (*training*); *kedua*, SDM yang mempunyai komitmen tinggi atas bidang tugas pekerjaannya dan organisasi/instansi/lembaga tempat dia bekerja dan menyukai tantangan; *ketiga*, SDM anak didik yang bernaluri melihat, mengantisipasi dan menangani peluang-peluang secara profesional; *keempat*, SDM yang mempunyai pola pikir yang jernih dan sistematis dan pola aksi—tindak yang profesional; dan *kelima*, SDM yang memiliki kemampuan dalam berinterkasi dengan orang lain dan lingkungannya.

Konsekuensi dari paradigma pendidikan yang bernuansa kompetitif terutama dalam menghadapi era globalisasi, maka dalam ranah perencanaan pendidikan, misal, *pertama*, harus mengacu pada bagaimana mengembangkan “*man power approach*” (pendekatan ketenaga-kerjaan) yang selama ini terkesan universal ke spesifikasi ketenaga-kerjaan di dalam bermacam-macam variasi jenis kebutuhan tenaga kerja adanya; *kedua*, pendidikan harus berpandangan luas dan berorientasi jauh ke depan (*future oriented*), yang menuntut pendekatan yang bersifat inter-disipliner dan komprehensif; dan *ketiga*, relevansi pendidikan dengan kebutuhan riil masyarakat (*social demands approach*).

Guna menggapai obsesi tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis sebagai berikut : *pertama*, meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan baik pada tingkat makro (daerah) maupun pada tingkat mikro yaitu pada lembaga pendidikan itu sendiri. Contohnya, pemberian “*bonus*” bagi guru-guru yang berprestasi, dengan promosi pangkat/jabatan, misal. *Kedua*, mendorong partisipasi masyarakat termasuk lembaga sosial kemasyarakatan dan dunia usaha sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan, termasuk memberikan subsidi pada perguruan-perguruan tinggi swasta. *Ketiga*, menyediakan fasilitas yang memadai agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, dinamis, kreatif, dan produktif, misalnya membangun perpustakaan, dan balai-balai latihan yang representatif, sehingga luaran pendidikan dapat mandiri, dan tidak semata-mata memburu menjadi PNS yang porsinya relatif kecil tiap tahun. *Keempat*, menciptakan sistem pendidikan yang pro-aktif dan lentur (fleksibel), misalnya dengan memperbanyak sekolah-sekolah kejuruan. *Kelima*, menumbuh-kembangkan daya juang (*spirit*), profesionalisme dan wawasan keunggulan. *Keenam*, menumbuh-kembangkan sikap hidup yang hemat, cermat, teliti, tertib, tekun, dan disiplin, bermoral dan berbudi pekerti luhur sebagai pengejawantahan dari keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan menggunakan strategi budaya, fondasi yang perlu digunakan dalam membangun sistem pendidikan yang bermartabat sehingga dapat menghasilkan manusia yang mempunyai daya saing dan daya juang yang tinggi; berwawasan iptek, serta bermoral dan berbudaya adalah prinsip dasar moral dan keadilan. Di atas fondasi itulah sistem pendidikan dibangun.

Pilar yang akan memperkuat bangunan sistem pendidikan sebagaimana termuat dalam rumusan Komisi Pendidikan UNESCO yang diketuai oleh Jacques Delors (Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (Editor), 2001 : xxxi) mengenai pendidikan untuk Abad ke-21 berjudul “*Learning, The Treasure Within*” tentang belajar menjadi manusia bermutu juga mencanangkan pilar-pilar penting dalam pendidikan, yakni bahwa pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan belajar untuk mengetahui (*learning how to know*), belajar untuk melakukan sesuatu (*learning how to do*), belajar menjadi seseorang (*learning how to be*), dan belajar menjalani kehidupan bersama (*learning how to live together*).

Problematika pendidikan lain, menurut Ven (1970), “*To day’s schools and universities are too past and present bount*”. Artinya : sekolah-sekolah dan universitas-universitas sekarang kurang mengajarkan masa depan. Akibatnya setelah peserta didik lulus dari sekolahnya, mereka sekaligus telah *absolote*. Ven selanjutnya menganjurkan, “*When we think of school for tomorrow, we must think about their role in a total manpower development program*”. Maksudnya sekolah sebagai jembatan antara peserta didik dan peranannya di masyarakat, bertugas mencarikan peranan yang bermakna dalam masyarakat. Atau dengan lain perkataan, di antara sekian banyak faktor yang menyebabkan pengangguran, khususnya yang berkaitan dengan perguruan tinggi adalah adanya ketidaksesuaian (*missmatch*) antara pengetahuan serta keterampilan yang dipelajari di sekolah dengan tuntutan dunia kerja.

Sebagai penutup, dari sejumlah persoalan pendidikan yang segera ditangani sekarang, di antaranya : *pertama*, penataan dan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, iklim, dan proses pendidikan yang demokratis, bermutu, dan

bermartabat; *kedua*, pemberdayaan masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan, semangat, dan kepedulian terhadap pendidikan; *ketiga*, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, mengingat pendidikan bukan hanya berorientasi lokal, melainkan juga berorientasi kepentingan nasional dan bahkan harus memiliki perspektif global; *keempat*, peningkatan akuntabilitas pendidikan, artinya lembaga pendidikan senantiasa dituntut untuk mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat; dan *kelima*, mutu dengan standar global agar dapat bersaing secara global.

Di samping itu, perlu diselenggarakannya program-program pendidikan strategis, dengan indikator : (1) terbentuknya keterampilan dasar untuk hidup (*basic life skills*) melalui pendidikan dasar; (2) penekanan kompetensi generik untuk mengantisipasi globalisasi pasar kerja; (3) meningkatnya produktivitas keluaran pendidikan; (4) dihasilkannya sejumlah produk pendidikan unggulan untuk mendukung perkembangan Iptek serta mempertajam pemahaman dan kearifan manusia melalui pengembangan ilmu, misalnya ilmu kesenian, sastra, filsafat, dan agama; (5) tegak dan dilaksanakannya nilai-nilai moral dalam kehidupan individu, masyarakat, satuan-satuan sosial kemasyarakatan, dan dunia kerja.

Khususnya pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) sebagaimana disinggung point *pertama* di atas adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.

Kualitas multidimensional manusia yang diharapkan tercipta melalui dunia pendidikan mencakup : (1) *kualitas kepribadian* yang terdiri dari kecerdasan, kemandirian, kreativitas, ketahanan mental, keseimbangan antara emosi dan ratio, dan sebagainya; (2) *kualitas bermasyarakat* seperti kesetiakawan sosial, solidaritas, keterbukaan, dan sebagainya; (3) *kualitas berbangsa*, yaitu tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara yang bermartabat dengan bangsa-bangsa lain; (4) *kualitas spiritual*, yaitu religiusitas dan spiritualitas; (5) *kualitas lingkungan* yang mempunyai kepedulian terhadap kelestarian lingkungan; dan (6) *kualitas pekerjaan* yaitu kemampuan untuk mewujudkan aspirasi dan potensi diri yang diperlukan untuk kerja nyata guna menghasilkan sesuatu dengan mutu sebaik-baiknya (Alwi Dahlan, 1992 dalam Moeljarto Tjokrowinoto, 2002 : 78).

S e m o g a !

## BAB XXI RUANG PUBLIK KOTA

“Pandangan pertama awal aku berjumpa/  
Seolah-olah hanya/Impian yang berlalu/  
Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya/  
Gadis secantik dia/Datang menghampiriku/  
Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya...”

Itulah kurang lebih potongan bait syair lagunya A. Rafiq yang begitu tenar puluhan tahun silam. Artinya, begitu dalamnya kesan pertama dalam suatu perjumpaan. Dalam tulisan ini, perjumpaan pertama dalam memasuki suatu kota, yang diterjemahkan sebagai : pintu gerbang dan penataan ruang publik macam taman kota. Pintu gerbang kota, mestinya didesain begitu apik, indah, rapi, dan menarik sehingga semua orang akan terkesima, terpesona, decak kagum, penasaran, dan tentu ingin menjelajah jauh ke dalam jantung kota, dan pintu gerbang dengan segala asesorisnya—taman-taman dan bangunan-bangunan menarik lainnya, misalnya rumah makan, kafe, tempat singgah, atau bangunan jenis lain saban waktu mengucapkan “Selamat Datang” dan “Selamat Jalan” setelah menikmati kota.”

Ruang publik antara lain meliputi taman yang dapat dimanfaatkan oleh publik (Mulyani, 2002 : 20). Menurut Tibbalds (2001 :1) bidang publik dalam ruang perkotaan adalah semua bagian jaringan perkotaan yang dapat diakses secara fisik dan visual oleh masyarakat umum, termasuk jalan, taman, dan lapangan/alun-alun.

Taman merupakan ruang publik yang memiliki batas tertentu yang digunakan untuk kesenangan dan dapat diakses oleh publik. Makna taman menunjukkan ruang terbuka yang memiliki keindahan dan kenyamanan yang divisualisasikan oleh alam, baik alam yang bersifat natural maupun alam buatan dan dapat diakses oleh publik.

Selain persoalan taman, pemerintah kota pun giat memoles ruang terbuka kota. Ruang terbuka mempunyai dua interpretasi, yaitu ruang terbuka yang di atasnya memang sudah ada sentuhan campur tangan manusia dan ruang terbuka yang di atasnya belum terdapat campur tangan manusia. Istilah yang terkenal untuk ruang terbuka pertama adalah *man-made open space* dan ruang terbuka kedua adalah *natural open space*. Beberapa contoh *man-made open space* antara lain kebun (*gardens*), padang golf (*golf courses*), lahan pertanian (*agricultural lands*) dan beberapa contoh mengenai *natural open space* antara lain lahan hutan alami (*natural forest land*), gumpuk pasir (*sand dunes*), padang rumput (*grass land*) (Williams, 1969; Bryant et.al., 1982 dalam Hari Sabari Yunus, 2008 : 322).

Lalu, apa fungsi ruang terbuka kota? Clawson dalam Hari Sabari Yunus (2008 : 324-330) mengemukakan 5 macam fungsi ruang terbuka, yaitu : 1. Ruang terbuka yang berfungsi sebagai media pemberi udara dan penerangan (*provision of air and light to buildings*) bagi gedung-gedung. 2. Ruang terbuka yang berfungsi sebagai pengurang kesan kepadatan yang tinggi (*to relieve a sense of crowding*). 3. Ruang terbuka yang berfungsi sebagai media rekreasi (*recreation functions*). 4. Ruang terbuka yang berfungsi ekologis (*ecological functions*). 5. Ruang terbuka yang berfungsi sebagai media pembentuk tampilan fisik kota (*city-forming functions*).



William dalam Hari Sabari Yunus (2008 : 332-335) mengemukakan 6 macam fungsi ruang terbuka, yaitu : 1. Ruang terbuka yang berfungsi sebagai sumber produksi (*resource production*). 2. Ruang terbuka yang berfungsi untuk preservasi sumber daya alam dan manusia (*preservation of natural and human/cultural resources*). 3. Ruang terbuka yang berfungsi sebagai penunjang kesehatan, rekreasi, pendidikan dan pembentukan kenampakan kota (*functions for health, recreation, education and urban design*). 4. Ruang terbuka yang berfungsi sebagai proteksi keamanan publik (*functions for public safety*). 5. Ruang terbuka yang berfungsi sebagai koridor (*open space for corridors*). 6. Ruang terbuka yang berfungsi sebagai cadangan perluasan kota (*functions for urban expansion*).

Latarjet (1972) dalam Hari Sabari Yunus (2008 : 337-335) mengemukakan 6 macam fungsi ruang terbuka, yaitu : 1. Ruang terbuka yang berfungsi sebagai tempat rekreasi (*recreational functions*). 2. Ruang terbuka yang berfungsi ekologis (*ecological functions*). 3. Ruang terbuka yang berfungsi sebagai penentu organisasi keruangan (*spatial organisation functions*).

Kenapa perlu zona prevervasi atau jalur hijau—taman kota, misal? Perlunya penghijauan kota dilatari alasan bahwa hutan/hijauan kota bermanfaat : memfilter atau menyaring asap dan debu kendaraan dan debu alam yang beterbangan, apalagi Kota Bima masih dominan kotoran kuda (penarik benhur); terjaminnya fungsi pengaturan iklim; dan nilai estetika yang menyangkut arsitektur, serta kebahagiaan manusia. Pada dimensi lain, hijauan/hutan kota berfungsi sebagai wahana rekreasi murah-meriah bagi masyarakatnya, yang ingin melepaskan lelah di siang hari sesudah bekerja, agar etos kerja dapat pulih kembali dan akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja.

### **RUANG PUBLIK KOTA, UNTUK APA?**

“Ruang publik perkotaan (*public urban space*) memungkinkan dan membiarkan masyarakat yang berbeda kelas, etnik, gender, dan usia saling bercampur baur” (Madanipour dalam Paulus Hariyono, 2007 : 133).

Jika dicermati seksama, ruang publik di kota–kota Indonesia tampak semrawut dan tidak beraturan. Kondisi ini disebabkan ruangan publik diperebutkan banya pihak, seperti pengguna lalu lintas, pedagang kaki lima, pejalan kaki, pengguna tempat parkir, maupun pengguna papan reklamen secara serampangan. Tempat-tempat tertentu, seperti taman kota diperebutkan pula oleh kelompok masyarakat kecil yang melakukan kegiatan ekonomi di satu pihak dan di lain pihak terdapat kelompok masyarakat atas dan menengah yang ingin melakukan aktivitas rekreasi, olahraga, atau santai sejenak.

Ruang merupakan alih kata *space* untuk bahasa Indonesia. Dalam *Oxford Engglis Dictionary* disebutkan, *space* berasal dari kata latin *spatium* yang berarti terbuka luas, memungkinkan orang berkegiatan dan bergerak leluasa di dalamnya, dan dapat berkembang tidak terhingga. Oleh Munitz (1975) ruang diberi pengertian sebagai tempat acuan untuk menunjukkan posisi perletakan sebuah objek, dan menjadi suatu medium yang memungkinkan suatu objek bergerak.

Menurut istilah geografi umum, yang dimaksud dengan ruang (*space*) adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia.

Berdasarkan UU RI 1992 tentang Penataan Kota, ruang itu termasuk daratan, lautan, angkasa dan penataan ruang bertujuan antara lain : terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Menurut Madanipour (1996) ruang publik perkotaan (*public urban space*) memungkinkan dan membiarkan masyarakat yang berbeda kelas, etnik, gender, dan usia saling bercampur baur. Pengertian yang diberikan oleh Madanipour ini khususnya sangat diperhatikan pada masyarakat dan pemerintah yang menganut paham demokrasi. Sedangkan menurut Tibbalds (2001) bidang publik dalam ruang perkotaan adalah semua jaringan perkotaan yang dapat diakses secara fisik dan visual oleh masyarakat umum, termasuk jalan, taman, dan lapangan/alun-alun. Jadi dapat dikatakan ruang publik adalah suatu tempat yang dapat menunjukkan perletakan sebuah objek. Tempat ini dapat diakses secara fisik maupun visual oleh masyarakat umum. Dengan demikian, ruangan publik dapat berupa jalan, trotoar, taman kota, lapangan, dan lain-lain.

Sedangkan ruang privata dalah suatu ruang yang diperuntukkan bagi aktivitas kalangan terbatas, dan penggunaannya biasanya bersifat tertutup dalam suatu teritorial tertentu berdasarkan kepemilikan secara legal oleh perorangan maupun badan hukum. Namun demikian, terdapat ruang privat yang terbuka untuk umum karena tuntutan aktivitasnya. Sebagai contoh, sebuah pusat perbelanjaan teritori lahannya bersifat privat. Namun karena tuntutan aktivitasnya, ruang tersebut dibuka untuk umum oleh pemiliknya dalam rentang waktu yang telah ditentukan sehingga di dalamnya terselip ruang yang statusnya semi privat dan semi publik. Pada saat aktivitas di ruang tersebut berakhir untuk umum, maka ruang tersebut berubah menjadi privat.

Ruang dalam pemahaman post-modernisme mencoba menggali kembali nilai-nilai dari stuktur ruang. Tempat dan penghubung, selain menjadi penampung berbagai aktivitas operasional fisik dan sosial yang terorganisasi dalam ruang eksterior maupun interior, publik maupun privat, juga harus terangkai dalam sebuah sistem sirkuit ruang linear yang terdefinisi dan berhierarki.

Kerangka struktur kota yang menyangga ruang kota seharusnya bisa dirancang bagaikan *crascendo* : nada-nada yang digubah bergerak bertahap menuju suatu klimaks; memiliki wujud dan tematik. Dikarenakan ruang publik adalah ruang eksrerior kota yang terbentuk oleh bangunan, maka ruang publik terkesan sebagai "sisa" ruang publik kota seharusnya memiliki posisi yang sejajar dengan bangunan. Ia merupakan bagian dari rancangan detail suatu spasial bersama bangunan yang lain. Konsep ini mengingatkan orang akan kata-kata *Lao-Tse*: "*kita membuat cawan dari segenggam tanah liat. Ruang kosong di dalam cawan itulah yang membuat cawan itu berguna.*"

### **FUNGI RUANG PUBLIK KOTA**

Menurut Jan Gehl (Paulus Hariyono, 2007 : 136) ruang publik memiliki tiga fungsi, yaitu sebagi tempat bertemu, berdagang, dan lalu lintas. Dari tiga fungsi ini Jan Gehl membuat empat klasifikasi kota.

*Pertama*, kota tradisional, yaitu kota yang ketiga ruang publiknya masih hidup secara bersamaan. Biasanya kota jenis ini masih didapati pada kota kecamatan di Indonesia, di mana pasar tradisional masih memiliki kekuatan sentral yang kuat. Di

kota kecamatan yang terkonsentrasi pada desa tertentu sering terdapat pasar *tiban* atau pasar *kaget* yang memenuhi ketiga fungsi ruang publik di atas. Disebut pasar *tiban* (bahasa Jawa, artinya jatuh, kejatuhan, sesuatu, tiba-tiba ada) atau *kaget* (bahasa Jawa artinya terkejut, karena ada suatu kejadian mendadak) karena pasar ini muncul pada hari-hari tertentu, seperti setiap Selasa Legi dan Rabo Pahing. Di Kota Semarang pun setiap hari, seperti ruang publik di ruas-ruas jalan sekitar Pasar Johar. Bahkan kehadiran ruang publik di sekitar Pasar Johar tidak gentar berhadapan dengan pusat perbelanjaan modern yang dibangun dihadapannya, dan justru berakibat pusat perbelanjaan modern ini gulung tikar.

Kategori *kedua* yang dimaksud Jan Gehl adalah kota yang diserbu (*invaded city*), yaitu salah satu fungsi, biasanya fungsi lalu lintas, mendominasi sebagian besar ruang publik sehingga fungsi ruang publik yang lain tersingkirkan.

Kategori *ketiga* adalah kota yang ditinggalkan (*abandoned city*) dengan kondisi ruang publik dan aktivitasnya yang hilang. Kondisi ini dapat terjadi karena pusat kota berpindah lokasi. Aktivitas masyarakatnya berpindah ke pusat-pusat perbelanjaan modern. Kategori *keempat* adalah kota yang direbut kembali (*reconquered city*) dengan adanya upaya yang kuat untuk mengembalikan keseimbangan fungsi ruang publik sebagai tempat untuk bertemu, berdagang, dan berlalu lintas. Atau dengan kata lain, terdapat upaya revitalisasi suatu kawasan kota.

Ahmadjayadi (2000) dalam “*Penataan Ruang dalam Otonomi Daerah*” menekankan bahwa model-model daerah membangun dalam kegiatan penataan ruang ke depan, antara lain adalah : (1) inisiatif dan inspirasi lokal mewarnai perencanaan tata ruang; (2) perencanaan tata ruang bertumpu pada karakter dan potensi wilayah, tetapi tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat bersama-sama menggalang kerjasama membangun daerah secara konsisten berdasarkan rencana tata ruang yang telah disepakati; (4) penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipatif, tanggap, bertanggung jawab dan demokratis (Badrul Munir, 2002 : 243)

### **ELEMEN PEMBENTUK RUANG TERBUKA**

Elemen–elemen lansekap atau ruang terbuka menurut Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto (1999 : 70) dapat dibagi menjadi dua golongan besar yaitu : *pertama*, elemen keras (*hard material*), seperti perkerasan, bangunan dan sebagainya. *Kedua*, elemen lembut (*soft material*), yang berupa berbagai jenis tanaman.

Bagi seorang arsitek lansekap yang menangani masalah lingkungan, keseimbangan alam dan berpaduan antara alam, manusia, makhluk hidup lainnya dan elemen buatan manusia serta elemen alami, materi tanaman merupakan faktor penting di dalam perencanaan lansekap.

*Soft material* atau tanaman selalu berubah keadaannya, variasi ini dapat kita lihat dari bentuk, tekstur, warna dan ukurannya. Perubahan ini diakibatkan karena tanaman merupakan organisme yang selalu tumbuh dan berkembang dan juga dipengaruhi oleh alam habitatnya. Hal ini mengakibatkan penggunaan tanaman menjadi bervariasi.

Dalam kaitannya dengan perencanaan lahan, “*plantung design*” atau tata hijau menjadi suatu hal penting dan mencakup antara lain fungsi tanaman, perletakan tanaman, tujuan perencanaan, habitat tanaman dan prinsip dari perencanaan.

- a. Elemen keras (*hard material*). Elemen keras merupakan suatu unsur yang dapat memberikan sifat ruang terbuka menjadi kaku, tegar dan memberikan kesan ruang yang kuat, misalnya bangunan, pagar, pedestrian dan pembatas atau furniture taman (kota) dengan menggunakan bahan yang berkesan masif.
- b. Elemen lunak (*soft material*). Elemen lunak merupakan suatu unsur yang memberikan rasa kelembutan dan menggambarkan sesuatu yang hidup, karena kehidupan mempunyai sifat elastis dan fleksibel sedang kekakuan merupakan lambang kematian.

Tanaman adalah merupakan faktor utama dari elemen lunak di samping unsur lain seperti air misalnya. Tanaman tidak hanya mengandung nilai estetis saja, tetapi juga berfungsi untuk menambah kualitas lingkungan.

### **PERENCANAAN TATA RUANG KOTA**

Bila melihat evolusi perencanaan pembangunan kota di Eropa dan Amerika, industrialisasi merupakan salah satu faktor pendorong adanya perencanaan pembangunan kota. Hal ini berbeda dengan konteks Indonesia. Terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi faktor-faktor dasar kota di Indonesia. *Pertama*, perkembangan kota di Indonesia bukan disebabkan adanya industrialisasi, melainkan karena kurang menguntungkan kondisi di daerah pedesaan. Kondisi ini mempengaruhi faktor-faktor dasar kota di Indonesia, antara lain dalam struktur basis perekonomiannya, di mana terjadi dualisme perekonomian kota, yakni ekonomi modern dan ekonomi tradisional. Kondisi ini memperbesar sektor informal di kota, yang pada gilirannya berpengaruh pada struktur fisik kota.

*Kedua*, keadaan masyarakat, khususnya kondisi struktur pemerintahan di Indonesia dan organisasi masyarakat, tingkat pengetahuan dan serta kebutuhan dasarnya, dan sebagainya.

*Ketiga*, keadaan struktur pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem perangkat pemerintah daerah (desentralisasi) dan perwakilan pemerintah pusat di daerah (dekonsentrasi).

*Keempat*, belum mantapnya bidang dan proses perencanaan kota di Indonesia, sehingga mekanisme pendukungnya belum berjalan lancar.

*Kelima*, beragamnya jenis kota di Indonesia, terutama menyangkut besaran serta kompleksitas permasalahannya. Hal ini bisa dilihat dari beragamnya kota-kota yang ada di Indonesia, baik kota besar, kota menengah maupun kota kecil, dan juga beragamnya kondisi kota-kota, baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa.

Kelima kondisi di atas berpengaruh terhadap model perencanaan yang diterapkan di Indonesia, karena dari berbagai kondisi tersebut diupayakan penerapan model yang sesuai.

Bila kita mengkaji perencanaan pembangunan kota di Indonesia, menurut Sudjana Rochyat paling tidak terdapat dua pandangan dasar yang dapat diterapkan untuk mengupas permasalahan dan mengenali berbagai problematika perkotaan. *Pertama*, memandang kota sebagai dimensi fisik dari kehidupan kegiatan usaha manusia yang memberikan berbagai implikasi pada aspek-aspek pembangunan. *Kedua*, kota dipandang sebagai bagian dari suatu sistem yang menyeluruh dari kehidupan dan kegiatan usaha manusia dan masyarakat yang saling terkait dengan upaya pada aspek-aspek pembangunan lainnya.

Namun, dilihat dari fungsi dan peranan kota sebagai pusat pemukiman penduduk, pusat pendidikan, pusat kegiatan ekonomi dan sebagainya menunjukkan bahwa kota tidak hanya dipandang dari dimensi fisik semata, tetapi lebih merupakan bagian dari suatu sistem yang menyeluruh, yang hal ini akan dilihat dari perjalanan pembangunan kota di Indonesia.

Penataan ruang ialah usaha untuk merencanakan jumlah penggunaan lahan untuk keperluan tertentu dan pada tempat yang tepat, termasuk di dalamnya mengatur hubungan antara pemukiman dengan tempat kerja, tempat sekolah, tempat belanja, tempat hiburan dan lain-lain yang semuanya juga sangat tergantung pada rencana jaringan jalan di kota dan pemilihan rencana penggunaan lahan (Budi D. Sinulingga, 1999 : 114).

Perencanaan Tata Ruang Kota adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana-rencana tata ruang kota.

Rencana Tata Ruang Kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota, yang terdiri dari Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota, dan Rencana Teknis Ruang Kota yang semuanya merupakan kesatuan perencanaan yang hirarkis di mana satu sama lain saling mendukung dan dijadikan Peraturan Daerah.

### **TUJUAN PERENCANAAN TATA RUANG KOTA**

Tujuan dari perencanaan tata ruang kota pada umumnya : (a) Penyediaan ruang yang cukup untuk setiap jenis penggunaan secara efisien untuk kenyamanan bagi lingkungan kegiatan manusia kota; (b) Kemudahan hubungan antara bagian-bagian kota mencakup antar pemukiman dan dengan tempat pekerjaan, pusat pelayanan maupun lokasi rekreasi; (c) Menghindari penggunaan lahan yang berdekatan secara tidak harmonis, misalnya lokasi industri dengan perumahan; (d) Melestarikan dan bahkan memperkuat bagian-bagian kota yang telah mempunyai bentuk-bentuk yang baik; dan (e) Menghilangkan kondisi-kondisi buruk yang tidak dikehendaki, misalnya pemukiman kumuh (Budi D. Sinulingga, 1999 : 134).

Tujuan utama *integrated regional cooperation* adalah menciptakan bentuk perkembangan spasial yang tidak bertentangan dengan konsep *sustainable development* yang selalu memerhatikan (a) kepentingan wilayah lain (*inter frontier dimension*); (b) kepentingan wilayah itu sendiri (*intra frontier dimension*) (c) kepentingan generasi saat ini (*intra generation dimension*), (d) kepentingan generasi yang akan datang (*inter generation dimension*) untuk menapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Hadi Sabari Yunus, 2008 : 102).

### **RUANG TERBUKA HIJAU**

Ruang terbuka hijau dalam perencanaan kota dimaksudkan yakni bagian-bagian dari ruang kota yang sama sekali tidak mempunyai bangunan, seperti lapangan permainan, taman-taman kota, ruang terbuka yang berfungsi sebagai zona pembatas (*buffer zone*) pada kawasan industri, maupun pada kawasan perumahan yang terdapat sepanjang jalan terutama jalan arteri dan kolektor dan juga pada sungai yang mengalir pada kota (Budi D. Sinulingga, 1999 : 114). Untuk lapangan bermain maka distribusinya harus secara merata untuk melayani areal perumabahan.

Berapakah standar kebutuhan ruang terbuka hijau untuk suatu kota? Dalam buku *Principle and Practice of Town and Country Planning* (Keeble dan Lewis, 1969 dalam Budi D. Sinulingga, 1999 : 114) dinyatakan bahwa kebutuhan khusus untuk taman kota adalah 250 m<sup>2</sup> untuk tiap 1000 penduduk, sedangkan kebutuhan untuk lapangan bermain adalah 100 m<sup>2</sup> per 1000 penduduk.

Faktor lingkungan sudah mulai dianggap sebagai faktor penting dalam arsitektur. Victor Papanek (1971), seorang expert Unesco dalam bidang desain mengungkapkan pendapatnya bahwa “Design (arsitektur) harus sesuatu yang berarti bagi kehidupan manusia, dan yang berarti ini selalu ditekankan dalam setiap EXPRESSI antara lain seperti : keindahan (*beauty*); keagungan/kesombongan (*ugly*); ketenangan (*cool*); ketangkasan/kemeriahan (*cute*); ketegangan/kengerian (*disgust*); kejujuran (*realistic*); kerahasiaan (*secreat*); abstrak (*abstractnes*); dan kecantikan (*nicely*).

### **BUDAYA LOKAL DAN KERUANGAN KOTA**

Adakah korelasi budaya lokal dengan keruangan kota? Menurut Mulyono Sadyohutomo (2008 : 82-83), untuk menumbuhkan kesadaran terhadap budaya lokal keruangan, maka perlu dipahami konsep-konsep berikut.

*Pertama*, radius keunikan, yaitu radius rasa ruang dari pengaruh suatu eksistensi keunikan. Apabila pada suatu lokasi keunikan diintervensi dengan perubahan ruang didekatnya, maka perubahan tersebut dapat mengganggu nilai keunikan tersebut. Radius keunikan bukan hanya menggambarkan radius fisik keruangan saja. Tetapi juga menyangkut radius nilai keunikan.

*Kedua*, eksistensi spasial, yaitu menggambarkan peran dan posisi suatu keunikan ruang terhadap eksistensi-eksistensi ruang yang lain serta kapasitasnya.

### **FUNGSI DAN PERANAN PENGHIJAUAN**

Fungsi dan peranan penghijauan perkotaan menurut Zoer Aini Djamil Irwan (2003 : 167-168) antara lain : (1) Sebagai paru-paru kota. Tanaman sebagai elemen hijau, pada pertumbuhannya menghasilkan zat asam (O<sub>2</sub>) yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup untuk pernapasan. (2) Sebagai pengatur lingkungan (mikro), vegetasi akan menimbulkan hawa lingkungan setempat sejuk, nyaman dan segar. (3) Pencipta lingkungan hidup (ekologis). (4) Penghijauan dapat menciptakan ruang hidup bagi makhluk hidup di alam. (5) Penyeimbangan alam (adaphis) merupakan pembentukan tempat-tempat hidup alam bagi satwa yang hidup disekitarnya. (6) Perlindungan (protektif), terhadap kondisi fisik alami sekitarnya, (angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu). (7) Keindahan (estetika). Dengan terdapatnya unsur-unsur penghijauan yang direncanakan secara baik dan menyeluruh akan menambah keindahan kota. (8) Kesehatan (hygiene), misalnya untuk terapi mata. (9) Rekreasi dan pendidikan (edukatif). Jalur hijau dengan aneka vegetasi mengandung nilai-nilai ilmiah. (9) Sosial politik ekonomi.

Banyak contoh di dalam dan di luar negeri bahwa penghijauan di pinggir jalan maupun taman ditanami dengan tanaman produktif (buah-buahan, tanaman langka, tanaman bunga wangi).

Pemeliharaan pada penghijauan meliputi penyulaman, pemangkasan, pemberantasan hama dan penyakit, pemberantasan gulma, penyiraman, pemupukan, pemetikan dan lainnya.

Eckbo (1956), menyatakan bahwa pemilihan jenis tanaman untuk penghijauan agar tumbuh dengan baik hendaklah dipertimbangkan syarat-syarat hortikultur (ekologika) dan syarat-syarat pisik. Syarat holtikultural yaitu respons dan toleransi terhadap cahaya matahari, kebutuhan tanah, hama dan penyakit, serta syarat-syarat pisik yaitu tujuan penghijauan, persyaratan budi daya, bentuk tajuk tekstur, warna, aroma.

Dalam penelitian Sunarya Wargasasmita, dkk. (1990) menunjukkan bahwa tumbuhan dapat mengakumulasi Pb pada daun dan kulit batangnya. Ini terbukti dari hasil penelitian itu bahwa kandungan Pb lebih banyak pada tanaman ditepi jalan di DKI dibandingkan dengan kandungan Pb pada tumbuhan sejenis dari lokasi yang jauh di pinggir jalan. M. Ahmad badri (1986) mengemukakan bahwa tumbuhan dapat merupakan indikator dari pencemaran logam berat. Hal ini terbukti dari hasil penelitiannya bahwa *Axonopus Compressus*, *Acalypha Wikesiana* dan *Pterocarpus indicus* dapat menyerap logam berat seperti Zn, Pb, Cu dan Pb. (Tabel 4).

Jahya Fakuara dkk, menemukan dalam penelitiannya bahwa Johar (*Cassia slamea*), asam landi (*P. dulce*), dan mahoni (*S. macrophylla*) mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menyerap Pb, oleh karena itu jenis tanaman ini baik ditanam di lahan yang banyak mengandung Pb. Hasil penelitian Endes Nurfilmarasa D. (1989) menunjukkan bahwa kandungan timbal jerap dan timbal serapan sangat bervariasi menurut jenis daun. Daun tanaman damar, kesumba, kirai payung, mahoni, jamuju, dan pala mempunyai potensi yang tinggi sebagai pereduksi timbal. Sedangkan daun pohon pala, jnuju, kupu-kupu, damar, kesumba, mahoni dan kirai payung mempunyai kemampuan untuk mereduksi timbal yang tinggi-sedang, daun pohon kupu-kupu mempunyai kemampuan yang relatif lebih rendah. Sedangkan hasil penelitian Roy Widyastma (Kompos, 11 juli 1991) menemukan beberapa jenis pohon yang berpotensi yaitu damar, lamtorogung, dan kupu-kupu, akasia dan beringin mempunyai potensi ditinjau dari efektivitas penghasil O<sub>2</sub> karena mempunyai klorofil tinggi, dan laju fotosintesis tinggi dengan titik kompensasi cahaya rendah.

Pelaksanaan penghijauan secara konseptual yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan dengan mempertimbangkan aspek estetika, pelestarian lingkungan dan fungsional. Pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan begitu pula pemeliharaan harus dilakukan secara terus-menerus,

### **KEADAAN PENGHIJAUAN DI JAKARTA**

Hasil penelitian tentang pelaksanaan penghijauan di Jakarta dengan studi kasus Jakarta Selatan (Zoeraini Djamal Irwan dan Arwindrasti, 1988) menunjukkan bahwa : (1) Jenis yang paling banyak ditanam adalah akasia (*A. Auriculiformis*), angkana (*P. indicus*), mahoni (*S. macrophylla*) tanjung (*Memusops elengi*), hujan mas, flambyan (*Delonix regia*), bungur (*Langersromia indica*) dan glodngan (*Polyathia longofolia*). (2) Pemilihan jenis untuk penghijauan lebih ditekankan kepada tanaman yang mudah diperoleh, mudah tumbuh dan rindang, akibatnya keanekaragaman jenis menjadi rendah. (3) Aspek pelestarian lingkungan kurang mendapat perhatian, terbukti dengan kurangnya menanam tanaman produktif.

## BAB XXII TAMAN BUNGA DAN HUTAN KOTA

Fungsi-fungsi tanaman menurut Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto yaitu : 1. Kontrol pandangan (*visual control*). 2. Pembatas fisik (*physical barriers*). 3. Pengendali iklim (*climate control*). 4. Pencegah erosi (*erosion control*). 5. Habitat binatang (*wildlife habitats*). 6. Nilai estatis (*aesthetic values*)" (Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, 1999 : 73-74).

Memperbincangkan taman kota berarti bicara tentang keindahan dan seni. Umumnya manusia suka pada keindahan, termasuk keindahan alam yang berupa taman atau hutan kota. Keindahan alam adalah “keharmonisan yang menakjubkan dari hukum-hukum alam”, yang dibukakan untuk mereka yang mempunyai kemampuan untuk menerimanya (M. Habib Mustopo, 1983 : 98). Hebert Read (M. Habib Mustopo, 1983 : 98) menegaskan, keindahan itu adalah sesuatu kesatuan hubungan-hubungan yang formal daripada pengamatan yang dapat menimbulkan rasa senang (*beauty is unity of formal relation among our sense perceptions*). Atau, keindahan itu merangsang timbulnya rasa senang tanpa pamrih pada subyek yang melihatnya, dan bertumpu pada ciri-ciri yang terdapat pada obyek yang sesuai dengan rasa senang itu.

Keindahan berasal dari kata dasar “indah”, yang dapat diartikan bagus, cantik, molek, elok, dan permai, yaitu sifat yang menyenangkan, menggembirakan, menarik perhatian, dan tidak membosankan yang melekat pada suatu obyek (Abdulkarim Muhammad, 2008 : 111).

Keindahan adalah sesuatu yang mendatangkan rasa senang. Manusia memiliki sensibilitas esthetis (perasaan keindahan), karena itu manusia tak dapat dipisahkan dari keindahan. Manusia membutuhkan keindahan dalam kesempurnaan (keutuhan) pribadinya.

Rasa keindahan (*sense of beauty*) adalah rasa yang diterima oleh hati nurani sebagai hal yang menyenangkan, menggembirakan, menarik perhatian, dan tidak membosankan. Jadi, sesuatu itu dikatakan memiliki rasa keindahan apabila memenuhi sifat kualitas berikut ini : (a) menyenangkan (*happy*); (b) menggembirakan (*cheerful*); (c) menarik perhatian (*attractive*); dan (d) tidak membosankan (*unboring*) (Abdulkarim Muhammad, 2008 : 113).

Secara teknis keindahan sebagai hasil karya budaya dan seni manusia misal, dapat dirasakan atau diterima dengan baik antara lain dengan mengenal tiga karakteristik wujud ciptaan, yaitu : integritas, harmoni, dan individuasi. *Integritas* merupakan ketunggalan atau kesatuan yang padu dari semua unsur dan bagian-bagiannya, yang masing-masing berfungsi membangun wujudnya. *Harmoni* atau keselarasan dan keserasian adalah proporsi dan hubungan atau pertalian yang tepat dari bagian-bagian. Sedangkan individuasi adalah suatu keunikan tertentu, yang berarti bahwa keindahan tak dapat dipertukar-tukarkan dengan keindahan ciptaan lainnya.

Sifat keindahan (*nature of beauty*), antara lain : *pertama*, keindahan itu kebaikan (*goodness*), artinya setiap sesuatu yang indah pasti menyenangkan, menggembirakan,



menarik perhatian, dan tidak membosankan; *kedua*, keindahan itu keaslian (*originality*), artinya objek itu asli, bukan tiruan; *ketiga*, keindahan itu keabadian (*durability*), artinya tidak pernah dilupakan, tidak pernah hilang, atau susut; *keempat*, keindahan itu kewajaran (*properliness*), artinya tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan, menurut apa adanya; *kelima*, keindahan itu kenikmatan (*pleasure*), artinya kesenangan yang memberi kepuasan; *keenam*, keindahan itu kebiasaan (*habit*), artinya dilakukan berulang-ulang; dan *ketujuh*, keindahan itu relatif (*relative*), artinya terikat dengan selera perseorangan, waktu, dan tempat.

Para ahli tata taman misalnya, menguraikan dengan bagus korelasi antara tanaman dan bangunan sebagai berikut : “jumlah, jenis dan cara mengatur jaraknya dapat dibuat agar memberikan kesan nyaman, sejuk, tenteram, indah dan seterusnya. Jelas bahwa disitu bukan melulu pelestarian lingkungan (*environmental preservation*) yang dikejar, melainkan juga usaha untuk menumbuhkan keselarasan lingkungan (*environmental harmony*) dan itulah makna pemugaran dan perubahan” (N. Daldjoeni, 1997 : 171).

Elemen–elemen lansekap atau ruang terbuka dapat dibagi menjadi dua golongan besar yaitu : *pertama*, elemen keras (*hard material*), seperti perkerasan, bangunan dan sebagainya. *Kedua*, elemen lembut (*soft material*), yang berupa berbagai jenis tanaman.

Bagi seorang arsitek lansekap yang menangani masalah lingkungan, keseimbangan alam dan berpaduan antara alam, manusia, makhluk hidup lainnya dan elemen buatan manusia serta elemen alami, materi tanaman merupakan faktor penting di dalam perencanaan lansekap.

*Soft material* atau tanaman selalu berubah keadaannya, variasi ini dapat kita lihat dari bentuk, tekstur, warna dan ukurannya. Perubahan ini diakibatkan karena tanaman merupakan organisme yang selalu tumbuh dan berkembang dan juga dipengaruhi oleh alam habitatnya. Hal ini mengakibatkan penggunaan tanaman menjadi bervariasi.

Dalam kaitannya dengan perencanaan lahan, “*plantung design*” atau tata hijau menjadi suatu hal penting dan mencakup antara lain fungsi tanaman, perletakan tanaman, tujuan perencanaan, habitat tanaman dan prinsip dari perencanaan.

Elemen keras (*hard material*). Elemen keras merupakan suatu unsur yang dapat memberikan sifat ruang terbuka menjadi kaku, tegar dan memberikan kesan ruang yang kuat, misalnya bangunan, pagar, pedestarian dan pembatas atau furniture taman (kota) dengan menggunakan bahan yang berkesan masif. Sedangkan elemen lunak (*soft material*). Elemen lunak merupakan suatu unsur yang memberikan rasa kelembutan dan menggambarkan sesuatu yang hidup, karena kehidupan mempunyai sifat elastis dan fleksibel sedang kekakuan merupakan lambang kematian.

Tanaman adalah merupakan faktor utama dari elemen lunak di samping unsur lain seperti air misalnya. Tanaman tidak hanya mengandung nilai estetis saja, tetapi juga berfungsi untuk menambah kualitas lingkungan.

Fungsi-fungsi tanaman menurut Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto (1999 : 73-74) yaitu : (1) Kontrol pandangan (*visual control*); (2) Pembatas fisik (*physical barriers*); (3) Pengendali iklim (*climate control*); (4) Pencegah erosi (*erosion control*); (5) Habitat binatang (*wildlife habitats*); dan (6) Nilai estatis (*aesthetic values*).

**Kontrol Pandangan.** Sebagai kontrol pandangan atau *visual control*, tanaman dapat berfungsi untuk : *pertama*, menahan silau dari pantulan sinar di jalan raya maupun bangunan. *Kedua*, sebagai ruang luar, tanaman dapat dipakai sebagai dinding,

atap dan lantai. Dinding dapat dibentuk oleh pembatas. Atap dibentuk oleh pohon yang membentuk konopi atau tanaman merambat pada pergola. Sebagai lantai dapat diperguna rumput. *Ketiga*, sebagai pembentuk *privacy*, tanaman dapat digunakan untuk membentuk kesan *privacy* yang dibutuhkan oleh manusia. *Keempat*, pembatas hijau (*green screen*), tanaman digunakan sebagai penghalang pandangan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan untuk dilihat seperti sampah, galian pembangunan dan sebagainya.

**Pembatas Fisik.** Tanaman dipakai sebagai penghalang gerak manusia dan hewan, selain itu juga dapat berfungsi untuk mengarahkan.

**Pengendali Iklim.** Tanaman berfungsi sebagai pengendalian iklim untuk kenyamanan manusia. Faktor iklim yang mempengaruhi kenyamanan manusia adalah suhu, radiasi matahari, angin dan kelembaban. Selain itu hal yang mempengaruhi kenyamanan manusia adalah suara dan bau.

**Pencegah Erosi.** Tanaman digunakan untuk menahan efek negatif terhadap kondisi tanah baik oleh pembuatan bangunan, konstruksi, pengolahan tanah dan sebagainya.

**Habitat Binatang.** Tanaman sebagai sumber makanan bagi hewan dan sebagai tempat perlindungannya.

**Nilai Estetis.** Tanaman dapat memberikan nilai estetis dan menambah kualitas lingkungan disebabkan oleh sesuatu yang terkandung di dalamnya seperti warna, bentuk, tekstur dan skala.

Disadari atau tidak, masyarakat Kota Bima sedang demam atau keranjingan bunga. Sejumlah tumbuh-tumbuhan liar, seperti pohon asam, beringin, satinggi, bidara, dan pepohonan sejenisnya sedang diburu orang untuk dijadikan tanaman bonsai. Bukti kedemaman lainnya, nyaris semua ragam bunga yang dibawa dari Jawa, diserbu pembeli dan ludes dalam waktu sekejap. Di samping itu, bunga sekarang menjadi sasaran empuk bagi pencuri, karena pemasarannya gampang dan harganya selangit.

Demam bunga adalah fenomena menarik sebab bermanfaat, baik secara estetis maupun sosial. Nilai estetika dari taman diperoleh dari perpaduan antara warna daun, batang, dan bunga; bentuk fisik tanaman, meliputi batang, percabangan, dan tajuk; tekstur tanaman; skala tanaman dan komposisi tanaman. Nilai estetis tanaman juga dapat diperoleh dari satu tanaman, sekelompok tanaman yang sejenis, kombinasi tanaman berbagai jenis ataupun kombinasi antara tanaman dengan elemen lanskap lainnya (Rustam Hakim, 2003 : 129).

Warna batang, daun dan bunga dari suatu tanaman dapat menimbulkan efek visual, demikian pula refleksi cahaya yang jatuh pada tanaman tersebut. Warna daun dan bunga dari tanaman dapat menarik perhatian manusia dan memengaruhi emosi orang yang melihatnya. Efek psikologis yang ditimbulkan dari warna tersebut, yakni warna cerah memberikan rasa senang, gembira dan hangat. Sedangkan warna lembut memberikan kesan tenang dan sejuk. Apabila beberapa jenis tanaman dengan berbagai warna dipadukan dan dikomposisikan akan menimbulkan nilai estetika.

Bentuk tanaman dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan bentuk dua atau tiga dimensi, memberi kesan dinamis, indah, memperlebar, atau memperluas pandangan, ataupun sebagai aksentuasi dalam suatu ruang.

Tekstur suatu tanaman ditentukan oleh batang/percabangannya, massa daun, serta jarak penglihatan terhadap tanaman tersebut. Tekstur tanaman juga memengaruhi secara psikis dan fisik bagi yang memandangnya. Skala atau proporsi tanaman adalah

perbandingan besaran tanaman dengan tanaman lain atau perbandingan antara tanaman dengan lingkungan sekitarnya.

Peletakan tanaman sebenarnya dapat menimbulkan nilai estetika. Menurut Rustam Hakim (2003: 143) peletakan tanaman haruslah disesuaikan dengan tujuan dari perancangannya tanpa melupakan fungsi tanaman yang dipilih. Pada peletakan ini harus pula dipertimbangkan kesatuan dan desain atau unity, yaitu variasi (*variety*), penekanan (*accent*), keseimbangan (*balance*), kesederhanaan (*simplicity*), dan urutan (*sequence*).

Di samping fungsi estetika, taman kota memiliki fungsi lain. Menurut Rustam Hakim (2003: 52) taman kota sebagai ruang terbuka mempunyai beberapa fungsi sosial, antara lain meliputi : tempat bermain dan olahraga; tempat bermain dan sarana olahraga; tempat komunikasi sosial; tempat peralihan dan menunggu; tempat untuk mendapatkan udara segar; sarana penghubung antara satu tempat dengan tempat yang lain; pembatas di antara massa bangunan; sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan; dan sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, dan keindahan lingkungan.

Dari banyak fungsi taman kota tersebut, terdapat fungsi yang terfokus pada fungsi sosial, khususnya taman kota sebagai tempat bermain dan olahraga, tempat bermain dan sarana olahraga, tempat komunikasi sosial, tempat peralihan dan menunggu, tempat untuk mendapatkan udara segar. Fungsi-fungsi ini mengundang kerumunan orang untuk berdatangan sehingga dapat dikatakan taman kota memiliki fungsi sosial.

Salah satu kaidah panca faktor—Panca atau lima E dalam menata kota yaitu *environment* atau keseimbangan lingkungan/ekologi. Panca faktor lain yang juga perlu diperhatikan yakni *employment* atau lapangan kerja/ekonomi; *equity* atau pemerataan/keadilan; *engagement* atau peranserta (masyarakat maupun swasta); dan *energy* (baik energi yang terbarukan maupun tidak terbarukan); *equity* atau pemerataan/keadilan.

Apabila panca-faktor yang disebutkan di atas dipenuhi, kiranya kita semua akan dapat menyaksikan dan menikmati kota masa depan yang ideal, manusiawi, menyejahterakan dan membahagiakan warganya. Di samping kaidah “Panca E” tersebut dalam menata kota, masih terdapat pula “Tri E” yakni Etos kerja, Etika pembangunan, dan Estetika kota.

Kaitan dengan *environment* atau keseimbangan lingkungan/ekologi (Panca E) dan “estetika” kota (Tri E) tersebut, maka sebuah kota termasuk Kota Bima, mesti menyediakan lingkungan yang sejuk, indah, nyaman, bersih, aman, rapi, tertib, dan rekreatif. Karenanya, perlu mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan. Secara ekologis terdapat tiga kaidah pokok yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan. Pertama, keharmonisan spasial; kedua, kapasitas asimilasi; ketiga, pemanfaatan berkelanjutan. Keharmonisan spasial (*spatial sustainability*) masyarakat bahwa dalam suatu wilayah pembangunan, seluruh arealnya tidak boleh dialokasikan hanya untuk zona pemanfaatan. Namun, ada sebagian yang disisakan untuk zona prevervasi (jalur hijau, baik pantai maupun sungai; dan hutan lindung), dan zona konservasi (hutan produksi dan kebun raya).

Kenapa perlu zona prevervasi atau jalur hijau—taman kota, misal? Suatu kota yang hanya sarat dijejali dengan beton, besi, baja, dan batu bata yang keras, tidak dilengkapi dengan ruang terbuka dari penghijauan yang mencerminkan kelembutan

berarti sudah dekat dengan kematian (Eko Budihardjo, *Harian Suara Pembaruan*, 1/3/1996). Pada kesempatan lain, beliau menyarankan (*Harian Suara Merdeka*, 22/6/1996) "... agar kota-kota kita dihutankan."

Perlunya penghijauan kota dilatari alasan bahwa hutan/hijauan kota bermanfaat : memfilter atau menyaring asap dan debu kendaraan dan debu alam yang beterbangan, apalagi Kota Bima masih dominan kotoran kuda (penarik benhur); terjaminnya fungsi pengaturan iklim; dan nilai estetika yang menyangkut arsitektur, serta kebahagiaan manusia. Pada dimensi lain, hijauan/hutan kota berfungsi sebagai wahana rekreasi murah-meriah bagi masyarakatnya, yang ingin melepaskan lelah di siang hari sesudah bekerja, agar etos kerja dapat pulih kembali dan akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Hutan kota, sebenarnya dapat berupa : taman-taman, kebun-kebun, bahkan sekumpulan tanaman/pohon yang menghijau di sepanjang jalan (sekarang sedang ditanam), pinggir sungai atau sekeliling perkotaan, hotel, rumah sakit, pekarangan warga, lapangan olah raga, dan tempat-tempat pemukiman lain.

Dalam gerakan menghutankan kota misal, bukan mustahil bila menggunakan konsep hutan kota dengan orientasi tanaman hortikultural (sayur-sayur, buah-buahan, dan bunga-bunga—kini lagi trend), sehingga menjadi produktif, termasuk di setiap pekarangan rumah masyarakat.

Taman merupakan bagian dari bidang publik dalam ruang perkotaan (Tibbalds, 2001 : 1), yang dapat diakses oleh masyarakat yang berbeda kelas (Madanipour, 1996 : 11).

Ruang publik antara lain meliputi taman yang dapat dimanfaatkan oleh publik (Mulyani, 2002: 20). Menurut Tibbalds (2001 :1) bidang publik dalam ruang perkotaan adalah semua bagian jaringan perkotaan yang dapat diakses secara fisik dan visual oleh masyarakat umum, termasuk jalan, taman, dan lapangan/alun-alun.

Taman merupakan ruang publik yang memiliki batas tertentu yang digunakan untuk kesenangan dan dapat diakses oleh publik. Makna taman menunjukkan ruang terbuka yang memiliki keindahan dan kenyamanan yang divisualisasikan oleh alam, baik alam yang bersifat natural maupun alam buatan dan dapat diakses oleh publik.

### ***PELESTARIAN HUTAN SEBAGAI PARU-PARU KOTA***

Berdasarkan data, Kota Bima adalah salah satu kota di Indonesia yang memiliki hutan yang sangat luas, dan siapapun harus salut dan mendukung atas jerih payah pemerintah Kota Bima, yang memforsikan tenaganya memperhatikan hutan, baik hutan dalam pengertian sesungguhnya, misalnya dengan menata kembali hutan Ncai Kapenta, maupun hutan dalam pengertian menata taman-taman kota. Karena hutan kota, sebenarnya dapat berupa : taman-taman, kebun-kebun, bahkan sekumpulan tanaman/pohon yang menghijau di sepanjang jalan (sekarang sedang ditanam), pinggir sungai atau sekeliling perkotaan, hotel, rumah sakit, pekarangan warga, lapangan olah raga, dan tempat-tempat pemukiman lain.

Pentingnya penghijauan kota dilatari alasan manfaatnya yakni dapat memfilter atau menyaring asap dan debu kendaraan dan debu alam yang beterbangan, apalagi Kota Bima masih dominan kotoran kuda (penarik benhur); terjaminnya fungsi pengaturan iklim; dan nilai estetika yang menyangkut arsitektur, serta kebahagiaan manusia. Pada dimensi lain, hijauan/hutan kota berfungsi sebagai wahana rekreasi

murah-meriah bagi masyarakatnya, yang ingin melepaskan lelah di siang hari sesudah bekerja, agar etos kerja dapat pulih kembali dan akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Dalam gerakan menghutankan kota misal, bukan mustahil bila menggunakan konsep hutan kota dengan orientasi tanaman hortikultural (sayur-sayur, buah-buahan, dan bunga-bunga—kini lagi trend), sehingga menjadi produktif, termasuk di setiap pekarangan rumah warga.

Konsekuensi sebuah kota, termasuk Kota Bima harus menyediakan lingkungan yang sejuk dan nyaman, menarik perhatian para wisatawan, pemilik modal, para manager, dan para pekerja. Demikian halnya, kesehatan masyarakat harus diperhatikan, transportasi memadai, bersih, aman, dan hiburan cukup.

Menarik apa yang pernah dikemukakan Eko Budihardjo (*Harian Suara Pembaruan*, 1/3/1996), “suatu kota yang hanya sarat dijejali dengan beton, besi, baja, dan batu bata yang keras, tidak dilengkapi dengan ruang terbuka dari penghijauan yang mencerminkan kelembutan berarti sudah dekat dengan kematian.” Pada kesempatan lain, beliau menyarankan “agar kota-kota kita dihutankan.”

### **TAMAN DAN HUTAN KOTA**

Penghijauan adalah salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis lingkungan. Begitu pentingnya sehingga penghijauan sudah merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh nusantara. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa tidak jarang pembangunan dibangun di lahan pertanian dan di kebun buah-buahan. Padahal tumbuhan (yang berhijau daun) dalam ekosistem, berperan sebagai produsen pertama yang mengubah energi surya menjadi energi potensial untuk makhluk lainnya, dan mengubah CO<sub>2</sub> menjadi O<sub>2</sub> dalam proses fotosintesis. Sehingga dengan meningkatkan penghijauan dipertanian berarti dapat mengurangi CO<sub>2</sub>, atau polutan lainnya yang berperan terjadinya efek rumah kaca atau gangguan iklim. Di samping vegetasi berperan dalam kehidupan dan kesehatan lingkungan secara fisik, juga berperan dalam estetika serta kesehatan jiwa. Mengingat pentingnya peranan vegetasi ini terutama di perkotaan untuk menangani krisis lingkungan maka diperlukan perencanaan dan penanaman vegetasi untuk penghijauan secara konseptual.

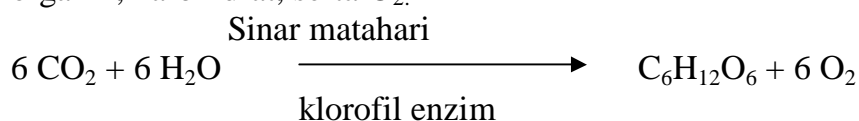
Dari berbagai pengamatan dan penelitian ada kecenderungan bahwa pelaksanaan penghijauan belum konseptual asal jadi. Memilih jenis tanaman dengan alasan mudah diperoleh, murah harganya dan cepat tumbuh. Sehingga fungsi penghijauan perkotaan dapat mengisi fungsi hutan, tidak tercapai di mana penghijauan perkotaan adalah unsur hutan kota.

### **PENGHIJAUAN PERKOTAAN**

Penghijauan dalam arti luas adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat memproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan. Ada pula yang mengatakan bahwa penghijauan kota adalah suatu usaha untuk menghijaukan kota dengan melaksanakan pengelolaan taman-taman kota, taman-taman lingkungan, jalur hijau dan sebagainya. Dalam hal ini penghijauan perkotaan merupakan kegiatan pengisian ruang terbuka di perkotaan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan diperkotaan terutama untuk pemukiman, seringkali lahan hijau menjadi korban, bahkan sekarang sudah meliputi daerah sekitarnya atau daerah batas kota. Sekarang banyak bekas tegalan atau kebun-kebun sudah berubah menjadi bangunan. Tambahan lagi pada umumnya pelaksanaan penghijauan diperkotaan kurang memperhatikan keanekaragaman. Malah lebih cenderung menggunakan jenis yang non produktif. Sebaliknya keberadaan gas-gas seperti karbondioksida lainnya semakin meningkat terutama karena peningkatan kendaraan bermotor dan industri. Hasil sidang lingkungan hidup sedunia di Jepang, November 1991 menyatakan bahwa kendaraan bermotor sebagai penghasil CO<sub>2</sub> adalah penyebab utama kenaikan suhu di dunia.

Proses fotosintesis terjadi bila ada sinar matahari, dibantu oleh enzim, yaitu suatu proses di mana zat-zat anorganik H<sub>2</sub>O dan CO<sub>2</sub> oleh klorofil diubah menjadi zat organik, karbohidrat, serta O<sub>2</sub>.



Jelasnya, tumbuhan hijau mengambil CO<sub>2</sub> untuk proses fotosintesis dan mengeluarkan C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> serta peranan O<sub>2</sub> yang sangat dibutuhkan makhluk hidup. Oleh karena itu, peranan tumbuhan hijau sangat dibutuhkan untuk *menjaring* CO<sub>2</sub> dan melepas O<sub>2</sub> kembali ke udara. Di samping itu berbagai proses metabolisme tumbuhan hijau, dapat memberikan berbagai fungsi untuk kebutuhan makhluk hidup yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan.

Manusia dan hewan mendapatkan makanan dalam keadaan yang sudah jadi yaitu berupa zat-zat organik. Sedangkan golongan hewan karnivora memperoleh makanan dari hewan-hewan lain, herbivora memperoleh makanan dari tumbuhan yang dimakannya. Di sini terlihat bahwa tumbuh-tumbuhan satu-satunya makhluk hidup yang merupakan produsen yang sejati. Sedangkan manusia dan hewan hanyalah merupakan konsumen. Tumbuh-tumbuhan mengambil makanannya berupa zat-zat anorganik dari bumi dan langit menjadi zat-zat organik dengan menggunakan sinar matahari dan klorofil. Setiap tahun tumbuh-tumbuhan di bumi ini mempersenyawakan sekitar 150.000 juta ton CO<sub>2</sub> dan 25.000 juta ton hidrogen dengan membebaskan 400.000 juta ton oksigen ke atmosfer, serta menghasilkan 450.000 juta ton zat-zat organik. Setiap jam 1 ha daun-daun hijau menyerap 8 kg CO<sub>2</sub> yang ekuivalen dengan CO<sub>2</sub> yang dihembuskan oleh napas manusia sekitar 200 orang dalam waktu yang sama. Begitu pentingnya peranan tumbuhan di bumi ini. Dalam menangani krisis lingkungan terutama di perkotaan, sangat tepat jika keberadaan tumbuhan mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan penghijauan perkotaan sebagai unsur hutan kota.

### **FUNGSI DAN PERANAN PENGHIJAUAN**

Fungsi dan peranan penghijauan perkotaan, antara lain :

1. Sebagai paru-paru kota. Tanaman sebagai elemen hijau, pada pertumbuhannya menghasilkan zat asam (O<sub>2</sub>) yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup untuk pernapasan.
2. Sebagai pengatur lingkungan (mikro), vegetasi akan menimbulkan hawa lingkungan setempat sejuk, nyaman dan segar.
3. Pencipta lingkungan hidup (ekologis).

Penghijauan dapat menciptakan ruang hidup bagi makhluk hidup di alam.

4. Penyeimbangan alam (adaphis) merupakan pembentukan tempat-tempat hidup alam bagi satwa yang hidup disekitarnya.
5. Perlindungan (protektif), terhadap kondisi fisik alami sekitarnya, (angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu).
6. Keindahan (estetika). Dengan terdapatnya unsur-unsur penghijauan yang direncanakan secara baik dan menyeluruh akan menambah keindahan kota.
7. Kesehatan (hygiene), misalnya untuk terapi mata.
8. Rekreasi dan pendidikan (edukatif). Jalur hijau dengan aneka vegetasi mengandung nilai-nilai ilmiah.
9. Sosial politik ekonomi.

Banyak contoh di dalam dan diluar negeri bahwa penghijauan di pinggir jalan maupun taman di tanami dengan tanaman produktif (buah-buahan, tanaman langka, tanaman bunga wangi).

Pemeliharaan pada penghijauan meliputi penyulaman, pemangkasan, pemberantasan hama dan penyakit, pemberantasan gulma, penyiraman, pemupukan, pemetikan dan lainnya.

Eckbo (1956), menyatakan bahwa pemilihan jenis tanaman untuk penghijauan agar tumbuh dengan baik hendaklah dipertimbangkan syarat-syarat hortikultur (ekologika) dan syarat-syarat pisik. Syarat holtikultural yaitu respons dan toleransi terhadap cahaya matahari, kebutuhan tanah, hama dan penyakit, serta syarat-syarat pisik yaitu tujuan penghijauan, persyaratan budi daya, bentuk tajuk tekstur, warna, aroma.

Dalam penelitian Sunarya Wargasasmita, dkk. (1990) menunjukkan bahwa tumbuhan dapat mengakumulasi Pb pada daun dan kulit batangnya. Ini terbukti dari hasil penelitian itu bahwa kandungan Pb lebih banya pada tanaman ditepi jalan di DKI dibandingkan dengan kandungan Pb pada tumbuhan sejenis dari lokasi yang jauh di pinggir jalan. M. Ahmad badri (1986) mengemukakan bahwa tumbuhan dapat merupakan indikator dari pencemaran logam berat. Hal ini terbukti dari hasil penelitiannya bahwa *Axonopus Compresus*, *Acalypha Wikesiana* dan *Pterocarpus indicus* dapat menyerap logam berat seperti Zn, Pb, Cu dan Pb. (Tabel 4).

Jahya fakuara *dkk*, menemukan dalam penelitiannya bahwa Johar (*Cassia slamea*), asam landi (*P. dulce*), dan mahoni (*S. macrophylla*) mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menyerap Pb, oleh karena itu jenis tanaman ini baik ditanam di lahan yang banyak mengandung Pb. Hasil penelitian Endes Nurfilmarasa D. (1989) menunjukkan bahwa kandungan timbal jerap dan timbal serapan sangat bervariasi menurut jenis daun. Daun tanaman damar, kesumba, kirai payung, mahoni, jamuju, dan pala mempunyai potensi yang tinggi sebagai pereduksi timbal. Sedangkan daun pohon pala, jnuju, kupu-kupu, damar, kesumba, mahoni dan kirai payung mempunyai kemampuan untuk mereduksi timbal yang tinggi-sedang, daun pohon kupu-kupu mempunyai kemampun yang relatif lebih rendah. Sedangkan hasil penelitian Roy Widyastma (Kompos, 11 juli 1991) menemukan beberapa jenis pohon yang berpotensi yaitu damar, lamtorogung, dan kupu-kupu, akasia dan beringin mempunyai potensi ditinjau dari efektivitas penghasil O<sub>2</sub> karena mempunyai klorofil tinggi, dan laju fotosintesis tinggi dengan titik kompensasi cahaya rendah.

Pelaksanaan penghijauan secara konseptual yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan dengan mempertimbangkan aspek estetika, pelestarian lingkungan dan fungsional. Pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan begitu pula pemeliharaan harus dilakukan secara terus-menerus.

### **KEADAAN PENGHIJAUAN DI JAKARTA**

Hasil penelitian tentang pelaksanaan penghijauan di Jakarta dengan studi kasus Jakarta Selatan (Zoeraini Djamil Irwan dan Arwindrasti, 1988) menunjukkan bahwa : (1) Jenis yang paling banyak ditanam adalah akasia (*A. Auriculiformis*), angsana (*P. indicus*), mahoni (*S. marcrophylla*) tanjung (*Memusops elengi*), hujan mas, flamboyan (*Delonix regia*), bungur (*Langersromia indica*) dan glodngan (*Polyathia longofolia*). (2) Pemilihan jenis untuk penghijauan lebih ditekankan kepada tanaman yang mudah diperoleh, mudah tumbuh dan rindang, akibatnya keanekaragaman jenis menjadi rendah. (3) Aspek pelestarian lingkungan kurang mendapat perhatian, terbukti dengan kurangnya menanam tanaman produktif.

Sedangkan hasil penelitian di lingkungan pemukiman dengan studi kasus pemukiman Pondok Indah dan Bintarto Jaya (Zoer'aini Djamil Irwan, 1989) menunjukkan bahwa : dalam kota kebun (sebagai misal), menurut Sir Ebenezer Howard (Johara T. Jayadinata, 1999 : 219), menyatukan dan mengawinkan kota dan pedesaan dalam bentuk kota yang baru. Kota kebun itu sebelumnya merupakan alat untuk tujuan yang lebih besar, yaitu menyatukan kapitalisme dan sosialisme (yang masing-masing mempertentangkan buruh dengan modal), menjadi individualisme yang sosial dalam bentuk sosial-ekonomi yang baru, yang berstempel : koperasi.

### **KOTA TAMAN (GARDEN CITY)**

Kota taman adalah kota yang dirancang dengan tujuan untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup kota industri yang dirasakan semakin memburuk (pencemaran udara) dimana kawasan permukiman perkotaan yang tersebar itu dikelilingi oleh jalur hijau Kota taman mengandung di dalamnya jalur hijau dan kantong-kantong fasilitas taman umum, pekarangan hijau, selain terdapat fasilitas-fasilitas lengkap untuk kehidupan sosial beserta kemudahan-kemudahan lainnya (Rahardjo Adisasmita (2006 : 141). Konsep kota taman dikembangkan oleh Ebenezer Howard dalam bukunya “*The City of Tomorrow*” (1902), pada dasarnya berpegang pada tiga prinsip dasar, yaitu : (1) lahan dikuasai atau dikendalikan oleh pemerintah, (2) didesain dengan cermat dan lengkap unsur-unsur kotanya, dan (3) ada jalur lingkaran hijau yang mengelilingi kota ini secara permanen yang antara lain fungsinya untuk membatasi pertumbuhan fisik kota (Rahardjo Adisasmita, 2006 : 140).

Semoga !!!



### BAB XXIII VANDALISME : TABIAT MERUSAK TATANAN WAJAH KOTA

“Vandalisme dan keberantakan tatanan wajah kota.”  
 “Salah satu sebab tragedi dan krisis berkepanjangan di negeri kita tak lain karena mentalitas bangsa kita yang tak pernah menghargai milik umum (*common property*). ... Lihatlah (apa saja) yang memakai label umum. Di mana-mana WC umum, bus-bus umum, telepon umum dan properti berlabel umum lainnya selalu cepat rusak, jorok, dan tak terawat. Di benak (sebagian) masyarakat, label umum selalu mengandung makna interior, barang yang boleh dikotori, dirusak bahkan dijarah”  
 (Dodik Ridho Nurrochmat, 2005 : 116).

Di tahun 2008 lalu, Harian BimaEkspres berturut-turut menurunkan dua kali berita tentang kasus pencabutan bunga yang ditanam Pemkot Bima di sepanjang jalan. Jum'at (21/4/2008) menurunkan berita dengan judul “*Kepincut Bunga, Cabut, Dihukum Walikota*” dan Sabtu (22/4/2008) menurunkannya dalam “Dari Redaksi” dengan judul “*Taman Bunga*”.

Menarik judul berita BimaEkspres (21/4/2008), “*Kepincut Bunga, Cabut, Dihukum Walikota.*” Intisari beritanya, cerita tentang orang yang suka curi bunga. “Walikota Bima, HM Nur A Latif mengaku telah empat kali mendapat warga yang mencabut bunga di sekitar lokasi yang sama. Yang pertama kita dapat, yang kedua kita tidak dapat, ketiga dan keempat berhasil kita tangkap.”

“*Hilangnya Mur Jembatan Suramadu*”, itulah judul Tajuk Rencana Kompas (19/6/2009). Dalam Tajuk Rencana itu, dipertanyakan “...apa kira-kira yang menjadi motif tindakan pencurian mur dan lampu Suramadu itu? Sekadar iseng? Ingin mendapatkan sejumlah uang?...” Masih dalam edisi yang sama, di halaman lain dengan judul “*Vandalisme : Mur dan Lampu Suramadu Terus Dicuri*”, diberitakan “Sedikitnya 75 mur di pagar pelindung motor arah Surabaya-Madura hilang, 25 mur kendur, dan 6 buah baut patah. Dari sisi Madura-Surabaya, 8 mur kendur, puluhan baut hilang, dan beberapa baut serta mur rambu-rambu putar arah (*U-turn*) hilang. Sedangkan lampu yang hilang pada Selasa lalu ada 42 lampu penerangan *box girder* (balok baja di bentang tengah jembatan). Lampu tersebut berfungsi sebagai penerangan pada saat petugas menginspeksi rangka jembatan.”

Nah, perilaku model “mencuri” mur, baut, lampu, dan semacam seperti itu disebut perilaku vandalisme.

Model kasus “mencuri” bunga seperti ini, dalam telaah psikologi sosial disebut perilaku vandalisme. Jika perilaku vandalisme dibiarkan terus, maka apa yang dilakukan Pemkot dalam menata keindahan, kenyamanan, keasrian lewat menanam tanaman di sepanjang jalan tersebut, hanyalah sebuah pekerjaan sia-sia.

“Suatu kota yang hanya sarat dijejali dengan beton, besi, baja, dan batu bata yang keras, tidak dilengkapi dengan ruang terbuka dari penghijauan yang mencerminkan

kelembutan berarti sudah dekat dengan kematian” (Eko Budihardjo, Harian Suara Pembaruan, 1/3/1996). Artinya, betapa pentingnya menata kota dengan tanaman-tanaman, baik dalam bentuk taman kota, maupun sekumpulan tanaman/pohon yang menghijau di sepanjang jalan, pinggir sungai atau sekeliling perkotaan, hotel, rumah sakit, pekarangan warga, lapangan olah raga, dan tempat-tempat pemukiman lain. Semuanya bermuara pada penciptaan kota yang ramah lingkungan.

Pentingnya penghijauan kota dengan tanaman-tanaman tersebut, dilatari alasan manfaatnya yakni sebagai filter atau penyaring asap dan debu kendaraan dan debu alam yang beterbangan, apalagi Kota Bima masih dominan kotoran kuda (penarik benhur); terjaminnya fungsi pengaturan iklim; dan nilai estetika yang menyangkut arsitektur, serta kebahagiaan manusia. Pada dimensi lain, penataan taman kota berfungsi sebagai wahana rekreasi murah-meriah bagi masyarakatnya, yang ingin melepaskan lelah sehabis bekerja, agar etos kerja dapat pulih kembali dan akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Dalam gerakan menata kota misal, bukan mustahil bila menggunakan konsep taman kota dengan orientasi tanaman hortikultural (sayur-sayur, buah-buahan, dan bunga-bunga—kini lagi trend), sehingga menjadi produktif, termasuk di setiap pekarangan rumah warga. Konsekuensi sebuah kota, termasuk Kota Bima harus menyediakan lingkungan yang sejuk dan nyaman, agar menarik perhatian para wisatawan, pemilik modal, dan para pekerja.

Kalau diamati secara cermat, bentuk perilaku vandalisme dapat dibagi dua. Pertama, perilaku vandalisme yang sifatnya merusak. Bentuk perilaku vandalisnya yakni mencorat-coret, dengan objek vandalisnya : berupa tembok, jembatan, pagar, halte bus, bus umum, WC umum, telpon umum, gedung umum, candi, dan lain sebagainya. Memang tidak dapat disangkal, aksi corat coret, dapat dimaknai atau sebagai penyaluran bakat, minat, hobi dari seseorang. Sehingga, jangan heran ada pimpinan daerah yang menaruh perhatian serius atas manifestasi bakat corat coret tersebut dengan membuat wadah (biasa berupa tembok persegi empat panjang) sebagai ajang penyaluran bakat, minat, hobi atau apapun namanya. Dengan wadah itu, para pemilik perilaku vandalisme tersebut, dapat melakukan aksi corat coret sesuka hatinya.

Kedua, perilaku vandalisme yang bersifat merusak. Bentuk perilaku vandalisnya yakni memotong pohon, merusak tanaman, memecahkan lampu, mencabut, melempari, mengotori, dan membaret, dengan objek vandalisnya :. taman umum, hutan wisata, gedung umum, gedung sekolah, taman, dan lain sebagainya.

Dalam telaah psikologi sosial, perilaku vandalisme, termasuk perilaku menyimpang. Vandalisme terhadap lingkungan fisik dan buatan dapat dikategorikan pada perilaku depresif dan menyimpang (*depreciative and deviant behavior*) (Stokols D. dan Irwin Altman, *dalam* Jason Lase, 2003 : 61). Perilaku menyimpang merupakan semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut (Robert M.Z. Lawang, 1998). Paul B. Horton (Indianto M., 2004 : 148), penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Penyimpangan bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat (Bruce J. Cohen, 1983 : 218).

Penyimpangan merupakan perbuatan yang mengabaikan norma, dan penyimpangan ini terjadi jika seseorang atau sebuah kelompok tidak mematuhi patokan baku di dalam masyarakat. Biasanya kita mengaitkan penyimpangan dengan istilah-istilah perilaku negatif, seperti tindak pidana dan kebrutalan. Namun, orang yang bertindak terlalu jauh dari patokan umum masyarakat bisa juga disebut sebagai penyimpangan.

Memang perilaku vandalisme, corat-coret (*grafitti*) misal, bisa dimaknai sebagai aksi protes terhadap kemapanan. Misalnya, di Jakarta yang dipenuhi dengan dinding beton yang cenderung massive, pejal, kaku, dan tidak ramah yang melambangkan batas-batas kebutuhan dan kepentingan di antara penghuninya.

Para ahli sosial, misal Cohen, Miller, Stokols dan Williams, menyebutkan bahwa dalam rangka menganalisis bentuk dan penyebab vandalisme, kemudian membagi vandalisme menjadi 5 jenis, yaitu: ekspresi dari suatu protes sosial (*an expression of social protest*); dendam (*revenge*); kebencian (*hatred*); aktualisasi diri (*self actualization*), dan manifestasi perilaku kewilayahan (*manifestation of territorial behavior*); permainan spontan (*a spontaneous play*); dan ungkapan kegembiraan (*excitement*) (Jason Lase, 2003 : 73).

Berbagai bentuk vandalisme yang dikelompokkan tersebut, merupakan ekspresi seseorang atau sekelompok orang dari apa yang dialaminya. Pengalaman yang mengekspresikan tindakan vandalisme lebih kepada kekecewaan, kebosanan, cemburu, loyalitas, iseng dan sebagainya.

Orang yang cenderung melakukan perilaku vandalisme atau merusak, yakni : pertama, para kaum jalanan yang kurang beruntung, karena tidak memiliki akses dalam pengambilan keputusan; kedua, mereka yang berbuat atas dasar kesenangan diri dan keuntungan pribadi; dan ketiga, mereka yang berbuat karena dilandasi kebenaran kelompok terdekat (Limas Susanto, Suara Pembaruan, 16 Juni 1995).

Apa dan bagaimana perilaku vandalisme? Webster' New World Dictionary (Neufeldt, 1994: 1475), dijelaskan, vandal berasal dari bahasa latin (*vandalus*) yang memiliki arti: pertama, suatu anggota dari bangsa Jerman Timur yang membinasakan Gaul, Spanyol, Afrika Utara dan merampok Roma (tahun 455 M). Dari pengertian ini ditonjolkan sifat kelompok tersebut yang bersifat merusak. Kedua, orang yang diluar kebencian atau ketidaktahuannya merusak atau mengganggu harta milik pribadi, khususnya barang yang indah atau artistik. Kata sifat vandal adalah *vandalis (vandalic)*. Dan vandalisme (*vandalism*) merupakan tindakan atau perbuatan vandal.

Soemarwoto (1987: 302) menjelaskan, vandalisme umumnya terjadi adalah “dalam bentuk corat-coret dan bentuk lain adalah memotong pohon, memetik bunga, dan mengambil tanaman.” Vandalisme juga dipakai menunjuk aksi kelompok penonton musik rock yang tidak dapat masuk karena kehabisan karcis atau karena tidak puas dengan penampilan grup musik. Vandalisme dipakai menunjuk pengrusakan yang dilakukan sekelompok suporter sepak bola yang tidak puas, karena kesebelasan kesayangannya mengalami kekalahan (Suara Pembaharuan, 16 Juni 1995).

Dengan demikian, vandalisme merupakan tindakan atau perilaku yang mengganggu atau merusak berbagai obyek fisik dan buatan, baik milik pribadi (*private properties*) maupun fasilitas atau milik umum (*public amenities*). Vandalisme adalah perbuatan merusak (kadang-kala ditambahkan penegasan ”dengan ganas/kejam”) terhadap benda/obyek keindahan dan artistik (misalnya pemandangan alam, karya seni, dan sebagainya).

Secara umum vandalisme yang menonjol terjadi adalah mencorat-coret (*graffiti*) tembok, jembatan, halte bis, bangunan umum, dan lain-lain. Begitu pula tindakan merusak fasilitas/peralatan untuk kepentingan umum (*public amenities*) seperti bus umum, taman, telpon umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya.

Kecenderungan merusak yang menggejala di kota-kota besar dapat dilihat seperti mencorat-coret tembok, pagar, jembatan, dan sebagainya. Perilaku tersebut pada dasarnya merupakan hasil interaksi seseorang dengan lingkungan fisik yaitu berupa persepsinya dengan obyek tersebut. Jika persepsi seseorang terhadap obyek berada dalam batas-batas optimal, maka individu dikatakan dalam keadaan omeostatis, yaitu keadaan yang serba seimbang. Keadaan ini biasanya ingin dipertahankan oleh individu karena menimbulkan perasaan-perasaan yang menyenangkan. Sebaliknya, jika obyek dipersepsikan sebagai di luar batas-batas optimal (terlalu besar, terlalu kuat, kurang keras, kurang dingin, terlalu aneh, dan sebagainya), maka individu itu akan mengalami stress dalam dirinya (Sarwono, 1992: 48). Lanjutnya, tekanan-tekanan energi dalam menghadapi objek akan meningkat, sehingga orang itu harus melakukan "*coping*" untuk menyesuaikan dirinya atau menyesuaikan lingkungan pada kondisi dirinya.

Jika seseorang tidak mampu menyesuaikan diri, maka akan melakukan perbuatan penyesuaian diri (*coping behavior*) seperti melarikan diri, membuang objek yang menyebabkan seseorang tidak dapat menyesuaikan diri, dan sebagainya. Lanjut Sarwono (1992: 48, 86), sebagai hasil dari "*coping behavior*" ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, tingkah laku "*coping*" itu tidak membawa hasil sebagaimana diharapkan. Gagalnya tingkah laku "*coping*" ini menyebabkan stress berlanjut dan dampaknya bisa berpengaruh pada kondisi individu maupun persepsi individu. Kemungkinan kedua, tingkah laku "*coping*" yang berhasil. Dalam hal ini terjadi penyesuaian antara diri individu dengan lingkungannya (adaptasi) atau penyesuaian keadaan lingkungan terhadap diri individu (*adjustment*). Jika dampak tingkah laku "*coping*" yang berhasil terjadi berulang-ulang, kemungkinan terjadi penurunan tingkat kegagalan atau kejenuhan.

Sedang jika yang terjadi adalah dampak dari kegagalan yang berulang-ulang, maka kewaspadaan akan meningkat. Namun pada suatu titik akan terjadi gangguan mental yang lebih serius, seperti keputusasaan, kebosanan. Jadi, kegagalan yang terjadi terus-menerus akan memberi kecenderungan seseorang untuk merusak objek (vandalisme).

Vandalisme ditinjau dari konteks dan tindakannya, memiliki sifat mendua (*ambiguous*) yaitu dapat merupakan tindakan yang tepat dalam konteks yang tidak tepat atau sebaliknya. Sebagaimana dikemukakan Zeffry (1994 : 20): "Tapi tidak semua gambar dan tulisan/coretan di tembok dapat diklasifikasikan sebagai grafiti yang mengandung ekspresi seni sebab berdasarkan kemampuan dan kemungkinannya, grafiti dapat saja menjadi ekspresi spontanitas yang sporadis dari rasa kecewa, frustrasi, solidaritas, loyalitas, dan iseng yang kemudian berkesan vulgar dan vandalistis."

Perilaku vandalisme terhadap lingkungan alami dan lingkungan buatan yang tampak dalam kehidupan remaja dapat dikelompokkan sebagai berikut : pertama, aksi corat-coret (*gravity*). Corat-coret ini umumnya berobjekkan tembok, jembatan, halte bus, bangunan, telepon umum, WC umum dan sebagainya. Kedua, memotong (*cutting*). Memotong pohon, tanaman, kembang yang dijumpainya dengan berbagai alasan. Ketiga, memetik (*plucking*). Memetik kembang, daun dan buah tanaman orang lain

tanpa alasan yang berarti. Keempat, mengambil (*taking*). Mengambil barang, tanaman, asesoris lingkungan dan sebagainya meskipun pada hakekatnya tak bermakna untuk dimiliki, mungkin barang/benda tersebut terlalu besar, terlalu kuat, kurang keras, kurang dingin, terlalu aneh dan sebagainya. Dan kelima, merusak (*destroying*). Merusak tatanan lingkungan yang sudah tersusun rapi misalnya mencongkel, memindahkan, membuang sampah di sembarang tempat bahkan kencing di depan rumah orang dan sebagainya (Jason Lase, 2003 : 72-73).

Ada beberapa motif lain dari perilaku vandalisme itu. Di antara motif dimaksud : pertama, "*leverage vandalism*" yaitu vandalisme mengungkit/membongkar sesuatu untuk mengetahui bagaimana sesuatu objek/alat bekerja; kedua, "*curiosity vandalism*", misalnya vandalisme memecah jendela hanya untuk mengetahui apa yang terdapat di dalamnya; ketiga, "*irresistible temptation vandalism*", yaitu vandalisme dalam bentuk godaan tentang sesuatu yang menarik, misalnya pohon yang rusak dalam proses mengetahui sejauhmana pohon tersebut dapat dibengkokkan atau melempar botol pada suatu tebing hanya mau melihat bagaimana botol tersebut pecah berkeping-keping; dan keempat, "*no-other-way-to-do-it vandalism*", misalnya seseorang mengencengi suatu tempat dekat stasiun karena pintu bangunan tersebut tertutup (Jason Lase, 2003 : 54).

Nah, dapatkah dikatakan : perilaku vandalisme dapat menciptakan keberantakan tatanam wajah kota? Ia !

Semoga !!!

## BAB XXIV KEBERANTAKAN WAJAH KOTA

“Dua kemungkinan bentuk wajah kota ke depan sebagai konsekuensi penataan kota, tidak terkecuali Kota Bima dan hal ini perlu diantisipasi dini oleh perancang atau perencana kota. **Pertama**, wajah kota semakin cantik; **kedua**, atau justru sebaliknya yakni semakin berantakkan.”

Mengapa bentuk wajah kota bisa jadi berantakkan ? Menurut Eko Budiardjo dan Sudanti Hardjohubojo (1993 : 64-65), terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) penyebab pokok yang paling besar pengaruhnya terhadap keberantakan wajah dan tata ruang perkotaan. **Pertama**, adanya kesenjangan antara perencanaan kota yang dwi-matra dengan perencanaan arsitektur yang trimatra. Perancangan kawasan perkotaan (*urban design*) masih merupakan benda aneh di negara kita. **Kedua**, membengkaknya pengaruh kendaraan bermotor (khususnya mobil pribadi) dalam jaringan kegiatan perkotaan. Pejalan kaki dan pelanggan kendaraan umum masih dilihat sebagai warga negara kelas dua. **Ketiga**, curahan perhatian yang terlalu ditekankan pada aspek keuntungan ekonomis dan kecanggihan teknologis dengan melecehkan manfaat sosial atau kepentingan masyarakat banyak, khususnya pada pembangunan fasilitas komersial oleh pihak swasta. **Keempat**, lemahnya aparat dan mekanisme kontrol pembangunan. Atau, memang sengaja dibikin tidak jelas aturan permainan dan sanksinya.... Keseluruhan aspek tersebut di atas harus dikaji secara bersamaan dan diatasi sekaligus untuk bisa mencegah kecenderungan dehumanisasi kota kita.

Ada tiga landasan yang dipegang dalam perencanaan kota satelit maupun kota baru (Eko Budiardjo dan Sudanti Hardjohubojo, 1993 : 88). **Pertama**, senyawa yang tuntas antara fasilitas perkotaan dengan citra dan suasana pedesaan. **Kedua**, desentralisasi dari kawasan perkotaan yang kepadatannya berlebihan. **Ketiga**, penciptaan komunitas yang seimbang, baik dalam penghidupan maupun lapangan kerjanya.

Siapun tidak menginginkan hadirnya wajah kota, seperti celotehnya Kevin Lynch dalam tulisannya “*The City as Environment*”. “Penampilan dan wajah kota bagaikan mimpi buruk : tunggal rupa, serba sama, tidak berwajah lepas dari alam, dan sering tidak terkendali, tidak manusiawi...”(Eko Budiardjo dan Sudanti Hardjohubojo, 1993 : 19). Pada kesempatan lain, Lynch mengemukakan, dalam penyelidikan terhadap bentuk kota, ada lima elemen pokok yang dapat membangun citra sebuah kota. **Pertama**, “*Pathway*” merupakan route-route sirkulasi yang biasa digunakan orang dalam melakukan pergerakan, baik inter maupun antar kota melalui jaringan jalan primer dan sekunder. **Kedua**, “*Districts*”, merupakan sebuah kawasan dalam suatu kota, kadang-kadang begitu bercampur karakternya sehingga tidak mempunyai batas-batas yang tegas. **Ketiga**, “*Edge*” pengakhiran sebuah distrik atau tepiannya. Distrik tertentu tidak mempunyai pengakhiran yang tegas tetapi sedikit demi sedikit berbaur dengan distrik lainnya. **Keempat**, “*Landmark*”, elemen penting dari bentuk kota karena membantu orang untuk mengorientasikan diri di dalam kota dan membantu mengenal suatu daerah kota. Sebuah “*Landmark*” yang baik adalah

elemen yang tegas tetapi harmonis dengan kerangka lingkungan kota. ***Kelima***, “*Node*”, pusat aktivitas merupakan salah satu jenis *landmark* tetapi berbeda karena fungsinya yang aktif (Eko Budiardjo dan Sudanti Hardjohubojo, 1993 : 36).  
Semoga !!!

## BAB XXV KOTA BIMA SEBAGAI AGROPOLITAN

Dengan melihat potensi wilayah, Kota Bima tetap dikembangkan sebagai *agropolitan*. Alasannya?

*Pertama*, Kota Bima memiliki luas lahan persawahan 1898 hekta are, yang terdiri atas sawah irigasi seluas 1718 hekta are, dan sawah tadah hujan seluas 180 hekta are. *Kedua*, Kota Bima memiliki luas hutan produksi terbatas 6124 hekta are, dan hutan rakyat seluas 1840 hekta are. *Ketiga*, Kota Bima memiliki lahan kering seluas 6109 hekta are, dengan rincian : ladang/tegalan 4716 hekta are, perkebunan 996 hekta are, usaha lain 239 hekta are, dan belum tidak diusahakan 158 hekta are. *Keempat*, berdasarkan data tahun 2007, penduduk Kota Bima yang bekerja di lapangan usaha pertanian masih sekitar 21,14 % (Diolah dari *Kota Bima dalam Angka*, 2007/2008).

*Agropolitan* adalah konsep dari Barat. *Agro* berarti pertanian dan *politan* (*polis*) adalah kota. Jadi *agropolitan* dapat diterjemahkan dengan istilah "Kota di ladang", kota yang berada di tengah (sekitar) ladang atau sawah yaitu lahan pertanian untuk produksi tanaman pangan (padi dan tanaman pertanian lainnya) (Rahardjo Adisasmita, 2006 : 108). Dengan menerapkan sistem pertanian yang baik, produksi dan produktifitasnya akan meningkat, maka kegiatan pasca panen (pemasaran keluar daerah dan peningkatan nilai tambah) dilakukan di/melalui agropolitan. Demikian pula kebutuhan sarana produksi (pupuk, bibit unggul, sarana produksi lainnya seperti traktor dan lainnya) didatangkan dari luar melalui agropolitan. Jadi agropolitan merupakan terminal atau simpul untuk berbagai kegiatan pelayanan untuk dan dari wilayah pengaruhnya baik yang keluar dari agropolitan (arus pemasaran dari daerah pertanian dikirim keluar) dan yang masuk (arus input produksi dari luar untuk memenuhi kebutuhan dari pertanian). Agropolitan merupakan kota di ladang yang melayani pemasaran produksi pertanian yang dihasilkan untuk dikirim ke luar daerah.

*Agropolitan* adalah konsep menciptakan suasana dan aktivitas kota yang terdapat di desa. Konsep *agropolitan* menurut John Friedman dan Mike Douglass (1976) dalam Paulus Hariyono (2007 : 106) ada dua, yaitu : 1) agropolitan atau "kota ladang" dan 2) agropolitan distrik, yaitu meluasnya hubungan sosial di pedesaan sampai keluar batas-batas desanya, sehingga terbentuk suatu ruang sosio-ekonomi dan politik yang lebih luas. Salah satu ciri terbentuknya agropolitan, yaitu terdapat modernisasi di kota yang berada di tengah ladang (John Friedman dan Mike Douglass, 1976). Beberapa hal yang dapat dimodernisasi di Kota Bima, yaitu tempat penginapan, tempat rekreasi, dan kelayakan industri yang mendukung potensi alam setempat.

Menurut Rahardjo Adisasmita (2006 : 140), kota pertanian atau agropolitan yang dikembangkan oleh Friedman karena kegagalan teori kutub pertumbuhan (*growth pole theory* yang diintroduksikan oleh Francois Perroux) dalam menyebarkan dampak pembangunan dari kutub pertumbuhan ke daerah sekitarnya (yaitu *trickling down effect* yang dikemukakan oleh Hirschman). Kegagalan tersebut mendorong



perencanaan pembangunan mempertimbangkan untuk menerapkan konsep kota pertanian atau “agropolitan” yang sering diterjemahkan sebagai “kota di ladang”.

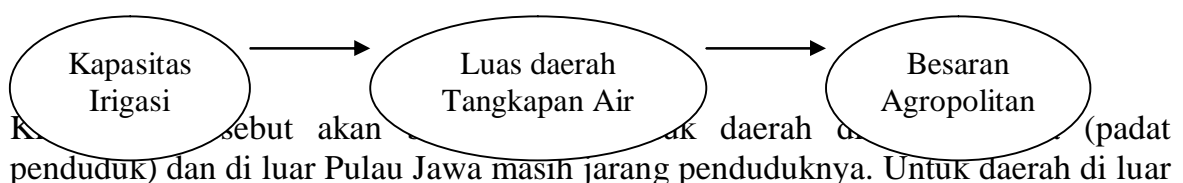
Ciri-ciri dari agropolitan yaitu berpenduduk sekitar 20.000 jiwa, berada di tengah ladang (sawah) yang mempunyai radius terhadap wilayah pengaruhnya sejauh sekitar 10 kilometer (atau satu jam perjalanan dengan sepeda). Di agropolitan terdapat kegiatan pelayanan pemasaran komoditas hasil pertanian (agrobisnis) dan terdapat pula kegiatan pengolahan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah (agroindustri). Kota pertanian dikenal yang kegiatan ekonominya berdasarkan perdagangan hasil pertanian. Contoh : Kota Karawang di Jawa Barat (pada masa lalu)

Dengan menerapkan sistem pertanian yang relatif luas, maka produksi dan produktivitasnya akan meningkat, kegiatan pasca panen (pemasaran ke luar daerah dan upaya peningkatan nilai tambah) dilakukan di (melalui) agropolitan. Jumlah agropolitan banyak dan tersebar di seluruh daerah pertanian. Sistem kota-kota pertanian (agropolitan) merupakan sub ordinasi dari kota-kota sedang yang ciri utama kegiatannya adalah pada sektor manufaktur dan jasa pada skala sedang dan sistem kota-kota sedang tersebut disubordinasi oleh kota-kota besar yang skala kegiatannya lebih besar (dalam sektor jasa dan manufaktur) (Rahardjo Adisasmita, 2006 : 140).

### **PEMBENTUKAN DAN PEMBANGUNAN “AGROPOLITAN”**

Dalam mengkaji pembentukan agropolitan dalam menunjang pembangunan perkotaan beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Beberapa faktor dimaksud menurut Rahardjo Adisasmita (2006 : 110-112) adalah :

1. Penduduk pada agropolitan. (Misalnya sekitar 10.000 atau 20.000 jiwa) dan penduduk yang bergerak dalam kegiatan sektor pertanian (misalnya sekitar 40-50 persen).
2. Kegiatan pertanian di daerah sekitar agropolitan merupakan lahan produksi pertanian. Sedangkan di daerah agropolitan dapat berupa pelayanan pemasaran (agribisnis) tetapi dapat pula merupakan kegiatan pengolahan pasca panen-untuk meningkatkan nilai tambah (agroindustri).
3. Infrastruktur dasar daerah pertanian yaitu irigasi dan jalan lokal, di agropolitan tersedia jalan kolektor yang menghubungkan ke ibukota kabupaten atau ibukota propinsi.
4. Fasilitas pasca panen di daerah pertanian adalah mesin perontok padi, lantai penjemuran padi, sedang di agropolitan terdapat penggilingan beras, pengkemas beras dalam kantong (karung), fasilitas perdagangan (pemasaran), perusahaan pengiriman beras antar kota/pulau.
5. Dari prasarana irigasi yang tersedia diketahui luas daerah tangkapan air, dan semakin besar kapasitas irigasi semakin luas daerah tangkapan air agropolitan, demikian sebaliknya. Dalam hubungan ini perlu dibuat klasifikasi untuk kaitan berikut ini.



Pulau Jawa dapat pula variasi/berbeda-beda untuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua).

6. Jarak dan luas wilayah lahan produksi pertanian terhadap besaran agropolitannya, hal ini akan terkait dengan prasarana pedesaan (seperti jalan) yang telah tersedia dan yang dibutuhkan untuk dibangun pada masa depan. Agropolitan mempunyai radius terhadap wilayah pengaruhnya sejauh sekitar 15 kilometer (sekitar setengah jam perjalanan dengan sepeda motor).
7. Jenis komoditas pertanian yang dihasilkan misalnya, padi, jagung, kacang-kacangan, sayur-mayur, dan buah-buahan. Ciri hasil tanaman pertanian yang merupakan andalan perlu diidentifikasi, hal ini diperlukan untuk merumuskan strategis pengembangannya yang menyangkut dengan pembangunan prasarana dan sarana dasar yang dibutuhkan.
8. Penentuan hirarkir, subordinasi, dan orientasi.

Agropolitan yang akan ditentukan adalah merupakan hasil pemilihan berdasar besaran dari pusat-pusat permukiman pedesaan yang diamati. Pusat-pusat yang bersangkutan ditetapkan hirarkinya. Berdasarkan hirarki pusat-pusat tersebut, selanjutnya diidentifikasi subordinasinya (sistem pusat) dan arah orientasi pemasarannya secara geografis (spasial), sehingga membentuk konfigurasi pusat-pusat yang efektif.

Dengan penentuan hirarki, subordinasi dan orientasi pemasaran agropolitan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kebutuhan dan prioritas prasarana dan sarana dasar ke-PU-an (Bina Marga, Pengairan dan Cipta Karya) yang akan ditempatkan pada daerah-daerah yang membutuhkan, demikian pula pada agropolitan.

Dalam mengembangkan agropolitan, perlu juga dibenahi pola agro-ekosistem. Conway (1983) dalam Hasanu Simon (2008 : 158) menyebutkan, bahwa sifat sistem yang paling penting untuk agro-ekosistem adalah : produktivitas (*productivity*), stabilitas (*stability*), kelestarian (*sustainability*), dan keadilan (*equitability*). **Produktivitas** adalah hasil bersih berupa biomassa dari suatu sistem per satuan waktu atau luas lahan. **Stabilitas** adalah tingkat produktivitas yang tidak menurun karena bebas dari pengaruh faktor-faktor alami yang mengganggu seperti hama dan iklim. **Kelestarian** mencerminkan kemampuan suatu sistem untuk bertahan terhadap gangguan-gangguan besar yang merusak seperti musim kering yang berkepanjangan, sehingga kualitas dan produktivitas sistem tidak merosot. **Keadilan** berkaitan dengan pemanfaatan hasil (*outcome*) dari sistem yang dapat diterima secara wajar (proposional) oleh pihak-pihak yang mempunyai hak.

Sedikit berbeda dengan Conway, Rambo (1982) dalam Hasanu Simon (2008 : 158) melukiskan sifat agro-ekosistem dengan menyebutkan (1) efisiensi energi, (2) efisiensi ekonomi, (3) keharmonisan (*compatibility*) dengan sistem yang lain, (4) ketergantungan (*dependency*) terhadap sistem yang lain, dan (5) diterima oleh kultur yang ada (*cultural acceptability*). Pendefinisian ini dapat dimengerti karena sebagai *human ecologist* Rambo bertitik-tolak dari teori yang mengatakan bahwa di dalam dan di antara sistem selalu terjadi arus energi, materi, dan informasi.

### ***KONSEKUENSI KOTA AGROPOLITAN***

Sebagai daerah agropolitan, maka Kota Bima tetap memandang sektor pertanian sebagai hal yang tetap urgen dibenahi. Pertanian perlu ditempatkan sebagai dasar pembangunan. Oleh karena itu menurut Francis, dkk. (2001 : 73), kita harus memperhatikan beberapa hal berikut : (1) membenahan tata ruang wilayah dan daerah berlandaskan pada asas tataguna lahan dan mengetatkan pelaksanaannya serta menghilangkan kecenderungan pembangunan sepihak; (2) mengindustrialikan pertanian dan menyerahkan urusan industri-industri pertanian kepada Departemen Pertanian; (3) mengembangkan teknologi produksi pertanian yang sesuai, mudah diadopsi petani, spesifik dalam hal lokasi dan sesuai kondisi agroekosistem; (4) mengembangkan teknologi produksi pertanian sesuai untuk tanah marginal yang hemat lahan dan air, dan dioperasikan dengan budidaya masukan rendah (LEISA); (5) memacu pengembangan hortikultura, peternakan dan perikanan dan berorientasi pada pasar; (6) membuat struktur pembangunan pertanian yang dapat saling mendukung antar subsektor dengan perantaraan industri; (7) mengintensifkan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian menjadi kebutuhan dasar; (8) Undang-Undang Budidaya Pertanian No. 12/1992 perlu segera disosialisasikan dan dilaksanakan. Semoga !!!

## BAB XXVI PEMERKOSAAN LINGKUNGAN DAN HILANGNYA LAHAN PERTANIAN KOTA

“Dalam penentuan visi spasial kota, tidak jarang terjadi pemerkosaan lingkungan (*environmental rape*) sehingga apa yang dirumuskan bukannya mengarah pada upaya mencapai sesuatu hal yang baik, lestari (*sustainable*) namun malah cenderung mengakibatkan munculnya imbas negatif yang bertentangan dengan *intra generation, inter generation, intra frontier, dan inter frontier*”  
(Hari Sabari Yunus, 2008 : 352)

Apa itu *pemerkosaan lingkungan*? Yaitu suatu tindakan mengubah fungsi alami elemen-elemen lingkungan menjadi tidak berfungsi lagi. Sebagai contoh adalah menimbun/mengurug daerah rawa-rawa yang berfungsi sebagai kantong-kantong penampungan luapan air di daerah pantai tanpa mengganti dengan bentuk lain yang menampung luapan air. Akibat lingkungan yang muncul adalah melubernya luapan air ke daerah-daerah yang semula tidak pernah tergenang air menjadi tergenang air, sehingga *social cost* yang muncul pada saat sesudahnya menjadi sangat besar dan tidak mudah untuk dipecahkan (Hadi Sabari Yunus, 2005 : 239). Demikian halnya, mengubah sawah subur, produktif dan beririgasi teknis menjadi lahan pemukiman dikategorikan sebagai *environmental rape*.

Sampai saat ini dikenal ada 2 macam paradigma pembangunan kota dalam persepektif spasial. Paradigma pembangunan kota yang pertama disebut sebagai *Urban Oriented Development Paradigm* (UOP) dan paradigma kedua dikenal sebagai *Rurban Oriented Development Paradigm* (ROP).

*Urban Oriented Development Paradigm* (UOP) adalah suatu paradigma pembangunan kota dengan filosofi pembangunannya *city is just for urban residents* atau *city is just for the city itself*. Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh banyaknya keberadaan lahan kosong baik di bagian dalam kota dan terlebih lagi di luar kota yang dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasikan struktur fisik baru (Hadi Sabari Yunus, 2005 : 242). Daerah pinggiran kota (*urban fringe areas*) sebagian besar didominasi oleh lahan kosong, atau lahan tidak produktif, sehingga setiap saat untuk membangun fungsi-fungsi kekotaan baru sebagai bentuk perkembangan dan pengembangan baru dapat dilaksanakan setiap saat.

*Rurban Oriented Development Paradigm* (ROP) adalah suatu paradigma pembangunan kota yang dilandasi filosofi bahwa *the development of a city is not just for the city itself but also for the rural areas*. Hal ini didasari oleh adanya suatu kenyataan bahwa kota yang produktif serta sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian nasional (Hadi Sabari Yunus, 2005 : 243).

Kaitan dengan penggunaan lahan pertanian, maka setiap upaya penilaian akan dikaitkan dengan : (1) produktivitas lahan; (2) kesuburan lahan; (3) keberadaan saluran irigasi.

ROP dilandasi oleh suatu konsep filsafati yang khusus yaitu : (1) perkembangan kota tidak boleh hanya untuk kepentingan kota itu sendiri; (2) kehidupan kota tidak

dapat dipisahkan dari kehidupan desa, sehingga program pengembangan kota juga harus memperhatikan kepentingan desa ; (3) bentuk kota ideal tidak harus bulat atau mendekati bulat atau bujur sangkar; (4) bentuk kota ideal tidak harus kompak memadat; (5) pengertian ideal selalu konform dengan kondisi lingkungan biotok, abiotok dan sosial kultural; (6) pembangunan kota harus memperhatikan *intra dimension* dan *inter dimension* baik terkait dengan keberadaan generasi maupun wilayah (Hadi Sabari Yunus, 2005 : 249).

### ***BEBERAPA ALTERNATIF VISI SPASIAL KOTA***

Upaya untuk menentukan visi pembangunan kota khususnya visi spasial kota merupakan hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan. *Pertama* adalah pengetahuan yang mendalam mengenai kondisi lingkungan biotik, abiotik dan sosio-kultural mengenai daerah kekotaannya sangat diperlukan. *Kedua* adalah kemampuan melihat perkembangan kota jauh ke depan dengan mendasarkan kecenderungan perkembangan yang ada. *Ketiga* adalah pemahaman yang mendalam mengenai konsep *sustainable development*. *Keempat* adalah pengetahuan mengenai berbagai variasi bentuk fisik ekspresi spasial kota (Hadi Sabari Yunus, 2005 : 250).

### ***PERENCANAAN KOTA DI INDONESIA***

Bila melihat evolusi perencanaan pembangunan kota di Eropa dan Amerika, industrialisasi merupakan salah satu faktor pendorong adanya perencanaan pembangunan kota. Hal ini berbeda dengan konteks Indonesia. Terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi faktor-faktor dasar kota di Indonesia. *Pertama*, perkembangan kota di Indonesia bukan disebabkan adanya industrialisasi, melainkan karena kurang menguntungkan kondisi di daerah pedesaan. Kondisi ini mempengaruhi faktor-faktor dasar kota di Indonesia, antara lain dalam struktur basis perekonomiannya, di mana terjadi dualisme perekonomian kota, yakni ekonomi modern dan ekonomi tradisional. Kondisi ini memperbesar sektor informal di kota, yang pada gilirannya berpengaruh pada struktur fisik kota.

*Kedua*, keadaan masyarakat, khususnya kondisi struktur pemerintahan di Indonesia dan organisasi masyarakat, tingkat pengetahuan dan serta kebutuhan dasarnya, dan sebagainya.

*Ketiga*, keadaan struktur pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem perangkat pemerintah daerah (desentralisasi) dan perwakilan pemerintah pusat di daerah (dekonsentrasi).

*Keempat*, belum mantapnya bidang dan proses perencanaan kota di Indonesia, sehingga mekanisme pendukungnya belum berjalan lancar.

*Kelima*, beragamnya jenis kota di Indonesia, terutama menyangkut besaran serta kompleksitas permasalahannya. Hal ini bisa dilihat dari beragamnya kota-kota yang ada di Indonesia, baik kota besar, kota menengah maupun kota kecil, dan juga beragamnya kondisi kota-kota, baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa.

Kelima kondisi di atas berpengaruh terhadap model perencanaan yang di terapkan di Indonesia, karena dari berbagai kondisi tersebut diupayakan penerapan model yang sesuai.

Bila kita mengkaji perencanaan pembangunan kota di Indonesia, menurut Sudjana Rochyat paling tidak terdapat dua pandangan dasar yang dapat diterapkan untuk

mengupas permasalahan dan mengenali berbagai problematika perkotaan. *Pertama*, memandang kota sebagai dimensi fisik dari kehidupan kegiatan usaha manusia yang memberikan berbagai implikasi pada aspek-aspek pembangunan. *Kedua*, kota dipandang sebagai bagian dari suatu sistem yang menyeluruh dari kehidupan dan kegiatan usaha manusia dan masyarakat yang saling terkait dengan upaya pada aspek-aspek pembangunan lainnya.

Namun, dilihat dari fungsi dan peranan kota sebagai pusat pemukiman penduduk, pusat pendidikan, pusat kegiatan ekonomi dan sebagainya menunjukkan bahwa kota tidak hanya dipandang dari dimensi fisik semata, tetapi lebih merupakan bagian dari suatu sistem yang menyeluruh, yang hal ini akan dilihat dari perjalanan pembangunan kota di Indonesia.

Kota baru (*new town*) seperti Kota Bima mesti didesain sejak awal dengan pemikiran yang holistik-integralistik. Berbeda dengan kota-kota konvensional yang tumbuh secara organik dan inkremental. Kota Bima adalah kota yang relatif baru dan jelas dikategorikan sebagai kota baru. Pada hakikatnya, kota baru adalah kota dalam ukuran terbatas yang direncanakan oleh agen pembangunan tunggal, sebagai satu kesatuan lingkungan binaan yang berisi perumahan, fasilitas dan pelayanan sosial, serta lapangan kerja yang beragam baik secara sosial maupun ekonomi (Eko Budihardjo, 2005 : 88).

Kunci utama keberhasilan pembangunan kota baru menurut Howard tidaklah terletak pada kehebatan produk rancangan fisiknya, melainkan lebih pada landasan sosial-ekonomi dalam perencanaan pembangunan. Konsep kota baru yang mendasar selalu harus berlandaskan pada teori ekonomi perkotaan dengan wawasan sosial (Eko Budihardjo, 2005 : 88).

Ada beberapa dampak negatif terhadap lingkungan sosio-kultural yang dapat muncul akibat penambahan luas suatu kota dengan konsekuensi hilangnya lahan pertanian produktif kota, antara lain : (1) penurunan *income* petani; (2) peningkatan konflik sosial; (3) gejala disintegrasi sosial; (4) peningkatan perilaku konsumtif; (5) peningkatan perilaku negatif remaja seperti pemakaian obat-obatan terlarang, kejahatan seksual, penjangbretan, pemalakan dan lain sebagainya (Hadi Sabari Yunus, 2006 : 479).

### **PEMANFAATAN LAHAN KERING**

Lahan kering meliputi areal kebun/ladang dan huma, tanaman keras/perkebunan, semak belukar dan pepohonan serta lahan yang belum dimanfaatkan atau lahan bera. Atau, dapat lebih spesifik meliputi pertanian tadah hujan, ladang/kebun dan huma (*shifting cultivation*).

Dengan terus menipisnya lahan pertanian produktif—sawah lahan basah, sebagai akibat dari pengalihan fungsi lahan pertanian karena pembangunan kantor-kantor pemerintah dan pemukiman warga, tentu akan menurunkan produksi pangan. Hilangnya lahan pertanian produksi yang terus-menerus tersebut perlu diantisipasi dengan maksimalisasi pemanfaatan lahan kering, dan pemerintah Kota Bima harus melakukannya.

Perhatian yang besar pada wilayah lahan kering sangat beralasan yaitu lahan kering sebagai sumberdaya pembangunan memiliki potensi strategis antara lain : (1) Lahan kering merupakan luasan terbesar dari wilayah budidaya; (2) Lahan kering dapat

memasok sebagian besar komoditas andalan, (3) Lahan kering mempunyai keanekaragaman komoditas bahan baku untuk pengembangan agroindustri dan kesejahteraan masyarakat (Alhusniduki Hamim *dalam* Bustanul Arifin, dkk., 1997 : 16).

Selain itu, alasan lain menurut Beddu Amang (Bustanul Arifin, dkk., 1997 : 19-21), yaitu : *pertama*, ...semakin susutnya ketersediaan lahan sawah subur di sentra produksi pangan.... *Kedua*, ... berbagai laporan di tingkat internasional memperlihatkan bahwa sedikit negara di muka bumi ini yang menjadi negara *net exporter* biji-bijian. *Ketiga*, pemerintah bersama DPR kita telah meratifikasi GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*), dan kini negara kita menjadi salah satu anggota badan WTO (*World Trade Organisation*).

Argumentasi pembenar lainnya bahwa berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS, 1995), areal hutan masih tercatat lebih dari 110 juta hektar atau lebih 55 % dari total 191 juta hektar luas permukaan lahan di Indonesia. Lahan pertanian—sebenarnya adalah lahan yang dapat ditanami (*arable land*)—hanya tercatat sekitar 60 juta hektar atau 30 % dari total luas lahan. Lebih dari 87 % dari total lahan pertanian itu atau lebih dari 52 % juta hektar lahan yang dapat ditanami di Indonesia adalah lahan kering, sedangkan 13 % siswa berupa lahan sawah. Jumlah sebesar 52 juta hektar itu meliputi areal kebun/ladang dan huma, tanaman keras/perkebunan, semak belukar dan pepohonan serta lahan yang belum dimanfaatkan atau lahan bera (Bustanul Arifin, dkk., 1997 : 2).

Dalam upaya maksimalisasi pemanfaatan lahan kering, beberapa agenda pembangunan pertanian modern di lahan kering, baik sebagai penyedia pangan alternatif di abad ke-21 ini maupun sebagai strategi keberlanjutan pembangunan pertanian secara makro : *pertama*, perencanaan pola tanam dan pengembangan komoditas di suatu wilayah yang lebih memadai. *Kedua*, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pembangunan yang terencana dan memenuhi standar kebutuhan. *Ketiga*, pembangunan perangkat lunak yang mendukung, melalui desentralisasi pola pengembangan sumber daya manusia.

Semoga !!!

## **BAB XXVII MASYARAKAT KOTA DAN PERILAKU SEHAT**

“Derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu faktor lingkungan, faktor perilaku manusia, faktor pelayanan kesehatan/medis, dan faktor keturunan.”

Di antara keempat faktor tersebut, maka yang sangat besar pengaruhnya adalah keadaan lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan perilaku masyarakat yang merugikan kesehatan, baik masyarakat di pedesaan maupun perkotaan yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan, ekonomi maupun teknologi.”

Indonesia Sehat 2010 yang telah dicanangkan oleh Departemen Kesehatan, mempunyai visi yang sangat ideal, yakni masyarakat Indonesia yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Bentuk Tematik Pembangunan Kota Bima bahwa *“Tahun 2011 Kota Bima sebagai kota yang sehat dengan fasilitas pelayanan publik yang nyaman.”*

Berdasarkan visi tersebut, terdapat 3 prakondisi yang perlu dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, yakni : lingkungan sehat, perilaku sehat, dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat, misalnya bebas polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan memadai, perumahan dan pemukiman sehat, dan sebagainya. Perilaku sehat adalah perilaku masyarakat yang proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari penyakit, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Sedangkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat diartikan masyarakat memperoleh pelayanan dengan mudah dari tenaga kesehatan yang profesional.

Guna mewujudkan visi Indonesia Sehat 2010 tersebut telah dicanangkan 4 misi pembangunan kesehatan, yakni : (1) menggerakkan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan; (2) mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; (3) memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau; dan (4) memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya (Soekidjo Notoatmodjo, 2003 : 104).

Baik atau buruknya derajat kesehatan masyarakat, termasuk masyarakat kota dipengaruhi oleh beberapa variabel, misalnya : faktor sosial ekonomi, sistem pelayanan kesehatan, lingkungan masyarakat, kepercayaan, norma sosial, demografi, gaya hidup dan perilaku masyarakat, dan faktor keturunan. Hal ini dipertegas Hendrik L. Blum (Depkes RI, 2001 : 1) mengemukakan bahwa “derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu faktor lingkungan, faktor perilaku manusia, faktor pelayanan kesehatan/medis, dan faktor keturunan.” Di antara keempat faktor tersebut, maka yang



sangat besar pengaruhnya adalah keadaan lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan perilaku masyarakat yang merugikan kesehatan, baik masyarakat di pedesaan maupun perkotaan yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan, ekonomi maupun teknologi.

Faktor perilaku manusia misal, banyak perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat yang menyebabkan timbulnya penyakit dan bahkan kematian. Perilaku tersebut di antaranya : minum air tidak dimasak, membuang kotoran di sembarang tempat/tidak di jamban sehat, memakan makanan yang tidak sehat, menyimpan pestisida di tempat penyimpanan makanan, membiarkan kuku kotor dan lain-lain.

Akibat perilaku yang tidak sehat tersebut, telah banyak menimbulkan pusparagam penyakit, misalnya diare yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

Berdasarkan data Departemen Kesehatan, salah satu penyebabnya yaitu bahwa penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan masih merupakan masalah kesehatan terutama di daerah pedesaan berpenghasilan rendah. Angka penyakit diare berdasarkan survei tahun 2001 sebesar 301 orang per 1000 penduduk, terutama menyerang pada umur balita, yaitu 55 % dari jumlah penderita, serta menunjukkan episode 1,0 – 1,5 per tahun (Depkes RI, 2004 : 1).

Hal di atas disebabkan oleh rendahnya cakupan air bersih dan sanitasi serta kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih yang masih rendah. Cakupan jamban di daerah pedesaan sebesar 54,2 % dan daerah perkotaan 85,9 % (rata-rata 66,03). Sedangkan cakupan air bersih di daerah pedesaan 67,4 % dan perkotaan 91,8 % (rata-rata 67,4 %). Angka cakupan air bersih dan jamban di desa berpenghasilan rendah jauh di bawah angka cakupan minimal tersebut di atas. Terjadinya pencemaran air dan lingkungan oleh kuman penyakit dan terjadinya penularan penyakit oleh kuman penyakit sehingga masuk ke dalam tubuh manusia, terutama disebabkan oleh perilaku manusia sendiri di samping kurangnya sarana air bersih dan sanitasi.

### ***PERILAKU SEHAT***

Soekidjo Notoadmodjo (1993 : 55) berpendapat bahwa : “Perilaku dapat dipandang dari segi biologi adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme yang bersangkutan. Jadi perilaku manusia pada hakekatnya adalah suatu aktifitas daripada manusia itu sendiri.”

Pendapat lain sebagaimana dikemukakan Kurt Lewin *dalam* Paulus Wirutomo (1982 : 49) sebagai berikut : “Perilaku (*behavior*) adalah fungsi dari keadaan diri pribadi (*personality*) dan lingkungan (*environment*). Makin banyak pengalaman seseorang, makin majemuk keadaan psikologinya.”

“Perilaku merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, merupakan tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap, tidak saja bahan/ucapan, yang terutama menunjukkan perubahan dalam ruang hidup, tidak dalam ruang obyektif tetapi hanya dapat disimpulkan daripada apa yang dapat diamati” (Sumadi Suryabrata, 1986 : 270)

Dengan demikian, perilaku dipakai untuk menunjukkan tiap perubahan di dalam ruang hidup, yaitu perubahan dalam arti psikologis.

Sehat berarti bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi meliputi seluruh kehidupan manusia, termasuk aspek sosial, psikologis, spiritual, faktor-faktor lingkungan ekonomi, pendidikan dan rekreasi.

Berdasarkan UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 (A.A. Gde Muninjaya, 1999 : 41), “Sehat ialah suatu keadaan yang optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya terbatas pada keadaan bebas dari penyakit atau kelemahan saja.”

Sehat merupakan suatu keadaan yang terdapat pada masa tumbuh kembang manusia. Sehat mencakup manusia seutuhnya meliputi aspek fisik, emosi, sosial dan spiritual (La Ode Jumadi Gaffar, 1999 : 45).

Sehat dimaksud, juga seperti yang diinginkan Abdulkadir Muhammad (2008 : 34), yaitu sehat dalam arti yang “*hakiki atau sesungguhnya*” dan sehat dalam arti “*hidup sempurna*”. Sehat dalam arti yang hakiki atau sesungguhnya meliputi “*sehat badan dan jiwa*”. Sehat dalam arti ini menentukan kelanjutan hidup karena hanya orang sehat badan dan jiwa yang mampu mencari nafkah untuk hidup dan kelanjutan generasinya. Sehat dalam arti “*hidup sempurna*”, meliputi sehat badan dan jiwa, cukup makanan bergizi, hidup di lingkungan bersih, dan interaksi dalam keluarga/masyarakat teratur, selaras, dan serasi. Sehat dalam arti ini adalah sehat yang paling didambakan oleh keluarga modern.

### ***DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT***

Indikator yang berhubungan dengan derajat kesehatan, yaitu : (1) Umur harapan hidup meningkat; (2) Angka kematian bayi menurun; (3) Bayi yang dilahirkan di bawah berat standar normal menurun; (4) Tingkat kecerdasan penduduk meningkat; (5) Angka kesakitan yang disebabkan oleh penyakit yang menyebabkan diare menurun; (6) Angka kesakitan penyakit TB paru yang dewasa ini sebesar 3/1000 penduduk menurun; (7) Jumlah penderita kelainan jiwa (psikosis) dapat dipertahankan pada rasio 1-3/1000 penduduk dan jumlah penderita gangguan jiwa yang relatif ringan/neurosis dan gangguan perilaku pada rasio 20-60/1000 penduduk (La Ode Jumadi Gaffar, 1999 : 74-75).

Misalnya, proyek air bersih dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah II yang diluncurkan selama ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui : (1) Perubahan perilaku; (2) Pelayanan kesehatan berbasis lingkungan; (3) Penyediaan air bersih dan sanitasi Penyehatan Lingkungan Pemukiman yang aman, cukup dan mudah dijangkau; dan (4) Kesenambungan dan efektivitas program melalui partisipasi masyarakat (Depkes RI, 2004 : II-1).

### ***PERILAKU MASYARAKAT***

Berdasarkan Panduan Konseling Bagi Petugas Klinik Sanitasi di Puskesmas (Depkes RI, 2001, 21), “Para ahli mengemukakan 5 karakteristik dalam proses perubahan perilaku individu, yaitu pengetahuan, menyetujui, niat, praktek dan meneruskan kepada orang lain (*advocacy*).”

Berbicara tentang perilaku individu di lingkungan masyarakat, perlu sekali diketahui tentang bagaimana hubungan antara individu dengan lingkungannya dalam membentuk perilaku tersebut. Hubungan individu dengan lingkungan ini mempunyai pengertian yang paling luas, artinya individu tidak hanya berinteraksi dalam kegiatan-

kegiatan luar yang tampak (jasmaniah), akan tetapi juga dalam kegiatan yang tidak tampak (rohaniah). Dalam proses berlangsungnya interaksi atau segala bentuk kegiatan, ada dua pihak atau unsur yang berperan yaitu individu dan lingkungan. Individu memberi pengaruh kepada lingkungan dan lingkunganpun memberi pengaruh pada individu. Individu memperoleh sesuatu dari lingkungan dan lingkunganpun memberi sesuatu pula dari individu. Itulah peristiwa timbal balik atau saling berpengaruh pada setiap kegiatan/prilaku individu.

Perilaku individu dalam interaksi dengan lingkungan secara umum dapat dikelompokkan dalam empat jenis bentuk antara lain : (1) Individu menggunakan lingkungan; (2) Individu menentang lingkungan; (3) Individu menyesuaikan diri dengan lingkungan; dan (4) Individu turut serta dengan kegiatan yang sedang berlangsung.

Terdapat beberapa macam perilaku masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, yang terinci sebagai berikut : (a) *Perilaku ideal*, yaitu perilaku yang perlu dilakukan oleh individu atau masyarakat untuk mengurangi atau membantu memecahkan masalah. (b) *Perilaku yang sekarang* yaitu perilaku yang dilaksanakan saat ini. Ini dapat diidentifikasi dengan pengamatan dan wawancara di lapangan, dikaitkan dengan epidemiologi masalah kesehatan yang sedang dianalisa dan dikaitkan dengan perilaku ideal (misanya tentang penyakit malaria). Dari hasil pengamatan perilaku sekarang, pasien/klien tidak memakai kelambu kalau tidur, tidak memasang kawat kasa nyamuk, tidak memakai obat nyamuk dan menggantung baju di dinding / pintu. (c) *Perilaku yang diharapkan* yaitu perilaku yang diidentifikasi berdasarkan hasil analisa perilaku ideal dan perilaku yang sekarang, dibahas dengan pemuka masyarakat setempat. (d) *Perubahan perilaku* akan lebih besar kemungkinannya diadopsi atau diterima masyarakat individu bila : (1) Perilaku yang akan diadopsi tersebut serupa dan cocok dengan apa yang sudah dilakukan saat ini; (2) Perilaku itu sesuai dengan norma/budaya setempat; (3) Perilaku itu sederhana, tidak ruwet/sulit; (4) Perilaku itu murah; (5) Perilaku itu memberikan dampak yang positif dalam waktu singkat, baik kepada pria maupun wanita; dan (6) Perilaku bersaing, yaitu perilaku yang harus dilaksanakan dalam waktu bersamaan (Depkes RI, 2001, 29).

Beberapa rangsangan dapat menyebabkan orang merubah perilakunya, yaitu : (a) Rangsangan fisik; (b) Rangsangan yang bersumber pada keadaan seseorang pada suatu saat (misalnya sedang sakit malaria); (c) Rangsangan rasional; (d) Rangsangan bersumber pada pengetahuan dan melihat bukti-bukti nyata; (e) Rangsangan emosional; (f) Rangsangan karena rasa takut, cinta, harapan-harapan (takut anaknya mati karena diare); (g) Keterampilan; (h) Rangsangan bersumber pada keterampilan seseorang untuk mengadopsi dan melanjutkan perilaku yang baru; (i) Jaringan perorangan dan keluarga; (j) Rangsangan bersumber dari pengaruh keluarga/teman; (k) Struktur sosial; dan (l) Rangsangan bersumber dari dampak faktor sosial, ekonomi, hukum dan teknologi terhadap kehidupan sehari-hari seseorang (Depkes RI, 2001, 31).

### **KESEHATAN BERBASIS LINGKUNGAN**

Ciri-ciri masyarakat sehat menurut Nasrul Effendy (1998 : 94), yaitu : (1) Peningkatan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat; (2) Mengatasi masalah kesehatan sederhana melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan terutama untuk ibu dan anak; (3) Peningkatan upaya

kesehatan lingkungan terutama penyediaan sanitasi dasar yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup; (4) Peningkatan status gizi masyarakat berkaitan dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat; dan (5) Penurunan angka kesakitan dan kematian dari berbagai sebab dan penyakit.

Pengelolaan lingkungan merupakan upaya untuk memecahkan, memperbaiki dan meningkatkan mutu lingkungan, agar fungsi lingkungan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dapat dipenuhi bagi kelangsungan hidup yang manusiawi.

Masalah yang timbul akibat tingginya penyakit yang berbasis lingkungan di Indonesia pada umumnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih, pemanfaatan jamban yang masih rendah, tercemarnya tanah, air dan udara karena limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian dan sarana transportasi serta kondisi lingkungan fisik yang memungkinkan berkembang biaknya vektor. Di samping itu perilaku manusia seringkali menimbulkan masalah dalam hubungannya dengan lingkungannya, seperti dalam aspek higienis industri makanan dan minuman serta penggunaan pestisida yang mengakibatkan timbulnya penyakit akibat keracunan makanan.

Penyakit yang berbasis lingkungan masih mendominasi 10 besar penyakit di Puskesmas akibat masih buruknya kondisi lingkungan. Penyakit-penyakit tersebut antara lain : “Diare; ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut); TBC; Malaria; Demam Berdarah Dengue (DBD); Kecacingan; Penyakit kulit; dan lain-lain (Depkes, 2001 : 6)

### ***PENURUNAN KUALITAS KESEHATAN MANUSIA***

Kesehatan manusia yang bertempat tinggal di bagian dalam kota sangat rentan terhadap berbagai ancaman penurunan kualitasnya. Beberapa penyebabnya menurut Hari Sabari Yunus (2006 : 434) antara lain : (a) gejala memburuknya kualitas udara yang dihirup; (b) gejala menurunnya kualitas air yang diminum; (c) gejala meningkatnya ancaman kesehatan dari makanan yang terkontaminasi; (d) gejala menurunnya kesehatan manusia karena pola hidup tidak sehat (kurang gerak, minuman keras, obat-obatan terlarang dll.); (e) gejala meningkatnya suhu perkotaan yang mengancam kesehatan, khususnya orang tua dan anak-anak; (f) makin banyaknya tikus, nyamuk dan kecoa yang mempunyai potensi besar mengancam kualitas kesehatan manusia; (g) kepadatan penduduk yang sangat tinggi di permukiman kumuh mengakibatkan kontak personal yang tinggi pula dan hal ini memunculkan potensi yang besar terhadap penularan penyakit yang tinggi.

### ***KEBIJAKAN KESEHATAN***

Beberapa kebijakan operasional yang perlu mendapat perhatian dalam menghadapi krisis kesehatan, di antaranya : *pertama*, meletakkan landasan kebijakan kesehatan yang lebih bersifat pencegahan (*preventive*). *Kedua*, kebijakan obat nasional harus diarahkan untuk pemasyarakatan obat-obat esensial yang terjangkau oleh masyarakat. Meskipun dengan dalih untuk membuka peluang bagi penanaman modal asing (PMA), pembatasan jumlah industri farmasi harus dilaksanakan secara ketat. *Ketiga*, etika kedokteran dan tanggung jawab profesi seharusnya mendapat porsi yang lebih besar dalam pendidikan dokter agar dokter yang ditamatkan oleh Fakultas Kedokteran di Indonesia juga dapat berfungsi sebagai cendekiawan di bidang kesehatan.

Dimulai dengan pengembangan program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) tahun 1998-2001, Program Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PDPSE) tahun 2001, dan Program Kompensasi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) tahun 2002-2004. Pada awal tahun 2005 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1241/Menkes/XI/2004 menetapkan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) melalui pihak ketiga, dengan menunjuk PT. Askes (Persero). Sasaran awal mengacu pada data BPS 2004 adalah sebesar 36.146.700 jiwa.

Semua kebijakan tersebut akan menimbulkan implikasi pada lembaga pelayanan kesehatan, seperti : *pertama*, basis pelayanan kesehatan primer yang bersifat orientasi masyarakat akan lebih diperkuat dengan dukungan sistem rujukan yang lebih efektif ke rumah sakit kabupaten/kota; *kedua*, pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten akan terus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masalah kesehatan masyarakat di masing-masing wilayah. Dalam hal ini perlu ada penajaman skala prioritas pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Upaya pembangunan kesehatan pada umumnya dimaksudkan untuk mewujudkan derajat kesehatan optimal, yang dilakukan melalui upaya peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*).

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pelayanan kesehatan, pemerintah telah menetapkan indikator keberhasilan pelayanan sektor kesehatan. Indikator ini secara spesifik diuraikan dalam SKN (Sistem Kesehatan Nasional). Indikator pelayanan kesehatan tersebut meliputi : *pertama*, derajat kesehatan (lama hidup, kematian, cacat, kesakitan, status gizi, tingkat pendidikan kesehatan, tersedianya air bersih, kebersihan lingkungan, jamban, dan kepenyuksesan); *kedua*, upaya kesehatan (tenaga, peralatan, fasilitas, biaya, kebijakan, informasi kesehatan, organisasi, dan kegiatan); *ketiga*, demografi; *keempat*, perilaku penduduk terhadap kesehatan; *kelima*, pengadaan sumber daya; *keenam*, pemanfaatan sumber daya; *ketujuh*, kesepakatan kebijakan; *kedelapan*, potensi organisasi kemasyarakatan (peran sektor lain, seperti sektor pendidikan, perekonomian, dan sebagainya); dan *kesembilan*, lingkungan.

Ciri masyarakat sehat berdasarkan indikator yang digunakan WHO adalah : *pertama*, keadaan yang berhubungan dengan status kesehatan masyarakat, meliputi : (a) Indikator komprehensif, terdiri atas : angka kematian kasar menurun; rasio angka mortalitas proporsional rendah; dan umur harapan hidup meningkat; dan (2) Indikator spesifik, terdiri atas : angka kematian ibu dan anak menurun; angka kematian karena penyakit menular menurun; dan angka kelahiran menurun. *Kedua*, indikator pelayanan kesehatan, meliputi : (a) Rasio antara tenaga kesehatan dan jumlah penduduk seimbang, (b) Distribusi tenaga kesehatan merata, (c) Informasi lengkap tentang jumlah tempat tidur di rumah sakit, fasilitas kesehatan lain, dan sebagainya, (d) Informasi tentang jumlah sarana pelayanan kesehatan di antaranya rumah sakit, Puskesmas, rumah bersalin dan sebagainya (Nasrul Effendy, 1998 : 94).

Semoga !!!

## **BAB XXVIII TERCEMARNYA AIR MINUM DAN AIR SUNGAI KOTA**

“Sungai sebagai sumber air yang merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya dalam kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya, apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan dalam kehidupan ini. Maka sungai sebagaimana dimaksudkan harus selalu berada pada kondisinya dengan cara :

- (1) dilindungi dan dijaga kelestariannya;
- (2) ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya; dan
- (3) dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan

(P. Joko Subagyo, 2005 : 39).

Pada masa lampau sungai dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, baik transportasi, mandi, mencuci dan sebagainya bahkan untuk di wilayah tertentu sungai dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan makan dan minum

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991, telah tersurat pengertian sungai yaitu tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiranya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Garis sempadan sungai adalah garis luar pengamanan air. Garis sempadan ini dalam bentuk tanggul dengan ketentuan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter yang terletak di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Sungai sebagai sumber air yang merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya dalam kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya, apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan dalam kehidupan ini. Maka sungai sebagaimana dimaksudkan harus selalu berada pada kondisinya dengan cara : (1) dilindungi dan dijaga kelestariannya; (2) ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya; dan (3) dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan (P. Joko Subagyo, 2005 : 39).

Air atau sungai dapat merupakan sumber malapetaka apabila tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya dengan tercemarnya air oleh zat-zat kimia selain mematikan kehidupan yang ada di sekitarnya juga merusak lingkungan, dan apabila dari segi pengamanan tidak dilakukan pengawasan atau tanggul-tanggul tidak memenuhi persyaratan dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Karena itu, pengendalian mutu sungai atau air mutlak dilakukan. Pengendalian mutu air erat kaitannya dengan penurunan mutu air pada sumber-sumber air yang disebabkan oleh pencemaran, sehingga air tidak dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, meliputi : (1) memenuhi berbagai kebutuhan manusia; (2) melindungi

kelestarian hidup fauna dan flora; dan (3) melindungi mikroorganisme yang bermanfaat bagi sumber-sumber air (P. Joko Subagyo, 2005 : 52-53).

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 20/1990 tentang Pengendalian Pencemar Air, dijelaskan bahwa : air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut.

Agar air dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan, maka pengendalian pencemaran air menjadi sangat penting. Pengendalian dimaksudkan adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan dan atau pemulihan. Pencemaran air sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20/1990 mengandung makna masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kuantitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Sesuai dengan peruntukannya, air dibagi ke dalam 4 golongan yaitu (1) *Golongan A*, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu; (2) *Golongan B*, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum; (3) *Golongan C*, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan; dan (4) *Golongan D*, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, pembangkit listrik tenaga air.

Menurut Suratmo (1991), pencemaran air dapat didefinisikan dengan berbagai cara, tetapi pada dasarnya berpangkal tolak pada konsentrasi pencemar tertentu di dalam air pada waktu yang cukup lama untuk dapat menimbulkan pengaruh tertentu. Jika pengaruh tersebut berhubungan dengan kesehatan manusia, maka digunakan istilah kontaminasi, kalau pengaruh yang timbul menyebabkan air yang tersedia dan memenuhi syarat untuk digunakan menjadi terbatas, biasanya digunakan pengertian keadaan pencemaran air. Dan istilah *nuisance* atau gangguan digunakan dalam diskusi mengenai estetika, misalnya air yang mengandung minyak, oli atau kotoran lain, yang mengambang di permukaan air.

Berdasarkan pendapat Odum (1993), ada dua jenis bahan pencemar yaitu; *pertama* bahan pencemar yang tidak dapat berdegradasi seperti kaleng aluminium, plastik, garam merkuri, bahan kimia phenolik yang berantai panjang maupun pestisida, yang tidak dapat dikurangi kadarnya atau dapat diturunkan secara lambat sekali di lingkungan alami; *kedua* bahan pencemar yang dapat berbiodegradasi seperti hasil pembuangan limbah rumah tangga yang dapat mengalami penguraian secara cepat melalui proses alami atau sistem rekayasa yang dapat memacu kemampuan alami untuk menguraikan dan mendaur ulang. Masalah yang timbul apabila pada bahan pencemar yang kedua ini adalah jika masukan ke dalam lingkungan melebihi kapasitas penguraian atau penyebarannya.

Bahan pencemar yang dapat berbiodegradasi juga merupakan nutrisi bagi organisme perairan. Jumlah nutrisi yang berlebihan akan merangsang pertumbuhan

tanaman air seperti ganggang dan enceng gondok, lama-kelamaan akan terjadi penimbunan bahan organik sisa-sisa tanaman tersebut sehingga akan merangsang pertumbuhan bakteri pembusuk di dalam perairan. Di samping itu pemakaian deterjen yang meluas di masyarakat, akan menyebabkan cepatnya proses aerobiosa karena deterjen mempunyai kemampuan melarutkan kotoran, yang berupa bahan organik, sangat tinggi. Dengan demikian akan terjadi penumpukan bahan-bahan organik dari pelarutan tersebut menuju perairan. Deterjen juga mengandung fosfor (P) yang merupakan nutrisi tumbuhan air yang akan mengakibatkan blooming pada perairan. Fosfor juga dapat berasal dari pemupukan terutama pada daerah-daerah aliran sungai (Heddy dan Kurniati, 1994).

Bahan pencemar yang dapat berbiodegradasi akan meningkatkan produktivitas ekosistem perairan dengan memberikan subsidi, jika kecepatan masukan sedang. Pada masukan tinggi, suatu kisaran kritis tercapai yang seringkali ditandai oleh perubahan yang hebat (blooming). Di atas batas ini menjadi tekanan, dan sistem menjadi beracun. Kemudian kecepatan perubahan yang tak terpantau dari baik menjadi buruk merupakan kesulitan dalam mengenali atau mengatasi pencemaran, karena bahan-bahan beracun bersifat menekan produktivitas ketika jumlahnya meningkat.

Efek dari penurunan kualitas air tanah telah menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Beberapa hal yang memerlukan perhatian secara khusus menurut Hadi Sabari Yunus (2006 : 416) adalah (1) pencemaran air tanah karena pembangunan *septic tank* yang sangat berdekatan dengan sumur; (2) penurunan kualitas air tanah untuk air minum karena intrusi air laut; dan (3) pencemaran air tanah yang berasal dari sangat jeleknya kualitas air sungai.

Semoga !!!



**BAB XXX**  
**URBANISASI :**  
**MUDIK LEBARAN DAN EKSODUSNYA**  
**ORANG DESA KE KOTA**

"Secara ekonomis, pemerintah desa merasa diuntungkan dengan mudiknya warga yang migrasi ke kota. Sebab, pemudik selalu membawa uang kontan yang akan digunakan di desanya. Hasil penelitian Soekartawi (Surya 1/3/1996) menyimpulkan, di samping uang itu dikonsumsi (40-50 %), sisanya mereka gunakan untuk memperbaiki atau membeli rumah (50-60 %) dan untuk investasi membeli tanah sekitar 21-28 %; membeli ternak (0,2-5,4 %) dan 18,31% untuk kegiatan lain. Lanjutnya, pemudik yang tinggal di kota sebagian besar (59,7 %) hanya bersifat sementara dan karenanya sebagian besar (79,3 %) mereka tidak membawa keluarga. Dan kondisi ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk desa, tentu pemerintahnya juga. Belum lagi, rezeki ini dinikmati oleh anak-anak dengan kebiasaan "*hagalar*"-nya."

Mudik atau pulang kampung, yang lebih trend disingkat "pulkam" untuk berlebaran merupakan peristiwa yang telah mentradisi bagi para urban, orang desa yang bekerja tetap di kota, juga mahasiswa/pelajar. Sehingga tak ayal, sekaligus sebuah panorama indah nan menarik di penghujung Ramadhan, bersibuk-sibuk rialah para urban berkemas-kemas "pulkam", dengan segala persiapan yang mapan dan matang baik secara ekonomis, fisik maupun mental prima. Seakan-akan tak lezat dan sedap rasanya makna puasa Ramadhan bagi mereka jika tidak "disempurnakan" dengan mudik. Seolah-olah jerih payah, peras-keringat, perjuangan hidup mati untuk mengumpulkan "recehan-recehan" selama setahun dipersiapkan untuk mudik. Dan memang, lebaran di tempat kelahiran dengan orang tua, saudara, sanak famili, handai tolan, teman-teman lama, ditambah suasana alam desa yang amat bersahabat—demikian halnya penghuninya, terasa begitu bersahabat, damai, romantis dan penuh nostalgia. Walaupun mereka sadari benar bahwa setiap mudik lebaran : kecelakaan bahkan "maut" di perjalanan selalu menanti mereka. Untuk tahun ini saja, kecelakaan tak terbilang jumlahnya, dan musibah kecelakaan tetap terjadi saban tahun (tahun 2009 ini saja ada lebih 300-an kasus kecelakaan). Dan tidak sedikit para pemudik, menemui ajalnya dalam perjalanan mudik. Toh, mudik tetap menjadi kebutuhan karena sudah membudaya.

Memang, secara ekonomis, pemerintah desa merasa diuntungkan dengan mudiknya warga yang migrasi ke kota. Sebab, pemudik selalu membawa uang kontan yang akan digunakan di desanya. Hasil penelitian Soekartawi (Surya 1/3/1996) menyimpulkan, di samping uang itu dikonsumsi (40-50 %), sisanya mereka gunakan untuk memperbaiki

atau membeli rumah (50-60 %) dan untuk investasi membeli tanah sekitar 21-28 %; membeli ternak (0,2-5,4 %) dan 18,31% untuk kegiatan lain. Lanjutnya, pemudik yang tinggal di kota sebagian besar (59,7 %) hanya bersifat sementara dan karenanya sebagian besar (79,3 %) mereka tidak membawa keluarga. Dan kondisi ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk desa, tentu pemerintahnya juga. Belum lagi, rezeki ini dinikmati oleh anak-anak dengan kebiasaan “hagalar”-nya.

Berarti secara ekonomis, mudik memberikan manfaat yang besar. Belum lagi, para urban biasanya membentuk perkumpulan-perkumpulan di kota dan membuat program-program pembangunan yang bermanfaat bagi desa kelahirannya. Misal, melalui kelompok arisan mereka mengumpulkan dana untuk membangun rumah ibadah, perbaikan jalan kampung/desa, membangun lumbung desa, dan sarana umum lainnya, termasuk balai desa.

Melihat “partisipasi” pemudik sebagaimana ilustrasi di atas, mengundang decak kagum orang desa/kampung apalagi ditambah “performance” atau penampilan pemudik yang sedikit “bersih”, bahkan ada yang menampilkan gaya hidup kota yang sedikit “wah” dan “trendy”, sehingga memancing orang desa masuk kota. Minimal, bagi urban yang agak mapan, menyertakan pembantu. Belum lagi urban yang masih lajang dan bujang, tidak sedikit yang membawa pasangan baru.

Bagi pemudik yang berhasil tentu akan menyertakan saudara atau teman-teman dekatnya bereksodus—pindah ke kota. Jadilah mereka berurbanisasi, walau mereka sadar “sekejam-kejamnya ibu tiri, tidak sekejam dan sesadis ibu kota”, apalagi dengan kondisi akhir-akhir ini. Kota penuh dengan ketidakpastian, ketidaknyamanan, terutama sebagai imbas krisis ekonomi, dan gemuruh, gelombang unjuk rasa sebagai bias era reformasi yang akhir-akhir ini telah menjurus ke wilayah yang amat sensitif yaitu kerusuhan yang ber-“trade mark” SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan).

Kaitan dengan tradisi mudik yang sering disertai dengan eksodusnya orang desa ke kota, sekurang-kurangnya ada dua faktor yang bertemu secara simultan atau berbarengan, demikian Burhanuddin (Suara Pembaruan 25/1/1999). *Pertama*, faktor pendorong (*push factor*), yaitu terbatasnya lapangan kerja di pedesaan, menyempitnya lahan pertanian dan bertambahnya populasi petani gurem berlahan sempit. *Kedua*, faktor penarik (*pull factor*), yaitu tersedianya beragam alternatif di kota, banyaknya kesempatan berusaha dan sisi-sisi ekonomi yang menjanjikan “jampi-jampi” penenang lebih besar. Di sinilah, mudik ikut berperan melipatgandakan efek faktor penarik melalui cara “*demonstration effect*” kaum urban.

M. Sofyan yang dikutip kembali Burhanuddin, mudik menjadi jembatan perantara yang efektif untuk mewadahi hasrat kaum pedesaan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi mereka. Ada “*triggering factors*” yang memicu fenomena urbanisasi di Indonesia. *Pertama*, makin menyusutnya lapangan kerja dan perubahan struktur kepemilikan tanah di pedesaan. *Kedua*, penetrasi gaya atraktif warga urban melalui mudik. *Ketiga*, efek mercu-suar dari kota metropololis yang diperoleh dari jalur informasi (TV, radio).

Memang harus diakui, kota punya daya tarik yang memikat bagi siapa saja, di samping kondisi desa yang kini dibalut kemiskinan yang mencekam. Kota menjadi pusat segala-galanya, baik ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hiburan, politik, dan lain-lain.

Eksodusnya penduduk desa ke kota baik karena mudik atau karena alasan lain, ingin merubah nasib misal (baca : hasil penelitian Heeren puluhan tahun lalu, menunjukkan bahwa banyak sekali yang pindah ke Jakarta untuk mencari nafkah dan tidak disebabkan karena keamanan !), akan menambah “beban” baru bagi pemerintah kota. Sebab eksodusnya orang desa ke kota tidak sedikit membawa ekses, antara lain lahirnya beberapa agenda permasalahan sosial, baik yang berwujud : menurunnya kualitas kebersihan kota maupun kesehatan; meningkatnya tensi kejahatan dan kenakalan, misalnya munculnya preman-preman kota; tumbuh-suburnya mental-mental individualistis; padatnya populasi penduduk; ketatnya kompetisi antar penghuninya; menjamurnya permukiman-permukiman liar, semrawut lagi kumuh, termasuk dengan adanya penempatan tanah negara secara liar (*squatter*). Khususnya penempatan tanah negara secara liar, akan menimbulkan beberapa ekses, di antaranya : adanya kehidupan gelandangan di tempat-tempat umum; adanya kemungkinan lebih besar kerusuhan-kerusuhan yang timbul oleh sekelompok penjahat; adanya kemungkinan yang lebih besar timbulnya tuna susila dan tuna wisma di tempat-tempat umum yang tidak ada koordinasi yang teratur (M. Cholil Mansyur 1989).

Ekses lain : kian membludaknya anak-anak jalanan, pengemis, dan sederet persoalan lainnya adalah anak-anak para urban yang kalah dan tak berdaya dalam berkompetisi dalam mencari kerja di kota. Maraknya pedagang asongan, pedagang kaki lima, yang memadati trotoar-trotoar dan jalan-jalan di kota pun sebuah panorama yang kurang mendukung penataan kota.

Eksodusnya orang desa ke kota bakal menambah pekerjaan dan “beban” baru bagi pemerintah kota. Dan yang jelas, kehidupan di kota itu “keras” dan “kejam” dan kehidupan kota mengandung benih-benih kejahatan. Salah satu penyebabnya, lantaran longgarnya kontrol masyarakat, dibandingkan suasana kehidupan desa.

## **URBANISASI**

Urbanisasi adalah “proses pengkotaan” atau proses perubahan suatu desa menjadi kota. Secara statistik/operasional, urbanisasi bisa dilihat dari proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan dan proporsi orang yang bekerja di sektor non-pertanian. Sebagai contoh, pada tahun 1998, sebesar 31,5 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan sebanyak 49,2 persen bekerja di sektor non-pertanian (Suharto, 2005 : 178).

Urbanisasi memiliki dua pengertian, yaitu 1) proses berpindahnya penduduk dari daerah/desa ke kota (*urbanward-migration*), dan 2) berkembangnya suatu kawasan yang penduduknya sederhana menjadi kompleks menyerupai ciri-ciri sebuah kota.

Schoorl (1980 : 263) mengatakan bahwa paling tidak terdapat empat pengertian urbanisasi, antara lain adalah : arus pindahan ke kota; bertambah besarnya jumlah tenaga kerja nonagraris di sektor industri dan sektor tersier; tumbuhnya pemukiman menjadi kota; dan meluasnya pengaruh kota di daerah pedesaan mengenai segi ekonomi, sosial, kebudayaan dan psikologi.

Urbanisasi dapat terjadi karena terdapat faktor yang mendorong penduduk meninggalkan daerah/desanya (*push factor*) dan faktor yang menjadi daya tarik penduduk mendatangi kota (*pull factor*). Ada kecenderungan, *push factor*-lah yang lebih dominan menjadi penyebab terjadinya urbanisasi (Paulus Hariyono, 2007 : 106-107).

Faktor pendorong (*pus factors*) urbanisasi : (1) semakin terbatasnya lapangan kerja di pedesaan; (2) kemiskinan di pedesaan akibat bertambah banyaknya jumlah penduduk; (3) transportasi desa-kota yang semakin lancar; (4) tingginya upah buruh di kota daripada di desa; (5) bertambahnya kemampuan membaca dan menulis atau tingkat pendidikan masyarakat di desa; dan (6) tata cara dan adat istiadat yang kadang-kadang dianggap sebagai “beban” oleh masyarakat desa.

Faktor penarik (*full factors*), di antaranya : (1) kesempatan kerja yang lebih luas dan bervariasi di kota; (2) tingkat upah yang lebih tinggi; (3) lebih banyak kesempatan untuk maju (diferensiasi pekerjaan dan pendidikan dalam segala bidang); (4) tersedianya barang-barang kebutuhan yang lebih lengkap; (5) terdapatnya bermacam-macam kesempatan untuk rekreasi dan pemanfaatan waktu luang (*pleisure time*), seperti bioskop, taman-taman hiburan, dan sebagainya; dan (6) bagi orang-orang atau kelompok tertentu di kota memberikan kesempatan untuk menghindari diri dari kontrol sosial yang ketat.

### **KEKUATAN SENTRIFUGAL**

Kekuatan Sentrifugal (*centrifugal forces*) adalah kekuatan yang menyebabkan terjadinya gerakan sentrifugal (*centrifugal movement*). Gerakan Sentrifugal dalam studi WPU (Wilayah Peri Urban) adalah gerakan penduduk dan fungsi-fungsi yang berasal dari bagian dalam sesuatu wilayah menuju ke bagian luarnya (Hadi Sabari Yunus, 2008 : 56).

Beberapa contoh yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang mendorong perpindahan penduduk dari bagian dalam kota menuju ke bagian luarnya menurut Hadi Sabari Yunus (2008 : 58-59) minimal ada 13 macam penyebab yang dapat dikemukakan yaitu (1) tingginya kepadatan penduduk; (2) tingginya kepadatan permukiman; (3) tingginya polusi udara; (4) tingginya polusi air; (5) tingginya polusi sosial; (6) tingginya tingkat kriminalitas; (7) banyaknya peraturan-peraturan yang mengikat; (8) tingginya kepadatan lalu lintas; (9) tingginya frekuensi kemacetan lalu lintas; (10) kurangnya lahan; (11) tingginya harga lahan; (12) tingginya suhu udara; (13) kurang terjaminnya *privacy* (Hadi Sabari Yunus, 2008 : 58-59).

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan antara lain (1) kurangnya lahan; (2) tingginya harga lahan; (3) tingginya pajak; (4) tingginya kepadatan lalu lintas; (5) tingginya frekuensi kemacetan lalu lintas; (6) banyaknya peraturan yang mengikat; (7) masalah *prestige*; (8) tingginya tingkat kriminalitas (Hadi Sabari Yunus, 2008 : 64).

Apabila pada tahap awal sudah diidentifikasi bahwa minimal ada 13 macam kekuatan pendorong gerakan sentrifugal, maka di sana juga minimal ada 13 macam kekuatan penarik gerakan sentrifugal. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kekuatan penarik gerakan sentrifugal adalah (1) rendahnya kepadatan penduduk; (2) rendahnya kepadatan permukiman; (3) rendahnya polusi udara; (4) rendahnya polusi air; (5) rendahnya polusi sosial; (6) rendahnya tingkat kriminalitas; (7) sedikitnya peraturan-peraturan yang mengikat; (8) rendahnya kepadatan lalu lintas; (9) rendahnya frekuensi kemacetan lalu lintas; (10) banyaknya lahan; (11) rendahnya harga lahan; (12) rendahnya suhu udara; (13) lebih terjaminnya *privacy*. Penjelasan masing-masing kekuatan tersebut tidak perlu dikemukakan lagi, karena mirip dengan penjelasan fungsi kekuatan pendorong hanya dengan peranan berbeda (Hadi Sabari Yunus, 2008 : 65-66).

### ***KEKUATAN SENTRIPETAL***

Kekuatan Sentripetal (*centripetal forces*) adalah kekuatan-kekuatan yang mengakibatkan gerakan penduduk atau fungsi-fungsi yang berasal dari bagian luar kota menuju ke bagian dalamnya (Hadi Sabari Yunus, 2008 : 66).

Kekuatan pendorong selalu berasosiasi secara spasial dengan daerah asal gerakan, maka kekuatan pendorong gerakan sentripetal berada di WPU. Beberapa kekuatan-kekuatan pendorong yang mengakibatkan penduduk meninggalkan WPU antara lain (1) kurangnya fasilitas kehidupan (sosial, ekonomi); (2) kurang terjaminnya keamanan; (3) rendahnya penghasilan; (4) rendahnya *prestige*; (5) rendahnya aksesibilitas; (6) rendahnya/langkanya kesempatan kerja dan; (7) jauhnya dari tempat kerja. Masing-masing kota dan WPU mempunyai kondisi lingkungan yang berbeda sehingga variasi kombinasi antara kekuatan-kekuatan pendorong pun juga selalu mewarnai gerakan sentripetal yang ada (Hadi Sabari Yunus, 2008 : 67).

Macam-macam kekuatan penarik gerakan sentripetal yang muncul mempunyai kemiripan dengan kekuatan pendorong, namun dengan predikat yang berbeda. Kekuatan pendorong berkonotasi dan bersifat *disinsentif* sedangkan kekuatan penarik berkonotasi dan bersifat *insentif*. Dengan demikian beberapa kekuatan penarik dapat disebutkan antara lain (1) banyaknya fasilitas kehidupan (sosial, ekonomi); (2) lebih terjaminnya keamanan; (3) tingginya penghasilan; (4) tingginya *prestige*; (5) tingginya aksesibilitas; (6) banyaknya kesempatan kerja dan; (7) dekatnya dari tempat kerja (Hadi Sabari Yunus, 2008 : 69-70).

Semoga !!!

## BAB XXXI

### PERMUKIMAN KUMUH/LIAR : POTRET BURAM PENATAAN PEMUKIMAN

"Kota adalah suatu pemukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih besar daripada kepadatan wilayah nasional, dengan struktur matapencaharian non agraris dan tata guna yang beraneka, serta dengan pergedungan yang berdirinya berdekatan"  
(Grunfeld *dalam* N. Daldjoeni, 1997 : 46).

Dalam seluk beluk kehidupan, nenek moyang kita telah memberi petunjuk bahwa orang yang dinilai berhasil adalah yang memiliki lima hal : *wisma* (rumah), *wanita* (isteri), *turangga* (kendaraan), *kukila* (hiburan), *cunga* (senjata).

Kota itu adalah suatu pemusatan spasial dari tempat tinggal dan tempat kerja manusia yang kegiatan umumnya di sektor ekonomi sekunder dan tersier, dengan pembagian kerja ke dalam dan arus lalu lintas yang beraneka, antara bagian-bagiannya dan pusatnya, yang pertumbuhannya sebagian besar disebabkan oleh bertambahnya kaum pendatang yang mampu melayani kebutuhan-kebutuhan barang serta jasa bagi wilayah yang jauh letaknya (Hofmeister *dalam* N. Daldjoeni, 1997 : 25).

Mulyono Sadyohutomo (2008 : 3) menjelaskan pengertian kota adalah suatu daerah terbangun yang didominasi jenis penggunaan tanah nonpertanian dengan jumlah penduduk dan intensitas penggunaan ruang yang cukup tinggi.

Kota sesuai dengan definisinya tersebut merupakan konsentrasi penduduk, karenanya pemukiman (papan) adalah merupakan kebutuhan yang sangat penting di samping sandang dan pangan.

Permukiman merupakan suatu kelompok rumah hunian pada suatu areal atau wilayah beserta prasarana yang ada di dalamnya. Bentuk permukiman dapat berupa kelompok rumah, kampung, atau wilayah permukiman yang luas (Mulyono Sadyohutomo, 2008 : 134). Perumahan (*housing*) berarti kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Dalam UU RI Nomor 4/1992 tentang Perumahan dan Pemukiman Pasal 1, Butir 1 dinyatakan bahwa Rumah atau Perumahan selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan manusia untuk berlindung dari gangguan iklim dan gangguan makhluk hidup lainnya, merupakan pula tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat, maka penataan ruang dan kelengkapan prasarana dan sarana lingkungan dan lainnya, dimaksudkan agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Kenapa dengan permukiman atau perumahan? Beberapa hal yang merupakan penyebab timbulnya permasalahan perumahan di kota. *Pertama*, tingginya pertumbuhan penduduk, baik karena kelahiran maupun karena pendatang (migrasi) yang berakibat pada meningkatnya tuntutan akan kebutuhan perumahan, sementara itu kebanyakan pemerintahan kota tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi tingginya tuntutan tersebut, (2) cadangan lahan yang tersisa di bagian

dalam kewenangan kota, semakin terbatas, dan (3) banyak pendatang ke kota dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang rendah.

Pemukiman pada garis besarnya terdiri dari berbagai komponen yaitu : *pertama*, lahan atau tanah yang diperuntukkan untuk pemukiman itu di mana kondisi tanah akan mempengaruhi harga dari satuan rumah yang dibangun atas lahan itu. Misalnya apabila tanah yang sangat lembek atau merupakan lembah akan memerlukan pekerjaan perbaikan tanah ataupun konstruksi fundasi yang mahal. Yang *kedua*, ialah prasarana pemukiman yaitu jalan lokal, saluran drainase, saluran air kotor, saluran air bersih serta jaringan listrik dan telepon, yang semuanya juga turut menentukan kualitas pemukiman yang dibangun. Dan komponen yang *ketiga*, yaitu perumahan (tempat tinggal) yang dibangun. Suatu pemukiman akan menjadi ideal apabila telah memiliki komponen yang *keempat*, yaitu fasilitas umum dan fasilitas sosial (kadang disebut fasilitas kota), yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, lapangan bermain dan lain-lain dalam lingkungan pemukiman itu (Budi D. Sinulingga, 1999 : 186).

### **PERSYARATAN SUATU PEMUKIMAN**

Siapapun mengharapkan adanya pemukiman yang ideal, dan juga siapapun tidak memimpikan adanya pemukiman yang semrawut, liar, kumuh, atau tidak tertata. Untuk menciptakan suatu lingkungan pemukiman yang baik, maka diperlukan infrastruktur pemukiman dan fasilitas umum pemukiman. Infrastruktur pemukiman dimaksudkan ialah : jalan lokal, saluran drainase, pengadaan air bersih, pembuangan air kotor, listrik dan telepon. Sedangkan fasilitas umum atau kadang-kadang disebut juga fasilitas umum dan fasilitas sosial pemukiman adalah : fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbelanjaan dan pasar; fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan kebudayaan, fasilitas olah raga dan lapangan terbuka (Budi D. Sinulingga, 1999 : 225).

Sir Ebenezer Howard (Johara T. Jayadinata, 1999 : 218), mengemukakan bahwa prinsip dalam perkotaan adalah “Perumahan dalam pemukiman usahakan agar kompak (rapat), sediakan ruang terbuka (taman, dsb), pisahkan kawasan tempat tinggal dari kawasan industri tetapi tidak dari kawasan perdagangan, bangun perumahan yang dapat dibayar/dibiayai penduduk, sediakan kesempatan kerja dan buat rencana yang lentur terhadap kebutuhan penduduk. Jangan berhenti membuat perbaikan. Kalau dunia berubah, kita harus ikut berubah.

Suatu pemukiman yang baik menurut Budi D. Sinulingga (1999 : 187-189) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : (a) Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik, yang umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya; (b) Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan; (c) Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun hujan yang lebat sekalipun; (d) Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah; (e) Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor tinja, yang dapat dibuat dengan sistem individual yaitu tanki septik dan lapangan rembesan, ataupun tanki septik komunal; (f) Pemukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan pemukiman tetap nyaman; (g) Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, lapangan

atau taman, tempat beribadat, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala besarnya pemukiman itu; dan (h) Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon.

Fasilitas kesehatan, misal : perlu ada Puskesmas Pembantu, Puskesmas, praktik dokter, rumah bersalin, apotek, dan lain-lain. Fasilitas perbelanjaan dan niaga, misal : perlu ada warung, pertokoan, pusat perbelanjaan lingkungan, pusat perbelanjaan dan niaga kecamatan. Fasilitas pelayanan umum, misal : perlu ada fasilitas rekreasi dan taman bermain, olahraga dan lapangan terbuka, tempat parkir kendaraan, fasilitas gedung untuk kegiatan pesta/keramaian, hingga yang paling sederhana yakni tempat menjemur pakaian.

Untuk menangani masalah perumahan yang sehat di kota menurut Khairuddin (2000 : 219) biasanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : (1) Dengan mengembangkan daerah pemukiman baru, yaitu dengan membangun rumah-rumah sesuai dengan kebutuhan penduduk; dan (2) Dengan memperbaiki lingkungan perumahan yang sudah ada sehingga memenuhi persyaratan untuk kehidupan yang layak.

Lanjut Khairuddin, cara yang pertama saat ini banyak dikembangkan di daerah-daerah perkotaan untuk membantu penduduk yang ingin memiliki rumah sederhana, tanpa harus membeli secara lunas. Pemilikan ini dapat dilakukan dengan kredit, yang dikenal dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Cara yang kedua, lebih dititikberatkan pada renovasi pada rumah-rumah yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk didiami, atau dilihat dari kualitas lingkungannya. Program seperti ini, di Indonesia, dikenal dengan program perbaikan kampung (*Kampung Improvement Program*) (Sujarto, 1977 : 26). Program perbaikan kampung ini menyangkut suatu pemikiran kualitas lingkungan pemukiman secara luas yang menyangkut baik perbaikan sosial ekonomi, maupun fisik. Perbaikan lingkungan perumahan dan fisik rumah ini termasuk dalam suatu usaha *urban renewal* (Sukirno, 1985 : 168) yang mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut : (1) *Usaha rehabilitasi*, yaitu mempertinggi standar bangunan yang tidak memenuhi syarat hingga mencapai syarat yang ditentukan; (2) *Usaha konservasi*, yaitu mengadakan usaha memperbaiki daerah sekitar dari bangunan yang direhabilitasi; dan (3) *Pembangunan kembali*, yaitu menghancurkan bangunan yang lama dan menciptakan bangunan yang baru di tempat yang sama.

### **PERKAMPUNGAN KUMPUH**

Sebelum dibahas permukiman kumuh, ada istilah yang mirip-mirip artinya yaitu permukiman liar. Ada dua tipe permukiman liar kota : *pertama*, permukiman liar yang berada pada “*kepemilikan dan keperuntukan lahan ilegal*”; dan *kedua*, permukiman liar yang berada pada “*lahan dengan kepemilikan legal namun keperuntukan ilegal*.”

Perkampungan kawasan kumuh merupakan bagian dari kota yang kurang teratur, jorok dan pada umumnya dihuni oleh penduduk kota yang berpendapatan rendah.

Bintarto (Khairuddin, 2000 : 218) mencirikan daerah *slum* (kumuh) ini sebagai berikut : (1) Daerah ini merupakan permukiman yang didiami oleh warga kota yang gagal dalam bidang ekonomi; (2) Daerah ini merupakan daerah dengan lingkungan yang tidak sehat; (3) Daerah ini merupakan daerah yang banyak didiami oleh banyak penganggur; (4) Penduduk di daerah ini emosinya tidak stabil; dan (5) Penduduk di



daerah ini dihindangi oleh kebiasaan berjudi dan masih banyak unsur-unsur lain yang bersifat negatif.

Berdasarkan pengalaman empiris negara-negara di dunia, ada tiga macam proses terjadinya permukiman kumuh, yaitu (1) densifikasi yang tidak terkendali (*uncontrolled densification*), (2) proses penuaan bangunan (*ageing process*), dan (3) proses inundasi (*inundation process*) (Drakakis-Smith, 1980; Hadi Sabari Yunus, 2008).

Mulyono Sadyohutomo (2008 : 134-135) mengklasifikasikan sebab-sebab munculnya permukiman kumuh sebagai berikut : (1) Pertumbuhan kota yang tinggi, tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan yang cukup; dan (2) Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman baru.

Ada beberapa argumen yang dikemukakan mengapa sikap negara-negara tertentu tidak mengambil tindakan apapun terhadap merebaknya permukiman kumuh di kota. *Pertama*, berkaitan dengan anggapan bahwa munculnya permasalahan permukiman liar di kota merupakan akibat membanjirnya migran dari daerah perdesaan yang tidak mempunyai bekal yang memadai untuk masuk ke dalam sistem kehidupan perkotaan. *Kedua*, kelangkaan data tentang permukiman kumuh. *Ketiga*, kurangnya pengetahuan berkenaan dengan cara mengatasi permasalahan permukiman kumuh yang dimiliki oleh para birokrat yang sebenarnya membidangi masalah perumahan. *Keempat*, terjadinya kekacauan politik. *Kelima*, kesemrawutan administrasi. *Keenam*, kekurangan dana khusus untuk menangani permukiman kumuh.

Dampak transformasi spasial terhadap lahan permukiman dapat diamati dalam empat hal, yaitu (a) penambahan luas lahan permukiman, (b) pemadatan bangunan rumah mukim, (c) kecenderungan segregasi rumah mukim, dan (d) merebaknya permukiman liar (Mangin, 1968; MacEwan, 1972; Ross, 1973; Davies dan Blood, 1973; Vaughan dan Feindt, 1973; Feldman, 1975; Drakakis-Smith dan Fischer, 1975; Krausse, 1978; Drakakis-Smith, 1980).

Gejala yang telah disebutkan tersebut sangat erat kaitannya dengan gejala pertambahan jumlah penduduk kota. Seperti diketahui bahwa bagian kota, khususnya yang terletak dekat dengan lahan perkotaan terbangun merupakan sasaran pendatang-pendatang baru untuk bertempat tinggal, baik pendatang dari bagian dalam kota (*sentrifugal*) maupun pendatang dari bagian yang lebih jauh dari itu. Makin dekat dengan lahan terbangun, makin banyak jumlah pendatang. Bagi migran yang berasal dari bagian dalam kota, wilayah pinggir kota merupakan daerah yang sangat menarik untuk bertempat tinggal, karena menawarkan tingkat kenyamanan yang jauh lebih tinggi ketimbang suasana yang ada di bagian dalam kota. Bagian wilayah pinggir kota menawarkan atribut suasana kedesaan baik dari segi lingkungan alami (*natural environment*) maupun lingkungan budayawi (*cultural environment*) termasuk di dalamnya kondisi sosial kemasyarakatannya. Beberapa faktor penarik wilayah pinggir kota bagi migran dari dalam kota yang dapat dikemukakan antara lain (1) keinginan memperoleh *privacy* yang terjamin, (2) keinginan untuk menikmati suasana alami dan kebebasan membangun, (3) keinginan untuk menikmati keleluasan melaksanakan kegiatan, (4) keinginan untuk memperoleh suasana yang kondusif untuk memperbesar anak-anak, (5) keinginan untuk memperoleh harapan baru

berkegiatan ekonomi (Colby, 1959; Turner, 1972; Bauer dan Roux, 1976; Russwurm dan Preston, 1980 *dalam* Hadi Sabari Yunus, 2008 : 242).

Sementara itu beberapa faktor penarik warga kota bagi migran dari luar kota sangat terkait dengan atribut kekotaan dan beberapa di antaranya yang dapat disebutkan adalah (1) keinginan untuk memperoleh lokasi tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja, (2) keinginan untuk memperoleh peluang kerja yang lebih besar, (3) keinginan untuk menikmati fasilitas kehidupan dan kegiatan yang lebih lengkap, (4) keinginan untuk memperoleh lokasi tempat tinggal yang mempunyai aksesibilitas tinggi, (5) keinginan untuk memperoleh lokasi yang lebih *prestisius/lebih bermartabat*.

### **PROGRAM PERBAIKAN KAMPUNG**

Pada awal dimulainya pembangunan nasional yaitu Pelita I, maka 60-80% dari warga kota terutama kota besar tinggal dalam lingkungan yang tidak ideal termasuk kampung-kampung kumuh. Oleh karena sebagian besar dari penduduk kota tinggal pada kampung-kampung ini, maka program perbaikan kampung ini memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh.

Budi D. Sinulingga (1999 : 212-213) membeberkan beberapa ciri perkampungan kumuh sebagai berikut : (a) Penduduknya sangat padat antara 250–400 jiwa/ha. Pendapat para ahli perkotaan (MMUDP, 90) menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah mencapai 80 jiwa/ha, maka akan timbul masalah akibat kepadatan ini, antara perumahan yang dibangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan fisiologis, psikologis dan perlindungan terhadap penularan penyakit. (b) Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena sempitnya, kadang-kadang jalan ini sudah tersembunyi di balik atap-atap rumah yang telah bersinggungan satu sama lain. Di samping sempit, jalan-jalan ini juga sering sekali belum dikeraskan, hanya berupa jalan tanah. (c) Fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan malahan biasa terdapat jalan-jalan tanpa fasilitas drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air. (d) Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Ada di antaranya yang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan rumah, ataupun ada juga yang membuangnya ke sungai yang terdekat. Sebagian dari penghuni membuat WC cubluk tetapi karena lahan sempit, terpaksa harus berdekatan dengan sumur dangkal yang dimanfaatkan sebagai sumber air minum, sehingga kemungkinan terjadi pencemaran air sumur dangkal ini sangat besar sekali. (e) Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan. (f) Tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umumnya tidak permanen dan malahan banyak yang darurat. (g) Kondisi a sampai f membuat kawasan ini sangat rawan terhadap penularan penyakit. (h) Pemilikan hak terhadap lahan sering tidak legal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa.

Program perbaikan kampung pertama sekali diprogramkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1930 dengan nama "*Kampung Verbetering*" dengan cara memperbaiki prasarana maupun sarana lingkungan kampung, tetapi karena di waktu itu terjadi perang dunia kedua, sehingga usaha ini terhenti. Setelah zaman

kemerdekaan Pemerintah Indonesia belum sempat memikirkan perbaikan kampung ini karena masalah pembangunan ekonomi dan politik lebih diutamakan.

Perbaikan kampung pertama yang termasuk berhasil dilakukan di Jakarta yang terkenal dengan “Proyek Husni Thamrin” dimulai tahun 1969. Oleh karena sukses perbaikan kampung ini, maka ada perhatian dari badan keuangan dunia, untuk membantu proyek ini. Bank Dunia memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Kota Madya Surabaya untuk program perbaikan kampung tahun 1974-1979. Selanjutnya proyek perbaikan kampung ini diperluas untuk kota-kota lain seperti Bandung dan Medan, dana pembangunannya bukan saja oleh Bank Dunia melainkan dari Bank Pembangunan Asia.

Program perbaikan kampung ini dinilai sangat berhasil karena dapat meningkatkan kualitas fisik lingkungan bersamaan dengan meningkatnya derajat kesehatan mereka. Beberapa kegiatan dari program perbaikan kampung ini menurut Budi D. Sinulingga (1999 : 213) yaitu di antara : (a) Melebarkan jalan-jalan yang sempit, ataupun sekurang-kurangnya memperkeras gang-gang yang selama ini kondisinya becek. (b) Membangun parit-parit lingkungan untuk mencegah terjadinya genangan air waktu musim hujan. (c) Menyediakan fasilitas penyediaan air bersih berupa pet umum ataupun kalau memungkinkan adalah pengadaan bangunan MCK (Mandi, Cuci, Kakus). (d) Menyediakan sarana pembuangan sampah berupa kereta dorong dan perlengkapan lainnya.

Kekurangan program perbaikan kampung, pada umumnya perbaikan kampung ini tidak memperbaiki tata letak bangunan, hanyalah meningkatkan kondisi yang ada agar lebih higienis. Oleh karena itu ada juga yang tidak setuju dengan program ini karena kawasan yang ada tetap tidak akan sesuai dengan standar rencana kota dan mereka menyatakan bahwa program ini merupakan suatu kawasan yang tidak teratur dan tidak akan pernah lagi menjadi teratur. Namun untuk jangka menengah program ini memang sudah banyak memberi manfaat walaupun untuk jangka panjang harus dicari jalan pemecahannya berupa program peremajaan kota (*urban renewal*).

### ***IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN***

Tumbuh suburnya pemukiman liar dan pemukiman yang tidak tertata akibatnya longgarnya kontrol pemerintah terutama kaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Secara khusus tujuan IMB adalah : (1) untuk mengatur perencanaan dan pelaksanaan pendirian bangunan sesuai dengan persyaratan teknis yang benar dan baik; (2) untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan teratur; (3) untuk mengatur keserasian pelaksanaan pendirian bangunan terhadap perkembangan jalur jalan; (4) untuk mengatur peruntukan wilayah sesuai dengan pola perkembangan dan

*master plan* tata ruang dan (5) untuk memberikan kepastian hukum atas suatu bangunan kepada pemiliknya (Hari Sabari Yunus, 2008 : 413-414).

Dalam mendirikan bangunan dimaksudkan adalah mendirikan, memperbaiki, memperluas, mengubah atau membongkar sesuatu bangunan atau bagian daripadanya termasuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan pada tanah bangunan.

Terdapat sejumlah ketentuan dan tatalaksana perizinan atau langkah-langkah perizinan, yaitu : (1) Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (SPIMB) harus dilampiri dengan : izin yang dibutuhkan (izin lokasi dan izin-izin lain yang berhubungan dengan hal tersebut) bagi bangunan yang menggunakan fasilitas penanaman modal; surat keterangan tentang pemilikan/tanahnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/sertifikatnya; surat kuasa yang syah, apabila pemohon diwakili; gambar/desain dan RAB Bangunan yang disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya; khusus untuk bangunan bertingkat dilengkapi dengan perhitungan kekuatan konstruksi. (2) Pada gambar yang dimaksud harus dicantumkan nama/perencana, dan/atau konstruksi bangunan; dan (3) Dalam hal-hal tertentu Bupati/Walikota dapat meminta surat-surat keterangan lainnya yang dianggap perlu.

Dalam pengurusan dan pembuatan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terdapat beberapa proses yang perlu dilewati dan proses dimaksud, yaitu : (1) Pemohon mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syarat; (2) Syarat-syarat tersebut diperiksa/diverifikasi oleh team Izin Mendirikan Bangunan Dinas Kimpraswil; (3) Apabila memenuhi syarat, maka permohonan tersebut akan diproses sampai terbit sertifikat surat Uzin Mendirikan Bangunan.

Sejumlah syarat-syarat pengurusan surat Izin Mendirikan Bangunan dimaksud, yaitu : (1) Foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku; (2) Foto copy tanda lunas pajak bumi dan bangunan tahun terakhir; (3) Foto copy sertifikat tanah/keterangan pemilikan tanah yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan; dan (4) Foto copy gambar denah bangunan.

### **PEREMAJAHAN KOTA**

Berbeda dengan program perbaikan kampung yang mempertahankan tata letak suatu kawasan apa adanya, maka program peremajaan kota adalah menghilangkan habis suatu kawasan kumuh dan kemudian membangun kembali dengan yang baru dengan tata lingkungan yang baru yang akan disesuaikan dengan standar perencanaan kota.

Peremajaan kota (*urban renewal*) bertujuan untuk mengubah citra daerah-daerah yang dianggap kumuh menjadi daerah-daerah yang tidak kumuh lagi. Sasaran program *urban renewal* dengan maksud : (1) untuk memperbaiki atau mengubah sama sekali lingkungan permukiman yang kumuh menjadi permukiman, dan (2) untuk membangun kompleks kegiatan baik ekonomi dan perkantoran.

Pada awalnya program peremajaan kota dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dengan sekarang ini, yaitu tanpa memperhatikan akibat yang akan terjadi pada penghuni kawasan setempat. Penghuni kawasan ini diberi ganti rugi dan selanjutnya terserah mereka bagaimana memanfaatkan uangnya. Pada areal bekas kawasan kumuh ini dibangun suatu kawasan pemukiman mewah yang mendatangkan untung seperti kawasan pemukiman Cempaka Putih Jakarta.

Pendekatan seperti itu menurut Budi D. Sinulingga (1999 : 214-215) dianggap kurang tepat untuk diterapkan sekarang ini karena : (a) Dapat terjadi bahwa penduduk eks kawasan kumuh menjadi lebih melarat karena tidak dapat mengelola uang ganti rugi dengan baik. Uang ini sering dipakai untuk membeli barang-barang konsumtif, sehingga mereka dari mempunyai rumah walaupun kumuh menjadi tidak mempunyai rumah lagi. (b) Penduduk dari eks kawasan kumuh ini akan mencari pemukiman baru dan akan memilih daerah kumuh juga, karena relatif lebih murah. Oleh karena itu program ini tidak akan menurunkan persentase penduduk yang tinggal di kawasan kumuh, hanya memberi kenyamanan pada sekelompok orang yang telah menempati kawasan eks kumuh yang telah ditinggalkan menjadi kawasan mewah. (c) Peremajaan seperti ini menimbulkan kesan telah terjadi penggusuran kelompok masyarakat miskin oleh masyarakat kaya.

Oleh karena itu diadakan pendekatan-pendekatan baru yaitu dengan membangun tanpa menggusur dan ketentuan ini diatur dalam Inpres No. 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang terletak di atas tanah negara, yang pada prinsipnya mengatur pembangunan kawasan kumuh kembali, dan tetap diberikan kepada orang-orang yang tadinya bermukim di sana.

Pada prinsipnya metode ini menurut Budi D. Sinulingga (1999 : 215) sebagai berikut : (a) Seluruh penduduk pada kawasan kumuh ditampung kembali di kawasan semula, dengan cara membangun rumah susun untuk mengurangi kepadatan kawasan. (b) Karena penduduk pada kawasan kumuh itu biasanya berpendapatan rendah dan tidak akan sanggup membayar biaya pembangunan, maka harus diadakan prinsip subsidi, yang artinya tidak semua biaya pembangunan dibebankan kepada mereka. (c) Sebagian dari tanah eks kawasan kumuh akan diberikan kepada pihak swasta untuk membangun bangunan komersial, dan hasilnya digunakan untuk dana subsidi untuk masyarakat dengan penghasilan rendah tadi. (d) Oleh karena biasanya dana dari tanah sisa itu juga tidak cukup untuk subsidi maka pemerintah diharapkan untuk turun tangan membangun prasarana dan sarana.

### ***RUMAH SUSUN***

Sadono Sukirno (Khairuddin, 2000 : 219) mengomentari begini : “Masalah yang paling serius dalam menyediakan persediaan perumahan yang baru untuk memenuhi keperluan adalah masalah perumahan bagi golongan masyarakat yang berpendapatan rendah. Di sektor ini, keperluan perumahan jauh melebihi jumlah rumah yang tersedia dan perkembangan keperluannya setiap tahun melebihi kesanggupan daerah urban untuk memenuhinya.”

Nah, untuk mengantisipasi permasalahan perumahan rakyat berpenghasilan rendah tersebut, maka dibangunlah rumah susun. Pengertian rumah susun berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1993 yaitu sebagai bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bangunan-bangunan yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal, merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki secara terpisah terutama tempat-tempat hunian yang dilengkapi dengan bangunan bersama dan tanah bersama.

Bangunan blok rumah susun adalah alternatif yang dipilih dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan namun mampu menciptakan perumahan yang memenuhi kriteria

tertib lingkungan, tertib bangunan, tertib hukum, tertib administrasi, dan mampu merumahkan banyak orang.

Untuk dekade 90-an, tumbuh pula gejala baru yaitu rumah susun mewah (*condominium*), yaitu suatu bangunan bertingkat banyak yang mewah, lengkap dengan fasilitasnya dibangun untuk para eksekutif yang tujuannya agar para eksekutif ini karena situasi pekerjaan menghendaki agar tetap tinggal di pusat kota, sedangkan lahan di pusat kota tidak ada lagi sehingga memerlukan pembangunan vertikal.

### **TIPOLOGI PERUMAHAN**

Ada beberapa macam atau tipologi perumahan. Budi D. Sinulingga (2000 : 203-206) membaginya ke dalam 7 (tujuh) tipologi, di antaranya : (a) Rumah Tunggal (*Detached House*)—rumah yang berdiri sendiri pada persilnya dan terpisah dari rumah di sebelahnya. Rumah-rumah seperti ini pada umumnya adalah tipe besar dengan luas persil di atas 600 m<sup>2</sup>, dengan lebar persil minimum 15 m. (b) Rumah Koppel (*Semi Detached House*)—rumah yang umumnya berada pada 1 (satu) persil, terdiri dari 1 (satu) bangunan dengan 2 (dua) unit rumah tinggal, di mana atapnya menjadi 1 (satu). Rumah-rumah seperti ini pada umumnya adalah rumah dengan persil menengah luas 200-600 m<sup>2</sup>, dengan lebar persil minimum 10 m. (c) Rumah Deret (*Row-House*)—suatu jenis hunian yang bangunan/unit rumahnya menempel satu dengan lainnya, yang pada umumnya berderet maksimal 6 (enam) unit, rumah dengan tipe seperti ini adalah rumah dengan tipe kecil dengan luas persil di bawah 200 m<sup>2</sup> dengan lebar persil minimum 6 m, sering juga tipe seperti ini dinamakan bangunan tertutup. (d) Rumah Tipe Moissonette—rumah tinggal yang terdiri dari 2 (dua) lantai, bisa berupa 1 (satu) unit tersendiri, bisa berderet dan dapat juga berada dalam suatu massa lebar, umumnya lantai satu untuk kegiatan umum (ruang tinggal, makan, keluarga dan dapur) dan lantai dua khusus untuk ruang tidur. Luas bangunan minimum seluas 40m<sup>2</sup> dan maksimum 70m<sup>2</sup> jumlah luas lantai atas dan bawah). Luas persil 45-165 m<sup>2</sup> kecuali untuk persil sudut dapat ditambah pada salah satu sisi yang sejajar dengan jalan sampai sesuai dengan ketentuan minimum lebar garis Sempadan Bangunan. (e) Apartemen—sebuah bangunan besar yang umumnya bertingkat banyak dan terdiri dari unit-unit hunian. (f) Rumah Inti—rumah yang hanya terdiri dari ruang-ruang pokok (tidak lengkap), yaitu : WC, kamar tidur, dapur dan satu ruang serba guna; yang permenagannya di kemudian hari dapat dilakukan penghuni sendiri dengan arahan dari pengelola. Luas minimum 12 m<sup>2</sup> dan dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi rumah sederhana lengkap dengan luas minimum 36 m<sup>2</sup>. (g) Ruko—ruko adalah singkatan dari rumah toko, yang sebenarnya merumahkan rumah deret (*row house*) yang terdiri dari minimum dua lantai di mana lantai bawah dipergunakan untuk kegiatan usaha sedang lantai di atasnya untuk tempat tinggal.

Semoga !!!

## BAB XXXII MEMANAJERIAL PUSPARAGAM KONFLIK DI KOTA

"Begitu banyak ragam konflik di kota, sejurus dengan ragam kepentingan warganya, baik pada dimensi sosial, ekonomi, kultural, dan politik."

Dari segi aktor atau elit yang terlibat, konflik dalam era otonomi daerah menurut Dwiyanto (2003 : 62) dapat dibedakan dalam enam jenis yaitu : konflik pemerintah daerah-masyarakat; konflik bupati/walikota-DPRD; konflik antar instansi; konflik antarwarga; konflik antardaerah; dan konflik perburuhan

Salah satu faktor pemicu konflik dalam kota yakni konflik pemanfaatan lahan. Konflik jenis ini menurut Hadi Sabari Yunus (2008 : 358) sangat banyak dan kompleks sifatnya. Berdasarkan jenisnya dapat dikategorikan menjadi 17 macam, yaitu : (a) konflik antar-individu; (2) konflik antar-kelompok masyarakat; (3) konflik antar individu dengan kelompok masyarakat; (4) konflik individu dengan institusi; (5) konflik antar kelompok masyarakat dengan institusi; (6) konflik antar-institusi; (7) konflik intra waktu sekarang; (8) konflik intra waktu yang akan datang; (9) konflik antar waktu sekarang dan waktu yang akan datang; (10) konflik intra ruang lokal; (11) konflik inter ruang lokal; (12) konflik intra ruang regional; (13) konflik inter ruang regional; (14) konflik ekonomi; (15) konflik sosial; (16) konflik politik; (17) konflik budaya.

### ***Pengertian Konflik***

Konflik pada hakikatnya merupakan suatu gejala sosial yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, dan oleh karenanya melekat pula di dalam kehidupan setiap bangsa.

Memperbincangkan konflik, minimal terdapat dua hal yang esensial yaitu adanya perbedaan, dan ketidaksesuaian. Perbedaan-perbedaan dan ketidaksesuaian dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, hasrat (keinginan), persepsi, nilai, maupun tujuan, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Atau dengan kata lain, konflik atau pertentangan dapat terjadi antara seseorang dengan seseorang, kelompok dengan kelompok, atau seseorang dengan kelompok.

Hanson *dalam* Hassan Shadily (1993 : 70) mendefinisikan konflik sebagai "suatu interaksi yang dimanifestasikan dalam ketidakcocokan pendapat atau adanya perbedaan sesuatu di antara dua kesatuan sosial yang terdiri dari individu-individu, kelompok atau organisasi."

Wexley dan Yukl (1992 : 29) mengemukakan, "konflik adalah suatu perselisihan atau perjuangan di antara dua pihak yang ditandai dengan menunjukkan permusuhan secara terbuka dan mengganggu dengan sengaja pencapaian tujuan pihak yang menjadi lawannya." Gangguan dapat meliputi usaha-usaha aktif untuk merintangi pencapaian tujuan seseorang atau penolakan secara pasif seperti : menolak untuk memberikan pengadaan bahan dan informasi yang diperlukan oleh pihak lain.

Sementara itu Hocker *dalam* Maurice Duverger (2000 : 121) mengartikan konflik sebagai “suatu perasaan yang bergolak sekurang-kurangnya di antara dua kepentingan kelompok, yang merasa adanya perbedaan tujuan, pembagian sumber daya dan rintangan dari kelompok lain dalam pencapaian tujuan bersama.”

Fink *dalam* Kartini Kartono (1994 : 133) mendefinisikan konflik sebagai berikut : “*Pertama* sebagai relasi-relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan, intress-intress yang eksklusif dan tidak bisa dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan dan struktur-struktur nilai yang berbeda. *Kedua*, interaksi yang antagonis mencakup : tingkah laku lahiriah yang tampak jelas "pasang kuda-kuda", mulai dari bentuk-bentuk perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamufase sampai bentuk perlawanan terbuka.”

Mengacu pada beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan dan ketidaksesuaian yang disebabkan adanya perbedaan pandangan, persepsi, nilai, dan tujuan. Konflik terjadi apabila dalam kenyataan menunjukkan salah satu dari berbagai ciri sebagai berikut : *pertama*, paling tidak ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling berlawanan; *kedua*, saling adanya pertentangan dalam mencapai tujuan, dan atau adanya suatu norma atau nilai-nilai yang saling berlawanan; *ketiga*, adanya interaksi yang ditandai dengan perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain untuk memperoleh kemenangan seperti : status, tanggungjawab, pemenuhan berbagai kebutuhan dan sebagainya; *keempat*, adanya tindakan yang saling berhadap-hadapan akibat pertentangan; dan *kelima*, adanya ketidakseimbangan akibat usaha masing-masing pihak yang berkaitan dengan kedudukan atau kewibawaan, harga diri, prestise, dan sebagainya.

#### **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK**

Jary D. dan Julia Jery *dalam* Tholkhah (2001 : 7) dikemukakan, “Secara sosiologis, “konflik” mengacu kepada perjuangan terselubung antar individu-individu atau kelompok dalam masyarakat. Atau antara negara-bangsa. Ia mungkin terjadi misalnya antara dua orang atau lebih, gerakan-gerakan sosial, kelompok-kelompok kepentingan, kelas, gender, organisasi partai politik dan etnik, ras atau perkumpulan keagamaan.”

Menurut DuBois dan Miley (1992 *dalam* Edi Suharto, 2005 : 225) sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, adanya diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta tiadanya pengahraaan terhadap keberagaman. Ketiga faktor tersebut sangat berkaitan dengan sikap-sikap dan perilaku masyarakat yang ditandai dengan akhiran “*ism*” : *racism*, *elitism*, *sexism*, *ageism*, dan *handicapism*.

*Racism* merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya; termasuk perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompok sosial lainnya. *Elitism* merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise. *Sexism* merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu memiliki kelebihan atas jenis kelamin lainnya. *Ageism* menunjuk pada sikap-sikap negatif



terhadap proses ketuaan. Sedangkan *handicapism* menunjuk pada prasangka atau sikap-sikap negatif terhadap orang yang memiliki kecacatan (tubuh, mental).

Faktor penyebab atau sumber konflik dalam masyarakat salah satu di antaranya adalah manusia dan perilakunya. Manusia dan perilakunya dikatakan sebagai salah satu sumber konflik, sebab manusia dengan latar belakang pendidikan, sifat-sifat pribadi, berbagai naluri (*instinct*), baik secara perseorangan maupun kelompok, tidak dapat melepaskan diri dari berbagai gejala kepentingan seperti : (a) berbagai atribut yang bertalian dengan pangkat dan kedudukan, (b) sistem nilai yang tidak sama di antara sesama bawahan maupun antar atasan dengan bawahan, (c) adanya bermacam-macam harapan (*expectations*), (d) gaya kepemimpinan, (e) berbagai sifat atau kepribadian, serta (f) semangat dan ambisi.

Wexley dan Yukl (1992 : 29) mengemukakan enam kategori penting dari kondisi-kondisi pemula (*antecedent conditions*) sebagai sumber konflik yaitu : “(1) persaingan terhadap sumber-sumber, (2) ketergantungan pekerjaan, (3) kekaburan bidang tugas, (4) perbedaan tujuan, (5) problem status, (6) rintangan komunikasi, dan (7) sifat-sifat individu.” Selanjutnya, pendapat senada sebagaimana dikemukakan Wahjosumidjo (1987 : 125),

Berbagai kemungkinan sebagai kondisi pemula (*antecedent conditions*), di antaranya : “(1) ketidak-puasan, (2) adanya tujuan dan berbagai sistem nilai yang berbeda-beda, (3) berbagai hambatan komunikasi, (4) manusia dan perilakunya, (5) struktur organisasi, dan (6) tugas pokok dan fungsi.”

Nasikun yang menyimpulkan dari beberapa hasil penelitian mengemukakan sebab terjadinya konflik sebagai berikut :

“(1) adanya kesalahpahaman (kegagalan komunikasi), (2) keadaan pribadi individu-individu yang saling berkonflik, (3) perbedaan nilai, pandangan, dan tujuan, (4) perbedaan standar penampilan (*performance*), (5) perbedaan-perbedaan yang berkenaan dengan cara, (6) hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban, (7) kurangnya kemampuan dalam hal-hal berkomunikasi, (8) hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan, (9) adanya frustrasi dan kejengkelan, (10) adanya kompetisi karena memperebutkan sumber yang terbatas, dan (11) tidak menyetujui butir-butir dalam peraturan dan kebijakan.” (Nasikun, 2000 : 78).

Dengan demikian, faktor-faktor penyebab timbulnya konflik bukan karena alasan yang konstan atau yang itu-itu saja atau hanya dilatarbelakangi hanya satu macam penyebab permanen, akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sifatnya situasional dan insidental.

### **SUMBER-SUMBER TIMBULNYA KONFLIK**

Konflik timbul apabila terdapat adanya ketidaksesuaian paham pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan atau terdapat adanya antagonisme-antagonisme emosional.

Ada dua sumber timbulnya konflik yaitu konflik-konflik dengan sumber yang bersifat substantif dan konflik-konflik dengan sumber yang bersifat emosional. Kedua sumber konflik tersebut, Winardi (1994 : 5) menjelaskannya sebagai berikut :

“Konflik-konflik substantif (*substantive conflicts*) meliputi ketidaksesuaian paham tentang hal-hal seperti misalnya : tujuan-tujuan alokasi sumber daya, distribusi imbalan-imbalan, kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur, serta

penugasan pekerjaan. Sedangkan konflik-konflik emosional (*emotional conflicts*) timbul karena perasaan-perasaan marah, ketidakpercayaan, ketidaksenangan, takut dan sikap menentang, maupun bentrokan-bentrokan kepribadian.” (Winardi, 1994 : 5).

Sesuatu konflik dapat terjadi karena masing-masing pihak atau salah satu pihak merasa dirugikan. Kerugian ini bukan hanya bersifat material, melainkan dapat juga bersifat non-material. Untuk dapat mencegah konflik pertama-tama kita harus mempelajari sumber-sumber atau sebab-sebab yang dapat menimbulkan konflik. Sumber-sumber atau sebab-sebab tersebut antara lain terpapar dengan gamblang sebagai berikut.

**a. Perbedaan pendapat**

Sesuatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, masing-masing pihak merasa dirinya yang paling benar. Bila perbedaan pendapat tersebut cukup tajam dapat menimbulkan rasa yang kurang enak, ketegangan dan sebagainya. Hal-hal seperti ini dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, ada pihak yang melarang seseorang untuk mendiskusikan sesuatu hal yang dianggap sangat sensitif misalnya persoalan agama dan politik.

**b. Salah paham**

Terjadinya kesalahpahaman merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik. Misalnya tindakan seseorang mungkin tujuannya baik, tetapi oleh pihak lain dianggap merugikan. Bagi yang merasa dirugikan timbul rasa tidak enak, kurang simpati, atau justru kebencian. Oleh karena itu, betullah apa yang dikemukakan suatu pepatah : “Berbuat baik pikir-pikir dahulu, berbuat jahat jangan sekali-kali.”

**c. Salah satu atau kedua pihak merasa dirugikan**

Perbuatan atau tindakan salah satu atau seseorang mungkin dianggap merugikan yang lain atau masing-masing merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Sudah tentu seseorang yang dirugikan merasa kurang enak, kurang simpati atau malahan benci. Perasaan-perasaan ini dapat menjurus ke arah konflik dengan segala akibatnya. Kerugian ini bukan hanya bersifat materi, tetapi dapat juga bersifat non-materi.

**d. Perasaan yang terlalu sensitif**

Tindakan atau perbuatan seseorang mungkin saja dianggap wajar, tetapi oleh pihak lain dapat saja dianggap merugikan. Jadi, kalau dilihat dari sudut hukum atau etika yang berlaku tindakan ini tidak termasuk perbuatan yang salah. Meskipun demikian, karena pihak lain terlalu sensitif perasaannya, hal ini tetap dianggap merugikan sehingga dapat menimbulkan konflik. Misalnya dalam suatu perusahaan ada orang yang dianggap ahli komputer. Kemudian ada temannya dari perusahaan yang sama memperdalam pengetahuan dan keterampilan tentang komputer dengan mengikuti kursus. Oleh ahli komputer dalam perusahaan itu dianggap menyainginya sehingga dapat menimbulkan konflik.

**JENIS-JENIS KONFLIK**

Jenis-jenis konflik pada dasarnya dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu : (a) jenis-jenis konflik dibedakan menurut bentuknya, dan (b) jenis-jenis konflik dibedakan berdasarkan pihak-pihak yang berkonflik.

Menurut Liputo, ditinjau dari bentuknya jenis konflik dapat dibedakan atas dua, yaitu : “(a) konflik nyata, yaitu konflik yang terjadi pada hal-hal yang bersifat nyata. Misalnya, kekurangan makan, gaji, yang tidak cukup, pembagian jatah yang tidak

adil, dan sebagainya, dan (b) konflik nilai (ideal) yaitu bentuk konflik yang timbul karena perbedaan pandangan, ideologi, agama/kepercayaan, warna kulit, bahasa dan ras. Konflik nilai sukar diselesaikan atau didamaikan karena menyangkut nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh seseorang atau kelompok.” (Liputo, 1988 : 65)

Di samping pendapat Liputo di atas, Walton dalam Winardi (2002 : 78) membedakan konflik atas dua macam, yaitu :

“*Pertama*, konflik-konflik substantif (*substantive conflict*), yang meliputi ketidaksesuaian paham tentang hal-hal : tujuan-tujuan, alokasi sumber-sumberdaya, distribusi imbalan-imbalan, kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur, serta penugasan pekerjaan. Kedua, konflik-konflik emosional (*emotional conflict*) timbul karena perasaan-perasaan marah, ketidakpercayaan, ketidaksenangan, takut dan sikap menentang, maupun bentrokan-bentrokan kepribadian.” (Walton dalam Winardi, 2002 : 78)

### **TEKNIK-TEKNIK MEMANAJERIAL KONFLIK**

Konflik dapat dihadapi dengan cara : bersikap tidak acuh terhadap konflik; menekan konflik; dan menyelesaikan konflik.

Sikap tidak acuh terhadap konflik dimaksudkan bahwa tidak adanya upaya langsung untuk menghadapi sebuah konflik yang telah termanifestasi. Dalam kondisi demikian, konflik dibiarkan berkembang menjadi sebuah kekuatan konstruktif atau sebuah kekuatan destruktif.

Kemudian, menekan (*suppression*) sebuah konflik yang terjadi menyebabkan menyusutnya dampak konflik yang negatif, tetapi ia tidak mengatasi ataupun meniadakan pokok-pokok penyebab timbulnya konflik tersebut. Alternatif menekan, hanya merupakan sebuah pemecahan semu (*surface solution*), yang menyebabkan kondisi-kondisi antaseden yang merupakan penyebab orisinal terjadinya konflik tetap ada.

Sedangkan alternatif penyelesaian konflik (*conflict resolution*) hanya terjadi, apabila alasan-alasan latar belakang terjadinya sesuatu konflik ditiadakan dan tidak disisakan kondisi-kondisi yang mengantung atau antagonisme-antagonisme untuk penyebab timbulnya lagi konflik pada masa mendatang.

Oleh karena itu, sebuah konflik harus diselesaikan, bukan ditekan apalagi hanya bersikap tidak acuh terhadap konflik.

Memanagerial konflik dimaksudkan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan individu ataupun kelompok untuk mencari solusi atau penyelesaian terhadap konflik.

Memanagerial atau mengelola konflik (dalam organisasi, misal) mempunyai dua tujuan, yaitu meminimumkan konflik yang merugikan dan memfungsionalkan konflik yang menguntungkan.

Mengacu pada pendapat Thoha (1995 : 21) bahwa : “teknik yang digunakan efektif bila dipahami penyebab timbulnya konflik, jenis konflik, intensitas konflik.” Oleh karena itulah tidak ada teknik pengendalian konflik terbaik yang dapat digunakan dalam setiap situasi. Seringnya terjadi konflik antar kelompok dan sukar mengendalikan jika sudah terjadi, maka akan lebih efektif dilakukan upaya pencegahan (*preventive*). Pengendalian konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Walaupun tidak ada teknik managerial konflik yang dapat dipakai dalam berbagai ragam situasi, akan tetapi secara umum konflik dapat dihadapi dengan cara : bersikap tidak acuh, menekan, atau menyelesaikannya. Sikap tidak acuh berarti tidak adanya

upaya langsung untuk menghadapi sebuah konflik yang telah termanifestasi. Dalam keadaan demikian, konflik dibiarkan berkembang menjadi sebuah kekuatan konstruktif atau sebuah kekuatan destruktif. Menekan sebuah konflik yang terjadi, menyebabkan menyusutnya dampak konflik yang negatif, tetapi tidak berusaha mengatasi, ataupun meniadakan pokok-pokok penyebab timbulnya konflik tersebut. Kalaupun ada pemecahan, sifatnya hanya pemecahan semu yang menyebabkan kondisi-kondisi antaseden yang merupakan penyebab orisinil terjadinya konflik tetap ada. Sedangkan penyelesaian konflik dengan mengabaikan latar belakang terjadinya konflik dan tidak diantisipasi kondisi-kondisi yang antagonis, akan menyebabkan timbulnya konflik di masa yang akan datang.

Selanjutnya, Blake dan Mouton, Walton dan Mckersie, serta Pruitt *dalam* Wexley dan Yukl (1992 : 69) mengatakan bahwa “banyak cara yang dapat ditempuh untuk mengendalikan konflik; tetapi reaksi paling utama yang sering digunakan oleh ilmuan perilaku adalah penarikan diri (*withdrawal*) dan taktik-taktik penghapusan/perdamaian merupakan usaha-usaha untuk menghindarkan suatu perselisihan atas perbenturan kepentingan atau nilai.” Sedangkan tanggapan-tanggapan lain seperti bujukan, paksaan, tawar-menawar (*bargaining*), serta pemecahan masalah bersama adalah bentuk-bentuk konfrontasi yang memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berbeda untuk penyelesaian suatu konflik.

Kemudian, Smith *dalam* Indrawijaya (1989 : 121) mengemukakan teknik-teknik pengelolaan konflik sebagai berikut :

“(1) menghindari konflik, dengan cara : mengabaikan konflik, menahan perasaan, atau pendirian, penghalusan, dan menempatkan orang-orang yang berpandangan hampir sama, (2) pencapaian tujuan pada tingkat yang lebih tinggi, (3) pemecahan masalah yang kreatif, dengan cara : menerima baik adanya perbedaan yang tinggi dalam organisasi, mendengarkan dengan disertai memahami dan bukannya menilai, mengakui dan menerima perasaan individu yang terlibat, menjernihkan hakikat konflik, menunjukkan siapa yang akan memutuskan tentang apa yang akan dibicarakan, menyarankan prosedur dan aturan main untuk menyelesaikan perbedaan, dan menciptakan sarana yang memadai untuk komunikasi antara pihak-pihak yang bertentangan, (4) kompromi dengan pihak ketiga, (5) jalur kekuasaan, (6) mengubah struktur organisasi, melalui : pemindahan atau pertukaran tempat tugas, meningkatkan pengelolaan terutama dalam fungsi koordinasi, memperlancar proses komunikasi antara bagian-bagian yang bertentangan, atau memisahkan satu sama lain pihak-pihak yang berkonflik.” (Smith *dalam* Indrawijaya, 1989 : 121).

Terkhusus dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dikemukakan Smith di atas, Wexley dan Yukl (1992 : 91) mengemukakan, “dalam upaya pengelolaan konflik dapat menggunakan campur tangan pihak ketiga bila pihak-pihak yang terlibat konflik tidak ingin berunding atau telah mencapai jalan buntu dalam perundingan, maka pihak ketiga dapat terlibat untuk membantu menyelesaikannya.” Tipe-tipe utama campur tangan pihak ketiga adalah : (1) Arbitrasi (*arbitration*) yaitu suatu prosedur di mana pihak ketiga mendengarkan kedua pihak yang berkonflik, dan bertindak sebagai seorang hakim dalam menentukan penyelesaian yang mengikat. Arbitrasi akan sangat efektif dalam menemukan penyelesaian yang adil jika ia memiliki informasi yang lengkap tentang permasalahan dan tidak semata-mata didasarkan pada argumentasi yang bias kedua pihak yang berkonflik. (2) Mediasi

(*mediation*), yaitu bahwa dalam menyelesaikan perselisihan ada pihak yang bertindak sebagai mediator. Seorang mediator tidak mempunyai wewenang langsung atas pihak-pihak yang berkonflik dan merekomendasinya tidak mengikat. (3) Konsultasi proses antar pihak (*inter-party process consultation*), yaitu suatu bentuk campur tangan pihak ketiga dengan tujuan mengembangkan hubungan antar dua pihak dan mengembangkan kapasitas mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik secara efektif di masa mendatang. Konsultan proses tidak memiliki kekuasaan menghakimi terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Begitu pula ia tidak menjembatani permasalahan-permasalahan yang bersifat substantif. Konsultan proses mengarahkan pihak-pihak yang terlibat ke arah saling pengertian serta menemukan pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.

Seirama dengan pendapat Wexley dan Yukl di atas, Baron dan Greenberg dalam Sarwono mengemukakan beberapa cara dalam upaya mengendalikan konflik, yaitu :

“(1) meminta bantuan pihak ketiga, sebagai mediator dan arbitrator, (2) menginduksi tujuan yang lebih tinggi. Dalam hal ini pimpinan dapat menginduksi kedua belah pihak yang berkonflik kepada pemusatan kerja untuk mencapai tujuan-tujuan, sehingga konflik di antara mereka dapat diperkecil, (3) meningkatkan intervensi, yang bertujuan untuk mencari bentuk penyelesaian yang dianggap tepat, dengan cara : meningkatkan atau menambah faktor-faktor penyebab konflik, memperluas masalah untuk memicu konflik, meningkatkan intensitas konflik, menimbulkan sikap-sikap yang dapat menimbulkan konflik, dan orang-orang yang terlibat konflik dapat menerima sikap masing-masing.” (Sarwono, 1999 : 89)

Selanjutnya Dubrin dalam Anonim mengklasifikasikan metode pengelolaan konflik dalam tiga bentuk yaitu :

“(1) metode tradisional, (2) pemecahan konflik melalui design organisasi, dan (3) penyelesaian konflik melalui konfrontasi. Ada empat cara yang dapat ditempuh melalui metode tradisional, yaitu (a) dengan meminta pertimbangan kepada atasan, (b) dengan melakukan dominasi terhadap pihak lain, (c) melakukan tawar-menawar terhadap pihak yang terlibat konflik, dan (d) *procastrinasi* yaitu dengan cara menunda-nunda pemecahannya. Pengelolaan konflik melalui design organisasi dapat dilakukan dengan pendekatan preventif, yaitu dengan cara : penyatuan arus kerja, adanya hubungan antar kelompok atau perantara, adanya pertukaran anggota yang terlibat konflik, serta pembentukan komite. Sedangkan penyelesaian konflik dengan pendekatan konfrontasi dibedakan ke dalam dua cara, yaitu : (a) *Organization confrontation meeting*, yang digunakan untuk penyelesaian konflik antar kelompok, dan (b) *Gentle confrontation*, yang digunakan untuk menyelesaikan konflik interpersonal.” (Anonim, 1995 : 71).

Merujuk pada beberapa teknik pengelolaan konflik seperti yang telah diuraikan sebelumnya, teknik manapun yang digunakan selalu diarahkan pada hasil yang memuaskan. Mengenai teknik dan hasil pengelolaan konflik, Gordon dalam Winardi (2002 : 72), membedakan tiga metode pengelolaan konflik yang dapat dirinci sebagai berikut :

1) Metode I, (metode menang-kalah) dengan ciri-ciri : (a) pengambilan keputusan sepihak, (b) pengambilan keputusan secara otoriter, (c) pengambilan keputusan berpusat pada pimpinan, (d) dominasi, (e) penggunaan hadiah;

- 2) Metode II, (metode kalah-kalah) yang ciri-cirinya : (a) pengabulan (mengabulkan keinginan orang lain), (b) menejemen lunak, (c) pengambilan keputusan yang berpusat pada bawahan, (d) kepemimpinan laizzer faire;
- 3) Metode III, metode tanpa ada yang kalah (menang-menang), metode ini mempunyai langkah-langkah yang sama dengan pemecahan masalah (problem solving) yaitu : (a) mengidentifikasi dan membatasi masalah, (b) menemukan alternatif pemecahan, (c) menilai alternatif pemecahan, (d) mengambil keputusan, (e) melaksanakan keputusan, (f) menilai pemecahan masalah.” (Gordon dalam Winardi, 2002 : 72).

Kemudian Luthans (1981 : 113) juga menganalisis hasil dari pengelolaan konflik menjadi : "Kalah-Kalah (*Lose-Lose*)", "Menang-Kalah (*Win-Lose*)", atau "Menang-Menang." Konflik dengan hasil kalah-kalah" terjadi apabila tak seorangpun di antara pihak yang terlibat mencapai keinginannya yang sebenarnya, dan alasan-alasan mengapa terjadinya konflik tidak mengalami perubahan. Sekalipun sebuah konflik seakan-akan terselesaikan atau memberi kesan lenyap untuk sementara waktu, ia mempunyai tendensi untuk muncul kembali pada masa mendatang. Hasil kalah-kalah biasanya terjadi apabila konflik dikelola dengan sikap menghindari, akomodasi, dan atau melalui kompromi. Akibatnya, tidak ada satu pihak pun yang mencapai keinginan sepenuhnya, dan diciptakan kondisi-kondisi antaseden untuk konflik-konflik yang mungkin muncul pada masa yang akan datang. Konflik dengan hasil "menang-kalah" terjadi apabila salah satu pihak mencapai apa yang diinginkannya dengan mengorbankan keinginan pihak lain mencapai apa yang diinginkannya dengan mengorbankan keinginan pihak lain. Hal tersebut mungkin disebabkan karena adanya persaingan, di mana orang mencapai kemenangan melalui kekuatan, keterampilan yang superior, atau karena unsur dominasi. Mengingat bahwa strategi-strategi menang-kalah juga tidak memecahkan akar konflik, kemungkinan pada masa yang akan datang konflik-konflik akan muncul lagi. Konflik dengan hasil "menang-menang", di atasi dengan jalan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik yang bersangkutan. Hal tersebut dapat tercapai apabila dilakukan konfrontasi persoalan-persoalan yang ada, dan digunakan cara pemecahan masalah untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan. Pendekatan ini bersifat positif karena berkaitan dengan perasaan pada pihak-pihak yang sedang berkonflik bahwasannya ada sesuatu hal yang salah, dan hal itu perlu mendapat perhatian. Kondisi menang-menang meniadakan alasan untuk melanjutkan atau menimbulkan kembali konflik yang ada, karena tidak ada hal yang dihindari ataupun ditekan. Semua persoalan diperbincangkan dan dibicarakan secara terbuka.

Sementara itu Indrawijaya (1989 : 129) mengemukakan garis besar strategi penanggulangan konflik sebagai berikut : “(1) pemecahan permasalahan, (2) perundingan atau musyawarah, (3) mencari lawan yang sama, (4) meminta pihak ketiga, (5) peningkatan interaksi dan komunikasi, (6) latihan kepekaan (*sensitivity training*), dan (7) koordinasi.”

William Ury dalam Mas Achmad Santosa (2000 : 3) membagi tiga pendekatan penyelesaian sengketa.

1. Pendekatan “*interest based*” (rekonsiliasi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa menuju suatu solusi yang diterima serta memuaskan pihak-pihak

tersebut. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam prosedur negosiasi (perundingan) maupun mediasi (penengahan). Teknik negosiasi atau mediasi *interest based* (Fisher dan Ury, 1991, Moore, 1996) merupakan teknik yang dikenal untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa untuk kemudian dikemas ke dalam suatu solusi yang bersifat *mutually acceptable*.

2. Pendekatan "*right based*" adalah pendekatan di mana penyelesaian konflik didasarkan pada suatu ketetapan tentang siapa pihak yang benar dan salah, pihak yang berhak dan yang tidak berhak. Pendekatan ini mengandalkan standar independen yang legitimate dan adil yang biasanya standar tersebut diformulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, *socially accepted standard of behavior* seperti *reciprocity*, *precedent*, *equality* ataupun *seniority*. Prosedur yang digunakan dalam pendekatan ini biasanya adalah adjudikasi (pengadilan dan arbitrase).
3. Pendekatan "*power based*", pendekatan yang menggunakan basis kekuatan (*power*) untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Tidak jarang pendekatan power ini bersifat memaksa, serangan fisik maupun menahan hak seseorang." (William Ury dalam Mas Achmad Santosa, 2000 : 3)

### **GAYA DALAM MEMANAJERIAL KONFLIK**

Setiap konflik yang terjadi diperlukan adanya pengendalian atau diperlukan upaya penyelesaian dengan mengikuti sebuah rangkaian pola yang mekanistik. Melalui mekanisme pengendalian konflik-konflik sosial yang efektif, maka konflik-konflik sosial di antara berbagai kelompok kepentingan justru akan menjadi kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial yang tidak akan mengenal akhir.

Teknik atau cara orang-orang menangani suatu konflik sangat dipengaruhi oleh efektivitas tindakannya dalam keadaan konflik. Bila seseorang harus mengambil pilihan-pilihan yang berguna tentang bagaimana harus bertindak dalam memanagerial konflik, maka penting baginya bahwa pertama-pertama dalam menangani konflik harus memperhatikan gaya manajerial yang dapat digunakan.

Kenneth Thomas dan Ralp Kilman (Anonim, 1995 : 44) telah "mengidentifikasi lima gaya yang umum dipakai orang-orang atau kelompok dalam menangani konflik."

Terapat dua dimensi yang mendasar pada masing-masing gaya, yaitu:

- a. Keasertipan (*assertiveness*). Yaitu sejauhmana seorang individu berusaha untuk memenuhi kepentingan sendiri, dan
- b. Kekooperatifan (*cooperativeness*). Yaitu sejauhmana seorang individu berusaha memenuhi kepentingan orang lain. Dalam kenyataannya, setiap gaya merupakan kombinasi dari kedua dimensi di atas, yang dapat dilukiskan seperti berikut :

#### **1. Gaya Kompetisi (*competition style*)**

Gaya ini ditandai oleh gaya asertip (*assertive*) dan tidak kooperative (*uncooperative*) yaitu mengejar kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain.

Mereka yang menggunakan gaya kompetitif berusaha mendapatkan kekuasaan dengan konfrontasi langsung, dengan mencoba memenangkan argumentasi atau pertengkaran tanpa penyesuaian terhadap tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan

orang lain. Kompetitif adalah merupakan gaya yang berorientasi kepada kekuasaan untuk memperoleh landasan atau bahkan untuk menang-pangkat atau kedudukan, persuasi, pengetahuan keahlian, atau sanksi-sanksi (kemampuan untuk menghukum atau menolak sesuatu).

Contoh yang paling ekstrim yaitu orang yang secara khas melihat konflik sebagai medan pertempuran, di mana kemenangan merupakan tujuan dan kepentingan-kepentingan orang lain tidak penting. Keagresifan demikian sering mengarah kepada rusaknya hubungan, ketegangan dan ketidakpercayaan.

Gaya kompetitif : dalam menangani konflik tidak selalu jelek. Kita dapat secara terang-terangan berkompetisi tanpa melukai perasaan orang lain atau tanpa merusak suatu hubungan kerja. Misalnya dalam mempertahankan satu azas yang penting; atau jika seseorang atau kelompok berada dalam keadaan kedudukan yang kurang berkuasa dan memerlukan perhatian pihak lainnya; atau jika diperlukan tindakan pengambilan keputusan yang cepat; atau jika satu keputusan yang tidak populer harus diambil.

## 2. Gaya Akomodasi (*acomodation style*)

Akomodasi adalah kebalikan dari kompetisi. Akomodasi adalah tidak asertif dan tidak kooperatif. Jika menggunakan gaya ini orang cenderung untuk mengenyampingkan kepentingan dirinya demi untuk memuaskan kepentingan orang lain. Akomodasi mengandung unsur pengorbanan diri. Akomodasi dapat berbentuk kemurahan hati tanpa pamrih, dapat menerima petunjuk orang lain atau mengikuti pandangan orang lain. Akomodasi paling berguna jika : permasalahannya lebih penting untuk pihak yang lain; jika kompetisi berkelanjutan, akan merusak kepentingan kita, atau dalam memupuk keharmonisan adalah hal yang sangat penting. Jika akomodasi digunakan berlebihan, seseorang dapat kehilangan pengaruh, kehormatan, atau perhatian terhadap ide-idenya. Pihak yang lainnya mengharapkan seorang akomodator untuk "menyerah".

## 3. Gaya Kollaborasi (*collaboration style*)

Apabila keasertipan yang tinggi diarahkan kepada pencapaian sasaran seseorang diimbangi dengan perhatian yang besar terhadap pihak-pihak lain, maka digunakan gaya kollaborasi. Cara ini menyangkut satu usaha untuk bekerja dengan orang lain dalam mencari satu penyelesaian yang sepenuhnya (atau hampir sepenuhnya) memuaskan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak. Hal ini berarti mendalami suatu issue untuk mencapai kepentingan-kepentingan kedua belah pihak dan kemudian menelaah pilihan-pilihan yang mungkin dapat memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kollaborasi ditandai oleh pernyataan : "jika saya berada dalam konflik dengan seseorang, saya mencoba untuk bekerja secara kreatif dengan mereka untuk menemukan pilihan-pilihan baru." Orang-orang yang percaya diri dalam penggunaan kollaborasi melihat ketidakcocokkan sebagai suatu kesempatan atau sebagai suatu jalan untuk memperoleh informasi baru yang akan mengarah ke ide-ide atau pemecahan-pemecahan yang lebih baik. Kollaborasi merupakan cara yang sangat disarankan untuk mengembangkan pemecahan masalah secara konsensus dan komitmen yang kuat terhadap pemecahan-pemecahan tersebut, karena tidak ada pihak yang merasa "menang" atau "kalah".



Akan tetapi, gaya kollaborasi menghendaki sekali banyak waktu dan energi, kollaborasi seringkali tidak masuk akal untuk memecahkan issue-issue yang kurang penting. Penggunaan gaya kollaborasi yang berlebihan kadang-kadang merupakan keinginan untuk mengurangi risiko, untuk menunda tindakan yang hampir merupakan suatu bentuk penghindaran.

#### 4. **Gaya Penghindaran (*avoiding style*)**

Sikap ini merupakan gaya yang tidak asertip dan tidak kooperatif, yaitu merupakan kebalikan dari gaya kollaborasi. Yang bersangkutan tidak secara langsung mengejar kepentingannya atau kepentingan orang lain. Penghindaran dapat berbentuk mengelakkan issue, menunda issue sampai "waktu yang lebih baik" atau semata-mata menjauhkan diri dari keadaan yang membahayakan." Penghindaran mungkin merupakan gaya yang cocok dalam situasi sebagai berikut :

- a. Apabila issuenya tidak begitu penting.
- b. Apabila anda berada pada satu kedudukan yang rendah wewenangnya dan mempunyai sedikit kesempatan untuk memuaskan kepentingan-kepentingan diri.
- c. Apabila anda merasa perlu untuk "mendinginkan" keadaan; atau mencari waktu untuk memperoleh lebih banyak informasi.

#### 5. **Gaya Kompromi (*compromise style*)**

Kompromi merupakan suatu strategi tengah antara keasertipan dan kekooperatifan. Pendekatan ini sebenarnya untuk menemukan pemecahan konflik yang dapat diterima dan untuk sebagian dapat memuaskan kedua belah pihak. Gaya ini ditandai dengan istilah "*splitting the different*" (memisahkan perbedaan) atau pernyataan : "anda harus memberi sedikit untuk mendapatkan sedikit."

Gaya kompromi berguna :

- a. Bila kedua belah pihak kira-kira sama kuatnya dan sama-sama sangat tertarik kepada sasaran yang konflik.
- b. Bila kedua belah pihak ingin mencapai penyelesaian sementara/paling praktis dalam keadaan mendesak.
- c. Bila kedua belah pihak ingin mendapatkan persetujuan yang paling praktis karena desakan waktu.

Masalah yang melekat pada kompromi adalah bahwa proses tawar-menawar dapat menjadi satu kebiasaan, hampir merupakan suatu permainan bagi sementara orang, yang berarti bahwa mereka tidak melihat kesempatan-kesempatan yang dapat lebih banyak memuaskan mereka.

Semoga !!!

### BAB XXXIII

## MENGAPA ETNIS CINA SELALU MENJADI KORBAN DALAM KERUSUHAN DI KOTA ?

"Prasangka, juga menjadi pemicu aksi kekerasan terhadap Etnis Cina. Kesulitan mendasar yang acapkali dijadikan pemicu (*trigger*) adalah pada seputar kecurigaan atas beberapa hal. *Pertama*, tidak mudahnya kaum migran keturunan Cina sekalipun sudah menjadi WNI keluar dari eksklusifitas hidup. Sehingga bagi masyarakat di sekitarnya seolah-olah tetap dianggap "orang asing." *Kedua*, terlampau jauh disparitas kepemilikan ekonomi, sehingga secara potensial selalu menyimpan rasa iri dan cemburu di kalangan warga pribumi. *Ketiga*, belum berhasilnya program pembauran dari tingkat bawah hingga kalangan atas. Bila dilihat dari segi kuantitas, baru sedikit warga keturunan Cina "bersedia" memihak dengan pribumi."

Aksi kekerasan majikan—"bos" yang berakhir dengan tewasnya seorang pembantu rumah tangga di Makassar beberapa saat lalu mendapat reaksi keras massa, dan di antara massa yang paling peduli itu berasal dari kampus—mahasiswa. Mengapa mendapat reaksi keras massa? Jawabnya, karena yang melakukannya adalah WNI Etnis Cina. Reaksi keras massa Mei ini tidak lebih bringas dibandingkan dengan tragedi kelabu medio September 1997 yang meluluh-lantakkan Kota Angingmamiri itu. Issu sebagai pemicunya nyaris bahkan sama : "Etnis Cina "menghina" pribumi Bugis-Makassar." Tragedi kelabu medio September 1997, misal, dipicu berita koran : "Orang Cina membunuh anak orang muslim"—kasus "Suku Agama dan Rasial". Pada saat itu, memang yang membunuh anak sematang wayang, buah hati pasangan dosen IAIN Alauddin Makassar yakni laki-laki kurang waras alias gila keturunan Cina. Kasus yang lagi hangat di Makassar sekarang, tidak jauh beda dengan tragedi kelabu Medio September 1997. Nah, pertanyaannya sekarang : "mengapa WNI Etnis Cina selalu menjadi sasaran akumulasi kemarahan dan mereka masih dianggap "orang lain" ?"

Hampir tiap kali terjadi gejolak sosial di negeri ini, seperti tragedi kelabu Medio September 1997 dan Mei 2006 di Makassar, Mei Kelabu di Jakarta 1998, musibah Bima, dan beberapa tragedi tidak terbilang lainnya dapat dipastikan WNI Etnis Cina selalu menjadi "korban."

Sebenarnya, penyebab munculnya aksi anti-Cina dominan dipicu oleh kecemburuan ekonomi ketimbang perasaan atau sentimen sosial. Hal ini didukung hasil penelitian atau pol pendapat Majalah Gatra dan Lembaga Ilmiah CPDS (Harian Surya, 18-3-1998) yang menyimpulkan, di kota besar di Indonesia kesenjangan ekonomi merupakan ancaman terbesar (54 %) bagi stabilitas nasional, menyusul masalah SARA (35 %), separatis (21 %) dan bahaya laten PKI (12 %). Kemudian, Ginandjar Kartasmita (Kompas, 8-1-1995), mengemukakan faktor yang paling dapat mengganggu stabilitas dan keutuhan bangsa, kini bukanlah masalah primordial, melainkan persoalan kesenjangan sosial ekonomi. Atau, pinjam pendapat I Niarsama

Windhu (1992 : vi), karena perbedaan dalam segi “ada” (*being*), “memiliki” (*having*) dan “kedudukan” dalam struktur (*structure*), ...”

Suparlan dalam artikelnya “*Siapa yang menjadi sasaran kerusuhan massa*”, dalam pencapaian kepentingan antar individu atau kelompok berpotensi menimbulkan pertentangan ada tiga. *Pertama*, perebutan sumber daya alat produksi dan akses ekonomi; *kedua*, benturan kepentingan kekuasaan politik dan ideologi; dan *ketiga*, perluasan batas identitas sosial budaya kelompok etnis tertentu (Berita Antropologi, No. 1/1980).

Kelompok masyarakat non-pribumi yang paling besar jumlahnya di negeri ini adalah etnis Cina. Mereka mempunyai kedudukan istimewa dan juga keunggulan sumber daya manusia dengan stereotipe rajin, ulet, kreatif, kerja keras, dan stereotipe fungsional lainnya.

David Cl. Chung dalam buku “*Sukses Bisnis Cina Perantauan*” (1995 : 38), mengemukakan, keberhasilan mereka karena faktor etos kerja yang menekankan pada keuletan dan kerajinan. Gambaran stereotipe tentang mereka adalah “pekerja yang tak pernah lelah”. Nilai kerja keras, ditanamkan pada anak sejak dini. Mereka bekerja keras untuk mendapatkan ganjaran materi, juga karena mempunyai orientasi kelompok. Ajaran Konfusius, mengajar mereka asas kekeluargaan mendorong untuk terciptanya keberadaan hubungan sesama etnis.

Etnis Cina memiliki etos kewiraswastaan yang tinggi. Itu didefinisikan sebagai suatu budaya yang menuntut seseorang untuk menginvestasikan sumberdayanya dalam jangka panjang, guna meningkatkan kesejahteraan materi dan jaminan bagi keluarga dekatnya. Sebuah sigi (macam poling pendapat) dilakukan Noper Abijono (Harun, Surya, 5-4-1997) lebih satu dekade lalu dan ditulis dengan judul “*Problema Kelompok Etnis dalam Jemaat GPIB Banda Aceh (Ditinjau dari Sudut Stereotipe Etnik)*” menunjukkan, stereotipe umum etnis Cina adalah materialistik, teliti, dan pelit. Sedangkan stereotipe khusus adalah ulet, rajin, tidak tahu balas budi, kurang patriot, tak dapat dipercaya, dan licik. Konklusi ini diambil dari penilaian responden yang bersuku Manado, Nias, Ambon, Jawa, Batak Karo, dan Batak Toba.

Orang Cina mempunyai semboyan dalam hidup “Tiada Hari Tanpa Kerja”. Orang tua Cina yang sudah jompo sekalipun selalu aktif bekerja walau hanya disesuaikan dengan kemampuannya seperti membuat amplop, menjaga toko, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak memerlukan tenaga fisik yang banyak.

WNI keturunan Cina di Indonesia memiliki peranan ekonomi sangat besar. Mereka menguasai lima puluh persen perekonomian Indonesia (senilai 100 miliar dollar AS, kurs sebelum krisis moneter), walaupun jumlah warga etnis Cina hanya empat persen dari jumlah penduduk Indonesia. Mereka juga telah menguasai sebanyak 72 persen perusahaan go publik berdasarkan kapitalisasi di pasar (Data : *Nomura Research Institute*) (Abdul Baqir Zein, 2000: 5).

Dalam urutan orang-orang kaya di Indonesia (berdasarkan pajak yang disetor) kelompok etnis Cina mendominasi urutan paling atas (Kompas, 3/2/1997). Berarti, peran dominatf etnis Cina secara kualitatif sangat besar di bidang ekonomi dan penguasaan sumber-sumber daya. Sebaliknya (dari perbedaan horizontal), etnis Cina hanya menduduki posisi sebagai kelompok minoritas (Burhanuddin, Harian Surya, 7/3/1997). Kesuksesan tersebut disebabkan mental berwiraswasta mereka yang tinggi.

Dalam “*Indonesian, s New Order*” mengisarkan angka sekitar 100 juta dolar aset konglomerat di Indonesia, 80 % dikuasai non-pribumi. Oriental ekonomis orang non-pribumi ini semakin terjadi ketika isu-isu sekitar “*Capitalist Flight*”, pendirian Toserba (Toko Serba ada), real estate, pengaturan penjualan tanah dan lainnya semakin menggusur kesempatan dan peran ekonomis pribumi.

Kelebihan lain, etnis Cina memiliki sifat hemat dan kreatifitas. Menabung sering dianggap sebagai kunci keberhasilan bisnisnya. Sifat hemat merupakan falsafah yang diciptakan untuk meningkatkan pertumbuhan kekayaan keluarga.

Warga etnis Cina juga sangat menekankan aspek kreatifitas. Mereka “berani” mencoba sesuatu yang lain yang dianggap sudah mapan. Seperti memperkenalkan barang/jasa, metode, pasar sumber-suber pasokan dan mereorganisasi industri yang baru.

Penghargaan terhadap tenaga professional, juga merupakan sifat etnis Cina. Walaupun mereka membantu mengerjakan pekerjaan orang tua, mereka tetap dibayar sebagaimana layaknya seorang pekerja upahan.

Bagi etnis Cina jarang ada yang mau menangani suatu kegiatan yang tidak dikuasainya dalam suatu perusahaan apalagi perusahaan ayahnya, karena mereka sadar bahwa sikap itu akan mempercepat kehancuran dari perusahaan itu sendiri.

Kebencian terhadap Etnis Cina, juga lantaran gagalnya pembauran. Untuk menciptakan kondisi yang penuh kekeluargaan antar etnis, ada beberapa hal yang perlu diciptakan. *Pertama*, etnis Cina perlu membuka diri terhadap pribumi misalnya yang ringan saja, tentang resep kue. Jangan sampai pembantu sudah dua puluh tahun mengabdikan, satu resep kue enak pun tidak diberikan. *Kedua*, etnis Cina perlu diikutsertakan dalam berbagai pertemuan, kerja bakti, jaga malam bersama di Pos Kamling secara bergiliran. Sebab selama ini ada kesan bila ada kegiatan kampung, etnis Cina cukup menyediakan uang untuk beli kopi atau rokok, misal, Padahal, secara psikologis, kehadiran mereka akan melahirkan tanggung jawab bersama. Sebaliknya, pribumi mesti tahu diri jangan sampai harga diri sekian orang dibeli dengan uang. *Ketiga*, etnis Cina “wajib” meninggalkan tradisi selalu berbicara dengan bahasa sendiri bila berhadapan dengan pribumi. Fakta menunjukkan, bila sedang terjadi tawar-menawar barang, etnis Cina akan memakai bahasa Cina kepada sesamanya, sementara etnis pribumi menunggu seperti peminta-minta.

Dalam sebuah studi mengenai pembauran, Charles S. Coppel dalam bukunya “*Indonesia Chinese in Crisis*” (Oxford University Press, 1983) yang dikutip kembali Abdul Baqir Zein (2000 : 7), memaparkan empat pendekatan yang dilakukan tokoh-tokoh WNI keturunan Cina itu sendiri.

*Pendekatan pertama*, dilakukan oleh tokoh Baperki, Siaw Giok Tjan (1960-an), yang mengemukakan konsep pembauran melalui pembentukan “Masyarakat Sosialis Indonesia.” *Pendekatan kedua*, dikemukakan oleh anggota Baperki lain yang lebih demokrat yaitu Yap Thiam Hien. Menurut Yap, pembauran dapat dilaksanakan melalui eliminasi (menghilangkan) prasangka dan jaminan hak-hak azasi manusia (HAM). Yap memang dikenal sebagai tokoh yang gigih membela rakyat kecil sampai akhir hayatnya. *Pendekatan ketiga*, dikemukakan oleh Sindhunata, seorang tokoh Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (cikal bakal Bakom PKB) melalui asimilasi atau perkawinan. *Pendekatan keempat*, dikemukakan oleh Junus Jahya seorang tokoh muslim Tionghoa, yang mengusulkan pembauran melalui pemelukan agama pribumi

mayoritas (baca : Islam). “Dengan memeluk agama Islam, maka proses pembauran itu akan berlangsung lebih cepat, sementara citra sebagai “cina” otomatis lenyap. Mereka langsung menjadi “Indonesia” tegas Yunus.

Sosiolog Hassan Shadily pernah melakukan Wawancara dengan 20 pengusaha pribumi, dan terangkum kesimpulan, bahwa untuk menghilangkan benih permusuhan di antara pri dengan non-pri di antaranya : *pertama*, hilangkan pengelompokkan, baik di dalam soal perumahan ataupun pertokoan; *kedua*, perkawinan harus diperluas atas dasar suka sama suka; *ketiga*, pengusaha Cina harus ikut melatih dan membiayai pengusaha Indonesia sehingga mereka dapat mengimbangi pengusaha Cina; dan *keempat*, pemerintah harus membantu ke arah itu dan pejabat pemerintah maupun bank jangan mau disuap.

Prasangka, juga menjadi pemicu aksi kekerasan terhadap Etnis Cina. Kesulitan mendasar yang acapkali dijadikan pemicu (*trigger*) adalah pada seputar kecurigaan atas beberapa hal. *Pertama*, tidak mudahnya kaum migran keturunan Cina sekalipun sudah menjadi WNI keluar dari eksklusifitas hidup. Sehingga bagi masyarakat di sekitarnya seolah-olah tetap dianggap “orang asing.” *Kedua*, terlampau jauh disparitas kepemilikan ekonomi, sehingga secara potensial selalu menyimpan rasa iri dan cemburu di kalangan warga pribumi. *Ketiga*, belum berhasilnya program pembauran dari tingkat bawah hingga kalangan atas. Bila dilihat dari segi kuantitas, baru sedikit warga keturunan Cina “bersedia” memihak dengan pribumi.

Salah satu upaya untuk mengurangi anggapan bahwa Etnis Cina adalah “orang lain” yakni dengan mengintensifkan asimilasi. Asimilasi yaitu percampuran kebudayaan yang berlainan (sering melalui antar perkawinan) menjadi ciri-ciri umum dari keduanya. Melalui proses asimilasi kebudayaan-kebudayaan cenderung untuk berbaur dan melepaskan identitas-identitas mereka yang terpisah (Bruce J. Cohen, 1983 : 368). Agar etnis Cina tidak dianggap “orang asing” di negeri in, asimilasi sebagai salah satu alternatif yang perlu dioptimalkan.

Mantan Menteri Agama Tarmizi Taher (1997 : 154), pernah mengemukakan beberapa faktor menonjol yang menyebabkan adanya proses asimilasi. *Pertama*, faktor historis, khususnya politik Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda mengkategorikan penduduk ke dalam tiga kelompok golongan : 1) Orang-orang Eropa paling tinggi; 2) Timur Asing yaitu Cina, India dan Arab; 3) Golongan pribumi yang menduduki posisi sosial terbawah. *Kedua*, faktor sosial ekonomi. Pemerintah Kolonial Belanda sejak awal memberikan hak-hak istimewa kepada orang-orang keturunan Cina sehingga mereka diidentikkan dengan penguasa, yang akhirnya masyarakat pribumi antipati. *Ketiga*, keturunan Cina diberikan hak-hak istimewa oleh pemerintah Orde Baru sebagaimana yang mereka terima dari pemerintah kolonial Belanda. *Keempat*, faktor kultural. Dalam konteks adat-istiadat yang masih dipertahankan sejumlah keturunan Cina; *Kelima*, konsep kebangsaan di Indonesia yang didasarkan pada ras; dan *keenam*, posisi Islam sebagaimana agama yang dianut oleh masyarakat penduduk di Indonesia.

Di samping sejumlah alternatif di atas, alternatif lain agar Etnis Cina tidak dianggap “orang asing”, maka gaya hidup yang eksklusivisme perlu diperhatikan oleh orang-orang etnis Cina; proses asimilasi dioptimalkan; amalgamasi digalakkan; hindari pemakaian bahasan Cina ketika terjadi transaksi jual-beli; dan tidak menghalalkan

segala cara dalam berusaha dan juga dalam pengurusan dengan berbagai birokrasi; dan beberapa hal yang mengakselerasikan pembauran.  
Semoga !!!

**BAB XXXIV**  
**KETIKA AGRESIVITAS MENJADI**  
**“BUDAYA (?!)” BARU ORANG KOTA**

“Kekerasan hanya akan berakibat pada kekerasan :  
 siapa mengalami kekerasan, dia hanya akan  
 membalas dengan kekerasan.”

(Rene Girard, Ahmad Usman, *Harian Bima Ekspres*,  
 5 Agustus 2004)

“Bila kekerasan dilawan dengan kekerasan, situasinya  
 akan bolak-balik ke situ-situ juga”

(Saraswati, *Harian Kompas*, 2/10/1996).

Atmosfir kekerasan kembali mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Polisi versus—lawan mahasiswa. Terjadi di daerah Makassar yang terkesan “kasar.” Apa yang terjadi di Makassar ini mengingatkan penulis pada pendapat Antropolog Rene Girard, : “kekerasan hanya akan berakibat pada kekerasan : siapa mengalami kekerasan, dia hanya akan membalas dengan kekerasan.” Juga pendapat Saraswati (*Harian Kompas*, 2/10/1996), “Bila kekerasan dilawan dengan kekerasan, situasinya akan bolak-balik ke situ-situ juga”. Dua pendapat ini tidaklah terlalu berlebih-lebihan, kasus Makassar, polisi melakukan tindakan kekerasan karena mahasiswa mempertontonkan kekerasan dengan “menyandera” polisi.

Apa yang diperagakan polisi dengan mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar tersebut, dalam telaah psikologi sosial dikategorikan sebagai agresivitas. Lorenz, seorang ahli perilaku, memandang agresivitas sebagai suatu dorongan yang secara biologik terbentuk karena evolusi yang melindungi eksistensi individu (Inu Wicaksono, *Harian Kompas*, 3/7/1997). Dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, mengartikan agresivitas sebagai “tindakan fisik atau verbal yang bertujuan untuk mencederai—fisik maupun perasaan—orang lain.

Leovits Berkowitz, membagi agresivitas ke dalam agresi instrumental dan agresi kebencian atau agresi impulsif (*hostile aggression*). Yang pertama adalah agresivitas yang dilakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu (mungkin juga tujuan politik seperti tragedi UMI Makassar !). Agresi dalam kerusuhan massa bisa digolongkan dalam kategori ini. Yang kedua, agresivitas yang semata-mata sebagai pelampiasan keinginan untuk menyakiti. Suatu agresi tanpa tujuan selain menimbulkan kerusakan atau kematian pada korban. Sebagian besar kasus-kasus pembunuhan dengan penganiayaan sadis bisa dimasukkan dalam kelompok ini.

Peristiwa unjuk rasa mahasiswa (juga masyarakat pada umumnya) yang berakhir dengan kerusuhan misal, dapat didekati secara sosio-psikologis. *Pertama*, secara sosiologis ini dapat berarti, di dalam masyarakat umumnya, serta segmen sosial-politik-ekonomi khususnya, terjadi “ketidakseimbangan” struktur sosial, yang cenderung menggiring anggota masyarakat termasuk mahasiswa bertindak agresif. Jika tingkat agresivitas ini sudah melewati batas-batas kendali moral, baik kesadaran kognitif (hal-hal yang menyangkut persepsi—pendapat) maupun kesadaran evaluatif (baik atau buruk), akan cenderung destruktif—merusak. *Kedua*, secara struktural ini

dapat berarti dalam masyarakat itu sendiri terjadi “ketimpangan” sosial, yang disebabkan oleh “pertumbuhan kapitalisme yang tidak seimbang.”

Solidaritas mahasiswa yang bermanifestasi protes—unjuk rasa—demonstrasi atas “*Tragedi Penyerbuan Mahasiswa oleh Polisi di UMI Makassar*” membahana seantara nusantara, tidak ketinggalan adik-adik mahasiswa di Kota Bima. Dengan tidak bermaksud mengamini aksi mahasiswa tersebut, bagi negara berkembang termasuk Indonesia, gerakan protes mahasiswa memiliki peran politik mengesankan. Altbach (1988) menyatakan, itu sering merupakan penyebab efektif yang merangsang perubahan sosial. Karena itu, mahasiswa merupakan bagian dari persamaan politik yang konsisten, penting, bahkan absah. Sebab : (a) Sering kekurangan lembaga dan struktur politik yang mapan sehingga lebih mudah berdampak langsung atas politik. (b) Mahasiswa terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dan diakui bagian dari proses politik. (c) Mahasiswa adalah elit baru istimewa. (d) Banyak perguruan tinggi di ibukota negara memberi perasaan, mahasiswa mempunyai asset ke pusat kekuasaan. (e) Sedikitnya efektivitas pelaksanaan sistem politik yang demokratis. Akibatnya, mahasiswa dianggap penyuar “hati nurani” masyarakatnya. (f) Rata-rata mahasiswa berasal dari latar sosioekonomi tinggi, melalui keluarganya punya akses langsung kepada segmen masyarakat yang kuat (MT Arifin, Harian Surya, 22/12/1993). Sekali lagi, penulis tidak sedang menjustifikasi—membenarkan aksi mahasiswa tersebut. Tapi yang jelas, apa yang dipertontonkan pihak kepolisian, merupakan bentuk-bentuk *state violence*, kekerasan oleh aparat—negara.

Dengan menggunakan parameter yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis melihat ada indikasi—isyarat, bahwa akrobatik kekekerasan akhir-akhir ini (seolah-olah ada upaya terencana mendiskreditkan militer terutama kaitan dengan suksesi kepemimpinan nasional Juli 2004) dan memang sudah menyentuh zona politik.

Konon, di bidang politik, pinjam pendapat mantan Menkeu Mar’ie Muhammad, “Indonesia adalah negara yang politiknya berisiko tinggi. *Indonesia is a high political risk country* (Suara Pembaruan, 10/6/1998). Tragedi “Sidang Istimewa Berdarah” atau yang lebih dikenal dengan “Tragedi Semanggi”, “Tragedi Dukun Santet”, “Tragedi UMI Makassar” dan berbagai tragedi dan kerusakan lain mengindikasikan. Rangkaian serial tragedi tersebut, menurut analisa sebagian pakar merupakan rangkaian krisis politik yang diawali dengan hembusan angin reformasi dan adanya persaingan kurang sehat para “elite politik” kita—terutama menjelang suksesi kepemimpinan nasional , 5 Juli 2004.

Apa ia ! Sebagai barometernya, penulis merujuk pada parameter yang biasa dipakai oleh para ahli ilmu-ilmu sosial untuk menilai intensitas daripada pertentangan-pertentangan politik di dalam suatu masyarakat. Charles Lewis Taylor dan Michael C. Hudson (Nasikun, 2000) misal, mengajukan beberapa indikator. Indikator yang *pertama*, adalah apa yang mereka sebut sebagai demonstrasi (*a protest demonstration*). Yang dimaksud dengan demonstrasi di sini adalah sejumlah orang yang tidak menggunakan kekerasan mengorganisir diri untuk melakukan protes terhadap suatu rezim, pemerintah, atau pimpinan dari rezim atau pemerintah tersebut; atau terhadap ideologi, kebijaksanaan, kebijaksanaan yang sedang direncanakan, atau kurangnya kebijaksanaan, atau terhadap suatu tindakan atau suatu tindakan yang sedang direncanakan.



Indikator *kedua* adalah *kerusuhan*, suatu istilah yang barangkali tidak terlalu tepat untuk menggantikan istilah “riot” sebagaimana yang digunakan oleh Taylor dan Hudson. Indikator yang *ketiga* adalah apa yang disebut sebagai serangan bersenjata (*armed attack*—lihat : *Kasus Mahasiswa UMI Makassar*), yaitu suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh atau untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan kekuasaan dari kelompok lain. Dan indikator *terakhir* adalah jumlah kematian sebagai akibat kekerasan politik.

Bolehkah kita mengkategorikan, apa yang sementara “dipertontonkan” elit-elit politik tersebut merupakan sebuah wacana pendidikan politik (apa ia !)? Lucian Arreat pernah melontarkan kritiknya yang rada jenaka, tapi masuk akal. “*La paedagoiaux de politique, une des plus grosses solitiches de cetemps. Mais he dison pas trop hant. Ille ya taunt de gens que en vivent*”. Artinya, pendidikan politik, dia adalah suatu omong kosong yang manis dan menggelikan dewasa ini. Tapi anda jangan omong terlalu tinggi, karena banyak orang hidup dari padanya.

Memang beberapa tahun terakhir, negeri ini benar-benar telah menjadi sangat keras--*violent*, sadis, brutal, anomalis, barbar, dan berdarah. Malah dalam Orasi Ilmiah pada wisuda STISIP Mbojo Bima (Sabtu, 28-12-2002) lalu, penulis menilai keadaan masyarakat akhir-akhir ini sudah berada “*Di Ambang “Ketakberaturan” Tatanan Sosial.*”

Apa benar, agresivitas--kekerasan di negeri ini telah menjadi “budaya”? Dr. Saraswati, antropolog dari Universitas Washington, Amerika Serikat, pernah mengemukakan, di balik segala keramahatamahannya, masyarakat Indonesia sangat dekat dengan budaya kekerasan. Budaya kekerasan di Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat. Karena telah berjalan sejak lama dan orang terlalu sering melihat kekerasan, kini masyarakat cenderung menganggap kekerasan sebagai suatu yang normal dan biasa-biasa saja (*Harian Kompas*, 2/10/1996). Lanjutnya, pada masa penjajahan Belanda, kepala seorang tentara bayaran yang dipancung sengaja dipertontonkan untuk umum. Bukankah ini isyarat, kekerasan dibolehkan.

Kembali pada tabiat agresivitas—kekerasan yang membiasa akhir-akhir ini, dan memang kita mulai terbiasa. Terdapat beberapa parameter atau indikasi sehingga penulis menilai seperti itu yang dalam zona telaah sosiologi diklasifikasikan sebagai problematika sosial. *Pertama*, ada indikasi-isyarat bahwa masyarakat kita mulai berperilaku *euphoria* (sikap berlebih-lebihan dan seolah tidak ada orang lain yang benar !), bahkan telah bertransformasi ke *euphoria-manai*, tidak terkecuali mahasiswa, dan penulis sangat menginsyafi perubahan perilaku tersebut, misalnya Universitas Negeri Makassar kini mahasiswanya benar-benar keras, brutal, dan berbeda seratus delapan puluh derajat ketika universitas tersebut masih bernama IKIP Ujung Pandang, sebagai wadah mendidik manusia menjadi guru, yang mahasiswanya cukup santun, termasuk penulis pernah mengenyam pendidikan di institut guru itu. Pembakaran kampus, perkelahian antar fakultas, perilaku menyimpang dalam kampus, bukan lagi hal yang mengagetkan di Makassar sekarang. *Kedua*, penghakiman publik dengan cara barbar dan kanibal menjadi sebuah tabiat kekerasan baru; *ketiga*, ada tanda-tanda, terjadi akrobatik loncatan budaya kekerasan yang akhirnya menjadi sebuah panorama kelabu atau potret buram bahkan menjadi sindroma bagi masyarakat di awal millenium baru ini; *keempat*, ada indikasi terciptanya masyarakat *anomi* yaitu masyarakat yang tidak mengacu lagi pada norma, mudarnya nilai-nilai budaya, adat, dan redupnya

pernik-pernik mutiara religi; *kelima*, penafsiran keliru bahkan salah kaprah terhadap makna filsafati solidaritas-kesetiakawanan, akhirnya termanifestasikan dalam wujud konflik, baik konflik antara kampung, antar geng, antar kelompok, bahkan antar dusun atau rukun tetangga dalam satu kampung, yang bukan mustahil di antara mereka masih (bahkan !) memiliki pertalian darah yang sangat dekat. Dan *keenam*, tumbuh-suburnya perilaku provokasi atau mental adu-domba yang acapkali disutradarai atau diskenarioi para elit, terutama elit “sakit hati” atau elit tendensi-ambisius.

### **CITRA POLISI**

Minggu-minggu terakhir ini, berita tentang polisi menghiasi halaman-halaman surat kabar, maupun lewat layar kaca televisi, menyaingi popularitas berita Pemilu. Hanya sayang, berita tentang Polisi ini, bukan berita prestatif atau yang “membusungkan dada”, tapi berita akan rangkaian kegagalan, dan tindakan-tindakan tak semestinya dilakukan polisi sebagai pengayom rakyat. Berita hangat terakhir, yakni kekerasan polisi terhadap mahasiswa pengunjuk rasa di Makassar, kasus Abu Bakar Ba’syir, kasus Ambon Maluku, yang buntutnya dicopotnya dua Kapolda yakni Polda Sulsel dan Polda Maluku, beberapa Kapolsek di Makassar, dan sejumlah perwira sedang diperiksa.

Situasi model ini mengindikasikan adanya kondisi yang salah dalam relasi polisi dengan masyarakat, juga mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat (baca : kondisi yang penulis beberkan berikut pernah juga kemukakan pada artikel penulis : “Polisi dan “*Persengkokolan*” Jahat”). Kondisi yang salah tadi dengan mudah memunculkan rasa permusuhan publik terhadap polisi. Secara teoretis, menurut Adrianus Maliala, terdapat tiga sebab masyarakat melawan polisi (*Majalah Detektif dan Romantika*, 30/11/1996). *Pertama*, terjadi suatu perkembangan dalam masyarakat sehingga tidak lagi mengakui kekuasaan polisional yang dimiliki polisi sebagai penegak hukum. Karena itu lebih tepat disebut sebagai pemberontakan publik. *Kedua*, masyarakat berkali-kali menjadi sasaran penyimpangan polisi dan akhirnya melawan. Dalam konteks Indoensia, penyimpangan tersebut bisa berupa perilaku gagah-gagahan, mempergunakan upaya paksa secara sembarangan, meminta uang dari masyarakat, melakukan kejahatan jabatan, dan lain-lain... *Ketiga*, walaupun kondisi akumulasi kekesalan terhadap penyimpangan polisi tidak ada, bahkan hubungan polisi-masyarakat amat harmonis, keberingasan toh tetap dapat muncul. Itu bisa terjadi bila terdapat kondisi yang tidak dapat diterima sama sekali oleh masyarakat.

Penyebab kedua tersebut, akibat bergentayangannya polisi-polisi korup, penjilat, yes man, yang sadistis, tidak peduli prosedur, atau sibuk mengejar target penyelesaian kasus. Merekalah para polisi yang potensial menjadi penganiaya masyarakat. Secara sosiologis, adalah wajar bila suatu kelompok yang ditekan terus-menerus suatu ketika melawan. Sedangkan skenario ketiga, terjadi seiring dengan semakin besar serta cepatnya informasi yang beredar di masyarakat. Kesalahpahaman, kekurangjelasan, ataupun ketidaktahuan dapat dengan mudah muncul di kalangan masyarakat, betapapun masyarakat tersebut sebenarnya cukup intelektual, termasuk mahasiswa. Ketidaktahuan itu dapat terjadi antara lain akibat ciri pekerjaan polisi yang *low visibility* atau kerap tidak terlihat sehingga tidak bisa setiap saat dimonitor.

Siapun, menginginkan figur seorang polisi menjadi “malaikat” yang tak mungkin khilaf dan alpa—tak ada nafsu dan jauh dari godaan setan, termasuk godaan

dan rayuan harta, wanita, tahta, suka menghakimi. Polisi dituntut suatu kesempurnaan. Tanpa cacat, bahkan diharapkan serba ahli. Tapi, polisi bukan malaikat, bukan robot, melainkan manusia, yang tak luput dari noda dan nista, serta ketidaksempurnaan.

Tak dapat diingkari, tidak sedikit polisi (oknum) yang melecehkan citra (image) korpsnya. Sejumlah penilaian miring dan sinis terhadapnya, antara lain : adanya kesan tilang gaya baru (?), yang terwujud uang titipan atau denda pelanggaran, dan sering dijuluki peradilan jalanan (*street justice*) atau yang lazim disebut *eigenrichting* (*pseudo trial*); kolusi dalam penegakkan aturan-aturan penyelesaian kasus melalui "jalan pintas"; kurang bertindak wajar, misal pemaksaan, pemerasan, menjadi *backing*, "polisi kurang tanggap", dan "seribu satu macam macam" penilaian miring lainnya.

Bahkan polisi (oknum) selalu dianalogkan sebagai sosok yang selalu mencari-cari kesalahan masyarakat. Sarwono (1993), pernah mengemukakan, "sejak lama polisi Indonesia di mata masyarakat tidak begitu baik. Seringkali polisi dengan kekurangan, kelicikan, korupsi, pemerasan, kekerasan/kekejaman (misal dalam interogasi), ketidakefisienan, dan sebagainya".

Kristin Sina (Surya, 24/3/94), pernah menuduh begini, "... polisi bukan sebagai badan keamanan melainkan sebagai hakim yang sekaligus menuntut pengadilan di kepolisian." Dalam "Bidikan Surya "-nya Harian Surya Surabaya (19 Februari 1994), tentang "polisi terlibat dalam tindak pidana dalam kurun waktu 1992/1993", disebutkan, dari seluruh anggota polisi di Jawa Timur, 159 orang di antaranya pernah melakukan tindak pidana. Angka itu belum termasuk tindak pidana polisi yang tidak sempat terungkap.

Sutherland (1960)--seorang pakar kriminologi Amerika, pernah mengemukakan, polisi menjadi sangat akrab dan tak asing lagi dengan kejahatan. Dalam ungkapan yang dipoles dengan *euphemistik* (halus, pen), G. Jebaru Taju (Surya, 24 Maret 1994), betapa banyak gadungan yang memakai pakaian korps "keamanan negara" (polisi), tapi sesungguhnya dia adalah penjahat.

Walaupun penelitian ini "kadaluarsa"--dilaksanakan belasan tahun lalu, sebagaimana hasil penelitian majalah Tempo--kini, 'almarhum' (dibreidel) (Edisi Juli 1994), tersimpul bahwa rata-rata lebih dari 53% sikap mental anggota Polri yang diharapkan masyarakat yang mencakup performance, kesiagaan, dan kemampuan melindungi masyarakat masih rendah. Dan menurut Studi Lembaga Konsultan *Political and Economic Risk Consultancy Ltd* (PERC) bermarkas di Hongkong yang mewawancarai 400 eksekutif asing, menilai lembaga kepolisian dan peradilan Indonesia terburuk di antara 10 negara Asia. Hasil survei yang disiarkan kantor berita AFP itu (Selasa, 5 Agustus 1997) lebih lanjut mengemukakan, lembaga peradilan Indonesia menghadapi timbunan perkara dan korupsi, sementara kepolisian dikatakan menghadapi "mimpi buruk" antara lain karena berulang kali pos-pos polisi diserang saat terjadi kerusuhan (*Harian Suara Pembaruan*, 7/8/1997).

Kembali ke persoalan oknum polisi yang menyimpang. Memang, benar yang menyimpang adalah oknum (ini yang menjadi dalih). Bukankah, ada pepatah "akibat nila setitik, rusak susu se belanga," atau dalam ungkapan lama "*pars proto toto*."

Karenanya, agar citra (image) polisi tidak ternoda dan tetap terhormat : polisi kembali kepada "jati diri"-nya—*back to basic*; kaji ulang makna dan hikmah Sapta Marga; makna dan hikmah Tri Brata; makna dan hikmah Catur Prasetya; dan makna dan hikmah Sumpah Prajurit.

Polisi, bukan sebatas sebagai aparat negara dan karya hukum ‘an sich’, melainkan sekaligus sebagai “sumber moral” bangsa. Nah, bagaimana mengembalikan citra Polri, agar tidak ternista.

### ***KRISIS VS REFORMASI POLITIK***

Lalu, adakah pengaruh krisis ekonomi terhadap reformasi politik ? Mark J. Gasiorowski (APSA, Desember 1995, Vol. 89/No.4) menjelaskan dampak krisis ekonomi terhadap reformasi politik dalam negeri. Dengan menggunakan data dan teknik statistik tentang perubahan dan pergantian rezim politik di 75 negara di dunia ketiga, ia mengembangkan model multivariat tentang pergantian rezim politik dan transisi demokratis. Hasil temuannya menyimpulkan, krisis ekonomi—berupa tingginya inflasi, krisis moneter dan resesi—memberi kontribusi besar terhadap demokratisasi periode 1950-1970. Tekanan inflasi dan krisis moneter mendukung tesis Samuel P. Huntington (194), proses demokratisasi sangat berbeda di tahun 1980-an daripada dekade 1970-an. Dasarnya, laju pertumbuhan ekonomi di kedua periode ini sangat berbeda, begitu pula pembangunan politiknya.

Di sisi lain, Huntington (Faisal Siagian, 24/11/1997), melihat, dalam rangka mengelaborasi secara empirik dampak krisis ekonomi terhadap demokratisasi, mengajukan beberapa hipotesis. *Pertama*, krisis membawa rezim ke arah demokrasi. *Kedua*, dampak krisis ekonomi terhadap demokratisasi tergantung pada sifat rezim politik. *Ketiga*, krisis ekonomi mendorong proses demokratisasi, namun tergantung bentuk dan sifat komplementer rezim. *Keempat*, peranan krisis ekonomi dalam proses demokratisasi menurun dan menjadi tak signifikan setelah dekade 1980-an, sedang perannya menaik selama dekade 1980-an. *Kelima*, kondisi sosial ekonomi, struktural, budaya politik, lembaga demokrasi, situasi internasional mempengaruhi proses demokratisasi, secara relatif tergantung pada tingkat pembangunan ekonomi dan politik.

Dan memang sudah mulai tampak prediksi, Dr. Harold Crouch dari *The Australian National University*. Dalam pengantar buku yang berjudul *ABRI dan Demokratisasi*, Harold meramalkan, bahwa : *pertama*, perubahan politik di Indonesia dalam jangka panjang pasti akan terjadi. *Kedua*, desakan-desakan masyarakat akan mendorong perubahan politik di Indonesia. *Ketiga*, dalam mengadakan perubahan politik, perlu kerja sama antara pihak sipil dan militer (*Harian Suara Pembaruan*, 2/12/1997).

Konsekuensinya, bagaimana menciptakan dan mempertahankan stabilitas politik demi pertumbuhan ekonomi. Mengapa hal itu harus dipersoalkan ? Demikian “pertanyaan” *Suara Pembaruan* dalam Tajuk Rencananya (25/7/1996).

*Pertama*, bila itu kita lakukan maka—tanpa sadar—kita telah menetakkan satu sektor kehidupan di atas sektor lainnya. Dalam hal ini, sektor ekonomi kita letakkan di atas sektor politik. Padahal yang seharusnya terjadi adalah koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara semua sektor kehidupan. Bukan dominasi yang satu terhadap yang lain ! Memperlakukan sektor ekonomi sebagai nahkoda, adalah sama salahnya mengangkat sektor politik menjadi panglima.

*Kedua*, sering tanpa sadar pula, lalu kita menciptakan keadaan di mana pembangunan politik jauh tertinggal dari pembangunan ekonomi (baca : pertumbuhan ekonomi). Tentu saja demikian dan tidak dapat tidak ! Oleh karena demi pertumbuhan

ekonomi, maka stabilitas politik; lalu cenderung diartikan sebagai *status quo* politik ! Dan ini tidak mungkin dipertahankan terus-menerus, sebab keberhasilan ekonomi justru akan melahirkan tuntutan pembangunan politik. Mau tidak mau ! Lambat atau cepat ! Yang seharusnya terjadi adalah pembangunan yang semerata mungkin di semua sektor.

*Ketiga*, kecenderungan yang mempertahankan *status quo* politik, dalam jangka panjang akan merupakan bumerang bagi stabilitas politik itu sendiri. Sebab, sesungguhnya—tanpa disadari dan pasti tidak diakui—yang dipertahankan itu tidak lain adalah stabilitas semu yang amat rapuh. Sebab, mempertahankan status quo hanya dapat dilakukan dengan menekan dinamika yang ada. Padahal, dinamika adalah hakikat kehidupan itu sendiri. Meniadakan kehidupan bertentangan dengan hukum kehidupan. Tidak mungkin bisa bertahan.

Sebab itu, tepatlah bila yang harus terus kita upayakan adalah stabilitas yang dinamis. Artinya, stabilitas yang tidak menekan dinamika, tapi sebaliknya memanfaatkan semua dinamika yang ada untuk menumbuhkan stabilitas itu sendiri.

Stabilitas sejati adalah stabilitas yang hidup; jadi tidak mandek. Ia bertumbuh dan bergerak. Stabilitas yang sejati juga adalah stabilitas yang menghidupi dan menghidupkan. Yang memungkinkan kehidupan; bukan justru mematikan.

Memang membutuhkan resep yang sangat komplis untuk menyelesaikan buhul dan kusutnya persoalan bangsa akhir-akhir ini. *Pertama*, merebaknya puspa-ragam konflik, pertentangan, kerusuhan perlu di-“kanalisasi” (disalurkan) dan dicarikan jalan keluar; *kedua*, pemerintah perlu “menyalakan lampu empati”, sehingga rakyat tidak merasa diisolasikan pemerintah; *ketiga*, hentikan politik kepentingan dan ambisi golongan; *keempat*, politik kekerasan dan fitnah harus diakhiri; *kelima*, jangan menjadikan rakyat sebagai “tumbal”; *keenam*, hentikan politik adu domba dengan SARA sebagai dalih; dan *ketujuh*, tumbuh-suburkan rasa solidaritas, kesetiakawanan, toleransi, kebersamaan, kasih sayang, simpati, dan jauhkan mental arogansi, individualistis-egoistis, anarkis, brutalism, dan mental kriminalitas. Semoga !!!

## BAB XXXV KOTA DAN TABIAT KEKERASAN

Negeri ini sudah menjadi sangat keras--*violent*,  
sadis, brutal, anomalis, kanibal, barbar, dan berdarah.  
Lalu, timbul sederet pertanyaan : di manakah nilai moral, tata-susila,  
etika, butir-butir mutiara religi, nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas,  
kerukunan, kesetiakawanan, toleransi, pernik-pernik budaya,  
kelemah-lembutan,  
keramah-tamahan, kesopan-santunan yang  
dipersemaikan lembaga-lembaga pendidikan—juga  
institusi keluarga, dan kesakralan nilai-nilai  
adat-istiadat yang ditaburkan institusi masyarakat  
selama ini ? Realitas memprihatinkan ini,  
mengharuskan *Tri Pusat Pendidikan* yaitu keluarga,  
sekolah, dan masyarakat untuk berintrospeksi diri.

Dalam membedah persoalan tabiat kekerasan yang sering diperagakan masyarakat kita akhir-akhir ini, di antara para pakar dengan memakai “pisau analisa” masing-masing, akhirnya melahirkan pendapat yang berbeda tentang pemicu (*trigger*) kekerasan.

Pakar ekonom mensinyalir, muncul kekerasan sebagai isyarat munculnya “the psychology of fear” dari masyarakat yang lemah—masyarakat yang sangat merasakan dampak badai dahsyat krisis ? Gejalanya menurut Lukman Sutrisno, selama ini mereka harus menerima kenyataan yang ada. Padahal, mereka merasa tidak ikut menciptakan kenyataan itu. Berdasarkan pol pendapat atau poling (penelitian) Majalah Gatra dan Lembaga Ilmiah *Center for Policy and Development Student* tahun 2000 menyimpulkan, di kota besar di Indonesia, kesenjangan ekonomi merupakan ancaman terbesar (54 %) bagi stabilitas nasional menyusul masalah SARA (35 %), separatisme (21 %) dan bahaya *latent* PKI (12 %).

Kemudian, Ginandjar Kartasmita, pernah mengemukakan, faktor yang paling dapat mengganggu stabilitas dan keutuhan bangsa, kini bukanlah masalah primordialisme, melainkan persoalan kesenjangan sosial ekonomi (Kompas, 8-1-1995). Pinjam istilah Godwin : “yang satu mewah, yang lain sengsara.” Suatu penelitian yang cukup terkenal dalam bidang Psikologi Sosial dengan judul “Experimental Study of Prolonged Semistarvation” lebih kurang setengah abad yang lalu (Sherif dan Sherif, 1954), membuktikan bahwa masyarakat yang menderita kelaparan sosialibitasnya menurun; terjadi perubahan tingkah laku antara lain menjadi pendiam, apatis, senang bicara soal makan, ...”

Apalagi, “budaya” kalangan bawah di perkotaan (proletariat tulen) bisa begitu mudah terpancing melakukan tindakan destruktif karena mereka tidak akan merasa kehilangan apapun dengan aksi-aksinya. Kalangan proletariat tulen itu bisa merasa terseniggung olehsesuatu hal, bisa terpicu untuk melakukan kerusuhan sosial. Karenanya, masyarakat yang “lapar” memerlukan pendekatan kemanusiaan (*human approach*), sehingga mereka merasa lebih dimanusiakan, diperhatikan kepentingannya

dan bukan sekadar dinilai sebagai ancaman stabilitas. Dan pembangunan ke depan, mesti memaksimalkan model pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*).

Lalu, bagaimana dengan persoalan politik ? Konon, di bidang politik, pinjam pendapat Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia, yang juga mantan Menkeu Mar'ie Muhammad, "Indonesia adalah negaera yang politiknya berisiko tinggi. Indonesia is a high political risk country (Suara Pembaruan, 10/6/1998). Tragedi "Sidang Istimewa Berdarah" atau yang lebih dikenal dengan "Tragedi Semanggi", "Tragedi Dukun Santet", kerusuhan .... Dan beberapa tragedi lainnya, menurut analisa sebagai pakar merupakan rangkaian krisis politik yang diawali dengan hembusan angin reformasi dan adanya persaingan kurang sehat para "elite politik" kita.

Dengan menggunakan parameter yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis melihat ada indikasi--isyarat, bahwa "ketidak-akuran" kita sudah menyentuh zona pada stratum politik.

Apa ia ! Sebagai barometernya, penulis merujuk pada parameter yang biasa dipakai oleh para ahli ilmu-ilmu sosial untuk menilai intensitas daripada pertentangan-pertentangan politik di dalam suatu masyarakat. Charles Lewis Taylor dan Michael C. Hudson (Nasikun, 2000) misal, mengajukan beberapa indikator. Indikator yang *pertama*, adalah apa yang mereka sebut sebagai demonstrasi (*a protest demonstration*). Yang dimaksud dengan demonstrasi di sini adalah sejumlah orang yang tidak menggunakan kekerasan mengorganisir diri untuk melakukan protes terhadap suatu rezim, pemerintah, atau pimpinan dari rezim atau pemerintah tersebut; atau terhadap ideologi, kebijaksanaan, kebijaksanaan yang sedang direncanakan, atau kurangnya kebijaksanaan, atau terhadap suatu tindakan atau suatu tindakan yang sedang direncanakan.

Indikator *kedua* adalah *kerusuhan*, suatu istilah yang barangkali tidak terlalu tepat untuk menggantikan istilah "riot" sebagaimana yang digunakan oleh Taylor dan Hudson. Indikator yang *ketiga* adalah apa yang disebut sebagai serangan bersenjata (*armed attack*), yaitu suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh atau untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan kekuasaan dari kelompok lain. Dan indikator *terakhir* adalah *jumlah kematian sebagai akibat kekerasan politik*. Dari empat parameter tersebut, Bima baru berada pada posisi parameter pertama dan kedua, dan untuk parameter ketiga dan keempat, belum begitu tampak.

Tidaklah terlalu bombastis, kalau dikatakan, apa yang sementara "dipertontonkan" elit-elit politik tersebut merupakan sebuah wacana pendidikan politik (apa ia !). Lucian Arreat pernah melontarkan kritiknya yang rada jenaka, tapi masuk akal. "*La paedagoiaux de politique, une des plus grosses solitiches de cetemps. Mais he dison pas trop hant. Ille ya taunt de gens que en vivent*". Artinya, pendidikan politik, dia adalah suatu omong kosong yang manis dan menggelikan dewasa ini. Tapi anda jangan omong terlalu tinggi, karena banyak orang hidup dari padanya.

Lalu, adakah pengaruh krisis ekonomi terhadap reformasi politik ? Mark J. Gasiorowski (APSA, Desember 1995, Vol. 89/No.4) menjelaskan dampak krisis ekonomi terhadap reformasi politik dalam negeri. Dengan menggunakan data dan teknik statistik tentang perubahan dan pergantian rezim politik di 75 negara di dunia ketiga, ia mengembangkan model multivariat tentang pergantian rezim politik dan transisi demokratis. Hasil temuannya menyimpulkan, krisis ekonomi—berupa

tingginya inflasi, krisis moneter dan resesi—memberi kontribusi besar terhadap demokratisasi periode 1950-1970. Tekanan inflasi dan krisis moneter mendukung tesis Samuel P. Huntington (194), proses demokratisasi sangat berbeda di tahun 1980-an daripada dekade 1970-an. Dasarnya, laju pertumbuhan ekonomi di kedua periode ini sangat berbeda, begitu pula pembangunan politiknya.

Di sisi lain, Huntington (Faisal Siagian, 24/11/1997), melihat, dalam rangka mengelaborasi secara empirik dampak krisis ekonomi terhadap demokratisasi, mengajukan beberapa hipotesis. *Pertama*, krisis membawa rezim ke arah demokrasi. *Kedua*, dampak krisis ekonomi terhadap demokratisasi tergantung pada sifat rezim politik. *Ketiga*, krisis ekonomi mendorong proses demokratisasi, namun tergantung bentuk dan sifat komplementer rezim. *Keempat*, peranan krisis ekonomi dalam proses demokratisasi menurun dan menjadi tak signifikan setelah dekade 1980-an, sedang peranannya menaik selama dekade 1980-an. *Kelima*, kondisi sosial ekonomi, struktural, budaya politik, lembaga demokrasi, situasi internasional mempengaruhi proses demokratisasi, secara relatif tergantung pada tingkat pembangunan ekonomi dan politik.

Dan memang sudah mulai nampak prediksi, Dr. Harold Crouch dari *The Australian National University*. Dalam pengantar buku yang berjudul *ABRI dan Demokratisasi*, Harold meramalkan, bahwa : *pertama*, perubahan politik di Indonesia dalam jangka panjang pasti akan terjadi. *Kedua*, desakan-desakan masyarakat akan mendorong perubahan politik di Indonesia. *Ketiga*, dalam mengadakan perubahan politik, perlu kerja sama antara pihak sipil dan militer (Suara Pembaruan, 2/12/1997).

Konsekuensinya, bagaimana menciptakan dan mempertahankan stabilitas politik demi pertumbuhan ekonomi. Mengapa hal itu harus dipersoalkan ? Demikian “pertanyaan” Suara Pembaruan dalam Tajuk Rencananya (25/7/1996).

*Pertama*, bila itu kita lakukan maka—tanpa sadar—kita telah menetakkan satu sektor kehidupan di atas sektor lainnya. Dalam hal ini, sektor ekonomi kita letakkan di atas sektor politik. Padahal yang seharusnya terjadi adalah koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara semua sektor kehidupan. Bukan dominasi yang satu terhadap yang lain ! Memperlakukan sektor ekonomi sebagai nahkoda, adalah sama salahnya mengangkat sektor politik menjadi panglima.

*Kedua*, sering tanpa sadar pula, lalu kita menciptakan keadaan di mana pembangunan politik jauh tertinggal dari pembangunan ekonomi (baca : pertumbuhan ekonomi). Tentu saja demikian dan tidak dapat tidak ! Oleh karena demi pertumbuhan ekonomi, maka stabilitas politik; lalu cenderung diartikan sebagai *status quo* politik ! Dan ini tidak mungkin dipertahankan terus-menerus, sebab keberhasilan ekonomi justru akan melahirkan tuntutan pembangunan politik. Mau tidak mau ! Lambat atau cepat ! Yang seharusnya terjadi adalah pembangunan yang semerata mungkin di semua sektor.

*Ketiga*, kecenderungan yang mempertahankan *status quo* politik, dalam jangka panjang akan merupakan bumerang bagi stabilitas politik itu sendiri. Sebab, sesungguhnya—tanpa disadari dan pasti tidak diakui—yang dipertahankan itu tidak lain adalah stabilitas semu yang amat rapuh. Sebab, mempertahankan status quo hanya dapat dilakukan dengan menekan dinamika yang ada. Padahal, dinamika adalah hakikat kehidupan itu sendiri. Meniadakan kehidupan bertentangan dengan hukum kehidupan. Tidak mungkin bisa bertahan.



Sebab itu, tepatlah bila yang harus terus kita upayakan adalah stabilitas yang dinamis. Artinya, stabilitas yang tidak menekan dinamika, tapi sebaliknya memanfaatkan semua dinamika yang ada untuk menumbuhkan stabilitas itu sendiri.

Stabilitas sejati adalah stabilitas yang hidup; jadi tidak mandek. Ia bertumbuh dan bergerak. Stabilitas yang sejati juga adalah stabilitas yang menghidupi dan menghidupkan. Yang memungkinkan kehidupan; bukan justru mematikan.

### **RESEP**

Memang membutuhkan resep yang sangat komplis untuk menyelesaikan buhul dan kusutnya persoalan bangsa akhir-akhir ini. *Pertama*, merebaknya puspa-ragam konflik, pertentangan, kerusuhan perlu di-“kanalisasi” (disalurkan) dan dicarikan jalan keluar; *kedua*, pemerintah perlu “menyalakan lampu empati”, sehingga rakyat tidak merasa diisolasi pemerintah; *ketiga*, hentikan politik kepentingan dan ambisi golongan; *keempat*, politik kekerasan dan fitnah harus diakhiri; *kelima*, jangan menjadikan rakyat sebagai “tumbal”; *keenam*, hentikan politik adu domba dengan SARA sebagai dalih; dan *ketujuh*, tumbuh-suburkan rasa solidaritas, kesetiakawanan, toleransi, kebersamaan, kasih sayang, simpati, dan jauhkan mental arogansi, individualistis-egoistis, anarkis, brutalism, dan mental kriminalitas.

### **PENUTUP**

Kemunculan kekerasan, konflik misal, tentu tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal, nasional regional, maupun global. Untuk lima tahun ke depan, konflik di Indonesia diperkirakan berkisar pada isu amandemen konstitusi, rekonstelasi parpol dan ormas, pemilu, dampak pengusutan korupsi, kegelisahan perburuhan, lanjutan krisis ekonomi, implementasi Otda, ketidakadilan, dan kekerasan masa lampau. Adapun identitas primer—agama dan etnisitas—masih potensial dijadikan sebagai sentimen pemicu.

Semoga !!!

**BAB XXVI**  
**PENGHAKIMAN PUBLIK, INDIKASI**  
**MASYARAKAT KOTA YANG “KANIBAL” ?**

Negeri yang pernah dijuluki antropolog Jerman Adolf Bastian dalam "*Indonesian, Order die Insel des Malaischen Archipels*" sebagai "zamrut di atas khatulistiwa" tersebut, kini dihinggapi *sizofrenia kultural*, yang berwujud : masyarakat manusia berwajah garang, berwatak keras, dan berperilaku liar serta brutal. Yang satu sama lain saling bermusuhan secara agresif. Bahkan ada yang menuduh, kita sedang menuju masyarakat "*kanibal*"; masyarakat yang bermental *homo homoni lupus*--manusia adalah serigala bagi yang lain; atau *sianre bale* (pinjam istilah Bugis)--menjadi ikan buas pemangsa sesama.

Perlakuan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan kembali terjadi. Beberapa saat lalu, dukun santet di Dusun Nggarolo Desa PenanaE, dicincang-cincang kemudian dibakar nyaris hangus—"diper-abu-kan." Kemudian, seorang anggota polisi, "dicurigai" komplotan perampok (apa ia !) dibunuh, dan mobil yang dipakai untuk "aksi kejahatan" (konon mobil sewaan) tersebut dibakar massa.

Perlakuan penghakiman publik (*publik vigilantism*), dan tindakan-tindakan kekerasan (*violence*) lainnya, di Dana Mbojo frekuensi dan kuantitasnya menunjukkan grafik yang kian melonjak, dan kualitasnya juga makin "berbobot". Penghakiman oleh massa atau main hakim sendiri (*take the law in their own hand*) terhadap tersangka telah merebak menjadi fenomena sosial yang memprihatinkan. Pengeroyokan, perkelahian masal, pembakaran atas orang-orang yang disangka melanggar hukum terus mengalir tanpa rintangan. Ada sebagian masyarakat memandang kekerasan massal yang brutal dan sadistis tersebut dianggap sebagai pengadilan rakyat (*people court*). Cara itu konon berlaku pada masyarakat primitif yang tidak beradab (*savage society*) (Thontowi, 2001). Ini adalah sebuah panorama kelabu persoalan sosial.

Di samping itu, konflik sosial (*sosial conflict*) yang mula-mula dianggap biasa, wajar, dan lumrah, namun akhirnya diresponi secara bringas, misalnya, dengan pembumihangusan kampung atau pembersihan etnis (misal kasus Sambas, Sampit, dan Poso), malah sudah menjurus pada apa yang dalam khazanah antropologi disebut *genocide*--praktek pembunuhan secara besar-besaran suku bangsa oleh suku bangsa lain.

Negeri yang pernah dijuluki antropolog Jerman Adolf Bastian dalam "*Indonesian, Order die Insel des Malaischen Archipels*" sebagai "zamrut di atas khatulistiwa" tersebut, kini dihinggapi *sizofrenia kultural*, yang berwujud : masyarakat manusia berwajah garang, berwatak keras, dan berperilaku liar serta brutal. Yang satu sama lain saling bermusuhan secara agresif. Bahkan ada yang menuduh, kita sedang menuju masyarakat "*kanibal*"; masyarakat yang bermental *homo homoni lupus*--manusia adalah serigala bagi yang lain; atau *sianre bale* (pinjam istilah Bugis)--menjadi ikan buas pemangsa sesama.

Mungkin kondisi seperti saat sekarang yang disinyalir Erich Fromm (2000) dalam buku terbarunya “Akar Kekerasan Analisis Sosial-Psikologis atas Watak Manusia” tentang fenomena dan meningkatnya kekejaman dan kedestruktifan manusia, khususnya agresi ‘jahat’. Yakni kekejaman dan kedestruktifan, merupakan ciri khas spesies manusia dan tak ditemukan pada sebagian besar hewan mamalia. Agresi ini tidak terprogram secara filogenetik dan tidak adaptif secara biologis. Ia tidak memiliki tujuan dan muncul karena dorongan nafsu semata.

Atau, seperti hal sekarang mungkin kebenaran isi buku *Ethics of Today* bahwa “*Today is the day of conflict, violence, and frustration*”--saat ini adalah masa yang penuh pertentangan, kekerasan, dan kekecewaan.

Dalam zona kajian psikologis sosial, fenomena kelam yang sementara merebak sekarang dapat ditaxonomikan sebagai *incremental frustration* dan *relative deprivation*. *Incremental frustration* terjadi jika harapan melambung tinggi namun tidak disertai kemampuan. Sedangkan deprivasi relatif (*relative deprivation*) menurut Ted R. Gurr adalah kesenjangan relatif antara apa yang dimiliki atau diperoleh seseorang/sekelompok orang dengan apa yang seyogyanya dimiliki atau diperolehnya. Atau, tingkah laku agresif akan timbul sebagai salah satu reaksi terhadap adanya deprivasi relatif (perasaan kecewa) karena harapan-harapan (*value expectation*) berbeda jauh dari kenyataan yang bisa diperoleh (*value capabilities*). Harapan masyarakat, hukum ditegakkan. Pelanggar hukum diadili. Tapi, nyatanya. Lacur ! Perasaan deprivasi relatif ini dikenal merupakan sumber pertama dari munculnya kekerasan masyarakat. Akhirnya, masyarakat main hakim sendiri. Berperilaku “kanibal”.

Dari rentetan aksi kekerasan, kerusakan, dan aksi-aksi destruktif lainnya tersebut, kini masyarakat Indonesia dihantui bahkan telah diterpa badai kepanikan sosial. Masyarakat diselimuti oleh berbagai ketidakpastian. Masyarakat juga tidak memiliki harapan lagi untuk mendapat pengayoman. Masyarakat digelisahkan oleh berbagai tindak kriminalitas dan tidak punya harapan lagi untuk memperoleh keadilan (*justice*). Tidak ada lagi yang dapat dipercaya, baik penguasa, aparat keamanan, maupun aparat hukum.

Tidaklah berlebih-lebihan, perlahan-lahan kita sedang beramai-ramai menuju gerbang masyarakat *anomi*. Masyarakat tak bernorma. Tak bernilai. Tak berkaidah. Pinjam pendapat Emile Durkheim--si pencetus “*Le Suicide*” ( 1897) (Teori Bunuh Diri), *anomi* (*anomic suicide*) merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan tindakan bunuh diri, di samping sebab lain, seperti *egoistic suicide*, *altruistic suicide* dan *fatalistic suicide* ( Ahmad Usman, 2000). Durkheim memaknai *anomi*, ialah kalau dalam sebuah masyarakat orang-orang tidak mau berpegang lagi kepada sendi-sendi masyarakat seperti adat, norma, etika dan sebagainya ( Shadily, 1984 )

Pemaknaan lain, *anomi* yaitu tidak ada pegangan terhadap apa yang baik dan apa yang buruk, sehingga masyarakat tidak mampu mengukur tindakan-tindakannya. Sebagai parameter apakah masyarakat sedang mengalami *anomi* atau tidak, Sracle (Asmaun Azis, 2001) mengajukan empat indikator yaitu : *pertama*, pemimpin mempunyai keinginan berbeda dengan keinginan masyarakat; *kedua*, masyarakat tanpa ketertiban (berubah-ubah tidak terduga dan tidak dapat diramalkan); *ketiga*, kehidupan tanpa arti; dan *keempat*, hubungan individu yang tidak dapat diperkirakan.

Mudah-mudahan kita tidak sedang terjadi sebagaimana apa yang dikhawatirkan Luhman, munculnya “*Bodies without minds*”--manusia atau masyarakat tanpa makna; masyarakat yang tidak memiliki karier, serta ditegakkan oleh hubungan-hubungan sosial yang plastis. Masyarakat yang tidak memiliki kebahagiaan, tidak memiliki solidaritas, dan masalah cita rasa.

Anomi juga terjadi pada waktu disorganisasi meningkat ke tahap reorganisasi. Disorganisasi dalam arti ketidakserasian dari bagian-bagian dari suatu sistem (masyarakat), dan pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan-perubahan lembaga kemasyarakatan.

Bagi Robert King Merton, sebagaimana dijelaskan dalam karyanya mengenai perilaku adaptif, *anomi* yaitu keadaan di mana tidak ada lagi norma yang dapat dipegang teguh masyarakat. Keadaan ini akan menimbulkan perilaku menyimpang. *Anomi*, yang juga disebut anomalia itu, memiliki dua konsekuensi : (1) terhadap perilaku individu, di mana anomie mampu mendorong seseorang melakukan perilaku menyimpang; (2) menyebabkan masyarakat serempak melakukan perilaku menyimpang.

Mentalitas, perilaku menyimpang, dan budaya kekerasan, serta fenomena masyarakat anomali sebagaimana sinyal pada paparan di atas, kini juga telah menjadi bagian mentalitas, perilaku dan budaya baru masyarakat Bima. Sebagai realita, perkelahian antar dusun/kampung/desa, sebagai sampel, konflik Desa Renda dengan Desa Ngali yang diakhiri dengan aksi pemutusan jalan yang menghubungkan kedua desa tersebut, Desa Jati Baru dengan Desa Lela, Desa Belo dengan Tente, Desa Daru dengan Desa Rasabou., Kelurahan Kumbe versus Kecamatan Sape akibat ulah oknum “preman” yang bahkan melibatkan Kapolda NTB, konflik Desa Rompo dan Laju dengan Dusun Tanjung Mas Desa Sondo yang klimaksnya pembumihangusan kurang lebih 183 rumah penduduk, dan tragedi Desa Kalampa antara masyarakat dengan pihak aparat keamanan yang diakhiri dengan pembakaran Kantor Polsek Woha. Aksi kekerasan jenis lain, pembakaran prasarana/sarana pelayanan masyarakat sendiri, sebagai sampel, pembakaran kantor Desa Sondo, Desa Risa, Desa Dodu, Desa Jati Baru dan beberapa kantor pelayanan masyarakat lainnya.

Kemudian aksi kekerasan “*kanibal*” terus merebak, seperti pembakaran hidup-hidup pencuri di Nggembe dan Salama, pembakaran hidup-hidup warga Sape di Sila, dan sejumlah kasus main hakim sendiri masyarakat, termasuk aksi perusakan dan pembakaran rumah dengan modus santet dan juga pembunuhan terhadap dukun santet.

Aksi kekerasan semuanya menjadi fenomenal dan menjadi budaya kekerasan baru di Kabupaten Bima.

Pada panorama kelabu lain, sebagian masyarakat mulai meragukan (kalau tidak mau dikatakan tidak dipercaya !) akan eksistensi lembaga hukum; kurang menghargai lagi aparat keamanan; demikian juga birokrasi pemerintah, kewibawaannya tidak lagi disakralkan. Masyarakat lebih memilih solusi dengan cara pilihan mereka sendiri yaitu dengan main hakim sendiri atau penghakiman publik (*public vigilantism*).

Dengan diragukannya atau dengan tidak dipercayanya lagi eksistensi lembaga-lembaga formal tersebut, maka perlu dicarikan alternatif sebagai solusi-konstruktif : *Pertama*, pemberdayaan kembali dan optimalisasi peranan pranata-pranata sosial dan lembaga-lembaga adat. *Kedua*, fungsionalisasi, maksimalisasi peranan elit informal (elit adat, elit agama, elit pemuda, elit wanita, elit usahawan, elit cendikiawan dan elit

politik). Khususnya alternatif kedua, pinjam pendapat Schoorl (1988), bahwa justru dalam keadaan genting, peranan elit itu tidak dapat ditiadakan. Berarti pemberdayaan dan menemu-kenali elit sangat urgen dan esensial.

Penghakiman publik, secara tidak disadari kita sedang bermaia-ramai menuju masyarakat “kanibal”. Ini adalah sebuah malapetaka !.  
Semoga !!!

## **BAB XXXVII**

### **MASYARAKAT KOTA DAN PERILAKU MENYIMPANG**

“Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut”

(Robert M.Z. Lawang *dalam* Indianto M., 2004 : 147)

Paul B. Horton (Indianto M., 2004 : 148), “Penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.” Dan James Vander Zander (Indianto M., 2004 : 147), perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang.

Prilaku secara umum dapatlah dibagi menjadi dua macam bentuk, yaitu prilaku normal dan prilaku menyimpang. Menurut Kartini Kartono (1999 : 13) bahwa : “Prilaku normal adalah prilaku yang dapat diterima oleh masyarakat umum atau sesuai dengan pola kelompok masyarakat setempat, sehingga tercapai relasi personal dan interpersonal yang memuaskan. Sedangkan prilaku menyimpang adalah prilaku yang tidak sesuai atau

tidak dapat diterima oleh masyarakat umum dan tidak sesuai dengan norma masyarakat.” (Kartini Kartono, 1999 : 13)

Menurut Bruce J. Cohen (1983 : 218), “Penyimpangan bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.”

Penyimpangan merupakan perbuatan yang mengabaikan norma, dan penyimpangan ini terjadi jika seseorang atau sebuah kelompok tidak mematuhi patokan baku di dalam masyarakat. Biasanya kita mengaitkan penyimpangan dengan istilah-istilah perilaku negatif, seperti tindak pidana dan kebrutalan. Namun, orang yang bertindak terlalu jauh dari patokan umum masyarakat bisa juga disebut sebagai penyimpangan.”

Kartini Kartono (1997 : 9), “Deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai : tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-iri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan/populasi.”

Ditinjau dari sudut sosiologi, maka terjadinya perilaku menyimpang karena sebab-sebab : perilaku menyimpang karena sosialisasi; perilaku menyimpang karena anomie; perilaku menyimpang karena hubungan diferensiasi; dan perilaku menyimpang karena pemberian julukan.

#### ***PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL***

Perubahan masyarakat merupakan kenyataan yang dibuktikan oleh gejala-gejala seperti : depersonalisasi, adanya frustrasi dan apati atau kelumpuhan mental, pertentangan dan perbedaan pendapat mengenai norma-norma susila yang sebelumnya dianggap mutlak, adanya pendapat *generation gap* (jurang pengertian antar generasi) dan lain-lain. Memang ada tidaknya suatu perubahan masyarakat, yaitu terganggunya keseimbangan (*equilibrium*) antar satuan sosial dalam masyarakat, hanya dapat dilihat

melalui gejala-gejala ini. Perubahan-perubahan norma sosial yang demikian akan lebih jelas kelihatan dalam kehidupan masyarakat kota. Perubahan-perubahan pada masyarakat kota terutama disebabkan oleh : *pertama*, komunikasi yang lancar, penerangan atau informasi baik melalui radio, surat kabar, televisi dan lain-lain mengenai suatu hal lebih mudah diterima. *Kedua*, penduduk kota berasal dari berbagai suku, pertemuan antara suku ini lebih mudah mempengaruhi cara berfikir lama dan timbul pemikiran baru tentang kehidupan sosial. *Ketiga*, mata pencaharian penduduk kota kebanyakan pada bidang jasa, kondisi ini memungkinkan orang kota lebih dinamis. *Keempat*, kehidupan kota lebih berorientasi pada kehidupan ekonomi, segala sesuatu diperhitungkan dari segi ekonomi. *Kelima*, kota pada umumnya penduduknya padat, kepadatan penduduk ini menyebabkan mereka berjuang untuk hidup lebih giat dan lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya (BKKBN Pusat, 1998: 6).

Perubahan tersebut, banyak tingkah laku dan perbuatan yang pada dasarnya di luar norma agama, tetapi selalu dikerjakan seolah-olah perbuatan tersebut tidak dilarang agama, padahal kehidupan mereka semasih berada di desa asalnya tidak banyak masalah yang mereka hadapi, kebutuhan mereka tidak sebanyak kebutuhan orang di kota. Tingkah laku orang desa tidak seagresif orang kota, segala sesuatu dilakukan dengan penuh ketegangan. Oleh karena itu, kemajuan-kemajuan yang dicapai di desanya dalam segala bidang tidak secepat di kota. Tetapi dalam norma-norma sosial orang desa lebih dapat mempertahankan kehidupan atau kebiasaan adat-istiadatnya daripada orang kota.

Tingkat pendidikan yang makin maju, komunikasi yang makin terbuka telah membawa pengaruh positif terhadap sikap hidup manusia. Namun pada sisi lain terlihat bahwa dalam proses pembangunan bangsa yang telah tinggal landas, sedang terjadi proses transformasi nilai dari masyarakat agraris atau tradisional ke masyarakat industrial atau moderen. Perubahan nilai ini juga secara deras telah mempengaruhi pola dan perilaku kehidupan manusia yang dulu masih dianggap tabu. Gejala ini memberi peluang terjadinya perilaku seksual yang menyimpang, tindakan-tindakan kriminal, perjudian, penggunaan obat-obat terlarang, dan memperbesar kemungkinan terjadinya kebobrokan moral.

Sosiolog Amerika cenderung memandang bahwa perubahan sosial semacam itu sedikit banyak merupakan akibat dari perubahan normative, menurut pandangan ini : "Di mana penyimpangan dalam bentuk penolakan terhadap norma-norma yang ada dan pembentukan norma-norma yang baru adalah kekuatan pendorong utama dari perubahan sosial." (Paulus Wirutomo, 1998 : 68).

Pendapat tersebut memberi gambaran kepada kita bahwa perubahan-perubahan normatif seperti : perubahan nilai lama ke nilai baru atau dari nilai tradisional ke nilai moderen dapat mempengaruhi ekses-ekses yang tidak diharapkan. Kita mengetahui bahwa kobaran gejolak sikap atau perilaku generasi muda sangat ditunjang oleh vitalitas dan semangat yang tidak terkendali, demikian pula halnya dengan ekses-ekses yang tidak bertanggung jawab atau yang di luar batas norma agama. Padahal mereka mengetahui kalau perilaku semacam itu dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Perkembangan sosial kemasyarakatan pada perilaku generasi muda perlu dipahami, dimengerti, karena perkembangan sosial itu sendiri tidaklah dapat terpisahkan terpisah dari aspek-spek perkembangan lainnya, seperti : hubungan yang

dekat dengan perkembangan emosional, perubahan sosiologi, aktifitas intelektual dan gambaran diri dapat diamati dalam setiap bentuk perilaku generasi muda.

Bentuk perilaku generasi muda bermacam-macam sifat dan khasnya. Ada yang menunjukkan sikap egois, sportif, malas, enggan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan senang melakukan hal-hal yang negatif atau merusak kehormatan dirinya itu sudah merupakan sebagai bagian dari tradisi kehidupan generasi muda. Ataupun pada akhir-akhir ini tidak sedikit rumah-rumah kontrakan digunakan sebagai ajang perjudian, minum-minuman keras, penggunaan obat-obat terlarang, dan tempat perzinahan, serta rumah kontrakan tidak lagi berfungsi sebagaimana layaknya rumah orang terpelajar.

Ini sebagai akibat dari pengaruh perubahan sosial dan kebudayaan. Sekilas memang tidak tampak adanya hubungan antara perubahan sosial, tingkat pendidikan dan iptek yang maju, proses transformasi nilai dari masyarakat agraris atau tradisional ke masyarakat modern dengan tingkat perubahan perilaku yang menyimpang namun sesungguhnya sangat erat karena perubahan dan kemajuan tersebut berpengaruh langsung terhadap sendi-sendi perilaku kehidupan generasi muda. Akibat yang secara tidak langsung inilah yang merupakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan adanya tindakan yang tidak bertanggung jawab atau sikap dan perilaku yang menyimpang, misalnya : (1) Perubahan sosial yang tidak seimbang antara proses transformasi nilai dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial dapat menyebabkan perubahan perilaku generasi muda yang dulunya lugu menjadi beringas; (2) Pandangan hidup masyarakat dengan cara hidup yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan memperhitungkan segala sesuatu dengan nilai material; dan (3) Sikap hidup atau gaya hidup masyarakat kota menuntut biaya banyak, kebutuhan jauh lebih besar dibandingkan dengan masyarakat di desa.

Akibat dari keseluruhan ini menimbulkan gejala-gejala yang negatif, orang tidak segan-segan lagi melanggar norma-norma hukum dan kesusilaan demi tercapainya tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (M. Cholil Mansyur, 1989 : 113).

Pendapat tersebut pada kenyataannya memang benar, kehidupan masyarakat kota semata-mata hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan keluarga daripada memikirkan orang lain. Hal ini disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan pembangunan masyarakat kota yang serba canggih, dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, sehingga membuat masyarakat kota berpengaruh sikapnya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan batas-batas norma kemanusiaan.

Hampir semua bentuk kehidupan masyarakat kota dikejar oleh kehidupan duniawi, karena situasi menuntut demikian, kadang-kadang masyarakat kota tidak mengenal halal dan haram, asalkan mendatangkan hasil, bahkan mereka jarang pulang ke rumah, sehingga keluarganya di rumah kurang mendapatkan perhatian, akhirnya muncullah berbagai gejolak dan tindakan yang tidak diharapkan bagi keluarganya. Ini sebagai akibat dari lemahnya kontrol terhadap keluarganya. Demikian juga hal kehidupan generasi muda, kadang-kadang mereka terpancing dengan situasi perkembangan pembangunan di kota, karena segala sesuatu yang di inginkan selalu tersedia. Mereka lupa akan kehidupan dan adat istiadat di daerahnya karena di pengaruh oleh keindahan dan panorama kota yang serba mempesona dan menggiurkan, sehingga mereka tidak segan-segan melakukan tindakan yang melanggar batas-batas kenormalan. Ini semua sebagai akibat dari kelemahan diri mereka sendiri, dan kebanyakan mereka lepas



kontrol akan dirinya. Perubahan perilaku generasi muda sangat tergantung pada pengontrolan dan pengendalian dirinya sendiri, itulah kunci yang menghindari dari segala kejahatan moral.

Uraian itu semua, dapatlah di simpulkan bahwa susunan masyarakat dan pandangan hidup yang berubah pada masyarakat kota, sama-sama bekerja sekuat-kuatnya untuk melepaskan manusia dari tiap-tiap tindakan tradisional, dan susunan sosial yang baru juga memudahkan pengganti golongan atau kehidupan masyarakat yang satu oleh kehidupan masyarakat yang lainnya, serta pandangan hidup masyarakat kota yang menjurus pada sikap materialistis. Disini sudah nampak jelas dari sikap hidup maupun tingkah laku kota yang mengarah pada mementingkan diri pribadi, pengaruh kesibukan-kesibukan dan gaya hidup yang dinamis, yang mana mengakibatkan mereka untuk mengabaikan faktor-faktor sosial, seperti dalam hal lemahnya kontrol sosial yang dapat menimbulkan gejala-gejala yang negatif, misalnya : timbulnya dekadensi moral, tindak kriminal, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

Di samping itu, dengan semakin majunya ilmu-ilmu pengetahuan, teknologi dan arus informasi yang deras dengan di ikuti oleh perkembangan lembaga pendidikan tinggi di masyarakat perkotaan, juga akan mempengaruhi perubahan sikap atau perilaku manusia khususnya generasi muda pada tiap-tiap individu sudah jelas akan mempunyai sikap atau perilaku dan tujuan hidup yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dari keanekaragaman sifat hidup ini, maka menyebabkan munculnya berbagai macam konflik; yaitu konflik di antara pikiran, perasaan dan kemauan yang saling berbenturan dan berlawanan dalam kehidupan pribadi generasi muda, yang mana pada kenyataannya bahwa kehidupan perilaku generasi muda sekarang ini sangatlah kompleks dan problematik atau penuh dengan masalah-masalah perilaku yang tidak sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku di masyarakat.

### ***BENTUK-BENTUK PERILAKU***

Perilaku secara umum dapatlah dibagi menjadi dua macam bentuk, yaitu perilaku normal dan perilaku menyimpang.

Menurut Kartini Kartono (1999 : 13) bahwa : “Perilaku normal adalah perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat umum atau sesuai dengan pola kelompok masyarakat setempat, sehingga tercapai relasi personal dan interpersonal yang memuaskan. Sedangkan perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai atau tidak dapat diterima oleh masyarakat umum dan tidak sesuai dengan norma masyarakat.” (Kartini Kartono, 1999 : 13)

Menurut Bruce J. Cohen (1983 : 218), “Penyimpangan bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.”

Penyimpangan merupakan perbuatan yang mengabaikan norma, dan penyimpangan ini terjadi jika seseorang atau sebuah kelompok tidak mematuhi patokan baku di dalam masyarakat. Biasanya kita mengaitkan penyimpangan dengan istilah-istilah perilaku negatif, seperti tindak pidana dan kebrutalan. Namun, orang yang bertindak terlalu jauh dari patokan umum masyarakat bisa juga disebut sebagai penyimpangan.”

Kartini Kartono (1997 : 9), menjelaskan bahwa “Deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai : tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-iri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan/populasi.”

Kalau diperhatikan definisi perilaku menyimpang tersebut keadaannya sangat relatif. Dalam arti bahwa sesuatu dikatakan menyimpang tergantung konteks sosial budaya dan norma masyarakat setempat. Hal ini dapat berarti bahwa sesuatu dianggap menyimpang di suatu tempat, belum tentu menyimpang di tempat lain, demikian pula sebaliknya. Namun demikian, tentu ada sifat-sifat umum yang universal yang semua masyarakat menganggap hal itu termasuk perilaku menyimpang, misalnya tindakan penipuan, pengrusakan, pelecehan, dan semua yang termasuk tindakan kejahatan, di manapun tempatnya hal ini tentunya termasuk perilaku menyimpang.

### ***SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERILAKU MENYIMPANG***

Setiap masyarakat mempunyai tujuan-tujuan kebudayaannya, dan memiliki cara-cara yang diperkenankan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sebagai akibat dari proses sosialisasi, individu-individu belajar mengenal tujuan-tujuan kebudayaannya. Selain itu, mereka juga mempelajari cara-cara untuk mencapai tujuan yang selaras dengan kebudayaannya. Apabila kesempatan untuk mencapai tujuan-tujuan ini tidak ada, individu-individu itu mencari alternatif. Perilaku alternatifnya kemungkinan akan menimbulkan penyimpangan sosial. Apalagi jika tiap individu diberi kesempatan untuk memilih cara-cara mencapai tujuan kebudayaannya sendiri-sendiri, maka kemungkinan akan terjadi perilaku yang menyimpang semakin besar.

Ditinjau dari sudut sosiologi, maka terjadinya perilaku menyimpang karena sebab-sebab berikut : Perilaku menyimpang karena sosialisasi; Perilaku menyimpang karena anomie; Perilaku menyimpang karena hubungan diferensiasi; dan Perilaku menyimpang karena pemberian julukan.

Wujud perilaku menyimpang yang sering dilakukan oleh generasi muda menurut Kartini Kartono (1998 : 21-23) sebagai berikut : (1) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain. (2) Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman milieu sekitar. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan. (3) Perkelahian antargang, antarkelompok, antar sekolah, antarsuku (tawuran) sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa. (4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak a-susila. (5) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong; melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya; mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya. (6) Berpesta-pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan hemat dan menimbulkan keadaan yang kacau balau) yang mengganggu lingkungan. (7) Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain. (8) Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius; drugs) yang erat

bergandengan dengan tindak kejahatan. (9) Tindak pidana immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tendeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, *geltungsrieb* (dorongan menuntut hak) dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya. (10) Homoseksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada anak remaja disertai tindak-tindak sadistis. (11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan eksek kriminalitas. (12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen, dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin. (13) Tindakan radikal dan ekstrim dengan cara kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. (14) Perbuatan a-sosial dan anti-sosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, psikotik neurotik dan menderita gangguan-gangguan jiwa lainnya. (15) Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitis lethargical*), dan ledakan meningitis serta *post-encephalitics*; juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak adakalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol-diri. (16) Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Semoga !!!

## BAB XXXVIII WARGA KOTA DAN FENOMENA PERILAKU KOLEKTIF

"Terdapat enam kondisi pokok yang merupakan determinan bagi perilaku kolektif, yaitu :

"1. "*Structural conduciveness*"; 2. Tekanan struktural;  
3. Keyakinan umum; 4. Faktor-faktor pendorong;  
5. Aksi mobilisasi; dan  
6. "*Operation of social control*"  
(Neil Smelser *dalam* Bruce J. Cohen, 1983 : 339-340)

Agustus lalu, belasan rumah di dusun Oi Foo Kelurahan Kumbe, hangus terbakar akibat aksi kolektif warga Ntonggu, sebagai reaksi atas meninggalnya salah seorang warganya. Beberapa hari lalu, seseorang yang dicurigai pencuri, dihakimi massa di Dompu, dan ia tewas mengenaskan. Perlakuan main hakim sendiri atau pengadilan massa/rakyat oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan, akhir-akhir ini menunjukkan grafik yang semakin menanjak. Beberapa saat lalu, dukun santet di Dusun Nggarolo Desa PenanaE Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima, dicincang-cincang kemudian dibakar nyaris hangus. Seorang pencuri di Desa Kuta Kecamatan Monta Kabupaten Bima mengalami nasib sial yaitu tewas, lantaran dituduh mencuri ayam dan mesin pompa air, si pelaku dihajar babak-belur secara massal (penghakiman massa) selanjutnya dibakar. Di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, seorang anggota polisi, "dicurigai" komplotan perampok dibunuh, dan mobil yang dipakai untuk "aksi kejahatan" tersebut dibakar massa.

Baru-baru ini, peristiwa pengadilan atau penghakiman massa kembali menimpa warga di Desa Nowa Kabupaten Dompu yang mengakibatkan korban cacat seumur hidup lantaran dicurigai berselingkuh. Dan masih tidak terhitung lagi peristiwa pengadilan massa yang dilakukan oleh masyarakat.

Perlakuan penghakiman massa/publik, dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya, di Dompu dan Bima frekuensi dan kuantitasnya menunjukkan grafik yang kian melonjak, dan kualitasnya juga makin memprihatinkan. Penghakiman oleh massa atau main hakim sendiri terhadap tersangka telah merebak menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan. Menurut Thontowi Jawahir (2001 : 103) "Pengeroyokan, perkelahian masal, pembakaran atas orang-orang yang disangka melanggar hukum terus mengalir tanpa rintangan. Ada sebagian masyarakat memandang kekerasan massal yang brutal dan sadistis tersebut dianggap sebagai pengadilan rakyat (*people court*). Cara itu konon berlaku pada masyarakat primitif yang tidak beradab (*savage society*)."

Fenomena sosial anarkis tersebut, dapat saja disebabkan lemahnya kontrol negara di satu pihak, dan menguatnya kekuatan rakyat di pihak lain. Beberapa sarjana sosial, khususnya antropolog hukum mengakui bahwa penggunaan kekerasan semula berfungsi sebagai alat pengendali perilaku sosial.

Perilaku masyarakat brutal, agresif, konfrontatif, non-kooperatif, destruktif bukan saja berwujud pada pengrusakan terhadap harta benda, seperti bangunan, perumahan dan perkantoran (pribadi atau milik pemerintah), melainkan juga jiwa dan raga dari golongan masyarakat. Hasil survei wartawan Kompas sekitar bulan Juni 2001

menyebutkan, di wilayah Jabotabek delapan puluh empat kasus kekerasan, 56 telah menjadi korban keganasan massa. Sekitar 26 korban terbunuh disebabkan karena mereka dikerokoyok dan dibakar. Motif pencurian motor menjadi faktor pemicu tertinggi tewasnya korban dibakar.

Sosiolog hukum Roger Cotterel (Thontowi Jawahir, 2001 : 106) menegaskan bahwa “Peradilan rakyat dipandang sebagai bentuk informalisme dari sistem peradilan yang selalu terkait dengan tuntutan keadilan rakyat atau *popular justice*. Suatu keadilan yang dituntut masyarakat dan hanya terjadi ketika proses pendelegasian wewenang dari rakyat kepada penegak hukum tidak mampu berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.”

Tumbuh-suburnya pengadilan massa dalam masyarakat dapat dipahami sebagai suatu kerusakan sistem hukum dalam masyarakat. Fungsi polisi misal, dalam sistem hukum moderen melayani dan melindungi rakyat dari berbagai keterancaman dan melakukan pengadilan atas adanya kejahatan terkadang tidak berfungsi efektif. Jikapun polisi melakukan tindakan represif, tidak sedikit kasus di mana masyarakat memaksa polisi untuk menyerahkan pelanggar ke tangan mereka.

Bilamana fakta polisi di Indonesia dengan masyarakat tidak sebanding dengan keperluan hukum, maka faktor penyebab tidak berfungsinya penegak hukum secara wajar bisa dimaklumi. Akan tetapi, justru yang memprihatinkan, tidak berfungsinya penegak hukum disebabkan persoalan etika dan moralitas aparat penegak hukum termasuk polisi. Dalam kondisi ini, aparat kepolisian sangat ragu-ragu untuk menggunakan paksaan dan ketegasan terhadap pelanggaran, karena isu HAM begitu dominan. Seringkali korban-korban penjarahan tidak dapat diselamatkan lantaran timbulnya sikap *a priori* dari sebagian oknum aparat. Beberapa aparat yang menjadi korban kekerasan massal juga merupakan faktor penting dalam menurunkan tingkat kepedulian aparat.

Akumulasi dari persoalan-persoalan di atas, sebagian masyarakat mulai meragukan, kalau tidak mau dikatakan tidak dipercaya akan peranan lembaga-lembaga hukum; kurang menghargai lagi aparat keamanan; demikian juga birokrasi pemerintah, kewibawaannya tidak lagi disakralkan. Masyarakat lebih memilih solusi dengan cara pilihan mereka sendiri yaitu dengan main hakim sendiri atau penghakiman massa/pengadilan publik.

Penghakiman massa/rakyat atau main hakim sendiri merupakan suatu bias atau akibat dari perilaku kolektif. Perilaku kolektif merupakan ciri khas masyarakat yang kompleks seperti yang ada di kota-kota dan pada umumnya absen di kalangan masyarakat yang sederhana. Contoh tingkah laku kolektif misalnya *crowd behaviour*, yaitu tindakan orang yang berkumpul sebentar untuk secara bersama menanggapi suatu rangsangan.

Perilaku kolektif menurut Bruce J. Cohen (1983 : 338), yaitu terjadi apabila cara-cara mengerjakan sesuatu yang telah dikukuhkan secara tradisional tidak lagi memadai. Perilaku kolektif ditandai oleh pola-pola perilaku yang tidak tersusun, spontan, emosional, dan tak dapat diduga. Individu-individu yang terlibat dalam perilaku kolektif tanggap terhadap rangsangan tertentu yang mungkin datangnya dari orang lain atau peristiwa khusus.

Berbagai contoh perilaku kolektif antara lain : kerusuhan, gerombolan, faham-faham moderen, kebrutalan, kepanikan, dan perkembangan pendapat umum.

Menurut Sosiolog Neil Smelser *dalam* Bruce J. Cohen (1983 : 339-340) terdapat enam kondisi pokok yang merupakan determinan bagi perilaku kolektif, yaitu : “1. “*Structural conduciveness*”; 2. Tekanan struktural; 3. Keyakinan umum; 4. Faktor-faktor pendorong; 5. Aksi mobilisasi; dan 6. “*Operation of social control*”.”

Ciri-ciri *crowd* (kerumunan) menurut N. Daldjoeni dan Bruce J. Cohen sebagai berikut : “(1) *anomitas* : di situ orang kehilangan tanggungjawab pribadinya; (2) *impersonalitas* yang penting hanyalah afiliasi orang dengan *group* yang bersangkutan; (3) *sugestibilitas* : tanpa kritik ikut begitu saja; (4) penularan (*contagion*) : emosi ditularkan secara kumulatif; meskipun demikian *crowd behaviour* dapat terbatas juga, karena kebutuhan emosional pada individu dapat berlainan, masih ada tata tertib pribadi yang mengerem adanya pengaruh dari pemimpin dan adanya pengawasan dari pihak luar, misalnya polisi.” (N. Daldjoeni, 1997 : 58 dan Bruce J. Cohen, 1983 : 338).

Kemudian, kalau dikaji lebih mendalam tentang bentuk-bentuk *crowd* atau kerumunan tersebut dapat bermacam-macam. Ada yang disebut *audience*, *mob*, *lunching*, *riot*, *orgy*, dan *panic*. N. Daldjoeni dan Bruce J. Cohen, menjelaskan macam-macam bentuk *crowd* tersebut sebagai berikut : “*Audience* : *crowd* yang berbuat sesuatu atas tarikan satu rangsangan. *Mob* yaitu *crowd* yang bertindak dengan kekerasan. *Lunching mob* : *mob* yang mengeroyok untuk membunuh paling sedikit menganiaya atau menyiksa. *Riot* : ribut-ributan yang agresif, juga untuk melunturkan rasa permusuhan. *Orgy* : perbuatan nekad-ngawur akibat pemanjaan atau pembiaran tanpa kontrol. *Panic* : kegusaran-kebingungan pada *crowd*.” (N. Daldjoeni, 1997 : 59 dan Bruce J. Cohen, 1983 : 341).

Masyarakat massa (*mass society*) merupakan gejala baru dalam sejarah umat manusia karena munculnya setelah ada kota-kota besar yang penduduknya padat. Namun suatu massa bukan sekadar manusia yang banyak tetapi menurut Houlst *dalam* N. Daldjoeni (1997 : 59) : “suatu jumlah manusia yang relatif banyak, tersebar secara keruangan dan sifatnya anonim yang mereaksi satu atau lebih rangsangan, tanpa mengingat satu sama lainnya.”

Adapun Blumer (N. Daldjoeni, 1997 : 59) menjelaskannya demikian : “massa tak mempunyai organisasi sosial tanpa adat dan tradisi, tanpa tata tertib, tanpa struktur peranan status dan tanpa kepemimpinan yang mapan. Isinya hanya kumpulan individu yang serba berlainan tak terikat tak saling mengenal tetapi homogen selama perilakunya yang massal itu masih berjalan.”

Masyarakat massal terjadi pada tahap peralihan *Gemeinschaft* (ciri masyarakat desa) menjadi *Gesellschaft* (ciri masyarakat kota) penuh. Masyarakat tradisional masih dipimpin oleh kaum elite, tetapi pada yang massal itu tak perlu; orang elite dapat dihasut oleh orang biasa melalui propaganda atau kampanye. Contohnya : *rumor* (keributan), *craze* (main edan-edanan), *histerics* (seperti keranjingan), dan *fad* (perbuatan aneh dalam tempo singkat).

Dapatkah dicegah ? Erlangga Masdiana (*Harian Suara Pembaruan*, 20/5/ 2000) menawarkan beberapa pola pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi kekerasan massa. “*Pertama*, pihak-pihak terkait perlu mengaktifkan dan menumbuhkan kembali peran dari lembaga-lembaga sosial tradisional yang bisa menyelesaikan kasus pelanggaran hukum. *Kedua*, pihak aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus meningkatkan kinerjanya dan meyakinkan masyarakat bahwa hukum itu tegak demi keadilan. *Ketiga*, pemerintah harus melakukan proses transparansi penegakan hukum.

*Keempat*, pemerintah juga harus memiliki *political will* untuk memberdayakan lembaga-lembaga penegakan hukum. Dan *kelima*, media massa harus terus mengupayakan penyadaran masyarakat bahwa proses penegakan hukum adalah melalui peradilan.”

Di samping lima tawaran solusif-pemecahan di atas, alternatif preventif lain, Mulyana W. Kusumah mengajukan beberapa alternatif. “*Pertama*, menanamkan nilai-nilai keimanan dalam diri kita. *Kedua*, membina kembali nilai-nilai moral yang baik. *Ketiga*, meningkatkan rasa kepedulian sosial dan solidaritas sosial, baik dalam wujud saling tolong menolong maupun saling mengingatkan dalam kebenaran. Cara demikian membuat tindak kejahatan berkurang. *Keempat*, menjauhkan masyarakat dari sarana yang merusak moral, baik itu tempat-tempat maksiat maupun barang-barang yang terlarang. Dan *kelima*, konsisten dalam menegakkan keadilan. Sebab keadilan merupakan satu-satunya harapan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Kalau keadilan tidak ditegakkan bukan mustahil tindak kejahatan muncul akibat ketidakpastian hukum.”

Semoga !!!

**BAB XXXIX**  
**MASYARAKAT KOTA DAN TREND**  
**BUNUH DIRI**  
**(Telaah “*Le Suicide*”-nya Emile Durkheim)**

"Durkheim, membagi jenis bunuh diri ke dalam empat jenis klasifikasi, walau Durkheim hanya tertarik membahas pada tiga jenis saja. Pertama, "*egoistic suicide*" (bunuh diri egoistis); kedua, "*anomic suicide*" (bunuh diri akibat anomie atau ketiadaan norma); ketiga, "*altruistic suicide*" (bunuh diri altruistik); dan keempat, "*fatalistic suicide*" (bunuh diri fatalistik)"  
 (Ahmad Usman, *Harian Fajar Makassar*, 5 Juni 2000)

Akhir-akhir ini trend bunuh diri, menunjukkan grafik kian menanjak, dengan gaya dan motif yang multivariatif. Seorang siswa di Yogya, nekad bunuh diri karena kemiskinan keluarganya, sembari menulis surat wasiat. Seorang ibu muda bersama anaknya di sebuah tempat di Jawa nekad bunuh diri dengan gaya terjun bebas ke aliran sungai yang deras dan dalam. Lagi-lagi, seorang ibu di Yogya melakukan percobaan bunuh diri dengan sengaja meracuni dirinya dan ketiga anaknya, lantaran suami selingkuh. Dua bocah di tempat yang berbeda di Sumatera, mencoba bunuh diri dengan cara gantung diri, lantaran kepergok merokok dan orang tua tidak cepat membeli mobil mainan teman sepermainannya yang ia rusaki. Di Manado sana, seorang Pendeta juga bunuh diri. Seorang tenaga honor daerah di sebuah daerah, gantung diri gara-gara tidak lulus tes CPNS beberapa saat lalu. Kemudian, seorang narapidana gantung diri di Lembaga Pemasyarakatan lantaran tidak ditengok sanak famili. Kalau kita rajin mengikuti berita-berita tv, nyaris semua tv menayangkan berita bunuh diri, saban hari.

Di Hongkong lebih dari setengah juta orang per tahun melakukan bunuh diri, dengan cara terjun dari gedung bertingkat. Di Amerika, juga lebih setengah juta per tahun, dengan cara mempergunakan senjata api. Di Afrika, caranya agak tradisional, kalau tidak menggunakan obat serangga, mereka menggantung diri. Di Jepang, bunuh diri (dalam bahasa Jepang : "*seppuku*") menjadi budaya (*culture*), malah dianggap sebagai tindakan moral, yang dilakukan secara kolektif (misal gaya : "*harakiri*"), khususnya selama pemerintahan Tokugawa (1603-1867) .

Kaitan dengan bunuh diri sebagai tindakan moral ini, Nitobe (Thomas Santoso, 2002 : 36) menulis begini : "Sekarang banyak pembaca akan memahami bahwa *seppuku* (bunuh diri) bukanlah semata-mata proses bunuh diri. Ia merupakan suatu institusi yang sifatnya legal dan seremonial. Berdasarkan temuan di abad-abad pertengahan, *seppuku* merupakan suatu proses di mana para kesatria bisa menghapuskan kejahatan, memohon ampun atas kesalahan, membebaskan diri dari kehinaan, menebus teman mereka, atau membuktikan ketulusan mereka. Bila digunakan sebagai hukuman legal, *seppuku* dipraktekkan dalam upacara. *Seppuku* merupakan suatu pembaruan terhadap penghancuran diri, dan tidak seorang pun dapat melakukannya tanpa hati yang sangat dingin, dan sikap yang penuh ketenangan."



Di Kekaisaran Roma (31 SM – 476 M), filsafat agama dominan dari kelas menengah dan kelas atas, yakni *stoicisme*, sangat mendukung bentuk-bentuk bunuh diri dan memandangnya sebagai benteng terakhir untuk mencapai kebebasan dan harga diri bagi orang-orang pemberani.

Dengan mengacu pada trend bunuh diri yang makin meningkat itulah, mengilhami penulis membuka kembali beberapa literatur sosiologi yang membahas tentang bunuh diri.

Bunuh diri (*suicide*) adalah suatu gejala “heboh” yang menyimpan seribu satu macam teka teki misteri. Artinya, gejala bunuh diri bukan dilatari penyebab yang bersifat homogen. Sebab, tidak sedikit orang yang dinilai “alim” (indikatornya : rajin sholat, bahkan sering ke Masjid; kebaktian ke Gereja; aktif sembahyang di Pura; dan lain-lain rumah ibadah), tetapi tiba-tiba diberitakan bunuh diri. Akan halnya, perilaku bunuh diri tidak dimonopoli jenis kelamin tertentu, misalnya wanita yang dianggap rentan. Tidak sedikit laki-laki perkasa (macho, malah) yang terpaksa mengakhiri kontrak hidupnya : apa lewat seutas tali—gantungan diri; menegak racun; menembak diri sendiri; memotong urat nadi sendiri; menerjunkan diri ke tebing terjal; minum obat over dosis; dan lain-lain cara.

Lalu, apa kira-kira penyebab seseorang cenderung bunuh diri? Beberapa pengamat psikologi, menilai depresi sebagai penyebab utama. Misalnya, Jean Baechler (1979) telah berusaha menunjukkan dari berbagai tinjauan kasus bahwa depresi berkaitan dengan kecenderungan umum beberapa orang untuk “menyerah” dalam menghadapi masalah-masalah situasional yang besar.

Gottlieb dan Torney sebagaimana dikutip Soesilo (S. Simandjuntak, 1985 : 142-143), menggolongkan faktor pencetus terjadinya depresi ke dalam tiga bagian. Pertama, kehilangan “*love obyect*”. Misalnya ditinggal mati orang yang dicintai, ketakutan ditolak oleh orang yang ia cintai. Kedua, “*trauma narcissistic*.” Misalnya, kehilangan harga diri, kesulitan ekonomi, penyakit fisik, *rudapaksa*. Ketiga, hubungan-hubungan kompetitif.

Dengan hilangnya “*love obyect*”, ataupun faktor pencetus lain, bisa membuat seseorang menjadi agresif dan punya persaan kebencian yang dikembangkan menjadi mekanisme *introjeksi*. Pada keadaan depresi berat, agresivitas bisa menyebabkan orang bunuh diri.

Gottlieb dan Torney membagi depresi menjadi beberapa bagian. Pertama, “*grief reaction*” yaitu timbulnya reaksi-reaksi sedih. Kedua, “*reactive depression*”, pada keadaan ini di samping gejala-gejala depresi juga didapatkan gejala kecemasan. Pada umumnya munculnya gangguan tidur. Ketiga, “*manic depression reaction*”, penderita dalam tingkat ini cenderung mendapat serangan berulang-ulang. Keadaan depresi sangat menyolok pada pagi hari. Kadang ia terbangun pagi-pagi sekali, kadangkala justru susah tidur. Dalam derajat ini penderita sudah memperlihatkan gejala somatik.

Sheidman dan Farberow (Simandjuntak, 1985 : 144) membagi peristiwa bunuh diri menjadi empat. *Pertama*, ada golongan yang melakukan bunuh diri karena memandang sebagai satu-satunya alternatif terbaik, misalnya menyangkut harga diri. Hal ini banyak menjadi alasan praktek “*hara-kiri*” di Jepang. *Kedua*, golongan orang tua yang putus asa, sehingga memandang bunuh diri merupakan pilihan terbaik. Ini terdapat dalam beberapa kasus di Gunung Kidul. *Ketiga*, ada pula yang membunuh diri lantaran psikotik, dalam hal ini bunuh diri merupakan jawaban terhadap halunisasinya.

Dan *terakhir*, bunuh diri sebagai balas dendam di mana penderita percaya dengan tindakannya akan mengakibatkan rasa bersalah pada orang lain yang ia benci.

Dengan tidak bermaksud mengagung-agungkan Emile Durkheim, berikut ini penulis sengaja mengajak pembaca yang budiman, untuk membuka kembali salah satu karya monumental dan telah dianggap “*grand theory*” dari Emile Durkheim yang bertitel “*Le Suicide*” (1897). Ini juga merupakan tanggung jawab moral penulis yang pernah mengenyam ilmu sosiologi, yang di dalamnya banyak menelaah persoalan-persoalan yang sifatnya patologik.

Dalam melahirkan teori yang telah dianggap “*grand theory*”—teori yang mendunia ini, Durkheim telah mengikuti prosedur penelitian ilmiah baku dengan menggunakan skala rasio perhitungan; skala nominal kelompok keagamaan; kemudian skala interval tahun kalender; dan skala ordinal status perkawinan (Walter L. Wallace, 1990).

“*Le Suicide*” merupakan koreksi ilmiah sekaligus bantahan atas latar bunuh diri yang dikemukakan pakar dan sejumlah mitos—anggapan, analisis “keliru (!) latar bunuh diri yang terlanjur beredar di masyarakat zaman itu, yang telah diyakini sebagai suatu kebenaran yang “haram”dibantah.

Misalnya : *pertama*, bunuh diri karena imitasi sebagaimana diyakini Gabriel Tarde. *Kedua*, bunuh diri karena kemiskinan. Pandangan kedua ini dikritisi Durkheim, sembari memberi contoh. Italia dan Spanyol adalah dua negara miskin pada zaman Durkheim, namun angka bunuh dirinya rendah. *Ketiga*, bunuh diri karena faktor kejiwaan—penyakit jiwa. Paham ketiga inipun dikoreksi habis Durkheim, kemudian memberi ilustrasi, Norwegia adalah negara yang penduduknya banyak mengidap penyakit jiwa, tetapi angka bunuh dirinya juga rendah. Sementara, Denmark yang penduduknya mengidap penyakit jiwa relatif rendah, justru angka bunuh dirinya tinggi.

Anggapan keempat yang “telanjur” diyakini benar sebagai penyebab bunuh diri yaitu disebabkan iklim, pun ditanggapi Durkheim. Demikian pula, paham yang menganggap bunuh diri dilatari alkoholisme, lagi-lagi dibantah Durkheim.

Selain memolemik pendapat sebagaimana dikemukakan di atas, Durkheim pun dengan arif, gagah, berani, bijak nan jantan meluruskan pemahamannya sendiri yang semula diyakini paling sahib, bahwa bunuh diri ada kaitannya dengan tiga faktor, yaitu predisposisi psikologis tertentu, faktor keturunan, dan kecenderungan manusia untuk meniru orang lain.

Setelah Durkheim mendefinisikan bunuh diri secara lugas sebagai “setiap kematian yang merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan positif atau negatif oleh korban itu sendiri, yang mengetahui bahwa perbuatan itu akan berakibat seperti itu” (L. Laeyendecker, 1983), maka ketiga faktor yang “dicurigai” Durkheim di atas tidak memberikan penerangan yang memuaskan. Sebab menurut data statistik kasus-kasus bunuh diri “tidak bersebar sama rata” antara semua orang dan semua golongan, pada ketiga faktor tadi tersebar secara sama rata. Misalnya, lebih banyak orang laki-laki membunuh diri daripada perempuan, lebih banyak orang Protestan daripada Katolik, lebih banyak orang Katolik daripada Yahudi, lebih banyak orang bujang daripada orang kawin, lebih banyak militer daripada sipil. Kita tidak dapat menyatakan bahwa ketiga faktor tadi lebih sering dikemukakan di kalangan orang laki-laki, orang Protestan, orang bujang atau militer. Malah berdasarkan kenyataan, lebih

banyak orang Yahudi menderita gangguan psikis daripada orang Kristen, padahal presentase kasus bunuh diri paling kecil di antara mereka (K.J.Veeger, 1986).

Dengan realitas di masyarakat demikian adanya, akhirnya Durkheim berkesimpulan bahwa berarti ada faktor lain yang berperan dalam menyebabkan fenomena bunuh diri, yaitu faktor sosial, dan bukan faktor individu. Faktor sosial yang dimaksud Durkheim adalah tingkat atau tipe integrasi sosial. Artinya, semakin kuat, erat, rekat integrasi atau solidaritas seseorang, semakin rendah angka bunuh dirinya, dan sebaliknya, kian renggang, lemah, longgar integrasi atau solidaritas seseorang, maka kian tinggi angka bunuh dirinya.

Durkheim, membagi jenis bunuh diri ke dalam empat jenis klasifikasi, walau Durkheim hanya tertarik membahas pada tiga jenis saja. Pertama, “*egoistic suicide*” (bunuh diri egoistis); kedua, “*anomic suicide*” (bunuh diri akibat anomi atau ketiadaan norma); ketiga, “*altruistic suicide*” (bunuh diri altruistik); dan keempat, “*fatalistic suicide*” (bunuh diri fatalistik).

“*Egoistic suicide*” yaitu bunuh diri yang terjadi di tengah masyarakat yang dipicu oleh rendahnya integrasi atau solidaritas sosial individu dengan kelompok masyarakat. Sedang “*anomic suicide*” (*normlessness suicide*), adalah bunuh diri yang diakibatkan oleh kekaburan norma yaitu suatu keadaan yang mana seseorang merasa kehilangan pegangan hidup yang disebabkan oleh terjadinya perubahan-perubahan sosial yang berjalan begitu cepat. Baik “*egoistic suicide*” maupun “*anomic suicide*” merupakan pencerminan rendahnya integrasi atau solidaritas sosial.

Lalu “*altruistic suicide*” ? Bunuh diri altruistik merupakan hasil dari suatu tingkat integrasi sosial yang terlampau kuat dengan kelompoknya; merupakan hasil salah satu dari dua kondisi. Pertama, kehidupan individu. Sebagai contoh, bunuh diri di kalangan pilot-pilot yang bertugas pada Angkatan Udara Jepang selama Perang Dunia II yang dikenal dengan sebut “*kamikaze*”, dan juga termasuk “*harakiri*”-nya bangsa Jepang. Kedua norma kelompok itu dapat menuntut pelaksanaan tugas-tugas yang begitu berat untuk dapat dicapai sehingga individu-individu itu mengalami kegagalan walaupun mereka sudah menunjukkan usaha yang paling optimal.

Dan terakhir adalah “*fatalistic suicide*”, yaitu lawan bunuh diri anomik, yang timbul dari pengaturan kelakuan secara berlebih-lebihan, misalnya dalam rezim-rezim yang sangat keras dan otoriter.

Itulah telaah ringan “*Le Suicide*”-nya Emile Durkheim—Si “Bapak Teori Bunuh Diri”, yang lahir di Desa Epinal, Prancis pada tanggal 15 April 1858.

Semoga !!!

## **BAB XXXX**

### **KOTA DAN PERMASALAHAN TRANSPORTASI**

(“Ketika Jalan Raya Kota Divonis sebagai “Pembunuh“ Berdarah Dingin”)

“Alkisah ! Suatu pagi nan sejuk di Singapura, seorang laki-laki paroh baya berlari pagi bersama anjing piaraannya. Ketika sampai pada *traffic light* atau tanda rambu lalu lintas, tiba-tiba anjing tadi terperangkap lampu tanda lalu lintas berwarna merah, sementara seorang paroh baya tadi yang sekaligus tuannya telah lewat jauh. Si anjing terpaksa terpisah dengan tuannya. Biasa, anjing selalu susul di belakang tuannya. Apa yang terjadi dengan anjing tadi? Ia, harus sabar, tabah, dan ikhlas menunggu hingga lampu tanda lalu lintas berwarna hijau, sebagai pertanda : boleh lewat !

Apa yang bisa kita tangkap dari kisah di atas? Anjing tadi begitu disiplin. Nah, bagaimana dengan pengendara kita?

Disiplin ! Itu kata kuncinya. Secara konseptual, disiplin lebih merujuk pada sikap yang selalu taat kepada aturan, norma, dan prinsip-prinsip tertentu. Disiplin mengandung makna sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri dengan tenang dan tetap taat walaupun situasi yang sangat menekan sekalipun. Disiplin mengikuti tata tertib peraturan yang harus ditaati.

Disiplin adalah berpegang teguh kepada dan mentaati prinsip-prinsip ...; disiplin adalah ketaatan yang sifatnya impersonal tidak memakai perasaan dan tidak memakai pamrih atau kepentingan pribadi; ... (Prajudi Atmosudirjo, 1981 : 29). Disiplin itu erat hubungannya dengan sikap mental dan moral yang melekat pada diri seseorang (Wursanto, 1981 : 121).

Tuduhan Walikota Drs.H.M.Nur A.Latief tentang “*Ojek sebagai pembunuh di jalan raya nomor dua setelah demam berdarah*” (malah nomor wahid !, penulis) beberapa saat lalu mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari pengelola ojek Kota Bima yang merasa sangat dirugikan atas pernyataan tersebut. Pernyataan ini, tidak sekadar tuduhan membabi-buta, tanpa realita di lapangan. Selang beberapa hari dari pernyataan tersebut, *Harian Bimaekspres* memuat kecelakaan lalu lintas beruntun dalam sehari, pada beberapa tempat berbeda. Termasuk sahabat H.M. Natsir Ali seorang wartawan *Harian Bimaekspres*, menulis secara bersambung dalam nuansa “seram” tentang kecelakaan jalan raya dengan mengangkat kasus “Doro Mbolo” dan alhamdulillah berdasarkan berita *Bimeks* (15/6/2004), Tim dari CV Prima Cipta Mataram bekerja sama dengan Dinas Kimpraswil Propinsi NTB, telah melakukan survai dan penelitian terhadap jalan negara yang bermasalah tersebut.

Apa yang dikemukakan Walikota Bima tersebut, tidaklah mengada-ada, bahkan Pudjo Suharso (*Harian Suara Pembaruan*, 25/1/1998) menilai, selama ini kecelakaan jalan raya menduduki peringkat teratas dibandingkan kecelakaan lainnya yang membawa korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit jumlahnya. Lanjutnya kalau

kita cermati, kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan di jalan raya hampir sebanding dengan dana APBN kita tiap tahun.

Sejumlah penyebab tingginya angka kecelakaan di jalan raya, salah satu di antaranya yakni tidak adanya etika pengemudi di jalan raya, atau dengan kata lain : pengemudi doyan melanggar peraturan.

Pelanggaran terhadap lalu lintas, secara hukum tidak berbeda dengan pelanggaran hukum lainnya. Keputusan untuk melanggar peraturan, ditentukan oleh berbagai faktor. John S. Carrol dan John Payne (Djamaludin Ancok, *Harian Surya*, 11/10/1995), pakar psikologi hukum mengajukan formula tindak pelanggaran hukum yang dilakukan seorang, sebagai berikut : “ $SU = [p(s) \times G - p(f) \times L]$ .” Di mana SU (*Subjective Utility*), ialah pertimbangan si pemakai jalan untuk melanggar atau tidak melanggar peraturan. Sedangkan P(S) (*Probability of Success*), ialah pertimbangan si pelanggar sejauhmana dia aman (tidak tertangkap) dalam melakukan pelanggaran (hemat waktu, bensin, merasa bangga karena melanggar, dll.). Adapun P(F) (*Probability of Faiture*), ialah pertimbangan besar-kecilnya kemungkinan tertangkap dalam melanggar peraturan. Terakhir, L (*Lorse*), ialah besarnya kerugian akibat tertangkap oleh petugas.

Bila dilihat dari formula di atas, beratnya hukuman pelanggaran lalu lintas akan menentukan kepatuhan akan membuat orang lebih berhati-hati.

Dalam artikel ini, penulis tidak akan mengupas banyak tentang ojek dan etika di jalan raya, akan tetapi mencoba urun-rembuk tentang transportasi, walaupun judul dipoles semenarik seperti itu.

Dalam masyarakat modern, sarana transportasi mempunyai dua fungsi yang penting (Sukirna dalam H. Khairuddin, 2000). *Pertama*, sebagai alat modal, untuk mengangkut orang pergi ke tempat kerja mereka atau memindahkan barang jadi dan setengah jadi dari suatu tempat ke tempat lainnya; dan *kedua*, sebagai barang akhir, yaitu untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam bentuk sebagai alat pengangkutan untuk bepergian, berekreasi, dan berbagai keperluan kehidupan sosial lainnya.

Apa yang sementara dikerjakan Pemkot Bima berkenaan dengan perbaikan, pelebaran jalan, dan (akan dilakukan !) pembuatan jalan baru adalah sebagai salah satu upaya mengatasi transportasi, dan upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang acapkali menelan korban, di samping bernuansa ekonomis dan politis. Berkenaan dengan korelasi antara kecelakaan dan transportasi--jalan raya ini, menarik apa yang dikemukakan Djamaluddin Ancok (*Harian Surya*, 11/10/1995), penataan tata ruang kota adalah awal dari penataan ketertiban lalu lintas. Karena itu, kehadiran pihak kepolisian dalam perencanaan tata kota menjadi keharusan. Selain itu, pembuatan jalan memerlukan keterlibatan pihak yang paham masalah perilaku manusia. Banyak jalan menjadi pembunuh manusia, karena kurang diperhatikannya masalah perilaku manusia (masalah persepsi, ekspektasi, ilusi, *self-hipnotic* yang terjadi karena kondisi jalan). Di sini kita membutuhkan partisipasi banyak pihak : psikolog, sosiolog, bukan sekadar arsitektur *an sich*.

Beberapa persoalan transportasi kota, di antaranya : *pertama*, kemacetan lalu lintas (*traffic jams*) dan lalu lintas merambat (*traffic congestion*). *Kedua*, kesemrawutan lalu lintas, karena campur aduk antara : transportasi lokal dengan transportasi antarregional; kendaraan lambat dengan kendaraan cepat; kendaraan tradisional/tidak bermesin dengan kendaraan bermesin; dan pedagang kaki lima di trotoar dengan

pejalan kaki, di mana terjadi perampasan hak pejalan kaki oleh pedagang kaki lima. *Ketiga*, polusi udara dari knalpot mobil-mobil tua. *Keempat*, kendaraan umum (bus, angkot, angdes) yang tidak aman, nyaman, dan tidak tepat waktu.

Problema ketertiban lalu lintas di masa depan semakin ruwet dan kian banyak korban kecelakaan. Ada beberapa penyebab, di antaranya : *pertama*, peningkatan jumlah penduduk masih tinggi, menyebabkan makin banyaknya jumlah anak yang akan turun ke jalan. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, menyebabkan mereka mampu membeli kendaraan. Jumlah kendaraan di jalan semakin meningkat. Ada pendapat bahwa laju pertumbuhan jumlah pengguna motor sudah dianggap tidak rasional lagi karena telah mencapai 75 persen dari total seluruh moda kendaraan bermesin, termasuk kendaraan pribadi roda empat dan angkutan umum (*Warta Kota*, 19 Januari 2009), sehingga jumlah sepeda motor tersebut pada akhir tahun 2008 tercatat 49 juta (data Mabes Polri) dengan pertumbuhan secara nasional 10 persen per tahun (IGN Suprpto, *Kompas*, 8 Mei 2009).

*Kedua*, berubahnya perilaku masyarakat akibat globalisasi dan pengaruh sistem kapitalis, membuat manusia semakin rendah toleransi sosialnya dan mudah kena stress akibat persaingan hidup. Ini, menyebabkan orang semakin udah marah dan ugall-ugalan dalam berlalu lintas. Juga bila pembangunan kita kurang berhasil dalam mengurangi kesenjangan sosial, besar kemungkinan kecemburuan sosial ditumpahkan ke jalan raya, dengan cara tidak mentaati peraturan lalu lintas.

Walaupun terkesan kadaluarsa, laporan dari *World Bank* (“*Urban Transport*” *World Bank Paper*, Washington dalam Eko Budihardjo dan Sudanti Hardjohubojo, 1993 : 156), yang menjelaskan bahwa, “pada akhir dekade ini penduduk kota akan berkembang lipat dua, sedangkan kepemilikan mobil akan berlipat tiga.”

Apa yang dikemukakan di atas, seandainya pernyataan tersebut adalah sebuah hipotesis atau dugaan sementara dalam sebuah penelitian ilmiah, maka kini benar-benar telah mendekati kebenaran dengan hasil yang cukup signifikan atau kepercayaan kebenaran yang begitu tinggi. Berdasarkan laporan, bahwa pasar mobil benar-benar menggila sejak kuartal terakhir tahun 1990 yang lalu. Bahkan karena tidak berimbang antara permintaan dengan kemampuan industri mobil, mantan Direktur Utama Indomobil Subronto Laras (Eko Budihardjo dan Sudanti Hardjohubojo, 1993 : 158), mengibaratkan bahwa pembeli mobil kini serupa dengan “orang mau menonton bioskop, tapi karcis di loket habis, sehingga mereka harus terpaksa membeli karcis dari calo dengan harga yang pasti lebih tinggi dari harga resmi.” Permintaan masyarakat dari seluruh jenis mobil, baik yang berupa minibus, kendaraan serbaguna (*jeep*), kendaraan niaga (*truck*), maupun sedan, melonjak dengan drastis.

Mobil merupakan alat transportasi yang selama ini dan akan terus berlanjut memiliki dampak yang luas terhadap kota-kota di negara-negara industri. Keadaan tersebut juga dialami oleh bangsa-bangsa yang sedang berkembang, sejalan dengan pertumbuhan komunitasnya dan semakin tingginya pendapatan sehingga memungkinkan meluasnya kepemilikan mobil.

Dampak dari pemakaian mobil dapat dijumpai di berbagai tempat. Menurut Melville C. Branch (1996 : 59), dampak tersebut meliputi : “pola dan perancangan detil jalan, penyediaan tempat parkir, pengendalian lalu lintas, pencemaran udara, kecelakaan lalu lintas, mobilitas, biaya konstruksi, biaya transportasi, citra dan gengsi,

dan yang akhir-akhir ini berkembang adalah mudah berubahnya harga bahan bakar minyak.”

Dengan banyaknya mobil yang beroperasi di jalan, maka konsekuensi lainnya yaitu timbulnya persoalan yang berkenaan dengan lalu lintas. Salah satu di antara sekian persoalannya, adanya kerawanan di jalan raya yakni kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan sendiri mengandung makna yakni suatu bencana yang berhubungan dengan lalu lintas. Atau secara lengkap, kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka lebih dahulu yang mengakibatkan kematian, luka-luka atau kerusakan harta benda dan menimbulkan rasa heran dan tercengang bagi pihak yang melihatnya.

Dari kondisi tersebut, akan terlihat bahwa semakin lama permasalahan lalu lintas akan semakin menumpuk, misalnya : kecelakaan lalu lintas, kebisingan, pencemaran yang berupa debu, bau maupun getaran. Jalan-jalan berskala manusia yang semula terasa akrab dan bersahabat dengan lingkungannya kini menjadi pengab dan tidak aman karena “dijejali” berbagai jenis kendaraan.

Otto Sumarwoto dalam Eko Budihardjo dan Sudanti Hardjohubojo (1993 : 160) juga menyatakan bahwa dewasa ini pertumbuhan lalu lintas di jalan tol merupakan kurva eksponensial. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan jumlah kendaraan yang melewati jalan tol itu semakin lama semakin membesar. Kurva semacam ini bagi ekologi merupakan ancaman, karenanya kurva ini disebut *overshoot and collapse*, yaitu melampaui daya dukung dan kemudian menuju keambrokan.

Keambrokan lalu lintas diperkirakan akan disebabkan oleh kemacetan yang semakin parah. Untuk mengatasi hal itu, haruslah dibuat jalan yang seimbang dengan pertumbuhan lalu lintas dan ini mengandung konsekuensi bahwa laju pembuatan jalan harus eksponensial pula. Namun hal ini cukup sulit dilakukan karena adanya beberapa kendala yaitu terutama sekali lahan dan ruang yang sudah sangat terbatas, di samping keterbatasan dana.

Transportasi memiliki posisi strategis dalam pembangunan bangsa dan negara, dan hal ini terbukti dengan adanya kebutuhan mobilitas penduduk yang intens dan tinggi. Transportasi merupakan sarana yang sangat urgen dalam memperlancar roda pembangunan maupun roda perekonomian. Demikian juga, transportasi dapat memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pula pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang. Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Dengan menginsyafi peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan raya harus ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

### **SINDROM KOTA**

Kota terutama kota-kota besar dijejali dengan puspa-ragam sindrom kasus patologi sosial, mulai dari gelandangan, lumpen-proletar, perjudian, urbanisasi, radikalisme,

pengangguran, slum area, rasionalisme, kemiskinan, pornografi, kerusuhan, pertentangan SARA, perkelahian kelompok, jual beli anak, inseminasi, samen leven, korupsi, pencopetan/perampokan, pencurian, penodongan, promiskuitas, sadisme, histeria, kebosanan hidup, bunuh diri, stress, kepadatan penduduk, dan deretan patologi sosial lainnya, termasuk di dalamnya persoalan transportasi yang tidak jarang menciptakan gejala-gejala sosial, seperti unjuk rasa, kerusuhan, pemogokkan sebagai pengaruh tak langsung (bahkan pengaruh langsung !) kestressan dan kefrustrasian pemakai jalan akibat kemacetan lalu lintas.

Di beberapa kota besar di banyak negara saat ini, kesemrawutan mencapai kondisi yang akut. Kota-kota besar di Jepang, Amerika, dan Eropa, misalnya terpasung dalam situasi ketidakjelasan (*confused*), tanpa dasar (*grundless*), serta mengawang-awang (*unreal*), sehingga terasa “menyesakkan”, tidak terkecuali di bidang transportasi.

Kepemilikan sarana-sarana transportasi merupakan “*trade mark*” sekaligus “*life style*” penghuni kota dan dampak pemakaiannya semakin luas, seperti pola dan perancangan detil jalan, penyediaan tempat parkir, pengendalian lalu lintas, pencemaran udara, kecelakaan lalu lintas, mobilitas, biaya konstruksi, biaya transportasi, citra dan gengsi, dan beberapa saat lalu berkembang adalah berubahnya harga bahan bakar minyak.

Dalam sub artikel ini, penulis akan menyoroti atau merefleksi eksistensi transportasi dan sindrom gejala sosial di perkotaan (sebuah telaah sosiologis). Memperbincangkan transportasi, maka variabel yang menonjol dan selalu muncul ke permukaan adalah kemacetan dengan puspa-ragam konsekuensinya.

Situasi dan kondisi jalan kota, secara harfiah banyak dirasakan oleh masyarakat awam, terutama soal kemacetan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas di kota. Masalah umum jalan perkotaan, terutama di kota metropolitan adalah kemacetan. Masalah mode transportasi pun menunjang kemacetan itu, terutama angkutan umum perkotaan. Sebenarnya, dari rencana umum tata ruang wilayah, bisa membantu solusinya, yaitu mengetahui kemungkinan wilayah pengembangan dan pelebaran jaringan jalan. Bahkan membuka jaringan jalan baru untuk mengatasi lalu lintas dan mobilitas masyarakat kota yang cukup tinggi.

### **FAKTOR PENYEBAB**

Beberapa faktor dominan yang menyebabkan kemacetan, di antaranya : *pertama*, *side friction*. Dengan adanya pasar, plaza, toko, bangunan sosial dan komersial, banyak orang hilir mudik di sepanjang jalan. Belum lagi kendaraan keluar masuk proyek dan bangunan di pinggir jalan, parkir tak teratur, angkutan umum yang menaik-turunkan penumpang di sepanjang tempat, pangkalan ojek, sepeda dan hambatan samping lainnya. *Side friction* membesar dan badan jalan menyempit, hingga perlu keterlibatan polisi untuk mengatur lalu lintas.

*Kedua*, trafik dan geometrik jalan. Penempatan dan konstruksi *U-turn* yang kurang tepat, dimensi *taper* untuk pemberhentian angkutan umum tak terpenuhi, serta kinerja *traffic light* dan *mix traffic* yang heterogen mengakibatkan antrean panjang dan kemacetan. *Ketiga*, rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan tak seimbang, sehingga kapasitas jalan mengecil. Konsep *three in one* dan semacamnya tak berhasil, jika rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan tidak diperkecil. *Keempat*, psikososial. Perilaku aparat dan masyarakat pengguna jalan juga berperan



mengakibatkan kemacetan. Walaupun kondisi geometrik jalan bagus, jika aparat dan masyarakat tak disiplin, kemacetan tak terselesaikan sampai kapan pun.

*Kelima*, proyek temporer, seperti pelebaran, *overlapping*, rehabilitas jalan, jembatan dan instalasi utilitas (PLN, PDAM, Telkom, Perum Gas, Pertamina, dan lain-lain). Atau pembangunan gedung, komersial besar bertingkat yang kurang memperhatikan penempatan alat berat, dan bahan-bahan material bangunan lainnya. *Keenam*, secara ekonomis, akibat kemacetan membuang biaya pembangunan sangat besar, langsung atau tidak langsung. *Ketujuh*, dampak psikososial. Kemacetan itu menimbulkan perasaan jenuh, stress, dan frustrasi.

*Kedelapan*, dari segi tata kota, kemacetan menurunkan kinerja kota. Pemandangan kota menjadi buruk dan menjatuhkan citra kota. Secara teknis akibat kemacetan akan memperpendek umur rencana jalan. Karena beban statis akibat kemacetan cenderung lebih berat dari beban dinamis, sehingga merusak struktur perkerasan. Akhirnya berdampak ekonomis, yaitu biaya ekonomi tinggi untuk rehabilitasi.

### **DAMPAK KEMACETAN**

Lalu, apa dampak dari kemacetan di jalan raya ? Beberapa rincian dampaknya, di antaranya : *Pertama*, dari segi teknik lalu lintas, kemacetan memperpanjang besarnya waktu tempuh dari tempat asal ke tujuan. Ini sangat merugikan pihak pengguna jalan, karena tak bisa mengantisipasi waktu perjalanan. *Kedua*, menimbulkan pemborosan secara langsung, karena bahan bakar yang terbuang percuma. Tak langsung, waktu dan uang pun terbuang. *Ketiga*, polusi asap buangan knalpot kendaraan mengganggu kesehatan. Kalau toh kendaraannya karena AC, tapi freon merusak ozon dan mengancam bencana global di masa depan. *Keempat*, secara makro, terutama di kota besar seperti Jakarta, Suarabaya, dan beberapa kota besar lain, mempengaruhi persepsi, reaksi dan perilaku warga. Dan *kelima*, lingkungan akan terganggu asap buangan dari knalpot kendaraan akibat kemacetan, menimbulkan polusi dan dampak lainnya. Hal ini sangat terasa menimpa polisi lalu lintas, seperti stress dan sakit paru-paru. Pengemudi pun merasa jenuh, tak nyaman, bosan, mengurangi konsentrasi mengemudi dan membuka peluang terjadi kemacetan.

Di samping itu, kepadatan lalu lintas, menurut Sadono Sukirno (1985), menimbulkan beberapa jenis biaya sosial dan ekonomi pada masyarakat, yaitu : (1) mempertinggi tingkat kecelakaan; (2) mempertinggi biaya pemeliharaan kendaraan karena penggunaan minyak yang lebih banyak dan mempercepat kerusakan kendaraan; (3) mempertinggi ongkos pengangkutan; (4) menimbulkan masalah pencemaran udara yang serius.

Ini perlu penanganan segera, jika menghendaki kota yang bercirikan tertib, rapi, nyaman, aman dan indah dipandang mata.

Kembali ke persoalan pembangunan jaringan jalan—transportasi. Pembangunan transportasi, berarti terwujudnya jaringan jalan yang mampu (1) mendukung berbagai kegiatan sektor yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan terwujudnya perubahan struktur perekonomian, yang semula bertitikberat pertanian menjadi industri, didukung pertanian yang tangguh; (2) mendukung keseimbangan dan pemerataan yang semakin tinggi dalam pertumbuhan antar daerah, melalui dukungan pemanfaatan potensi di daerah-daerah; dan (3) mendukung terwujudnya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Sasaran pembangunan transportasi dalam PJP II adalah mendukung terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal melalui penyelenggaraan transportasi nasional yang efisien. Dalam kaitan itu, pada akhir PJP II keterpaduan antarmoda transportasi dapat terwujud. Di samping itu, dapat dicapai tingkat kemandirian mantap di bidang transportasi melalui dukungan penggunaan hasil industri transportasi dalam negeri yang handal, penguasaan Iptek, peningkatan pelayanan dan peningkatan manajemen pengoperasian. Upaya meningkatkan volume produksi hasil pembangunan yang bergantung transportasi, menuntut pembangunan prasarana jalan terutama jalan antar-kota dengan status, peran dan fungsi yang mantap.

Jaringan jalan—transportasi yang memenuhi standar, diindikasikan dengan hal-hal berikut : *pertama*, jaringan terbentuk dan berfungsi secara meluas hampir ke pelosok, termasuk di pusat produksi dan menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran; *kedua*, dalam struktur pengembangan wilayah secara umum terwujud kesatuan sistem jaringan jalan primer yang mampu mengikat dan menghubungkan pusat pertumbuhan yang utama dengan wilayah yang secara hirarkis berada dalam pengaruh pelayanannya; *ketiga*, jalan-jalan di pusat pertumbuhan utama ditata untuk mewujudkan secara bertahap jaringan jalan sekunder untuk mewujudkan fungsinya sebagai pusat pertumbuhan wilayah pengaruhnya; *keempat*, sebagian besar kesatuan sistem jaringan jalan dan ruas dalam masing-masing sistem, secara proporsional dapat melayani kelancaran arus manusia, barang dan jasa di masing-masing wilayah, mempunyai peluang dikembangkan guna melayani kebutuhan jangka menengah maupun jangka panjang; dan *kelima*, meskipun ada keterbatasan dana, kondisi jalan diusahakan dapat memenuhi sasaran yang direncanakan, dengan kemampuan pelayanan yang marginal.

Dengan demikian, pembuatan jalan raya tidak sekadar untuk mengantisipasi kian rumitnya persoalan kecelakaan, akan tetapi yang maha penting yakni agar roda perekonomian kota berjalan lancar, yang muara akhirnya meningkatkan *in come percapita* masyarakat kota dan daerah sekitarnya.

### **SOLUSI CERDAS**

Idealnya, *mass transportation system* mesti dikemas sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan : (1) cepat; (2) tepat waktu; (3) nyaman; (4) aman; (5) mudah, dan (6) murah.

Beberapa contoh upaya yang mesti dilakukan pemerintah kota kaitan dengan permasalahan transportasi menurut Hari Sabari Yunus (2006 : 353-354) antara lain : (1) pengembangan moda transportasi massa; (2) pengetatan peraturan yang berkenaan dengan penggunaan kendaraan pribadi, seperti besarnya pajak kendaraan, banyaknya penumpang, pembatasan tahun pembuatan; (3) pembangunan jalan ...; (4) pembuatan jalur khusus untuk jalur transportasi umum, kendaraan-kendaraan tertentu seperti sepeda, becak, pejalan kaki dan kendaraan lainnya; (5) pembuatan jalur transportasi di bawah permukaan tanah; (6) pembatasan kepemilikan ijin mengemudi; (7) menambah kapasitas jalan-jalan dengan cara memperlebar atau memperpanjang ruas jalan; (8) memperbaiki permukaan jalan; (9) menambah beberapa rambu-rambu lalu-lintas; (10) pengaturan arah lalu-lintas; (11) pengaturan perparkiran; menambah personel pengatur lalu-lintas. Kesemuanya berkaitan erat dengan upaya untuk mengurangi kepadatan lalu-lintas. Salah satu contoh yang dikembangkan mengapolis negara maju antara lain

memasang rambu-rambu lalu-lintas otomatis yang mampu menginformasikan pada pengguna jalan mengenai kecepatan yang harus dipatuhi, kondisi kepadatan lalu-lintas, lokasi-lokasi kemacetan sehingga dapat mengurangi terjadinya kemacetan yang tidak diharapkan. Walaupun demikian, berhubung tidak semua orang mematuhi oleh karena sebab-sebab tertentu atau karena kecelakaan maka kemacetan tidak dapat dihindarkan lagi.

Khusus untuk kesesakan lalu lintas di jalan raya, Sadono Sukirno (1985) dalam Khairuddin (2000 : 221-222) menawarkan beberapa kebijaksanaan, antara lain : (1) Memperlebar jalan, memperbanyak jumlah jalan, dan memperluas tempat parkir kendaraan; (2) Membuat perubahan dalam pola penggunaan tanah (*land use*) di kota-kota besar dan daerah metropolitan; (3) Menggalakkan penggunaan alat-alat pengangkutan umum, seperti bis kota, kereta api, dan alat pengangkutan lainnya yang terdapat di kota-kota besar dan daerah metropolitan. Tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di dalam kota, terutama pada waktu *peak hour* dan dengan demikian dapat mengurangi kesesakan lalu lintas; dan (4) Menghalangi masuknya kendaraan-kendaraan ke daerah-daerah tertentu. Kebijakan ini akan dapat dilakukan dengan dua cara : (a) dengan melarang sama sekali kendaraan untuk memasuki daerah tersebut atau mengharuskan mereka masuk ke daerah tersebut dari arah tertentu dengan cara membuat peraturan lalu lintas (seperti jalan satu jurusan, daerah bebas becak (benhur/bajaj, penulis) dan sebagainya), (b) dengan denda atau mengenakan pungutan kepada kendaraan-kendaraan yang ingin masuk ke daerah-daerah tertentu seperti harus membayar biaya parkir yang lebih tinggi dan mengenakan pungutan terhadap kendaraan yang masuk ke daerah tertentu pada waktu *peak hour* (waktu-waktu sibuk).

Beberapa persoalan transportasi, di antaranya : *pertama*, kemacetan lalu lintas (*traffic jams*) dan lalu lintas merambat (*traffic congestion*). *Kedua*, kesemrawutan lalu lintas, karena campur aduk antara : transportasi lokal dengan transportasi antarregional; kendaraan lambat dengan kendaraan cepat; kendaraan tradisional/tidak bermesin dengan kendaraan bermesin; dan pedagang kaki lima di trotoar dengan pejalan kaki, di mana terjadi perampasan hak pejalan kaki oleh pedagang kaki lima. *Ketiga*, polusi udara dari knalpot mobil-mobil tua. *Keempat*, kendaraan umum (bus, angkot, angdes) yang tidak aman, nyaman, dan tidak tepat waktu. Semoga !!!

## BAB XXXXI

### KE-MAJEMUK-AN DAN KE-MULTIKULTURALISME-AN MASYARAKAT KOTA

#### A. Kemajemukan Masyarakat Kota

##### 1. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk (*plural society*). Kemajemukan pada dasarnya merujuk pada adanya keragaman dan perbedaan yang terjadi pada masyarakat. Kemajemukan ini ditandai oleh dua ciri. Secara horizontal ia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan agama, serta suku bangsa, warisan budaya (*cultural heritage*) serta perbedaan-perbedaan kedaerahan secara vertikal, masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan lapisan atas, menengah dan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 1984: 30; Gaffar, 1997:4).

Kemajemukan tak hanya sekadar dirujuk dari perbedaan dan keragaman budaya, namun hal tersebut akan mencakup pada semua fenomena yang bisa mempengaruhi perilaku umum masyarakat Indonesia. Namun, yang mencolok dari ciri kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada suku bangsa atau etnik. Dan sering kali menjadi acuan utama bagi jati dirinya. Berdasarkan ciri-ciri fisik atau tubuh yang dipunyai oleh seseorang, bahasa yang digunakan dan logat yang diucapkan, dan berbagai simbol-simbol yang digunakan atau dikenakan dirinya, dia akan diidentifikasi sebagai tergolong dalam suatu etnik dari suatu daerah tertentu.

Berdasarkan pengalaman selama ini, sifat pluralistik bangsa kita ini telah memberikan banyak pengalaman, yang memperingatkan kita betapa konsensus dan konflik adalah merupakan dua gejala yang melekat bersama-sama di dalam masyarakat kita. Bila dikelola dengan benar, kemajemukan menghasilkan energi hebat. Sebaliknya, bila tidak dikelola secara benar, kemajemukan bisa menimbulkan bencana dahsyat. Untuk itu, ideologi masyarakat majemuk yang menekankan pada keanekaragaman suku bangsa harus digeser menjadi *ideology multikultural*, kelompok-kelompok budaya tersebut berada dalam kesetaraan derajat. Jadi, masyarakat majemuk ini bukan berdasarkan pada kekuatan primordial kesukubangsaan yang lokal.

Dalam konteks ini, menjadi tugas kita bersama untuk memahami sifat pluralistik itu, sehingga menjadi kekuatan bangsa, menjadikan suatu sinergik nasional untuk mencapai kemajemukan. Oleh sebab itu, pengkajian tentang masyarakat pluralistik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya pemahaman kita yang lebih baik dalam implikasinya terhadap perkembangan masyarakat dan proses pembangunan, baik lokal (daerah) maupun nasional.

##### 2. Akar Kemajemukan Bangsa Indonesia

Masyarakat majemuk (*plural society*), suatu istilah yang mula-mula sekali diperkenalkan oleh Furnivall (Nasikun, 2000:31) untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda. Menurut Furnivall, masyarakat majemuk adalah “suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik”. Model yang

digunakan sebagai acuan dari masyarakat majemuk adalah negara jajahan Hindia-Belanda. Orang-orang Belanda sebagai golongan minoritas, sebagai penguasa yang memerintah bagian amat besar orang-orang Indonesia Pribumi yang menjadi warga negara kelas tiga dinegerinya sendiri. Sementara golongan Tionghoa, sebagai golongan terbesar di antara orang-orang timur asing lainnya, menempati kedudukan menengah di antara golongan tersebut di atas.

Dalam masyarakat majemuk Hindia-Belanda. Tidak ada tatanan demokrasi. Dalam tatanan itu jelas dibedakan antara tuan yang penguasa dan hamba yang pribumi. Perbedaan antara tuan dan hamba dilakukan berdasarkan ciri-ciri fisik atau rasial, sukubangsa, keyakinan agama, dan jenjang sosial menurut patokan feodalisme yang secara tradisional berlaku (Suparlan, 2001:5). Dalam pada itu, kehidupan pada masa Hindia-Belanda merupakan suatu masyarakat yang tumbuh di atas sistem kasta. Orang-orang Hindia-Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja, sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka. Seperti halnya dengan orang-orang Belanda, orang-orang Timur Asing, terutama orang-orang Tionghoa, juga datang ke Indonesia semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Sementara, kehidupan orang-orang pribumi, tidaklah lebih dari kehidupan nelayan dinegrinya sendiri. Secara keseluruhan, masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda yaitu orang-orang Belanda, orang-orang Tionghoa, dan orang-orang Indonesia pribumi, melalui agama, kebudayaan, dan bahasa mereka masing-masing, mempertahankan dari cara-cara hidup mereka masing-masing. Hasilnya, “ialah berupa masyarakat Indonesia yang sebagai keseluruhan tidak memiliki kehendak bersama” (Furnivall *dalam* Nasikun, 2000 : 33).

Dalam sejarahnya, masyarakat majemuk karena kemajemukan suku bangsa dan agama yang merupakan landasan kekuatan sosial dan politik, selalu mengalami kesulitan untuk menekankan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Suparlan (2001:5) memberikan contoh Negara Suriname, yang sampai dengan tahun 1975 dikenal sebagai negara demokrasi yang corak masyarakat majemuk, hancur berantakan oleh konflik politik antara dua sukubangsa yang dominan. Sehingga harus berubah menjadi negara totaliter di bawah kekuasaan rezim militer. Lebih lanjut Suparlan (2001:5) mengatakan bahwa kesukaran berkembangnya demokrasi dalam kehidupan masyarakat majemuk, dikarenakan oleh mantapnya primordialitas yang diperkuat oleh keyakinan keagamaan yang melandasinya. Selain itu, terdapat kemantapan batas-batas suku bangsa, orientasi dan loyalitas politik warga masyarakat pada sukubangsanya masing-masing. Berkembang pula prinsip paternal atau bapakisme dengan loyalitas primordial dari para pengikutnya dan kemantapan jenjang sosial yang primordial berdasarkan sukubangsa dan kebudayaan sukubangsa yang bersangkutan.

Seperti halnya dengan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, pada jaman pemerintahan Suharto pun masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri dari elemen-elemen yang terpisah satu sama lainnya, yaitu penguasa yang memerintah dan rakyat yang diperintah dalam jaman pemerintahan Presiden Suharto, pelarangan pengguna sukubangsa dan agama sebagai acuan kepentingan politik, yang dikenal dengan nama SARA. Pelarangan yang dilakukan secara represif dengan menggunakan kekuatan militer yang otoriter, sebenarnya hanya meredam berbagai gejolak primordial yang dirasakan sebagai tantangan hegemoni kekuasaan Pemerintah Presiden Suharto.

Sebenarnya, kebijakan SARA ini tidak memetakan potensi kekuatan sosial dan politik dari sukubangsa dan keagamaan yang pada perhatian keadaan yang berikut ini.

Pemerintah Presiden Suharto dalam kebijakan politik sukubangsa dan keagamaan justru telah menggunakan Direktorat Jenderal Kebudayaan terutama Direktorat Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional untuk menghidupkan potensi-potensi politik sukubangsa dan pengangkatan serta pemberian berbagai fasilitas dan honor kepada para tokoh adat dan pemangku adapt. Hal yang sama juga dilakukan oleh Departemen Agama yang dengan menggunakan kekuatan birokrasinya membangun pengembangan agama terutama agama Islam, begitu juga yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri yang melakukan berbagai kebijakan misalnya upaya penyeragaman corak pemerintah pada tingkat pedesaan yang secara tradisional bercorak semi otonomi, menjadi corak seperti pemerintahan desa Jawa yang dikuasai dan dikendalikan oleh pemerintah.

Kesukubasaan dan keyakinan dan keagamaan sebagai kekuatan sosial dan politik yang dipelihara dan dikembangkan oleh pemerintah Presiden Suharto, yang otoriter dan militeristik, telah mendukung bagi kemantapan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Hal itu berkembang sebagai kekuasaan-kekuasaan perorangan yang absolut, yang terpusat di tangan Suharto dan keluarganya.

Pada jaman Orde Baru tidak ada kesetaraan warga, yang ada hirarki atau jenjang sosial yang dimantapkan melalui berbagai bentuk peraturan dan kebijakan politik, serta pemberian fasilitas dan keistimewaan pada golongan militer, pejabat dan birokrasi, dan partai pendukung pemerintah. Akibatnya dengan jelas masyarakat Indonesia dapat dibedakan, yaitu pemerintah yang berkuasa dan masyarakat atau orang biasa yang dikuasai, yang harus mengabdikan pada yang berkuasa, atau rakyat digolongkan sebagai abdi atau hamba sahaya. Bila diilustrasikan perbedaan itu terwujud, seperti perbedaan antara sipil dan militer, antara pejabat dan bukan pejabat, penguasa dan konglomerat yang kebanyakan adalah orang Cina yang menjadi kroni presiden dan bukan orang Cina atau pribumi, antara golongan Islam dan yang bukan, antara warga masyarakat biasa dan tidak bersih lingkungan atau yang berindikasi komunis, atau ekstrim kiri dan ekstrim kanan, serta separatistis atau pengacau keamanan. Singkatnya dalam masa Orde Baru tidak ada kesetaraan warga, baik secara ekonomi, politik, hukum, maupun sosial budaya.

Dalam jaman pemerintahan Presiden Suharto. Di dalam kehidupan ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya, pertanda paling jelas dari masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk itu adalah tidak adanya kehendak bersama (*common will*). Walaupun Indonesia mengaku sebagai penganut azas demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila, dunia luar terutama dunia Barat tidak melihat demokrasi Pancasila sebagai demokrasi. Prinsip demokrasi yang utama, yaitu yang kesetaraan derajat secara individual dan kebebasan serta pemerintahan atas persetujuan rakyat, kurang terwujud selama pemerintahan Orde Baru. Selama Orde Baru masyarakat Indonesia keseluruhan terdiri dari elemen-elemen yang terpisah satu sama lain oleh karena pemerintahan oleh militer, para patron atau bapak, dan para kroni dan presiden.

Apa yang telah diuraikan di atas, rupanya pengertian masyarakat majemuk sebagaimana digambarkan oleh Furnivall masih relevan dan dapat kita pergunakan untuk melihat masyarakat Indonesia pada masa sekarang. Sekali lagi, suatu masyarakat majemuk yang dapat kita simpulkan dari konsep Furnivall adalah suatu masyarakat

yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kekuasaan politik, dan kurang berkembangnya sistem nilai konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat.

### 3. Ciri-ciri Masyarakat Majemuk

Pierre L. van den Berghe (Nasikun, 2000 : 31, M. Sirorus, 2004 : 110) memaparkan ciri-ciri/sifat-sifat atau karakteristik masyarakat majemuk sebagai berikut :

- 1) Masyarakat majemuk tersegmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain.
- 2) Masyarakat majemuk memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer.
- 3) Masyarakat majemuk kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.
- 4) Masyarakat majemuk secara relatif sering kali mengalami konflik antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain.
- 5) Masyarakat majemuk secara relatif mengalami proses integrasi sosial secara terpaksa (*coercion*) dan saling tergantung dalam bidang ekonomi.
- 6) Masyarakat majemuk memiliki dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain.

Dari uraian di atas, kemajemukan masyarakat memiliki potensi konflik yang dapat menimbulkan perpecahan dan potensi integrasi sosial.

## B. Multikultural Masyarakat Kota

### 1. Pendahuluan

Multikulturalisme, sebagai suatu paham yang bergerak untuk memahami dan menerima segenap perbedaan yang ada pada setiap individu manusia, bila tidak dikemas dalam ranah pendidikan dan kesadaran, akan memiliki potensi cukup besar bagi terjadinya konflik antarkelompok. Prinsip keragaman di masing-masing kelompok, misalnya, akan mudah menimbulkan “percikan-percikan” konflik antarkelompok yang ada lantaran adanya beberapa perbedaan yang cukup prinsipil dari masing-masing kelompok itu. Bahkan dalam skala yang lebih luas, manifestasi dari prinsip multikulturalisme itu bisa merambah hingga perbedaan wilayah geografis, etnis, budaya, agama, keyakinan, pola pikir maupun perbedaan kemampuan (*diffable*) – secara fisik maupun psikhis. Perbedaan-perbedaan itulah yang sekiranya tidak diantisipasi akan menjadi pemicu konflik. Dan tidak jarang konflik itu akan berujung pada kekerasan fisik, bahkan hingga terjadi pertumpahan darah (M. Ainun Yaqin, 2007 : v).

Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Sekarang ini, jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan,

Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan (M. Ainun Yaqin, 2007 : 3-4).

## 2. Karakteristik Kultur

Conrad P. Kottak (M. Ainun Yaqin, 2007 : 6-9.) menjelaskan bahwa kultur mempunyai karakter-karakter khusus. Karakter-karakter khusus ini dapat memberikan gambaran pada kita tentang apa sebenarnya makna kultur itu. *Pertama*, kultur adalah sesuatu yang general dan spesifik sekaligus. General artinya setiap manusia di dunia ini mempunyai kultur, dan spesifik berarti setiap kultur pada kelompok masyarakat adalah bervariasi antara dan lainnya, tergantung pada kelompok masyarakat mana kultur itu berada. Setiap manusia mempunyai kultur dan mereka hidup dalam kultur mereka sendiri-sendiri. Orang Jawa Tengah dan orang Jawa Timur, meskipun sama-sama berada dalam satu suku, “Suku Jawa”, mereka mempunyai kultur yang berbeda. Ini dapat dilihat dari beberapa indikasi seperti bahasa Jawa dan budaya lokal yang juga berbeda.

*Kedua*, kultur adalah sesuatu yang dipelajari. Seorang bayi atau anak kecil akan mudah meniru kebiasaan orang tuanya adalah contoh unik dari kapasitas kemampuan manusia dalam belajar. Dalam hal ini, ada tiga macam pembelajaran :

- 1) Pembelajaran individu secara situasional. Pembelajaran ini terjadi pada hewan yang belajar tentang apa yang akan dilakukannya di masa akan datang berdasarkan pengalamannya sendiri. Seekor hewan akan menghindari api apabila dia mempunyai pengalaman merasakan panasnya tersulut api;
- 2) Pembelajaran situasi secara sosial. Ini dapat dipahami dengan mengambil contoh dari tingkah laku dari seekor srigala yang belajar berburu dengan cara melihat Srigala lainnya melakukan perburuan;
- 3) Pembelajaran kultural, yaitu suatu kemampuan unik pada manusia dalam membangun kapasitasnya untuk menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda yang tidak ada hubungannya dengan asal usul dimana mereka berada.

*Ketiga*, kultur adalah sebuah simbol. Dalam hal ini simbol dapat berbentuk sesuatu yang verbal dan non-verbal, dapat juga berbentuk bahasa khusus yang hanya dapat diartikan secara khusus pula atau bahkan tidak dapat diartikan ataupun dijelaskan. Simbol ini, kadangkala, tidak ada hubungannya antara simbol yang digunakan dengan apa yang disimbolisasikan. Simbol, dalam hal ini, umumnya berbentuk linguistik. Kata “Harimau” merupakan sebutan untuk seekor hewan buas. Kenapa disebut Harimau, sampai sekarang masih tanda tanya. Kata “Harimau” adalah simbol bagi salah satu hewan buas menurut masyarakat kita, sedangkan bagi bangsa lain ada yang menyebutnya “Tiger”. Di sisi lain, ada juga simbol non-verbal seperti sebuah bendera yang dapat mewakili sebuah negara. Contoh lainnya, air melambangkan kesucian bagi penganut Yahudi, sementara matahari melambangkan Tuhan yang merahmati manusia bagi orang Jepang.

*Keempat*, kultur dapat membentuk dan melengkapi sesuatu yang alami. Secara alamiah, manusia harus makan untuk mendapatkan energi, kemudian kultur mengajarkan pada manusia untuk makan apa, kapan, dan bagaimana. Kultur juga dapat menyesuaikan diri dengan keadaan alam secara alamiah dimana mereka berada. Kita sadar, sebenarnya, bahwa tidak dilarang untuk bertamu di atas jam 21.00 akan tetapi



semua masyarakat menyadari dan menyetujui bahwa bertamu di atas jam 21.00 adalah tidak sopan, karena kecuali alasan darurat.

*Kelima*, kultur adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi atribut bagi individu sebagai anggota dari kelompok masyarakat. Kultur, secara alamiah, ditransformasikan melalui masyarakat. Pernyataan ini dapat dilihat dari pengalaman kita ketika belajar tentang kultur dengan cara observasi, mendengar, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain dalam kelompok kita. Selanjutnya, secara bersama-sama, kita mempunyai kepercayaan, kultur, nilai-nilai, ingatan-ingatan, harapan-harapan, berbagai gaya berfikir, tingkah laku yang mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu-individu.

*Keenam*, kultur adalah sebuah model. Artinya, kultur bukan kumpulan adat istiadat dan kepercayaan yang tidak ada artinya sama sekali. Kultur adalah sesuatu yang disatukan dan sistem-sistem yang tersusun dengan jelas. Adat istiadat, institusi, kepercayaan, dan nilai-nilai adalah sesuatu yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Contohnya, pada masa sebelum tahun 1970-an, wanita Indonesia mayoritas memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Kemudian setelah itu hingga awal tahun 1990-an, mayoritas mereka sudah memilih untuk melanjutkan sekolah dan bekerja secara profesional, di samping menjadi ibu rumah tangga. Namun pada akhir tahun 1990-an hingga sekarang, mayoritas wanita Indonesia sudah mempunyai kesadaran untuk karir mereka dan menjadi pekerja profesional. Kondisi ini disebabkan pada zaman modern, seperti sekarang ini, pandangan mayoritas wanita tentang perkawinan, rumah tangga, dan keluarga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

*Ketujuh*, kultur adalah sesuatu yang bersifat adaptif. Artinya, kultur merupakan sebuah proses bagi sebuah populasi untuk membangun hubungan yang baik dengan lingkungan di sekitarnya sehingga semua anggotanya melakukan usaha maksimal untuk bertahan hidup dan melanjutkan keturunan. Karakteristik-karakteristik biologis maupun kultural yang dipakai dalam proses bertahan hidup dan melanggengkan keturunan ini kemudian disebut sebagai suatu yang adaptif.

Berdasarkan beberapa karakteristik kultural di atas, maka secara umum dapat dijelaskan bahwa kultur adalah ciri-ciri dari tingkah laku manusia yang dipelajari, tidak diturunkan secara genetik dan bersifat sangat khusus, sehingga kultur pada masyarakat "A" berbeda dengan kultur yang ada pada masyarakat "B" atau "C" dan seterusnya. Dengan kata lain, kultur dapat diartikan sebagai sebuah cara dalam bertingkah-laku dan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

Poin penting yang digaris bawahi dari ciri-ciri kultur di atas adalah masing-masing kelompok masyarakat mempunyai keunikan dan kelebihanannya sendiri-sendiri sehingga tidak bisa dikatakan bahwa kultur yang satu lebih baik dari kultur yang lainnya.

### **3. Kelompok Sosial dalam Analisis Sosiologis**

#### **3.1. Pengertian Kelompok sosial**

Istilah kelompok sosial dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu "*sosial*" yang berarti sosial/kemasyarakatan dan "*groups*" yang berarti kelompok/golongan.

Ada banyak definisi dari para ahli tentang kelompok sosial. Beberapa di antaranya menurut Saptono dan Bambang Suteng S. (2006 : 118-119) sebagai berikut.

- Kelompok sosial adalah sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain secara teratur (Giddens, 1994: 185).
- Kelompok yang didefinisikan sebagai dua atau lebih orang yang saling berinteraksi dengan cara-cara yang terpola, dan dikenali sebagai sebuah kelompok oleh mereka sendiri dan oleh orang lain (Johnson, 1986: 93)
- Kelompok sosial adalah sebuah kelompok yang mencakup dua atau lebih orang yang memelihara pola-pola hubungan yang stabil/tetap selama rentang waktu tertentu (Stark, 1987: 8).
- Kelompok adalah kesatuan orang yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki beberapa landasan interaksi (Stewart, 1985: 41).
- Kelompok adalah sejumlah orang yang sama-sama memiliki kesadaran tentang keanggotaan bersama dan interaksi antara mereka (Horton dan Hunt, 1984: 186).
- Kelompok adalah sejumlah orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan (Merton, 1965: 285).

Demikianlah kita melihat bahwa ada keragaman rumusan tentang kelompok sosial. Namun demikian, berbagai pendapat di atas mengandung benang merah kesamaan pengertian tentang kelompok sosial (selanjutnya kadang disebut kelompok saja) sebagai berikut.

- Kelompok adalah kumpulan dari sejumlah orang;
- Orang-orang yang menjadi anggota kelompok terlibat dalam interaksi;
- Interaksi dalam kelompok dilandasi oleh pola interaksi yang sudah mapan;
- Interaksi dalam kelompok dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang relatif lama;
- Para anggota kelompok memiliki kesadaran bersama bahwa mereka adalah satu kelompok;
- Pihak lain juga melihat bahwa para anggota kelompok adalah satu kelompok.

Dapat disimpulkan bahwa kelompok adalah sejumlah orang yang memiliki norma-norma, dan harapan-harapan yang sama, yang secara sengaja dan teratur saling berinteraksi dan mempunyai kesadaran diri dengan anggota kelompok yang diakui oleh pihak luar kelompok.

Untuk lebih memahami pengertian kelompok sosial, ada baiknya jika kita pahami pengertian dari istilah-istilah yang sering disamakan pengertiannya dengan kelompok sosial, yaitu kategori sosial (*sosial kategori*) dan kumpulan/agregat (*aggregate*) atau kerumunan (*crowd*).

### 3.2 Kategori sosial

Kategori sosial adalah pengelompokan orang yang secara statistik, dimana orang-orang diklasifikasikan bersama atas dasar sifat-sifat yang dimiliki bersama. Misalnya orang-orang yang memiliki tingkat pendapatan atau pekerjaan yang sama akan masuk dalam satu kategori. Oleh karena itu keanggotaan seseorang dalam satu kategori berarti bahwa orang itu memiliki kesamaan dengan anggota yang lain. Wanita, pemilik rumah, muslim adalah kategori.

Kategori bukan kelompok karena orang-orang yang berada dalam satu kategori itu asing satu sama lain. Orang-orang yang berada dalam satu kategori tidak harus berhubungan satu sama lain atau berkumpul bersama dalam satu tempat tertentu, dan merekapun tidak perlu memiliki karakteristik penting bersama pula.

### 3. 2. Kumpulan/ agregat atau kerumunan

Agregat adalah kumpulan orang yang berada di tempat yang sama pada waktu yang bersamaan pula. Namun, di antara mereka tidak memiliki hubungan-hubungan yang pasti. Atau dalam istilah **Erving Goffman**, agregat adalah kumpulan orang yang berada dalam interaksi yang tak fokus. Sedangkan **Stewart** menyebutkan bahwa agregat adalah orang yang berada di suatu tempat yang sama tetapi tidak ada interaksi di antara mereka. Contoh agregat adalah para calon penumpang pesawat terbang yang sama-sama menunggu kedatangan pesawat, orang-orang yang bersama-sama antri membeli tiket pertandingan sepak bola, dan lain sebagainya.

Pakar lain, **Macionis** (1997: 174), lebih suka menyebut fenomena di atas sebagai *crowd* atau kerumunan, yaitu kumpulan orang yang bersifat sementara, yang di antara mereka mungkin saling berinteraksi atau tidak sama sekali.

### 4. Arti Penting Kelompok dalam Analisis Sosiologis

Konsep kelompok menjadi satuan pokok dalam analisis sosiologis karena sejumlah alasan. *Pertama*, karena kita mengarahkan bagian terbesar dari hidup kita kepada kelompok-kelompok, mulai dari kelompok yang intim seperti sepasang kekasih dan keluarga sampai ke kelompok yang sangat kompleks semacam birokrasi. Kita mengalami keinginan yang paling kuat untuk “menjadi bagian” dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok. Ketakutan yang paling besar dan konflik kita yang paling mendalam juga dalam kelompok. Beberapa macam kelompok merupakan pulau kecil yang merupakan surga, dimana kita diakui dan diterima. Namun juga bisa menjadi penjara yang tak memungkinkan bagi kita untuk melarikan diri. Sementara di lain pihak, terdapat pula kelompok-kelompok yang sangat besar dan kompleks, dimana kita merasa hilang dan tak bermakna di dalamnya.

*Kedua*, kelompok-kelompok memenuhi banyak kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan untuk disetujui dan diterima, perlindungan, dan keamanan serta dukungan terhadap nilai-nilai yang kita anut. Kita menggunakan kelompok acuan/referensi untuk menentukan tentang siapa diri kita serta membangun dan memelihara kepercayaan diri. Kita tumbuh, belajar, memperoleh penghasilan, dan menjalankan ajaran agama kita di dalam kelompok. Melalui kelompok, masyarakat mengatur dan mempertahankan dirinya, mendistribusikan keadilan dan ketidakadilan, menelan kesakitan, dan mendistribusikan ganjaran serta menerapkan hukuman.

*Ketiga*, kelompok juga merupakan sumber konflik sosial dan sejumlah masalah bagi orang perorang. Penyiksaan, diskriminasi, penekanan, dan peperangan sering disebabkan oleh interaksi antar kelompok. Keanggotaan kelompok tidaklah gratis, karena setiap kelompok mensyaratkan kesetiaan terhadap budayanya dan keberlangsungan interaksi dengan sesama anggota kelompok.

*Keempat*, kelompok juga menstrukturkan hubungan sosial dengan cara yang berbeda serta mendukung bermacam gagasan kebudayaan. Sifat-sifat sosial berdampak pada cara mereka mencoba mencapai tujuan-tujuan mereka maupun keberhasilannya. Kehidupan sosial berpusat pada kelompok, dan dengan memahami cara kelompok bekerja, kita dapat lebih memahami pengalaman-pengalaman dan perilaku kita sebagai partisipan kehidupan kelompok. Kita juga dapat memahami bagaimana sifat-sifat kelompok berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kemampuan keluarga dalam menumbuhkembangkan anak-anak, pemerintah dalam memerintah,

sistem peradilan dalam mengontrol kejahatan, rumah sakit dalam menyediakan perawatan kesehatan, semua itu penting dalam sosiologi.

Setiap masyarakat terbentuk dari banyak kelompok yang merupakan wadah berlangsungnya interaksi sosial sehari-hari. Kita mencari kelompok untuk membangun persahabatan, memenuhi sejumlah tujuan, dan memenuhi peran sosial yang telah kita terima. Kelompok memainkan bagian penting dalam struktur sosial, kebanyakan interaksi sosial kita terjadi dalam kelompok, dan dipengaruhi oleh norma dan sanksi-sanksi yang dibangun oleh kelompok. Harapan-harapan yang terkait dengan peran sosial termasuk yang terkait dengan kedudukan sebagai kakak, adik, dan siswa, menjadi amat jelas dalam konteks kelompok.

## KEPUSTAKAAN

- Abdulkarim Muhammad, 2008, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurrahman Wahid, dkk., 1994, *Moralitas Pembangunan : Perspektif Agama-agama di Indonesia*, LKPSM, Yogyakarta.
- Achmad Nurmandi, 1999, *Manajemen Perkotaan*, Lingkaran Bangsa, Yogyakarta.
- Adam, Rainer, Dkk., 2000, *Politik dan Radio : Buku Pegangan bagi Jurnalis Radio*, Sembrani Aksara Nusantara, Jakarta.
- Alan Gilbert dan Josef Gugler, 1996, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, Tiara Wacana, Yogya.
- Anthony J. Catanese, dkk., 1984, *Pengantar Perencanaan Kota*, Erlangga, Jakarta.
- APKASI, 2000, *Penilaian Diri dalam Good Governance*, Depdagri RI, Jakarta.
- Astrid S. Susanto, 1993, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Jakarta.
- Asykuri Ibn Chamim, Dkk., 2003, *Seri Pendidikan Pemilih Untuk Pelajar : Menuju Pemilu yang Demokratis dan Tanpa Kekerasan*, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Jakarta.
- Awang Faroek Ishak, 2003, *Paradigma Hutan Lestari dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal*, Indomedia, Jakarta.
- Badrul Munir, *Perencanaan Pembangunan Daerah : Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Bappeda Propinsi NTB, Mataram.
- Bagong Suyanto, 1996, *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan (Kumpulan Hasil Penelitian)*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Bintarto R., 1989, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bruce J. Cohen, 1988, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Terjemahan oleh Sahat Simamora), Bina Aksara, Jakarta.
- Budi D. Sinulingga, 1999, *Pembangunan Kota : Tinjauan Regional dan Lokal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bustanul Arifin, dkk., 1997, *Pemberdayaan Lahan Kering Untuk Penyediaan Pangan Abad 21*, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Jakarta.
- Cholil Mansyur M., *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Daldjoeni, N., 1997, *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, Alumni, Bandung.
- Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djaali, dkk., 1997, *Wawasan Pengembangan Masyarakat dan Pembinaan Sektor Informal*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Dodik Ridho Nurrochmat, 2005, *Strategi Pengelolaan Hutan : Upaya Menyelamatkan Rimba yang Tersisa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dwi Narwoko, J. dan Bagong Suyanto, 2006, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung.
- Eko Budihardjo, 2005, *Tata Ruang Perkotaan*, Alumni, Bandung.
- Eko Budihardjo dan Sudanti Hardjohubojo, 1993, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Alumni, Bandung.

- Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, 1998, *Kota Yang Berkelanjutan (Sustainable City)*, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud, Jakarta.
- Fakih. M., 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Ferry Anggoro Suryokusumo, R., 2008, *Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan*, Sinergi Publishing, Yogyakarta.
- Francis Wahono, dkk., 2001, *Pangan, Kearifan Lokal & Keanekaragaman Hayati : Pertaruhan Bangsa yang Terlupakan*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.
- Gani, Soelistyati Ismail, 1984, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Habib Mustopo, M., 1983, *Ilmu Budaya Dasar : Kumpulan Essay-Manusia dan Budaya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Hadi Sabari Yunus, 2005, *Manajemen Kota : Perspektif Spasial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2005, *Klasifikasi Kota*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2006, *Megapolitan : Konsep, Problematika dan Prospek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2008, *Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hasanu Simon, 2008, *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hans-Dieter Evers, 1995, *Sosiologi Perkotaan : Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*, LP3ES, Jakarta.
- Haryo Sasongko, HD., 2005, *Kerukunan Beragama, Daulat Politik & Kereta Reformasi*, Harapan Baru Raya, Jakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2004/2005, *36 Kasus Kebijakan Publik Asli Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Huntington, Samuel P., 1983, *Tertib Politik di dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Rajawali, Jakarta.
- Idianto M., 2004, *Sosiologi Untuk SMA Kelas X*, Erlangga, Jakarta.
- Ilham, 1990, *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Ishomuddin, 2001, *Diskursus Politik dan Pembangunan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Jason Lase, 2003, *Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Sekolah terhadap Vandalisme Siswa*, Program Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.
- Jefta Leibo, 1995, *Sosiologi Pedesaan : Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Johara T. Jayadinata, 1986, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah*, ITB, Bandung.
- Joko Subagyo, P., 2005, *Hukum Lingkungan : Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kantaprawira, Rusadi, 1999, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta.

- , 1998, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kartomo Wirosuhardjo, 1981, *Dasar-Dasar Demografi*, Lembaga Demografi FEUI bekerjasama dengan Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Khairuddin, 2000, *Pembangunan Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1993, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.
- Mansyur, M. Cholil, 1999, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Mardimin, J. (Editor), 1996, *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*, Kanisius, Jakarta.
- Michael P. Todaro, 1998, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta (Alih Bahasa : Haris Munandar).
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljarto Tjokrowinoto, 1987, *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- , 2002, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moenir, H.A.S., 2000, *Manajemen Pelayanan Umum*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Rusli Karim, 1988, *Seluk Beluk Perubahan Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Muhammad Rusli Karim dan Fauzie Ridjal (Editor), 1992, *Dinamika Ekonomi dan Iptek dalam Pembangunan*, Tiara Wacana, Yogya.
- Mulyono Sadyohutomo, 2008, *Manajemen Kota dan Wilayah : Realitas dan Tantangan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mul, Yatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Munandar Soelaeman, M., 1987, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Eresco, Bandung.
- Muninjaya, Gde AA., 1999, *Manajemen Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta.
- Nana Rukmana, dkk., 1993, *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*, LP3ES, Jakarta.
- Nas, P.J.M., 1984, *Kota di Dunia Ketiga : Pengantar Sosiologi Kota 2*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Nasrul Effendy, 1998, *Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta.
- Noor, I.R., *Agenda Demokratisasi oleh dan untuk Perempuan*, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 1, No. 1 Mei-Agustus, 2000, hal.118-131.
- Nurudin, dkk (Editor), 2006, *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Parsudi Suparlan, 1995, *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Paulus Hariyono, 2007, *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Prijono Tjiptoherijanto, 1997, *Migrasi Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

- Pudjiwati Sajogyo, 1985, *Sosiologi Pembangunan*, Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta Bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta.
- Rahardjo Adisasmita, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridjal, F., dkk. 1993, *Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Rukminto Adi, Isbandi, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff, 2000, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Safi'i, H.M., 2008, *Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Averroes Press, Malang.
- Samego, Indria, Dkk., *Dinamika Kedaulatan Rakyat : Dilema-dilema dalam Pemilu, Sistem Kepartaian dan Lembaga Perwakilan*, CIDES, Jakarta.
- Sanit, Arbi, 1985, *Swadaya Politik Masyarakat : Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sapari Imam Asy'ari, 1993, *Sosiologi Perkotaan dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Saparinah Sadli, 1987, *Persepsi Sosial Mengenai Prilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2002, *Psikologi Sosial : Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Mander Maju, Bandung.
- Seno Adji, Oemar, 1981, *Hukum Acara Pidana dan Perspektif*, Erlangga, Jakarta.
- Simandjuntak, B., 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Soedjatmoko, 1995, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Soekandar Wirjaatmadja, 1985, *Pokok-pokok Sosiologi Pedesaan*, Yasaguna, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2003, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soetjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Sopater, Sularso, 1998, *Pemberdayaan Birokrasi dalam Pembangunan*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetomo, 1990, *Pembangunan Masyarakat : Beberapa Tinjauan Kasus*, Liberty, Yogyakarta.
- Soetrisno, L., 1997, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Kanisius, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 2003, *Sistem Informasi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sri Mulyani Martaniah, 1984, *Motif Sosial : Remaja Suku Jawa dan Keturunan Cina di Beberapa SMA Yogyakarta (Suatu Studi Perbandingan)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sumanonugroho, T., 1991, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, PT. Hanindita, Yogyakarta.



- Sumodihardjo, 1993, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Suparto, 1987, *Sosiologi dan Antropologi*, Armico, Bandung.
- Syarifin, Pipin, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustakan Setia, Bandung.
- Tulus Warsito, 1999, *Pembangunan Politik : Refleksi Kritis atas Krisis*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Vincent Gaspersz, 1988, *Sistem Informasi Manajemen (Suatu Pengantar)*, Armico, Bandung.
- Wahjosumidjo, 1995, *Kepemimpinan Kepala Sekolah : Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wahyu, 2005, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Hecca Publishing, Jakarta.
- Yasin, M., 1997, *Wanita Karier dalam Perbincangan*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Zaini Hasan M. dan Salladin, 2007, *Pengantar Ilmu Sosial*, Dirjen Dikti Depdikbud, Jakarta.
- Zauhar, Soesilo, 1996, *Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Zoer Aini Djamal Irwan, 2003, *Prinsip-prinsip Ekologi dan Organisasi : Ekosistem Komunitas dan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta.

#### **JURNAL, MAJALAH, BULETIN, MAKALAH DAN ARTIKEL**

- Abdurrahman Arum, *Preman : Anak Masyarakat Kosmopolitan (Artikel)*, Suara Pembaruan, 6/11/1997.
- Agus Purnama, 8 Maret 2009, *Rencana Pengembangan Potensi dan Pembangunan Kota Bima (Makalah)*.
- Ahmad Usman, 2002, *Di Ambang "Keberantakan" Tatanan Sosial (Orasi Ilmiah STISIP Mbojo Bima)* (28 Desember 2002).
- Ahmad Usman, 2003, *Ketika Agama Dijadikan Pilar dan "Ruh" Pembangunan*, Bima Ekspres, 8 Juli 2003.
- Ahmad Usman, 8 Maret 2009, *Dosa-Dosa Perencana Kota dalam Perspektif Akademisi (Makalah)*.
- Bagus Takwin, *Perilaku yang Tak Berubah (Artikel)*, Kompas, 26 Juni 2009.
- Bintoro Gunadi, *Pengendalian Kasus Kanibalisme pada Manusia (Artikel)*, Harian Suara Pembaruan, 11/9/1995.
- Buletin Penelitian Kebijakan Kependudukan POPULASI, Vol. 13 No. 1 2002.
- Buletin Penelitian Kebijakan Kependudukan POPULASI, Volume 10 Nomor 2 Tahun 1999.
- Deden Rukmana, *Ruang Kota untuk PKL (Artikel)*, Kompas, 26 Juni 2009.
- Endah R. Tiasih, *Mewaspada Budaya Kekerasan (Artikel)*, Suara Karya, 9/10/1995.
- Huntington dalam Faisal Siagian, *Krisis Ekonomi*, Kompas, 24 Nopember 1997.
- Kartasasmata, Ginandjar, *Stabilitas dan Kebutuhan Bangsa*, Kompas, 8 Januari 1991.
- Mark J. Gasiorowski dalam Majalah APSA Desember 1995, *Pengaruh Krisis Ekonomi terhadap Reformasi Politik*.
- Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah VIII Tahun ke 1 Nomor 2 Tahun 1989 (1 Oktober 1989).
- Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah VIII Tahun ke 7 Nomor 14 1995 (Oktober 1989)

- Muhammad, Mar'ie, *Indonesia Negara yang Politiknya Berisiko Tinggi*, Suara Pembaruan, 10 Juni 1998.
- Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. IV No. 2 Maret-Agustus 2004
- Jurnal Equilibrium Vol. 2 No. 1 Januari–April 2004
- Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. IV No. 2 Maret-Agustus 2004
- Jurnal Sosiosains Vol. 17 No. 1 Januari 2004.
- Jurnal Sosiosains Vol. 18 No. 3 Juli 2005
- Sherif dan Sherif dalam Godwin, 1998, *Psikologi Sosial*, Gramedia, Jakarta.
- Sudarsono Soedomo, *Retorika Ekonomi Kerakyatan* (Artikel), Kompas, 26 Juni 2009.
- Sukardi Rinakit, *Buah-buah Pinang* (Artikel), Kompas, 27 Juni 2009.
- Sutrisno, Lukman, *Krisis Ekonomi*, Majalah Gatra, 2 Mei 2000.
- Tajuk Rencana Suara Pembaruan (2 Desember 1997), *Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi*.

### **DOKUMEN-DOKUMEN**

- APKASI, 2000, *Penilaian Diri dalam Good Governance*, Depdagri RI, Jakarta.
- Bappeda Pemerintah Kota Bima, 1997, *Buku Panduan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Bima 2007*, Kota Bima.
- Depdagri, 2003, *Panduan Peran Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi dalam Mensukseskan Pemilihan Umum 2004*, Depdagri, Jakarta.
- Depkes RI, 2000, *Visi Baru Indonesia Sehat 2010*, Depkes, Jakarta.
- Dirjen Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2004, *Suplemen Penyempurnaan Pedoman Umum : Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan*, Dirjen Perumahan dan Permukiman, Jakarta.
- H. Soerono, *Majalah Mimbar*, No. 25/III/1978.
- IGN Suprpto, *Transportasi : Melimpahnya Sepeda Motor*, Kompas, 8 Mei 2009.

